

ILMU EKONOMI

TAHUN 2024

Tim Penulis:

Susi Melinasari, Azizah Mursyidah, Ermi Suryani, Miftakhul Anwar,
Muhammad Kharis Mubarak, Yaya Ruhendi Casmita Pujiharto, Tubagus
Rifqy Thantawi, Rully Trihantana, Ria Kusumaningrum, Bayu Purnama Putra

Editor:

Tubagus Rifqy Thantawi

ILMU EKONOMI

Tim Penulis:

Susi Melinasari, Azizah Mursyidah, Ermi Suryani, Miftakhul Anwar, Muhammad Kharis Mubarak, Yaya Ruhendi Casmita Pujiharto, Tubagus Rifqy Thantawi, Rully Trihantana, Ria Kusumaningrum, Bayu Purnama Putra

Editor:

Tubagus Rifqy Thantawi

Penerbit:



<https://press.inais.ac.id/>

ILMU EKONOMI

Tim Penulis:

Susi Melinasari, Azizah Mursyidah, Ermi Suryani, Miftakhul Anwar, Muhammad Kharis Mubarak, Yaya Ruhendi Casmita Pujiharto, Tubagus Rifqy Thantawi, Rully Trihantana, Ria Kusumaningrum, Bayu Purnama Putra

Desain Cover:

Basit Tulhuda

Tata Letak:

Basit Tulhuda

Editor:

Tubagus Rifqy Thantawi

ISBN 978-623-10-3419-9

Cetakan Pertama:

Juni, 2024

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit INAIS Press

Dilarang keras menerjemahkan, memfotocopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

PENERBIT:

INAIS Press

(Publisher Buku Institut Agama Islam Sahid)

Jl. Kapten Dasuki Bakri, Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Bogor, Jawa Barat 16810

Website: <https://press.inais.ac.id/>

E-mail: inaispress@inais.ac.id

Telepon/Fax. (0251) 8592243

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sholallahu 'Alaihi Wassalam. Buku ini berhasil disusun sebagai kumpulan pemikiran meliputi hal-hal yang pokok di dalam Ilmu Ekonomi, diantaranya mengenai Definisi dan Konsep Ekonomi, Permintaan dan Penawaran, Elastisitas, Produksi, Biaya Produksi, Bentuk-bentuk Pasar Persaingan, Produk Nasional dan Pendapatan Nasional, Kebijakan Fiskal dan Moneter, Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan, Ekonomi Internasional. Kesepuluh hal pokok tersebut dihubungkan kembali aktualisasinya dengan keadaan saat ini, dan masih bermanfaat dalam penelaahan permasalahan-permasalahan perekonomian tidak hanya untuk di Indonesia, tetapi juga untuk di dunia internasional.

Para pembaca, khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan masyarakat pada umumnya, dapat turut menelaah dan mengembangkan kembali hal-hal pokok tersebut di atas. Seperti diketahui bahwa dalam suatu kegiatan perekonomian negara yang paling sederhana, terdapat dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Hal-hal pokok tersebut dapat ditelaah dan dikembangkan dalam posisi kita sebagai bagian dari sektor rumah tangga, atau sektor perusahaan. Begitu juga jika dalam posisi kita sebagai bagian dari kegiatan pemerintah dan perdagangan luar negeri. Pada dasarnya kita semua tidak terlepas dalam keadaan sebagai sektor rumah tangga, karena kita semua terdiri dari orang-orang baik perorangan maupun kelompok orang, lembaga maupun badan yang fungsinya dalam perekonomian sebagai konsumen, yaitu pihak yang membeli barang-barang dan jasa-jasa dengan jalan membelanjakan sarana pendapatannya, dan dalam keadaan khusus kita juga dapat sebagai pemilik faktor-faktor produksi yaitu pihak yang menawarkan berbagai jenis faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor perusahaan untuk digunakan dalam memproduksi barang dan jasa.

Kemudian, kita semua juga dapat terlibat dalam sektor perekonomian yang terdiri dari perusahaan-perusahaan swasta asing dan nasional, perusahaan negara, dan koperasi yang fungsinya dalam perekonomian sebagai penjual, yaitu mereka yang menjual semua barang yang diproduksinya, atau sebagai produsen, yaitu mereka yang mengombinasikan berbagai jenis faktor produksi untuk memproduksi barang dan jasa yang diperlukan masyarakat, serta membayar faktor produksi yang mereka gunakan dengan semua pendapatan dari penjualan hasil produksinya.

Dengan keadaan atau pilihan kita dalam kegiatan perekonomian negara, kita dapat menindaklanjutinya dalam praktik sehingga kesepuluh hal pokok tersebut di atas tidak hanya sebagai suatu narasi keilmuan di dalam suatu buku, tetapi juga pemahaman dan penguasaan keilmuan yang kita praktikkan di dalam kegiatan perekonomian. Dengan demikian, kegiatan perekonomian dijalankan oleh kita yang insya Allah, memahami dan menguasai keilmuan ilmu ekonomi, dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi dan bisnis Islam. Bersamaan dengan itu, kita tidak mudah juga untuk diperlakukan hanya sebagai obyek dalam

sistem perekonomian, dan disimpangi dengan ketidakadilan oleh orang-orang yang beritikad tidak baik. Pada akhirnya, semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak.

Juni, 2024

Editor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 DEFINISI DAN KONSEP EKONOMI.....	1
<i>Susi Melinasari</i>	
BAB 2 PERMINTAAN DAN PENAWARAN.....	14
<i>Azizah Mursyidah</i>	
BAB 3 ELASTISITAS	28
<i>Ermi Suryani</i>	
BAB 4 PRODUKSI	40
<i>Miftakhul Anwar</i>	
BAB 5 BIAYA PRODUKSI	52
<i>Muhammad Kharis Mubarko</i>	
BAB 6 BENTUK - BENTUK PASAR PERSAINGAN	74
<i>Yaya Rahendra Casmita Pujiharto</i>	
BAB 7 PRODUK NASIONAL DAN PENDAPATAN NASIONAL	90
<i>Tubagus Rifqy Thantawi</i>	
BAB 8 KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER.....	116
<i>Rully Trihantana</i>	
BAB 9 PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI.....	131
<i>Ria Kusumaningrum</i>	
BAB 10 EKONOMI INTERNASIONAL	154
<i>Bayu Purnama Putra</i>	
PROFIL PENULIS	169

Susi Melinasari, ME.
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jl. Kapten Dasuki Bakri, Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Bogor, Jawa Barat 16810
Susi.melinasari@inais.ac.id

BAB 1 DEFINISI DAN KONSEP EKONOMI
Sebuah Bunga Rampai Ilmu Ekonomi dari Literasi Pemikiran
dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Diterbitkan oleh:

INAIS Press

BAB 1

DEFINISI DAN KONSEP EKONOMI

PENDAHULUAN

Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari bagaimana masyarakat mengatur sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tak terbatas. Ilmu ekonomi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari bagaimana masyarakat mengatur sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Ini mencakup analisis barang dan jasa yang diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Ilmu ekonomi juga mempelajari bagaimana individu, perusahaan, dan pemerintah mengelola sumber daya, serta bagaimana kebijakan ekonomi memengaruhi perekonomian secara keseluruhan.

Bab ini membahas tentang definisi dan konsep ilmu ekonomi, definisi ilmu ekonomi menurut para ahli, sejarah singkat ilmu ekonomi dari zaman kuno sampai dengan ekonomi modern, tujuan ilmu ekonomi, manfaat ilmu ekonomi, cabang ilmu ekonomi, metodologi ilmu ekonomi, permasalahan ilmu ekonomi dan peran ilmu ekonomi dalam masyarakat semua terangkum dengan jelas dan baik.

RINCIAN PEMBAHASAN MATERI

A. Sejarah Singkat Ilmu Ekonomi

Sejarah ilmu ekonomi melibatkan perkembangan konsep, teori, dan pemikiran ekonomi dari zaman kuno hingga zaman modern. Berikut adalah gambaran lebih rinci tentang sejarah ilmu ekonomi:

1. Zaman Kuno: Peradaban awal seperti Mesir, Babilonia, Yunani, dan Romawi memiliki kontribusi awal dalam pemikiran ekonomi, termasuk prinsip perdagangan, pertanian, dan distribusi kekayaan. Di Mesir kuno, terdapat catatan tentang praktik pembagian tanah dan pemungutan pajak. Di Yunani kuno, para filsuf seperti Aristoteles dan Plato membahas masalah ekonomi dalam karya-karya mereka. Aristoteles, misalnya, membahas tentang pertukaran, uang, dan keadilan dalam perdagangan.
2. Abad Pertengahan: Pemikiran ekonomi Islam memainkan peran penting dalam pengembangan prinsip-prinsip ekonomi, seperti perdagangan, keuangan, dan zakat.
3. Masa Merkantilisme (Abad ke-16 hingga ke-18): Merkantilisme menekankan pentingnya kekayaan negara, ekspor, dan akumulasi emas sebagai fondasi ekonomi negara.
4. Ekonomi Klasik (Abad ke-18): Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill menjadi tokoh kunci dalam ekonomi klasik dengan penekanan pada pasar bebas, divisi kerja, dan teori nilai kerja.
5. Marxisme dan Sosialisme (Abad ke-19): Karl Marx dan Friedrich Engels mengembangkan teori ekonomi politik yang menyoroti konflik kelas dan kepemilikan alat produksi.
6. Ekonomi Neoklasik (Akhir Abad ke-19 hingga Awal Abad ke-20): Berkembang sebagai reaksi terhadap kritik terhadap ekonomi klasik, dengan fokus pada utilitas, penawaran, permintaan, dan keseimbangan pasar.
7. Keynesianisme (Awal Abad ke-20): Dipengaruhi oleh John Maynard Keynes, teori ini menyoroti peran pemerintah dalam mengatasi ketidakseimbangan ekonomi melalui intervensi fiskal dan moneter.
8. Ekonomi Modern (Abad ke-20 hingga ke-21): Melibatkan berbagai aliran ekonomi seperti ekonomi institusi, ekonomi perilaku, ekonomi lingkungan, dan ekonomi digital yang menanggapi tantangan dan dinamika ekonomi kontemporer.

Sejarah ilmu ekonomi mencerminkan evolusi pemikiran ekonomi dari masa ke masa, dengan kontribusi berbagai teori dan konsep yang membentuk landasan bagi pemahaman ekonomi saat ini.

Selama sejarah, ilmu ekonomi terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Pemikiran dan teori ekonomi yang ada saat ini merupakan hasil dari kontribusi berbagai pemikir dan aliran teori yang telah muncul selama berabad-abad.

B. Definisi Ilmu Ekonomi

Ilmu ekonomi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari bagaimana masyarakat mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan tak terbatas. Ini melibatkan analisis produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Ilmu ekonomi juga mempelajari perilaku individu, bisnis, dan pemerintah dalam mengelola sumber daya serta dampak kebijakan ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan.

Ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Ilmu ekonomi melibatkan analisis tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa.

Beberapa konsep utama dalam ilmu ekonomi meliputi:

1. **Permintaan dan Penawaran:** Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen pada berbagai tingkat harga, sedangkan penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Interaksi antara permintaan dan penawaran menentukan harga pasar dan jumlah barang atau jasa yang diproduksi.
2. **Produksi dan Biaya:** Produksi melibatkan penggunaan sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa. Biaya-produksi melibatkan pengorbanan yang dikeluarkan dalam proses produksi, termasuk biaya tenaga kerja, bahan baku, modal, dan faktor-faktor produksi lainnya.
3. **Teori Nilai:** Teori nilai mencoba menjelaskan bagaimana harga ditentukan. Beberapa teori nilai termasuk teori nilai kerja, teori nilai utilitas, dan teori nilai marjinal.
4. **Ekonomi Mikro dan Makro:** Mikro menganalisis tindakan individu dan bisnis serta interaksi pasar; makro menganalisis ekonomi secara keseluruhan, seperti inflasi, pengangguran, dan kebijakan fiskal dan moneter.
5. **Kebijakan Ekonomi:** Kebijakan ekonomi melibatkan upaya pemerintah untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi melalui kebijakan fiskal (pengaturan pendapatan dan pengeluaran pemerintah) dan kebijakan moneter (pengaturan pasokan uang dan suku bunga).
6. **Ekonomi Internasional:** Ekonomi internasional mempelajari bagaimana ekonomi negara berinteraksi satu sama lain, termasuk perdagangan, investasi, dan kebijakan perdagangan internasional.

Ilmu ekonomi memiliki banyak cabang dan aliran teori yang berbeda, termasuk ekonomi klasik, neoklasik, Keynesian, dan ekonomi institusional. Para ekonom menggunakan metode ilmiah untuk mengumpulkan data, menganalisisnya, dan membuat prediksi tentang perilaku ekonomi di masa depan.

Beberapa macam teori ekonomi yang relevan dalam studi ekonomi modern memberikan pandangan yang beragam dalam menganalisis perilaku ekonomi, kebijakan, dan dinamika sistem ekonomi dalam berbagai konteks dan kondisi:

1. **Teori Ekonomi Klasik:** Berfokus pada pemikiran ekonomi dari tokoh-tokoh seperti Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Teori ini menekankan peran pasar bebas, spesialisasi, dan keuntungan komparatif.
2. **Teori Ekonomi Neoklasik:** Mengembangkan konsep-konsep dari ekonomi klasik dengan penekanan pada utilitas, permintaan, penawaran, dan harga pasar dalam analisis ekonomi.

3. Teori Keynesian: Berdasarkan karya John Maynard Keynes, teori ini menekankan peran pemerintah dalam mengatasi ketidakseimbangan ekonomi, khususnya dalam mengatasi resesi melalui intervensi fiskal dan moneter.
4. Teori Monetarisme: Dipopulerkan oleh Milton Friedman, teori ini menekankan peran uang dalam menentukan tingkat inflasi dan stabilitas ekonomi, serta menyarankan kebijakan moneter yang konsisten.
5. Teori Pertukaran dan Integrasi Ekonomi: Memperhatikan hubungan perdagangan internasional, investasi asing, dan integrasi pasar global dalam konteks ekonomi internasional.
6. Teori Pengembangan Ekonomi: mempelajari variabel yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi negara, seperti investasi, pembangunan manusia, dan pembangunan.
1. Teori Institusi Ekonomi: Mengkaji peran lembaga-lembaga ekonomi, aturan, dan norma-norma dalam membentuk perilaku ekonomi individu dan kolektif.
2. Teori Ekonomi Sosial: Memperhitungkan aspek sosial, budaya, dan lingkungan dalam analisis ekonomi, serta menekankan pentingnya keberlanjutan dan kesejahteraan sosial.

C. Definisi Ilmu Ekonomi Menurut Para Ahli

Beberapa definisi ilmu ekonomi menurut para ahli antara lain:

1. Adam Smith, seorang ekonom dan filsuf terkenal dari abad ke-18, memberikan kontribusi besar untuk pemahaman awal ilmu ekonomi. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana individu dan masyarakat memilih cara untuk menggunakan sumber daya yang langka. Smith dijuluki sebagai "Bapak Ekonomi", dan bukunya yang paling terkenal, "The Wealth of Nations", keluar pada tahun 1776..
2. Alfred Marshall adalah seorang ekonom terkemuka pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai studi tentang manusia dalam kehidupan sehari-hari; itu berbicara tentang kegiatan manusia dalam bisnis dan pabrik, di pasar dan di rumah. Marshall adalah salah satu tokoh utama dalam perkembangan ekonomi neoklasik dan karyanya yang paling terkenal adalah "Prinsip Ekonomi" (*Principles of Economics*) yang diterbitkan pada tahun 1890..
3. Lionel Robbins adalah seorang ekonom Inggris terkenal, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sumber daya yang langka yang memiliki penggunaan alternatif. Definisi ini dikenal sebagai definisi yang lebih terfokus pada aspek ketidakcukupan sumber daya dan pilihan yang harus dibuat dalam mengalokasikan sumber daya tersebut. Lionel Robbins dikenal karena kontribusinya terhadap pemikiran ekonomi, terutama dalam konteks pendekatan definisi ekonomi yang lebih luas..
4. Paul Samuelson adalah seorang ekonom Amerika yang sangat berpengaruh, mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai studi tentang cara mencapai tujuan yang diinginkan dengan sumber daya yang terbatas. Definisi ini menekankan pada aspek pilihan dan pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Samuelson dikenal karena bukunya yang sangat populer, "*Economics: An Introductory Analysis*," yang telah menjadi standar dalam pendidikan ekonomi selama beberapa dekade.

D. Konsep Ekonomi Islam

Menurut S.M. Hasanuzzaman, "ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan eksplorasi berbagai macam sumber daya, untuk memberikan kepuasan lahir dan batin bagi manusia serta

memungkinkan mereka melaksanakan seluruh kewajiban mereka terhadap Sang Khaliq dan masyarakat (Rahardjo, 1999)."

Ekonomi Islam merupakan upaya sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia yang berkaitan dengan masalah tersebut dari sudut pandang Islam, kata Khurshid (Chapra, 2001). Siddiqui menyatakan bahwa "Ekonomi Islam merupakan respons para pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi kehidupan". Akal dan pengalaman, serta Al-Quran dan Sunnah, merupakan sumber utamanya (Chapra, 2001). "Ekonomi Islam adalah tujuan mempelajari kesejahteraan manusia (farah) dicapai melalui pengorganisasian sumber daya bumi berdasarkan kerja sama dan partisipasi," kata Akram Khan (Chapra, 2001).

Sebenarnya, para pemikir telah memberikan banyak definisi tambahan tentang ekonomi Islam saat berkembang. Namun, beberapa definisi di atas seharusnya mewakili definisi ekonomi Islam saat ini. Ilmu yang mempelajari bagaimana setiap tindakan manusia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mencapai kebahagiaan baik di dunia ini maupun di akhirat. Aturan Islam, atau Syariah, menentukan hal ini. didasarkan pada tauhid, yang terangkum dalam "Rukun Iman" dan "Rukun Islam".

Karena pengertian ekonomi bergantung pada perspektif, atau worldview, yang digunakan sebagai landasan nilai, Islam berfungsi sebagai identitas dalam ekonomi tanpa mempengaruhi artinya. Selanjutnya, ekonomi dan bekerja adalah pekerjaan yang egaliter dan kolektif yang diwajibkan oleh Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 105, "Dan kata-kallah, bekerjalah kamu, karena Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan itu." Selain itu, ada maghfiroh yang diharapkan dari pekerjaan, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah: *"Barang siapa diwaktu sorenya kelelahan karena kerja tangannya, maka diwaktu sore itu ia men-dapat ampunan (maghfiroh)."* (Hadits Riwayat Thabrani dan Baihaqi).

Konsep ekonomi Islam mencakup:

1. Syariah: Dasar hukum ekonomi Islam yang mencakup larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), mayisir (perjudian), dan haram lainnya serta mendorong keadilan, kebersamaan, dan transparansi.
2. Zakat: Kewajiban memberikan sebagian kekayaan kepada yang berhak, untuk membantu fakir miskin, dhuafa, amil, muallaf, dan memperkuat jaringan sosial.
3. Wakaf: Praktik menyisihkan sebagian aset untuk kepentingan umum, seperti membangun sekolah, rumah sakit, dan masjid, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
4. Mudharabah dan Musharakah: Bentuk investasi berdasarkan prinsip bagi hasil, di mana keuntungan dan risiko dibagi bersama antara investor dan pengusaha.
5. Hisbah: Pengawasan dan regulasi ekonomi untuk memastikan keadilan dan ketertiban dalam transaksi ekonomi.
6. Keberkahan dan Keadilan: Prinsip bahwa keberkahan (barakah) dan keadilan harus ada dalam semua transaksi ekonomi, dengan tujuan memastikan distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan.
7. Larangan Monopoli dan Eksploitasi: Ekonomi Islam menentang praktik monopoli, manipulasi harga, dan eksploitasi dalam pasar.

E. Tujuan Ilmu Ekonomi

Ilmu ekonomi bertujuan untuk mempelajari, menganalisis, dan memperbaiki sistem ekonomi untuk meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan dalam pengelolaan sumber daya yang terbatas. secara lengkap meliputi:

1. Mempelajari Sistem Ekonomi: Memahami berbagai sistem ekonomi yang ada di dunia dan bagaimana mereka beroperasi dalam mengalokasikan sumber daya.
2. Menganalisis Perilaku Ekonomi: Mengkaji bagaimana orang, bisnis, dan pemerintah bertindak saat mereka membuat keputusan ekonomi seperti konsumsi, investasi, produksi, dan distribusi..
3. Mengoptimalkan Alokasi Sumber Daya: Mencari cara untuk mengalokasikan sumber daya yang langka agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dengan efisien.
4. Memprediksi dan Menjelaskan Perubahan Ekonomi: Meramalkan dan menjelaskan perubahan dalam perekonomian, termasuk fluktuasi siklus ekonomi, inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi.
5. Merumuskan Kebijakan Ekonomi: Memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan organisasi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan ekonomi.
6. Memahami Interaksi Antar Subjek Ekonomi: Meneliti interaksi antara konsumen, produsen, dan pasar dalam menentukan harga, kuantitas, dan alokasi sumber daya.
7. Mengukur Kesejahteraan Ekonomi: Mengevaluasi kesejahteraan ekonomi suatu negara atau masyarakat melalui indikator seperti GDP, indeks pengangguran, dan tingkat kemiskinan.
8. Mengidentifikasi Faktor-faktor Produksi dan Distribusi: Meneliti faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan serta distribusi pendapatan di masyarakat.
9. Mengembangkan Teori dan Metode Analisis Ekonomi: Membangun teori ekonomi dan metode analisis yang dapat digunakan untuk memahami fenomena ekonomi yang kompleks.
10. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan: Memperjuangkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan adil bagi seluruh anggota masyarakat.

F. Cabang Ilmu Ekonomi

Ilmu ekonomi dibagi menjadi dua cabang utama yaitu:

1. Ekonomi Mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan, serta bagaimana interaksi antara mereka mempengaruhi alokasi sumber daya. Beberapa konsep utama dalam ekonomi mikro meliputi:
 - a. Permintaan dan Penawaran: Mempelajari bagaimana harga dan kuantitas suatu barang atau jasa ditentukan oleh interaksi antara permintaan konsumen dan penawaran produsen.
 - b. Teori Produksi: Mempelajari cara perusahaan mengalokasikan sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa.
 - c. Teori Konsumen: Memeriksa perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian berdasarkan preferensi, utilitas, dan keterbatasan anggaran.
 - d. Struktur Pasar: Mempelajari berbagai bentuk pasar seperti persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik.
 - e. Efisiensi Pasar: Menilai sejauh mana alokasi sumber daya dalam suatu pasar memaksimalkan kesejahteraan masyarakat.
 - f. Elastisitas: Mengukur responsifitas permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga atau faktor-faktor lain.

Ekonomi mikro juga mempertimbangkan masalah seperti eksternalitas, kegagalan pasar, distribusi pendapatan, dan peran pemerintah dalam memperbaiki ketidaksempurnaan pasar.

2. Ilmu ekonomi yang dikenal sebagai ekonomi makro mempelajari ekonomi secara keseluruhan, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi perekonomian suatu negara atau wilayah tertentu.. Beberapa konsep utama dalam ekonomi makro meliputi:
 - a. Pertumbuhan Ekonomi: Mempelajari faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan output ekonomi suatu negara dalam jangka panjang.
 - b. Inflasi: Mengukur dan menganalisis tingkat kenaikan umum harga barang dan jasa dalam perekonomian.
 - c. Pengangguran: Menyelidiki tingkat pengangguran dalam perekonomian dan upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran.
 - d. Kebijakan Moneter: Memahami peran bank sentral dalam mengendalikan suplai uang, suku bunga, dan kebijakan moneter lainnya untuk mencapai tujuan ekonomi makro.
 - e. Kebijakan Fiskal: Mempelajari penggunaan anggaran pemerintah, pajak, dan pengeluaran publik untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi dan mencapai tujuan ekonomi makro.
 - f. Perdagangan Internasional: Memeriksa hubungan ekonomi antara negara-negara, termasuk perdagangan internasional, neraca perdagangan, dan dampak globalisasi.
 - g. Keseimbangan Neraca Pembayaran: Mempelajari transaksi ekonomi antara suatu negara dengan negara lain, termasuk perdagangan barang dan jasa, investasi, dan transfer uang.
 - h. Ekonomi makro berfokus pada analisis agregat dan keadaan perekonomian secara keseluruhan, bertujuan untuk memahami dan mengoptimalkan kinerja ekonomi suatu negara atau wilayah.

G. Metodologi Ilmu Ekonomi

Metodologi dalam ilmu ekonomi merujuk pada pendekatan dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis fenomena ekonomi, dan mengembangkan teori. Berikut adalah beberapa metodologi umum dalam ilmu ekonomi:

1. Metode Empiris: Menggunakan data empiris, baik kuantitatif maupun kualitatif, untuk menguji hipotesis dan membuat generalisasi tentang perilaku ekonomi.
2. Model Matematika: Membangun model matematika untuk menggambarkan hubungan ekonomi antara variabel-variabel yang saling terkait, memprediksi hasil, dan menguji teori.
3. Eksperimen Ekonomi: Merancang eksperimen untuk menguji perilaku ekonomi individu atau kelompok dalam situasi tertentu, sering kali digunakan dalam ekonomi perilaku.
4. Analisis Statistik: Menggunakan teknik statistik untuk menganalisis data ekonomi, mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antara variabel-variabel ekonomi.
5. Teori Ekonomi: Membangun teori ekonomi berdasarkan asumsi dan model untuk menjelaskan perilaku ekonomi, mengembangkan prediksi, dan memberikan dasar bagi analisis lebih lanjut.
6. Analisis Kausalitas: Menganalisis hubungan sebab-akibat antara variabel ekonomi untuk memahami dampak perubahan dalam satu variabel terhadap variabel lain.
7. Studi Kasus: Menggunakan studi kasus untuk menggali fenomena ekonomi di lapangan, menganalisis situasi khusus, dan mengevaluasi implikasi dari kebijakan atau peristiwa tertentu.
8. Metode Komparatif: Membandingkan situasi ekonomi antara negara, wilayah, atau periode waktu untuk menarik kesimpulan tentang faktor-faktor yang memengaruhi kinerja ekonomi.
9. Metode Kualitatif: Menggunakan pendekatan kualitatif seperti wawancara, observasi, dan analisis konten untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena ekonomi yang kompleks.
10. Metode Komputasi dan Simulasi: Menggunakan teknik komputasi dan simulasi untuk memodelkan situasi ekonomi yang kompleks, menguji skenario, dan menganalisis dampak kebijakan.

Dengan berbagai metodologi ini, ilmu ekonomi dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang perilaku ekonomi, dinamika pasar, serta implikasi kebijakan dalam mengelola sistem ekonomi dan memahami interaksi antara elemen-elemen ekonomi yang berbeda.

Berdasarkan Ruang lingkupnya keilmuan ekonomi terbagi dalam 3 bagian :

1. Ekonomi deskriptif
Ekonomi deskriptif adalah cabang ilmu ekonomi yang menjelaskan dan mendeskripsikan keadaan perekonomian dan kegiatan perekonomian pada suatu tempat (fakta yang terjadi di lapangan). Di dalam Ekonomi ini mengumpulkan berbagai keterangan yang benar-benar terjadi. Keterangan tersebut sesuai dengan permasalahan yang ada.
2. Ekonomi Terapan
Ekonomi terapan ialah cabang keilmuan dimana peranannya sebagai penyelesaian dan solusi dari permasalahan ekonomi yang terjadi dengan menggunakan hasil kajian dari ekonomi deskriptif.
3. Teori Ekonomi.
Teori Ini merupakan bagian keilmuan tentang penjelasan penyebab terjadinya suatu kegiatan perekonomian Ekonomi terapan

H. Manfaat Ilmu Ekonomi

Ilmu ekonomi memiliki dampak yang luas dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pengelolaan keuangan pribadi hingga kebijakan ekonomi nasional dan internasional. Ilmu ekonomi memberikan beragam manfaat, antara lain:

1. Pemahaman Sistem Ekonomi: Memahami bagaimana ekonomi beroperasi, termasuk perilaku konsumen, produsen, dan mekanisme pasar.
2. Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik: Memberikan landasan untuk membuat keputusan yang lebih rasional dalam mengelola keuangan pribadi, bisnis, atau kebijakan publik.
3. Analisis Kebijakan: Menyediakan kerangka kerja untuk merancang, menerapkan, dan mengevaluasi kebijakan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan.
4. Memahami Dampak Kebijakan Ekonomi: Mempelajari bagaimana kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan berdampak pada perekonomian dan masyarakat.
5. Mengelola Sumber Daya dengan Efisien: Mempelajari cara mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memaksimalkan kepuasan dan efisiensi.
6. Memprediksi dan Mengatasi Krisis Ekonomi: Memberikan wawasan untuk mengidentifikasi dan merespons perubahan ekonomi serta mengelola risiko krisis.
7. Menyediakan Informasi Pasar: Memberikan pemahaman tentang tren pasar, harga, dan permintaan yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan investasi dan bisnis.
8. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Kontribusi ilmu ekonomi dalam merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
9. Mengurangi Kemiskinan: Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, ilmu ekonomi dapat membantu merancang kebijakan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.
10. Memahami Globalisasi: Menyediakan wawasan tentang interaksi ekonomi antarnegara, perdagangan internasional, investasi asing, dan isu-isu ekonomi global lainnya.

Ilmu ekonomi juga memberikan manfaat untuk berbagai kalangan, diantaranya:

1. Masyarakat Umum: Memberikan pemahaman tentang cara mengelola keuangan pribadi, membuat keputusan konsumsi yang lebih bijaksana, dan memahami dampak kebijakan ekonomi terhadap kehidupan sehari-hari.
2. Pemerintah: Membantu merancang kebijakan ekonomi yang efektif dalam mengatasi masalah seperti pengangguran, inflasi, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan.
3. Pengusaha dan Bisnis: Menyediakan wawasan tentang pasar, permintaan konsumen, strategi pricing, investasi, dan manajemen keuangan untuk mengoptimalkan kinerja bisnis.
4. Organisasi non-profit: Memungkinkan organisasi untuk merencanakan dan mengelola anggaran dengan lebih efisien, serta mengukur dampak sosial dari program-program mereka.
5. Akademisi: Mendorong penelitian dan pengembangan teori ekonomi yang lebih maju, serta memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika ekonomi dan sosial.
6. Pasar Keuangan: Memberikan analisis yang dapat membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang cerdas dan memahami pergerakan pasar keuangan.
7. Pembuat Kebijakan: Menyediakan data dan analisis untuk membantu pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, stabilitas, dan keberlanjutan.
8. Negara dan Pembangunan Ekonomi: Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan.
9. Masyarakat Internasional: Menyediakan kerangka kerja untuk memahami hubungan ekonomi antarnegara, perdagangan internasional, dan isu-isu global seperti perubahan iklim dan ketimpangan ekonomi.
10. Individu: Memungkinkan individu untuk memahami pentingnya pengelolaan keuangan pribadi, investasi yang cerdas, serta dampak keputusan ekonomi individu terhadap kehidupan mereka dan masyarakat secara luas.

I. Permasalahan Utama dalam Ekonomi

Masalah pokok ekonomi adalah masalah yang muncul ketika sumber daya yang digunakan terbatas untuk memenuhi permintaan. Masalah ekonomi ini akan selalu muncul dalam kehidupan sehari-hari. Intinya adalah kebutuhan manusia begitu banyak dan tidak terbatas.

Menyikapi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan memerlukan analisis ekonomi yang mendalam, kebijakan yang efektif, serta kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Beberapa permasalahan utama dalam ekonomi yang sering menjadi fokus pembahasan antara lain:

- **Kemiskinan:** Ketimpangan pendapatan, akses terhadap layanan dasar, dan kesenjangan ekonomi menjadi perhatian utama dalam upaya mengatasi kemiskinan.
- **Pengangguran:** Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menjadi hambatan dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- **Inflasi:** Kenaikan umum harga barang dan jasa yang dapat mengurangi daya beli masyarakat dan memengaruhi stabilitas ekonomi.
- **Ketimpangan Ekonomi:** Perbedaan yang signifikan dalam pendapatan, kekayaan, dan akses terhadap sumber daya antara kelompok sosial menjadi masalah yang sangat penting.
- **Krisis Ekonomi:** Krisis keuangan, resesi ekonomi, dan ketidakstabilan pasar dapat menyebabkan kerugian besar dalam perekonomian.

- **Ketidaksetaraan Gender:** Ketimpangan antara pria dan wanita dalam akses terhadap kesempatan ekonomi, pendidikan, dan keputusan ekonomi merupakan masalah serius.
- **Ketergantungan pada Sumber Daya Alam:** Negara-negara yang sangat tergantung pada ekspor sumber daya alam rentan terhadap fluktuasi harga global dan kerentanan ekonomi.
- **Krisis Lingkungan:** Kerusakan lingkungan, perubahan iklim, dan degradasi sumber daya alam menimbulkan ancaman serius terhadap keberlanjutan ekonomi dan sosial.
- **Ketidakstabilan Pasar Keuangan:** Volatilitas pasar keuangan, spekulasi, dan ketidakpastian ekonomi global dapat memicu krisis keuangan yang berdampak luas.
- **Kesenjangan Generasi:** Tantangan ekonomi yang dihadapi oleh generasi muda, termasuk kesulitan dalam memperoleh pekerjaan, kepemilikan rumah, dan kesejahteraan ekonomi masa depan.

J. Peran Ilmu Ekonomi dalam Masyarakat

Ilmu ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat modern, termasuk:

1. **Alokasi Sumber Daya:** Membantu dalam pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat secara efisien.
2. **Pengambilan Keputusan:** Memberikan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan yang lebih rasional, baik bagi individu, perusahaan, maupun pemerintah.
3. **Pengembangan Kebijakan:** Merancang kebijakan ekonomi yang efektif untuk mengatasi masalah seperti inflasi, pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi.
4. **Pemahaman Pasar:** Membantu dalam memahami dinamika pasar, perilaku konsumen, dan produsen sehingga dapat merencanakan strategi bisnis yang tepat.
5. **Pertumbuhan Ekonomi:** Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi yang kompetitif dan inovatif.
6. **Distribusi Kekayaan:** Menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi kekayaan dan pendapatan dalam masyarakat untuk mencapai keadilan sosial.
7. **Kesejahteraan Masyarakat:** Memperhitungkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam pengambilan keputusan ekonomi, bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata.
8. **Pencegahan Krisis Ekonomi:** Menganalisis risiko dan ketidakstabilan ekonomi untuk membantu mencegah krisis ekonomi yang merugikan masyarakat.
9. **Pengentasan Kemiskinan:** Merancang program-program dan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.
10. **Peningkatan Kualitas Hidup:** Melalui analisis ekonomi, ilmu ekonomi dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.

Dengan peran-peran tersebut, ilmu ekonomi berperan penting dalam membentuk kebijakan, merangsang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan secara ekonomi.

RANGKUMAN MATERI

Sejarah ilmu ekonomi melibatkan perkembangan konsep, teori, dan pemikiran ekonomi dari zaman kuno, abad pertengahan, masa merkantilisme (Abad ke-16 hingga ke-18), ekonomi klasik (abad ke-18), marxisme dan sosialisme (abad ke-19), ekonomi neoklasik (Akhir Abad ke-19 hingga awal abad ke-20), keynesianisme (awal abad ke-20), ekonomi modern (abad ke-20 hingga ke-21).

Cabang ilmu sosial yang disebut ilmu ekonomi mempelajari bagaimana masyarakat mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Ini mencakup analisis barang dan jasa yang diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Ilmu ekonomi juga mempelajari bagaimana individu, perusahaan, dan pemerintah mengelola sumber daya, serta bagaimana kebijakan ekonomi memengaruhi perekonomian secara keseluruhan.

Banyak aliran dan cabang ilmu ekonomi, termasuk ekonomi institusional, klasik, neoklasik, dan Keynesian, termasuk teori nilai, produksi dan biaya, permintaan dan penawaran, dan ekonomi mikro dan makro, kebijakan ekonomi, dan sebagainya. Para ekonom mengumpulkan data, menganalisisnya, dan membuat prediksi tentang perilaku ekonomi di masa depan dengan cara ilmiah.

Dalam ekonomi, Islam berfungsi sebagai identitas tanpa mempengaruhi arti ekonomi. Ini karena pengertian ekonomi lebih bergantung pada perspektif, atau lebih tepatnya worldview, yang digunakan sebagai landasan nilai. Selanjutnya, ekonomi dan bekerja adalah pekerjaan yang egaliter dan kolektif yang diwajibkan oleh Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 105, "Dan kata-kanlah, bekerjalah kamu, karena Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan itu." Selain itu, ada maghfiroh yang diharapkan dari pekerjaan, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah: *"Barang siapa diwaktu sorenya kelelahan karena kerja tangannya, maka diwaktu sore itu ia men-dapat ampunan (maghfiroh)."* (Hadits Riwayat Thabrani dan Baihaqi)

Tujuan ilmu ekonomi adalah untuk memahami, menganalisis, dan memperbaiki sistem ekonomi untuk mencapai kesejahteraan dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya yang terbatas secara lengkap, Metodologi dalam ilmu ekonomi merujuk pada pendekatan dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis fenomena ekonomi, dan mengembangkan teori. Berikut adalah beberapa metodologi umum dalam ilmu ekonomi.

Masalah pokok ekonomi adalah masalah yang muncul ketika sumber daya yang digunakan terbatas untuk memenuhi permintaan. Masalah ekonomi ini akan selalu muncul dalam kehidupan sehari-hari. Intinya adalah kebutuhan manusia begitu banyak dan tidak terbatas. Menyikapi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan memerlukan analisis ekonomi yang mendalam, kebijakan yang efektif, serta kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan definisi dari ekonomi dan ilmu ekonomi?
2. Sebutkan beberapa konsep utama dalam ilmu ekonomi?
3. Jelaskan beberapa metodologi umum dalam ilmu ekonomi?
4. Sebutkan beberapa tujuan dan manfaat ilmu ekonomi?
5. Sebutkan beberapa permasalahan utama dalam ekonomi yang sering menjadi fokus pembahasan?

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmam. (2001). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: International Institute of Islamic Thought Indonesia (IIIT).
- Boediono. 2005. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Penerbit FEUI
- Chapra, M. Umer. (2001). *Masa Depan Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press
- Fahmi Nurul. (2019). *Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Tasamuh Jurnal Studi Islam volume 11
- Putranto, A.T. dkk (2019). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Tangerang: Universitas Pamulang
- Rahardja, Prathama. (2016). *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*. Jakarta: Edisi ketiga Prathama Rahardja Mandala Manurung
- Rahardja, M. Dawam. (1999). *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat

GLOSARIUM

- Ekonomi** : Ilmuwan sosial menyelidiki bagaimana orang mengalokasikan sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tak terbatas.
- Ilmu Ekonomi** : Cabang ilmu sosial yang menyelidiki bagaimana orang mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas.
- Mengalokasikan** : Membagi atau mengarahkan sumber daya yang tersedia ke dalam penggunaan atau tujuan yang spesifik. Ini melibatkan penentuan cara terbaik untuk mendistribusikan sumber daya yang terbatas agar mencapai hasil yang diinginkan
- Produksi** : Proses atau kegiatan untuk menciptakan atau menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai ekonomi. Ini melibatkan penggunaan faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, modal, bahan baku, dan teknologi, untuk menghasilkan output yang berguna dan dapat dipasarkan
- Distribusi** : Proses atau kegiatan untuk mengalokasikan atau mendistribusikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen atau pasar yang membutuhkannya. Ini melibatkan mengatur, mengelola, dan memfasilitasi pergerakan barang atau jasa dari titik produksi ke titik konsumsi
- Kontribusi** : Dalam konteks ekonomi merujuk pada sumbangan atau pengaruh positif yang diberikan oleh individu, kelompok, atau sektor dalam pembentukan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah. Kontribusi ekonomi mencakup berbagai aspek dan dapat diukur dalam berbagai indikator ekonomi.
- Ekonomi Mikro** : Cabang ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi individu, rumah tangga, dan perusahaan serta interaksi antara mereka di pasar. Fokus utama ekonomi mikro adalah pada unit-unit ekonomi kecil dan bagaimana keputusan individu dalam hal produksi, konsumsi, dan

Ekonomi Makro

alokasi sumber daya mempengaruhi harga dan kuantitas barang dan jasa di pasar.

: Cabang ekonomi yang mempelajari fenomena ekonomi dalam skala yang lebih luas, seperti tingkat nasional, regional, atau global. Fokus utama ekonomi makro adalah pada variabel-variabel agregat, seperti tingkat output nasional, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Azizah Mursyidah, MEI.
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jl. Kapten Dasuki Bakri, Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Bogor, Jawa Barat 16810
azizahmursyidah9@gmail.com

BAB 2 PERMINTAAN DAN PENAWARAN
Sebuah Bunga Rampai Ilmu Ekonomi dari Literasi Pemikiran
dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Diterbitkan oleh:
INAIS Press

BAB 2 PERMINTAAN DAN PENAWARAN

A. Pendahuluan

Konsep permintaan dan penawaran sangat berkaitan dengan kehidupan, terutama di bidang Ekonomi, pada sisi Ekonomi mikro, *supply* dan *demand* dipengaruhi oleh sisi harga dan faktor-faktor lainnya yang bersifat *ceteris paribus*, selama manusia masih bersosialisasi dengan lingkungannya maka aktifitas permintaan dan penawaran ini tak terhindarkan, sehingga untuk memenuhi hal tersebut diperlukan pemanfaatan Sumber daya yang maksimal, diantaranya: modal, Tanah, sumber daya manusia, dan faktor produksi lainnya. Hal inilah yang menjadi minat bagi penulis untuk menganalisa lebih lanjut, konsep permintaan dan penawaran, sehingga bisa menambah khazanah keilmuan baik bagi akademisi, praktisi, dan masyarakat umum. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

B. PEMBAHASAN

1. Konsep dasar permintaan, penawaran dan pasar barang
2. Penawaran konsep permintaan dan penawaran

Tujuan pembelajaran ini adalah bagaimana keputusan diambil karena adanya harga yang berdasarkan atas permintaan dan penawaran, untuk pribadi maupun perusahaan atau pemerintah.

B.1 KONSEP DASAR PERMINTAAN

Dalam kehidupan nyata seperti di rumah tangga banyak sekali pengambilan keputusan diantaranya apabila seorang ibu ingin membeli roti pada harga Rp 3000; kemudian tiba-tiba harga naik menjadi Rp5.000; maka konsumen akan membeli 2 buah roti tetapi apabila konsumen memiliki 10.000 rupiah maka bisa memiliki 3 buah roti, hal ini lah yang mempengaruhi konsumen yaitu Harga, faktor lain yang menjadi faktor individu mengambil keputusan adalah

1. Harga
2. Jumlah pendapatan
3. Tingkat kekayaan
4. Barang pengganti
5. Cita rasa
6. Harapan individu terhadap perekonomian masa depan

Maka hubungan antara hukum permintaan dan harga adalah: **“Jika harga suatu jenis barang semakin rendah maka permintaan atas barang tersebut akan semakin banyak. Sebaliknya jika harga suatu jenis barang semakin tinggi maka permintaan atas barang tersebut akan semakin sedikit (Karim, 2018)”**.

Pada dasarnya harga akan menentukan keputusan seseorang untuk membeli barang, hal lain selain harga akan dianggap *ceteris paribus*.

Ceteris paribus merupakan analisis faktor lain selain harga, karena asumsi ini merupakan penyederhanaan dari analisis permintaan. Berdasarkan hukum permintaan dapat kita analisa lebih dalam, yaitu 1) berpindahnya permintaan pada barang pengganti. Misalnya harga roti naik maka permintaanpun akan turun. Sedangkan konsumen akan cenderung mengganti roti dengan dengan barang substitusi 2) kenaikan harga roti akan menurunkan pendapatan.

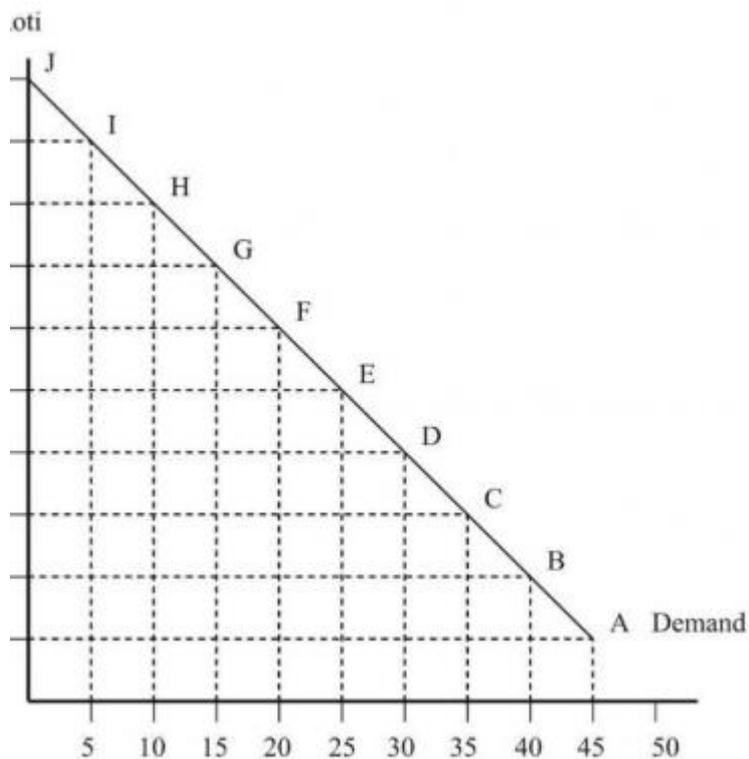
Dua pendekatan yang menggambarkan analisa diatas adalah dengan tabel, kurva permintaan dan persamaan fungsi permintaan. Tabel 1.1 terdapat hubungan yang negatif antara harga roti dengan permintaan. Pada saat harga 1000 roti terdapat jumlah permintaan sejumlah 45 bungkus roti tetapi ketika harga naik menjadi 2000 rupiah terjadi penurunan menjadi 40 bungkus, dan seterusnya.

	Harga roti (Puluh Ribu Rupiah)	Jumlah Permintaan roti (Bungkus)
A	1	45
B	2	40
C	3	35
D	4	30
E	5	25
F	6	20
G	7	15
H	8	10
I	9	5
J	10	0

Tabel 2.1

(Hadiyanto, 2020)

Cara kedua untuk menggambarkan hubungan permintaan ini dengan adanya Kurva ini adalah kurva permintaan yaitu sumbu vertikal merupakan harga, dan sumbu horizontal merupakan jumlah barang, kurva ini menggambarkan hubungan antara harga dan permintaan roti. Dari kurva dibawah ini menggambarkan sudut yang negatif, yaitu kemiringan antara kiri atas ke kanan bawah.



(Samuelson, 2006)

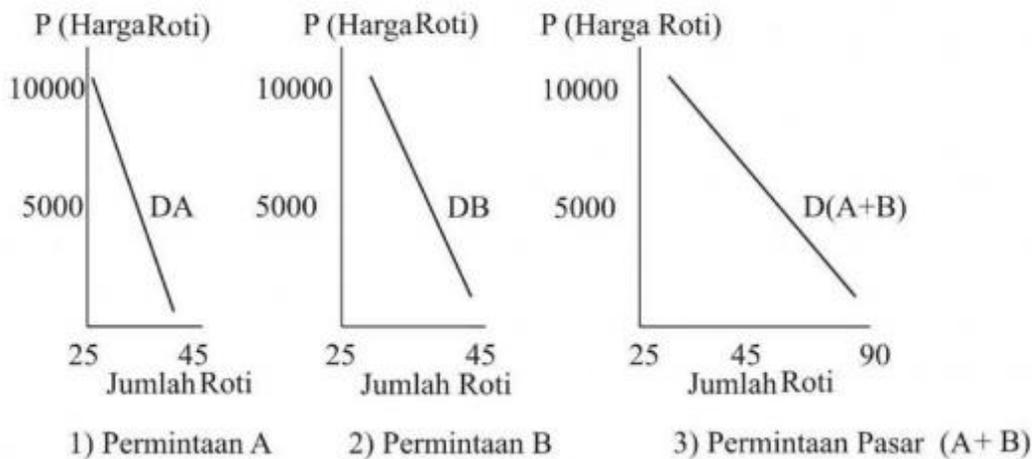
Selanjutnya kita akan mengetahui Cara dalam menganalisa untuk mencerminkan Permintaan pasar, yaitu menggambarkan permintaan barang yaitu roti dengan jumlah tertentu pada tingkatan harga tertentu. Artinya permintaan pada Individu A akan menurun seiring dengan naiknya harga roti, dan begitu juga dengan Individu B kecenderungan untuk membeli produk roti akan menurun nilainya seiring dengan naiknya harga barang . seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Permintaan Roti oleh A dan B atas Berbagai Tingkat Harga Selama Setahun

	Harga Roti (Ribu Rupiah)	Jumlah Permintaan Roti oleh A (Bungkus)	Jumlah Permintaan Roti oleh B (Bungkus)	Jumlah Permintaan Pasar untuk Roti (A + B) (Bungkus)
A	1	45	52	97
B	2	40	49	89
C	3	35	46	81
D	4	30	43	73
E	5	25	40	65
F	6	20	37	57
G	7	15	34	49
H	8	10	31	41
I	9	5	28	33
J	10	0	25	25

(Samuelson, 2006)

Tabel 5 ini menggambarkan permintaan roti, bila diasumsikan hanya ada 2 yang melakukan pembelian terhadap roti, maka pada gambar 2.2 ini merupakan permintaan A dan B pada setiap tingkatan harga.



Gambar 2.2
Permintaan Pasar untuk Roti

(Hadiyanto, 2020)

B.2 PERGERAKAN SEPANJANG KURVA DAN PERGESERAN KURVA PERMINTAAN

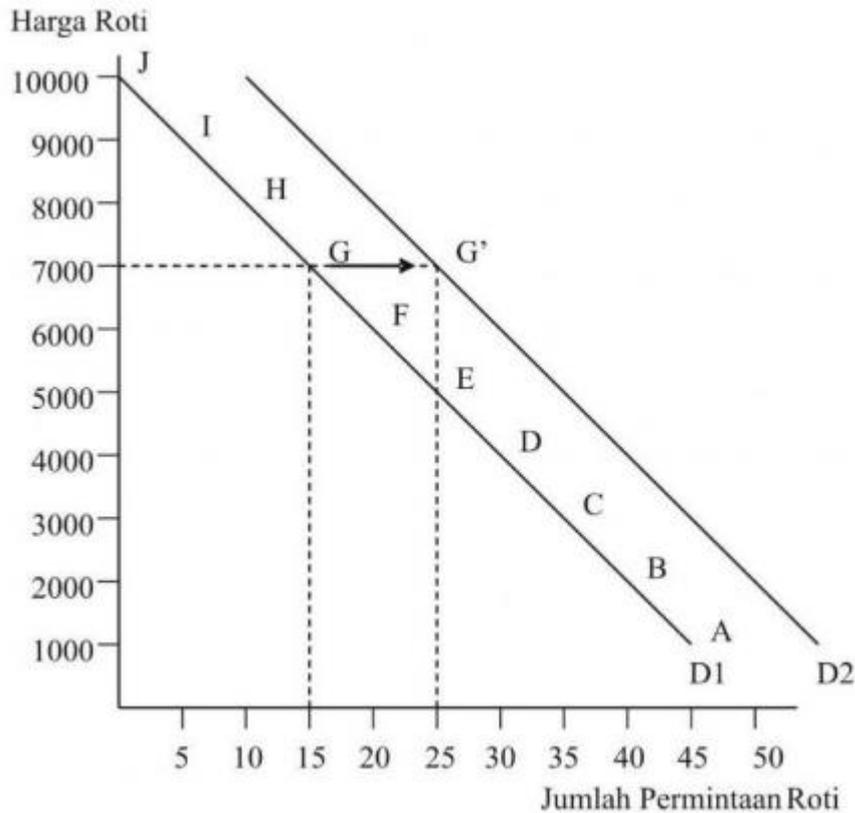
Tiap titik kurva yang ada di titik permintaan menggambarkan kesediaan konsumen pada harga terkait pada barang misal: Pergerakan kurva pada titik D, G, ke E, apabila harga mengalami kenaikan dari 25 roti menjadi 15 roti yang di konsumsi akibat kenaikan harga dari 5.000 menjadi 7.000 pada gambar 2.1

Jika pendapat naik dari 10.000 menjadi 15.000 maka daya beli masyarakat akan meningkat seiring bertambahnya pendapatan yaitu dilihat pada gambar 2.3 bahwa permintaan roti meningkat dari 15 bungkus menjadi 25 bungkus yaitu ada pergeseran dari D1 ke D2

Peningkatan Harga terjadi, Ketika harga naik dari 5.000 menjadi 7.000, dan konsumsi roti turun dari 25 menjadi 15, ini menunjukkan adanya pergerakan sepanjang kurva permintaan dari titik D ke titik E. Ini menunjukkan bahwa pada harga yang lebih tinggi, konsumen bersedia membeli jumlah yang lebih sedikit.

Peningkatan Pendapatan terjadi, Ketika pendapatan seseorang naik dari 10.000 menjadi 15.000, dan permintaan terhadap roti juga naik dari 15 menjadi 25 pada harga yang sama (7.000), ini menunjukkan pergeseran kurva permintaan dari D1 ke D2. Ini menunjukkan bahwa pada semua tingkat harga, konsumen sekarang bersedia membeli jumlah yang lebih besar, menunjukkan peningkatan daya beli mereka.

Kedua konsep ini menggambarkan bagaimana faktor-faktor eksternal seperti harga dan pendapatan dapat mempengaruhi tingkat permintaan terhadap suatu barang dan mengubah kurva permintaannya.



(Samuelson, 2006)

Pergeseran terjadi apabila yang harga yang berubah maka akan terjadi kurva garis permintaan sedangkan apabila ada faktor lain yang mempengaruhinya, seperti cita rasa, harga barang pelengkap yang sejenis, dll, maka

Pergeseran kurva permintaan terjadi ketika faktor-faktor selain harga berubah, seperti pendapatan, selera konsumen, harga barang lain yang sejenis, dan lain-lain. Ketika faktor-faktor ini berubah, kurva permintaan akan bergeser ke kiri atau kanan, menunjukkan peningkatan atau penurunan keseluruhan permintaan pada setiap tingkat harga. Ini menunjukkan perubahan dalam jumlah barang yang diminta pada setiap tingkat harga.

Namun, jika yang berubah adalah harga suatu barang, maka yang terjadi adalah pergerakan sepanjang kurva permintaan. Ini menunjukkan bahwa pada harga yang berbeda, jumlah barang yang diminta akan berbeda pula, tetapi tidak ada perubahan pada faktor-faktor selain harga yang mempengaruhi keseluruhan permintaan. Perubahan harga akan menyebabkan pergerakan sepanjang kurva permintaan, menunjukkan respons konsumen terhadap perubahan harga tersebut.

B.3 KONSEP DASAR PENAWARAN (SUPPLY)

Analisis penawaran barang dan jasa memang merupakan aspek penting dalam ekonomi untuk memahami keseimbangan antara harga dan jumlah yang tersedia di pasar. Hukum penawaran menyatakan bahwa ketika harga pasar naik, kuantitas barang yang ditawarkan oleh produsen juga akan meningkat, sedangkan ketika harga pasar turun, kuantitas barang yang ditawarkan akan menurun.

Beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah penawaran barang dan jasa oleh perusahaan atau produsen meliputi:

Harga: Harga barang itu sendiri merupakan faktor yang paling signifikan dalam menentukan jumlah barang yang ditawarkan. Ketika harga naik, produsen memiliki insentif untuk meningkatkan produksi karena mereka dapat memperoleh lebih banyak pendapatan dari setiap unit yang dijual.

Teknologi: Tingkat teknologi yang digunakan dalam proses produksi juga berpengaruh pada jumlah barang yang ditawarkan. Teknologi yang lebih canggih dan efisien dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi, sehingga memungkinkan produsen untuk menawarkan lebih banyak barang pada harga yang sama atau bahkan lebih rendah.

Biaya Produksi: Biaya produksi termasuk biaya bahan baku, upah tenaga kerja, biaya overhead pabrik, dan lain-lain. Ketika biaya produksi meningkat, produsen mungkin akan mengurangi jumlah barang yang ditawarkan untuk mempertahankan keuntungan mereka, kecuali jika mereka dapat mentransfer kenaikan biaya tersebut kepada konsumen melalui peningkatan harga.

Harga Barang Lain yang Sejenis: Harga barang lain yang sejenis atau substitusi juga dapat mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Jika harga barang lain naik, produsen mungkin akan beralih untuk memproduksi barang yang lebih menguntungkan, sehingga mengurangi jumlah barang yang ditawarkan dari barang yang pertama.

Faktor-faktor ini bersama-sama mempengaruhi keputusan produsen dalam menentukan jumlah barang yang akan mereka tawarkan di pasar pada berbagai tingkat harga.

Terdapat hubungan positif antara harga penawaran dengan asumsi tidak ada faktor lain yang mempengaruhi atau disebut *ceteris paribus*. Dengan mempertimbangkan hubungan positif antara harga penawaran dan jumlah barang yang ditawarkan, serta asumsi *ceteris paribus* (faktor lainnya tetap), kita dapat menggambarkan tabel penawaran berikut untuk perusahaan roti A selama satu tahun:

Harga (per bungkus)	Jumlah Roti Ditawarkan (bungkus)
7.000	25
8.000	30
9.000	35
10.000	40

Dalam tabel di atas, semakin tinggi harga roti, semakin banyak jumlah roti yang ditawarkan oleh perusahaan roti A. Ini mencerminkan hubungan positif antara harga penawaran dan jumlah barang yang ditawarkan.

Untuk menggambarkan hubungan ini dalam bentuk kurva penawaran, kita bisa menggambar grafik dengan harga di sumbu vertikal dan jumlah yang ditawarkan di sumbu horizontal. Dalam hal ini, kita akan melihat kurva penawaran naik dari kiri bawah ke kanan atas, mencerminkan hubungan positif antara harga dan jumlah yang ditawarkan.

Dengan asumsi tidak ada faktor lain yang mempengaruhi, perusahaan roti A akan menawarkan lebih banyak roti pada harga yang lebih tinggi, seperti yang diperlihatkan dalam tabel dan akan direpresentasikan dalam kurva penawaran yang naik.

Tabel 2.3
Penawaran Roti oleh Perusahaan A atas Berbagai Tingkat Harga Selama Setahun

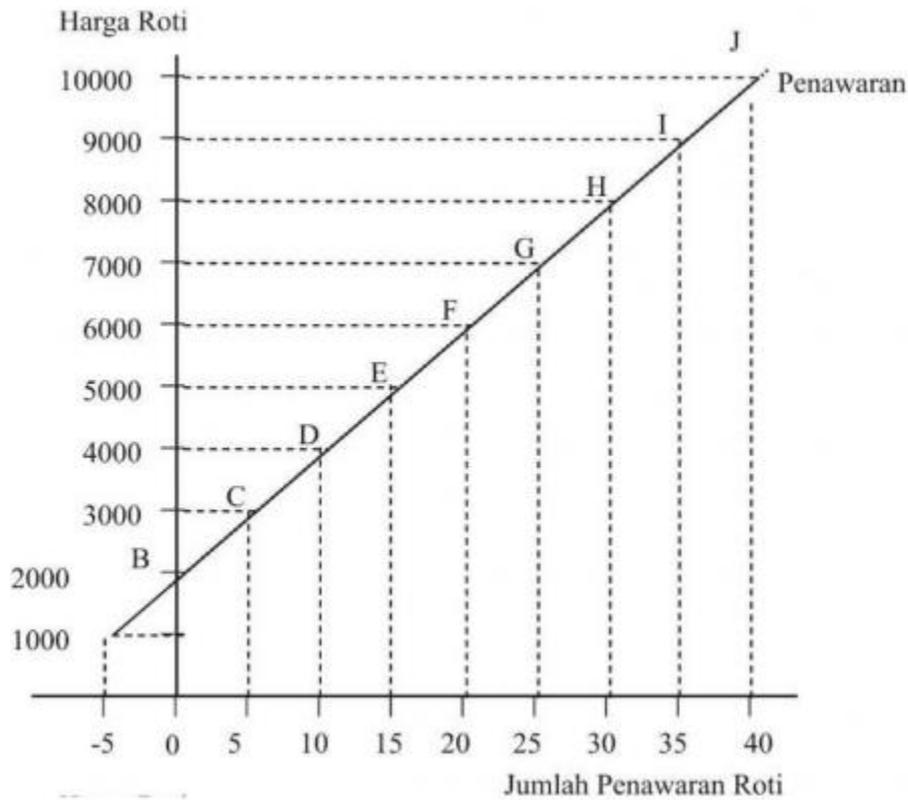
	Harga Roti (Ribu Rupiah)	Jumlah Roti yang Ditawarkan (Bungkus)
B	2	0
C	3	5
D	4	10
E	5	15
F	6	20
G	7	25
H	8	30
I	9	35
J	10	40

tabel 2.3 menunjukkan adanya hubungan yang searah antara harga dan jumlah roti yang ditawarkan, yang sesuai dengan hukum penawaran dalam ekonomi. Hukum penawaran menyatakan bahwa ada hubungan positif antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan, dengan asumsi ceteris paribus, seperti yang telah Anda jelaskan.

Dalam contoh diatas, ketika harga per bungkus roti naik dari 2.000 menjadi 3.000, jumlah roti yang ditawarkan meningkat dari nol menjadi 5. Ini adalah contoh yang baik dari penerapan hukum penawaran. Ketika harga meningkat, produsen memiliki insentif untuk menawarkan lebih banyak barang karena mereka dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dari setiap unit yang dijual.

Ini menegaskan hubungan searah antara harga dan jumlah yang ditawarkan dalam konteks penawaran barang dan jasa, dan adalah konsep dasar dalam ekonomi mikro.

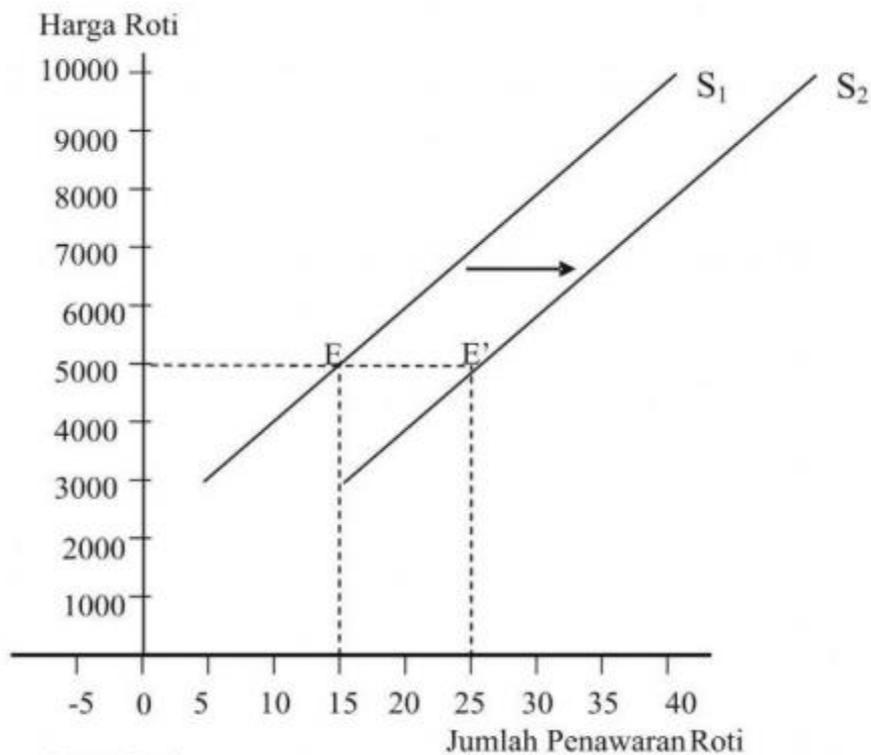
Pada gambar dibawah ini yakni 2.4 terjadi hubungan positif antara harga roti dengan penawaran roti.



(Sukirno, 2021)

B.4 Pergerakan Sepanjang Kurva dan Pergeseran Kurva Penawaran

Jika terjadi kenaikan harga terhadap barang maka, terjadilah kenaikan atas suatu penawaran, tetapi jika yang berubah harga selain barang itu sendiri, maka akan terjadi pergeseran kurva permintaan. Pergeseran terjadi jika harga tetap, dan variabel selain harga yang berubah maka dapat dilihat pada gambar berikut ini



Pergeseran

Pergeseran kurva penawaran roti oleh Perusahaan A

(Sukirno, 2021)

Dalam kasus ini, ditemukan teknologi baru yang mengurangi biaya produksi roti, sehingga perusahaan dapat meningkatkan jumlah roti yang ditawarkan dengan harga yang sama. Sebelum adanya teknologi baru, pada tingkat harga pasar Rp. 5.000 per bungkus, perusahaan hanya mampu menawarkan 15 bungkus roti.

Namun, setelah adanya penemuan teknologi baru, jumlah roti yang ditawarkan meningkat menjadi 25 bungkus pada harga yang sama, yaitu Rp. 5.000 per bungkus. Ini menunjukkan bahwa dengan biaya produksi yang lebih rendah, perusahaan dapat meningkatkan jumlah roti yang ditawarkan tanpa harus menaikkan harga jual.

Dalam konteks keseimbangan permintaan dan penawaran, penemuan teknologi baru ini dapat menggeser kurva penawaran ke kanan, menunjukkan peningkatan jumlah barang yang ditawarkan pada setiap tingkat harga. Hal ini akan menyebabkan peningkatan kuantitas yang ditawarkan dan dapat berdampak pada harga keseimbangan di pasar, tergantung pada respons permintaan konsumen terhadap perubahan jumlah yang ditawarkan ini. Jika permintaan tetap tinggi, maka harga keseimbangan mungkin tetap sama atau bahkan turun.

C. KESEIMBANGAN PERMINTAAN DAN PENAWARAN

Keseimbangan antara permintaan dan penawaran, yang terjadi pada tingkat harga dan jumlah yang sama, dapat dilihat melalui tiga cara:

Tabel Permintaan dan Penawaran:

Dalam tabel permintaan dan penawaran, Anda dapat melihat titik di mana jumlah yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah yang ditawarkan oleh produsen pada harga tertentu. Ini adalah titik keseimbangan di mana pasar mencapai kesetaraan antara permintaan dan penawaran.

Perpotongan Kurva Permintaan dan Penawaran:

Dalam grafik yang menampilkan kurva permintaan dan penawaran, titik keseimbangan adalah titik di mana kedua kurva tersebut berpotongan. Di titik ini, jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan sama pada tingkat harga tertentu.

Fungsi Permintaan dan Penawaran:

Anda juga dapat mencapai keseimbangan antara permintaan dan penawaran dengan menggunakan fungsi matematis dari kurva permintaan dan penawaran. Keseimbangan terjadi ketika persamaan permintaan sama dengan persamaan penawaran.

Melalui salah satu dari tiga cara tersebut, Anda dapat mengidentifikasi titik di mana pasar mencapai keseimbangan antara jumlah yang diminta oleh konsumen dan jumlah yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Keseimbangan ini penting karena di sinilah harga dan jumlah yang sebenarnya terbentuk dalam pasar.

Tabel 2.4
Keseimbangan Penawaran dan Permintaan Roti

	Harga Roti (Ribuan Rupiah)	Jumlah Permintaan Roti (Bungkus)	Jumlah Roti yang Ditawarkan (Bungkus)
A	1	45	-5
B	2	40	0
C	3	35	5
D	4	30	10
E	5	25	15
F	6	20	20
G	7	15	25
H	8	10	30
I	9	5	35
J	10	0	40

(Hadiyanto, 2020)

Dengan menggunakan pendekatan perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran, kita dapat menggambarkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar.

Pada Tabel 2.4, pada poin F, harga roti adalah 6.000 dengan permintaan sebesar 20 bungkus. Pada tingkat harga ini, tidak ada tekanan untuk harga berubah karena jumlah yang ditawarkan sesuai dengan permintaan, yaitu 20 bungkus. Ini menunjukkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar pada tingkat harga 6.000.

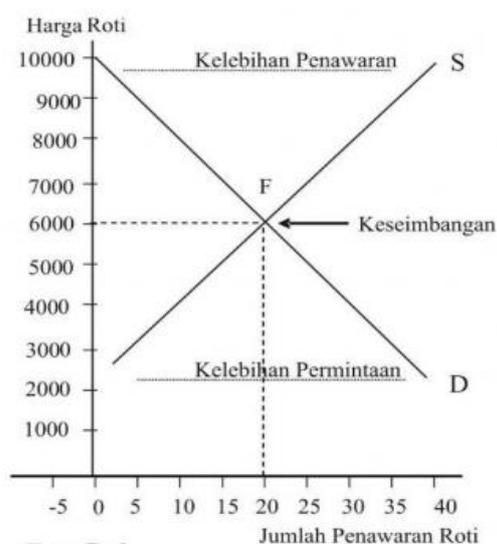
Namun, pada harga 7.000, terjadi kelebihan penawaran sejumlah 10 bungkus dari permintaan yang hanya sebesar 15 bungkus. Hal ini menyebabkan harga turun menjadi 6.000 untuk mencapai keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Dengan harga 6.000, jumlah yang ditawarkan menjadi 20 bungkus, yang sesuai dengan jumlah permintaan, yaitu 20 bungkus juga.

Dengan demikian, pada titik F, keseimbangan terjadi pada harga 6.000 dan output sebanyak 20 bungkus. Ini adalah titik di mana kurva permintaan dan kurva penawaran saling berpotongan, menunjukkan keseimbangan antara jumlah yang diminta oleh konsumen dan jumlah yang ditawarkan oleh produsen pada harga tersebut.

Jika harga terjadi diatas harga keseimbangan, maka disebut konsep excess supply dan excess demand dalam konteks keseimbangan permintaan dan penawaran.

- Excess Supply (Kelebihan Penawaran): Terjadi ketika harga pasar lebih tinggi dari harga keseimbangan. Ini berarti produsen menawarkan lebih banyak barang daripada yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga tersebut. Sebagai hasilnya, terjadi penumpukan barang yang tidak terjual di pasar. Dalam situasi ini, produsen mungkin akan bersaing untuk menarik pembeli dengan menurunkan harga, sehingga harga akan turun menuju keseimbangan.
- Excess Demand (Kelebihan Permintaan): Terjadi ketika harga pasar lebih rendah dari harga keseimbangan. Ini berarti jumlah yang diminta oleh konsumen lebih besar daripada jumlah yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tersebut. Sebagai hasilnya, konsumen bersaing untuk mendapatkan barang yang terbatas, dan ada kecenderungan harga naik karena permintaan yang tinggi. Dalam situasi ini, produsen mungkin akan menaikkan harga untuk menangkap nilai tambah dari barang mereka.

Kedua konsep ini menggambarkan bagaimana harga pasar cenderung menuju keseimbangan, di mana jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan sama. Jika harga berada di atas keseimbangan, maka pasar akan menuju kelebihan penawaran; sedangkan jika harga berada di bawah keseimbangan, maka pasar akan menuju kelebihan permintaan. Harga pasar akan cenderung bergerak menuju keseimbangan melalui mekanisme pasar yang melibatkan interaksi antara produsen dan konsumen.



(Mankiw N. , 2003)

KESIMPULAN

Tingginya permintaan dikarenakan harga yang rendah sebaliknya apabila permintaan menurun disebabkan harga yang tinggi, sedangkan tingginya penawaran dikarenakan harga yang tinggi dan rendahnya penawaran dikarenakan harga yang rendah. Kedua hukum tersebut menggambarkan yang terjadi antara harga dengan permintaan dan harga dengan penawaran.

Asumsi *ceteris paribus* dilakukan untuk menganalisa harga dengan permintaan dan harga dengan penawaran, apabila jika menganalisa seluruh faktor hal itu sangat sulit dilakukan. Terjadinya titik keseimbangan antara harga permintaan harus sama dengan harga penawaran dikarenakan *demand=supply*

TUGAS DAN EVALUASI

1. Sebutkan hukum permintaan dan penawaran, serta jelaskan hubungan yang terjadi antara harga dengan permintaan!
2. Jelaskan pentingnya asumsi *ceteris paribus* dalam teori permintaan dan penawaran!
3. Jelaskan penyebab terjadinya pergerakan sepanjang kurva dan pergeseran kurva permintaan!

Daftar Pustaka

- Hadiyanto, F. (2020). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Tangerang Selatan: Universitas terbuka.
- Karim, A. A. (2018). *Ekonomi Mikro Syariah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Mankiw, N. (2003). *Principles of Economics Edisi Ke-3*. Thompson South Western.
- Mankiw, N. G. (n.d.). *Principles of Economics*. 2003: Thampson South Western .
- Samuelson, P. A. (2006). *Economics*. Edisi k17 McGraw-Hill.
- Sukirno, S. (2021). *Pengantar Teori Ekonomi Mikro Edisi Ketiga*. Depok: RajaGrafindo Persada.

GLOSARIUM

1. Permintaan: Permintaan atau *demand* adalah sejumlah barang atau jasa yang mampu dibeli pembeli atau konsumen untuk memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan tingkat harga dan waktu tertentu.
2. Penawaran: penawaran adalah jumlah total barang atau jasa yang tersedia untuk konsumen. Selain itu, penawaran juga bisa bermaksud barang yang tersedia pada harga tertentu dalam satu periode.
3. *Ceteris Paribus*: suatu asumsi untuk menyederhanakan beragam formulasi dan deskripsi dari berbagai anggapan ekonomi.
4. Keseimbangan Pasar: titik pertemuan antara harga dan jumlah barang yang diminta dengan harga dan jumlah barang yang ditawarkan, sehingga transaksi jual beli bisa terjadi

Ermi Suryani, MA.

INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID

Jl. Kapten Dasuki Bakri, Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Bogor, Jawa Barat 16810

ermi.suryani@inais.ac.id

BAB 3 Elastisitas

Sebuah Bunga Rampai Ilmu Ekonomi dari Literasi Pemikiran
dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Diterbitkan oleh:

INAIS Press

BAB 3 Elastisitas

I. Pendahuluan

Dalam teori ekonomi mikro terdapat empat konsep elastisitas yang umumnya dipakai dipakai para pengkaji ilmu ekonomi. Empat hal ini satu sama lain saling berkaitan dan saling mempengaruhi perubahan-perubahan ekonomi masyarakat Indonesia maupun luar negeri. Adapun empat teori tersebut adalah Elastisitas harga permintaan (E_d), Elastisitas harga penawaran (E_s), Elastisitas silang (E_c) dan Elastisitas pendapatan (E_y). Setiap ada penawaran maka akan bertemu dengan barang yang menunjukkan kuantitas dan kualitas. Barang yang sedikit akan cenderung mempengaruhi naiknya harga. Sama halnya dengan kualitas barang yang sangat bagus akan cenderung mengakibatkan tingginya harga. Banyak hal yang mempengaruhi bergesernya kurva permintaan.

Elastisitas pertama kali dirumuskan oleh Robert Hooke sebagai ilmuwan fisika pada tahun 1675 sebagai anagram Latin, "ceiinossttuv". Ia menerbitkan jawabannya pada tahun 1678: "*Ut tensio, sic vis*" yang berarti sebagai perpanjangan, sehingga kekuatan hubungan linear yang biasa disebut sebagai hukum Hooke. Hukum ini dapat dinyatakan sebagai hubungan antara gaya F dan perpindahan x . Kemudian diadopsi menjadi teori-teori ekonomi dalam hukum permintaan dan penawaran.

II. Elastisitas Dalam Ekonomi Syariah

Secara etimologi elastisitas adalah reaksi konsumen terhadap perubahan. Secara terminologi elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Tingkat elastisitas disini adalah tingkat terpengaruhnya jumlah barang yang diminta maupun yang ditawarkan karena adanya perubahan harga. Jika yang berubah harga barang lain yang mempunyai hubungan komplemen atau substitusi, maka disebut elastisitas silang (cross elasticity) dimana perubahan jumlah barang X yang diminta disebabkan oleh perubahan barang lainnya (Y). Jika yang berubah pendapatan maka disebut elastisitas pendapat (income elasticity) dimana perubahan permintaan akan suatu barang yang diakibatkan oleh adanya perubahan pendapatan (income) riil konsumen. Jika yang berubah iklan dari barang itu, maka disebut elastisitas iklan (advertising elasticity). Jika dengan adanya perubahan harga, jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan relative besar tingkat pengaruhnya maka permintaan dan penawaran ini dikatakan permintaan dan penawaran yang elastis (bersifat sangat sensitif atau responsif, peka). Artinya, apabila adanya perubahan harga yang sedikit (kecil) saja berakibat perubahan yang besar terhadap jumlah barang, maka ini dinamakan sangat elasis. Sebaliknya, jika perubahan harga ini relative besar, tetapi tidak banyak berdampak terhadap perubahan jumlah barang, maka ini dikatakan tidak elastis (tidak respon/tidak peka/inelastis).

Konsep elastisitas merupakan suatu ukuran derajat kepekaan (response) suatu variabel terhadap perubahan variabel lainnya. Semakin tinggi elastisitas, semakin besar derajat kepekaan variabel tersebut. Elastisitas diukur dari persentase (%) perubahan suatu variabel akibat perubahan 1% variabel lainnya. Apa yang akan terjadi pada permintaan atau penawaran suatu barang jika harga barang tersebut turun atau naik sebesar satu persen? Jawabannya sangat tergantung kepada derajat kepekaan masing-masing konsumen dan Produsen dalam merespon perubahan harga tersebut. Derajat kepekaan konsumen dan produsen terhadap perubahan harga berbeda antara satu barang dengan barang yang lainnya. Kaitannya dengan ekonomi adalah sebagai dasar dalam melakukan tindakan

ekonomi karena ekonomi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dengan memperhatikan pengeluaran sebagai bagian dari perhitungan keuntungan. Selanjutnya keuntungan yang diperoleh sebisa mungkin hanya memerlukan pengeluaran sesedikit mungkin. Maka dari itu elastisitas perlu dipahami dalam mengambil keputusan/ menyikapi perilaku ekonomi yang berubah-ubah.

Ekonomi syariah adalah kata "ekonomi" merupakan kata serapan dari bahasa Yunani Kuno *oikouvoc* yang bermakna "pengelolaan rumah tangga. Kata ini merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *oikoc* (rumah) dan *veuw* (pengelolaan dan distribusi). Kata ini tercatat pertama kali digunakan pada karya yang dibuat oleh sebuah gereja pada tahun 1440 untuk menggambarkan sistem pengelolaan atau administrasi. Makna ekonomi yang banyak digunakan saat ini, yaitu ekonomi sebagai sebuah sistem yang digunakan di sebuah negara atau wilayah, baru berkembang pada abad ke-19 atau ke-20. Syariah adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik yang berdasarkan prinsip syariat Islam. Jadi, ekonomi syariah adalah segala perilaku penjual dan konsumen yang terkait dengan pengelolaan rumah tangga dan distribusi yang diatur dalam Islam. Seperti jual beli, simpan pinjam, zakat, Infaq, Sedekah, wakaf, utang piutang, pembiayaan dan konsumsi. Perubahan-perubahan perilaku dalam ekonomi syariah berpedoman kepada Al-Quran dan Hadits yang dijelaskan dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Ekonomi syariah cocok buat muslim dan non muslim karena ia berprinsip keadilan dan tidak bertentangan dengan agama selain Islam. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional belum tentu cocok dengan hukum Islam, prinsip yang terkandung didalamnya banyak yang bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya: hukum pinjam meminjam pada perbankan konvensional, dalam Ekonomi Islam tidak boleh ada penambahan baik zatnya maupun nilainya apabila akadnya pinjaman. Contoh kasus ekonomi syariah dalam kasus muamalah: Zahra meminjamkan uang sejumlah 1.000.000 kepada Alwi selama tiga tahun (2024) dengan tidak ada paksaan, setelah tiga tahun berlalu (2027) maka pengembalian pinjaman yang diberikan oleh Zahra tetap 1.000.000 dibayarkan oleh Alwi meskipun adanya inflasi. Dalam Ekonomi Konvensional dengan akad pinjaman diperbolehkan dalam pengembaliannya lebih dari pokoknya. Misal: Piraun meminjamkan sejumlah uang 1000.000 kepada Qorun dalam jangka tiga tahun (2024) dengan akad suka sama suka, setelah tiga tahun berlalu (2027) pengembaliannya menjadi 1.500.000 dengan alasan adanya kesepakatan dan adanya penurunan nilai uang. Hal berlaku di perbankan konvensional atau lembaga keuangan konvensional. Umat Islam harus lebih melihat prinsip-prinsip yang diatur supaya bisa menjaga agamanya/ketaatan terhadap Allah SWT bisa dipertahankan.

II.1 Elastisitas Harga Permintaan (Ed)

Elastisitas permintaan merupakan derajat kepekaan konsumen terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permintaan konsumen akan membantu mengevaluasi dan kebijakan dalam mengubah harga atau tidak. Elastisitas permintaan dapat membantu menjawab harus mengubah harga, besaran harga, menaikkan atau menurunkan harga. Fluktuasi harga barang/jasa akan mempengaruhi jumlah banyak sedikitnya yang dibutuhkan. Ketika harga naik maka kuantitas barang/jasa menurun. Ketika harga turun maka kuantitas barang/jasa meningkat.¹

¹ Fransiska Sari Astuti, dkk. (2021), *Elastisitas Permintaan Cabai Merah di Kota Surabaya, Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma. Volume.21*

Derajat kepekaan konsumen terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya disebut elastisitas permintaan.

Harga dalam ekonomi syariah adalah penetapan sejumlah uang yang diberikan penjual barang/jasa terhadap pembeli/pengguna jasa setelah adanya persetujuan kedua belah pihak. Islam tidak melarang pembeli menetapkan harga dengan keuntungan yang diinginkannya karena penjual dan pembeli harus sama-sama mendapatkan keuntungan. Keuntungan antara pembeli dan penjual harus berasaskan keadilan untuk mencapai keberkahan dalam melaksanakan muamalah. Apabila keuntungan yang didapatkan pembeli tidak seimbang dengan harga yang diberikan oleh penjual akan memunculkan ketidakiklasan. Ketidakikhlasan antara penjual dan pembeli terhadap harga yang ditetapkan akan menghilangkan keberkahan dalam praktik bermuamalah. Maka dari itu kesesuaian barang dengan penetapan harga harus disesuaikan dengan manfaat dan ketahannannya. Semakin besar bagian dari biaya produksi total yang dibayarkan kepada sesuatu faktor produksi, semakin lebih elastis permintaan faktor produksi tersebut.

Hukum permintaan adalah semakin besar permintaan konsumen maka semakin tinggi harga yang ditetapkan penjual. Dalam rangka melindungi hak pembeli dan penjual, Islam membolehkan dan bahkan mewajibkan adanya penetapan harga dan pemerintah dibolehkan ikut intervensi. Pertama, melindungi penjual dalam hal profit margin sekaligus pembeli dalam hal purchasing power. Kedua, harga yang sangat tinggi yang diberikan penjual sehingga merugikan pembeli yang diakibatkan dari praktik *ikhtikar* atau ghaban faa-hisy. Ketiga melindungi pembeli yang lebih luas (mewakili masyarakat yang lebih luas) dan penjual yang lebih luas (mewakili masyarakat kelompok yang lebih kecil). Suatu intervensi harga dianggap zalim apabila harga maksimum dibawah harga keseimbangan.²

II.2 Elastisitas Harga Penawaran (Es)

Derajat kepekaan produsen terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya disebut elastisitas penawaran. Slope (Kemiringan) Kurva Permintaan dan Penawaran. Slope (kemiringan) suatu kurva ditentukan oleh sudut yang dibentuk oleh kurva tersebut dengan sumbu horizontal. Semakin besar sudut yang terbentuk berarti semakin besar slope dari kurva tersebut. Slope kurva permintaan atau kurva penawaran menunjukkan seberapa besar derajat kepekaan permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga barang. Slope kurva yang semakin besar menunjukkan semakin tidak elastis (inelastis) permintaan atau penawaran. Sebaliknya, slope kurva yang semakin kecil menunjukkan permintaan atau penawaran semakin elastis terhadap perubahan harga barang semakin inelastis permintaan atau penawaran, semakin tidak respon permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga. Artinya perubahan harga tidak banyak mempengaruhi permintaan atau penawaran.

Bentuk-bentuk elastisitas dalam Teori Permintaan dan Penawaran. Price Elasticity of Demand (Elastisitas Harga Permintaan), Income Elasticity of Demand (Elastisitas Pendapatan terhadap permintaan), Cross-Price Elasticity of Demand (Elastisitas Harga Silang dari Permintaan) dan Price Elasticity of Supply (Elastisitas Harga Penawaran). Elastisitas Harga Permintaan Sering disebut Elastisitas Permintaan. Persentase perubahan jumlah yang diminta akibat perubahan harga sebesar satu persen.

$$E_D = \frac{\text{Persentase perubahan jumlah permintaan}}{\text{Persentase perubahan harga}}$$

²Asmuni Mth, *Penetapan Harga dalam Islam Perpektif Fikih dan Ekonomi (2004)*, Universitas Indonesia: Depok.

$$E_D = (\% \Delta Q) / (\% \Delta P)$$

$$E_D = \frac{\Delta Q / Q \times 100\%}{\Delta P / P \times 100\%} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \frac{P}{Q}$$

Tanda dan besaran elastisitas sesuai dengan hukum permintaan, bila harga naik, permintaan turun maka elastisitas permintaan selalu bertanda negatif. Karena selalu bertanda negatif, maka biasanya nilai elastisitas sering tidak menggunakan tanda negatif. Besaran nilai elastisitas sebagai berikut:

$E_D < 1$ = Inelastis

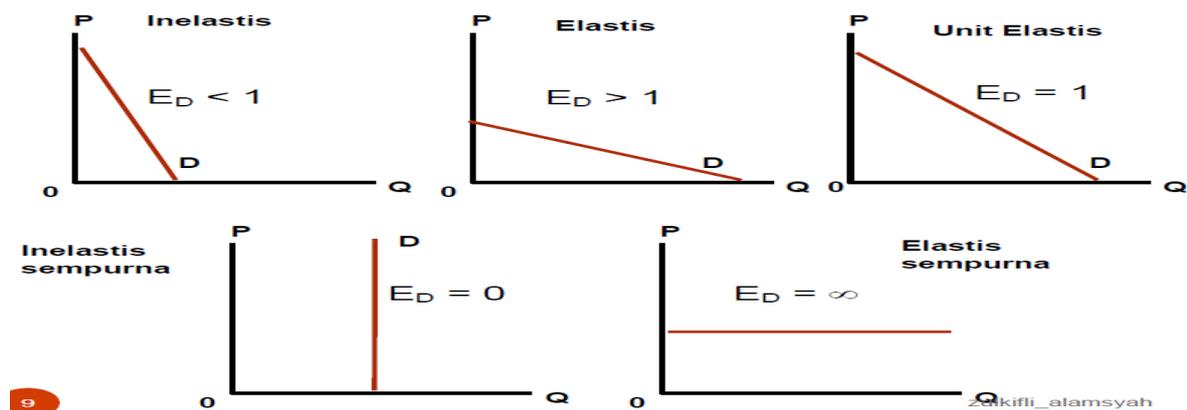
$E_D = 1$ = Unit elastis

$E_D > 1$ = Elastis

$E_D = \infty$ = Elastis sempurna

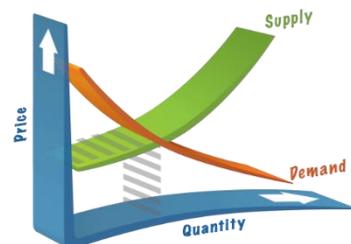
$E_D = 0$ = Inelastis sempurna

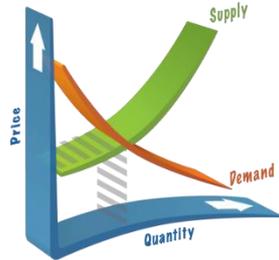
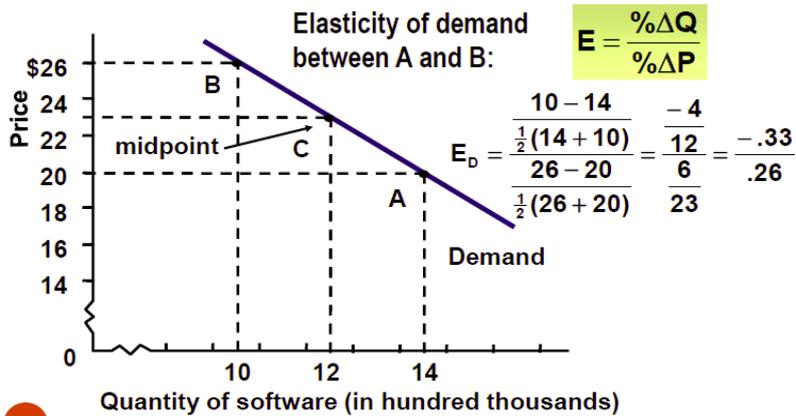
Penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Fungsi penawaran digunakan produsen untuk menganalisa berapa banyak barang yang diproduksi



Elastisitas permintaan pada dua titik (Elastisitas Busur), nilai elastisitas permintaan antara dua titik pada kurva permintaan, dihitung berdasarkan nilai tengah.

$$E = \frac{\% \Delta Q}{\% \Delta P} = \frac{\frac{Q_2 - Q_1}{\frac{1}{2}(Q_1 + Q_2)} \times 100\%}{\frac{P_2 - P_1}{\frac{1}{2}(P_1 + P_2)} \times 100\%}$$





Menghitung elastisitas permintaan antara dua titik

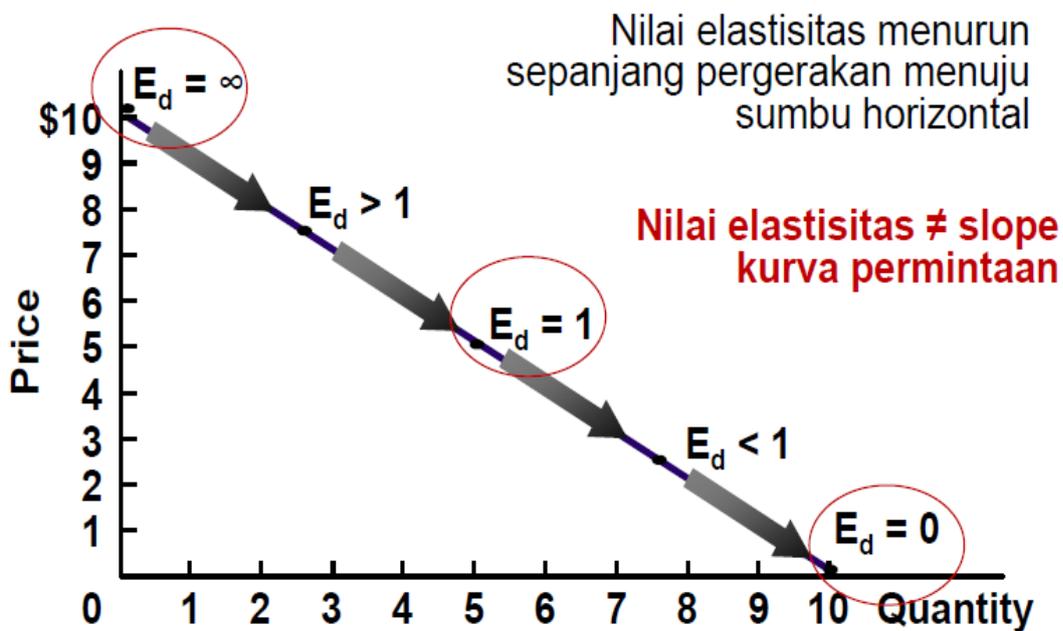
Contoh:

Contoh permintaan konsumen terhadap suatu barang pada saat harga Rp.500 per unit adalah sebanyak 60 unit. Karena terjadi kenaikan biaya angkut barang sehingga menyebabkan harga barang naik menjadi Rp.600 per unit, maka permintaan konsumen turun menjadi 50 unit. Hitunglah elastisitas permintaan harga barang tersebut.

$P_1 = 500$	$Q_1 = 60$	$E = \frac{\% \Delta Q}{\% \Delta P} = \frac{(600-500)/500}{(50-60)/60} = -1,2$
$P_2 = 600$	$Q_2 = 50$	
$\Delta P = +100$	$\Delta Q = -10$	

Karena nilai elastisitas > 1, maka permintaan bersifat elastis

Contoh Nilai Elastisitas Sepanjang Kurva Permintaan Sebagai berikut:



Faktor-faktor yang menentukan nilai elastisitas, permintaan cenderung elastis jika: Barang tergolong barang mewah (luxury goods), Semakin panjang periode waktu, Mempunyai kemampuan substitusi yang lebih tinggi terhadap barang lain, Ketersediaan barang yang terbatas di pasar.

Elastisitas permintaan jangka pendek dan jangka panjang. Secara umum, demand mempunyai elastisitas harga yang lebih elastis dalam jangka panjang. Konsumen memerlukan waktu untuk menyesuaikan kebiasaan konsumsinya. Substitusi umumnya tersedia dalam jangka panjang.

Elastisitas permintaan pada satu titik (Elastisitas Titik), elastisitas permintaan pada satu titik pada kurva permintaan tergantung pada slope serta nilai P dan Q pada titik tersebut.

Jika Fungsi Permintaan adalah $Q_d = a - bP$

Menurut Definisi: $E_d = \frac{\Delta Q_d}{\Delta P} \frac{P}{Q_d}$

Dari fungsi permintaan diatas, $\frac{\Delta Q_d}{\Delta P} = \text{slope} = -b$

maka: $E_D = (-b) (P/Q_d)$

Contoh: permintaan konsumen terhadap suatu barang ditunjukkan oleh fungsi permintaan sebagai berikut:

$$Q_d = 120 - 0,5P$$

Jika harga barang pada saat ini adalah Rp.100 per unit, Hitunglah berapakah elastisitas harga permintaan barang tersebut?

Jawab:

$$P = 100 \quad Q = 70 \quad \frac{\Delta Q_d}{\Delta P} = -0,5$$

$$E_d = -0,5 (100/70) = -0,71 \rightarrow \text{inelastis.}$$

Elastisitas pendapatan dari permintaan (Income Elasticity of Demand), persentase perubahan dari jumlah barang yang diminta akibat perubahan satu persen pendapatan konsumen.

$$E_I = \frac{\text{Persentase perubahan jumlah permintaan}}{\text{Persentase perubahan pendapatan}}$$

$$E_I = \frac{\frac{\Delta Q}{Q} \times 100\%}{\frac{\Delta I}{I} \times 100\%} = \frac{\Delta Q}{\Delta I} \frac{I}{Q}$$

Contoh: permintaan konsumen terhadap suatu barang ditunjukkan oleh fungsi permintaan sebagai berikut:

$$Q_d = 375 - 0,5P + 0,00125I$$

Jika harga barang saat ini yaitu 200 dan pendapatan konsumen adalah Rp.2,5 juta per bulan. Dengan asumsi bahwa harga barang tidak berubah, berapakah elastisitas pendapatan dari permintaan terhadap barang tersebut?

Jawab:

$$E_I = \frac{\Delta Q}{\Delta I} \frac{I}{Q}$$

I = 2,5 juta

$Q_d = 3400$

$\Delta Q/\Delta I = -0,00125$

$E_I = -0,00125 (2500000/3400) = 0,92 \rightarrow$ inelastis.

III. Elastisitas silang

Elastisitas Harga Silang Dari Permintaan (Cross-Price Elasticity of Demand). Mengukur % perubahan jumlah barang yang diminta (Q_b) yang diakibatkan dari perubahan satu % harga barang lainnya (P_m)

$$E_s = \frac{\Delta Q_b / Q_b}{\Delta P_m / P_m} = \frac{P_m}{Q_b} \frac{\Delta Q_b}{\Delta P_m}$$

- ◆ $E_s > 0$: Kedua barang bersifat **substitusi**
Contoh: **tahu** dan **tempe** atau **kopi** dan **teh**
- ◆ $E_s < 0$: Kedua barang bersifat **komplementer**
Contoh: **Kaos kaki** dan **Sepatu**
atau **kopi** dan **gula**

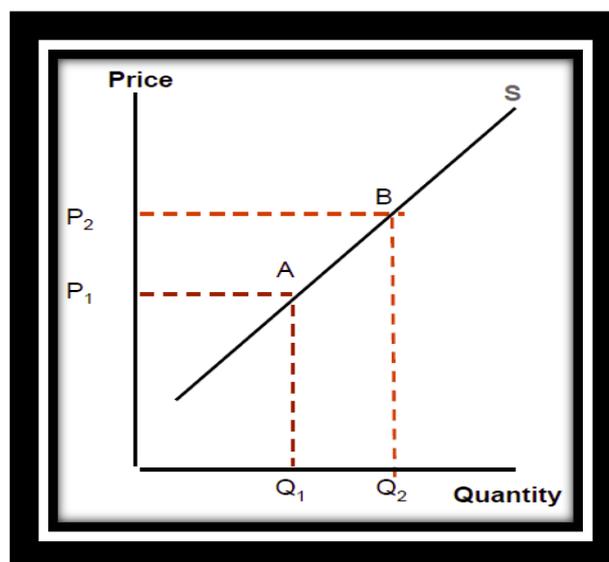
zulkifli_alamsyah

Elastisitas Harga Penawaran (Price Elasticity of Supply)

Persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat perubahan satu persen harganya.

$$E_s = (\% \Delta Q) / (\% \Delta P)$$

- $E_s = \infty$ Perfectly Elastic,
- $E_s > 1$ Elastic,
- $E_s = 1$ Unit Elastic,
- $E_s < 1$ Inelastic,
- $E_s = 0$ Perfectly Inelastic,



Faktor-faktor yang menentukan nilai elastisitas penawaran fleksibilitas atau kemampuan perusahaan untuk merubah jumlah barang yang diproduksi. Hasil produksi pertanian vs barang manufaktur. Jangka waktu lebih elastis dalam jangka panjang.

IV. Elastisitas pendapatan (Ey)

Elastisitas berasal dari kata elastis, artinya benda yang lentur. Ketika benda elastis ditarik ataupun ditekan sehingga bentuk dan ukurannya berubah, benda tersebut dapat kembali ke bentuk dan ukuran aslinya setelah tidak ditarik maupun ditekan. Contohnya harga daging ayam potong di hari raya Idul Fitri dan hari raya besar lainnya disebut elastis. Karena pendapatan konsumen naik dan jumlah barang yang diminta naik. Ini menunjukkan bahwa barang tersebut adalah barang normal dengan permintaan yang elastis terhadap pendapatan.

Elastisitas pendapatan adalah tingkat perubahan respon yang merujuk pada permintaan suatu barang (X) akibat perubahan pendapatan konsumen; baik menjadi lebih tinggi atau lebih rendah. Elastisitas pendapatan akan memiliki peran besar di dunia bisnis karena menjadi salah satu faktor pertimbangan bagi pebisnis untuk mengelola permintaan dan penjualan produk untuk konsumen yang nantinya bisa menghasilkan strategi yang tepat sasaran bagi bisnisnya tersebut. Terdapat 2 kategori barang yang dibagi berdasarkan tingkat permintaan konsumen yaitu barang elastis dan barang tidak elastis. Barang elastis merujuk pada barang-barang yang dapat digantikan saat konsumen tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk membelinya.

Jenis barang berdasarkan nilai elastisitas pendapatan:

$E_I > 0$: Barang Normal

$E_I < 0$: Barang Inferior

$E_I = 0$: Barang Netral pendapatan (Income-neutral Goods)

Barang kebutuhan pokok "necessities" cenderung mempunyai income inelastic... Contoh: makanan, minuman, pakaian. Barang mewah "luxuries" cenderung mempunyai income elastic. Contoh: mobil, barang smart electronics.

Contoh: kriteria elastisitas permintaan terhadap pendapatan

Nilai Elastisitas	Istilah Elastisitas
$\epsilon_p +$	Barang Normal
$\epsilon_p > 1$	Barang Elastis
$0 < \epsilon_p < 1$	Barang Inelastis
$\epsilon_p -$	Inferior

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil elastisitas pendapatan yaitu:

1. *Harga Jual Produk Itu Sendiri*

Harga jual barang sangat mempengaruhi elastisitas pendapatan. Apalagi barang tersebut merupakan kebutuhan pokok yang sulit untuk dicari penggantinya. Di Indonesia contohnya: bensin, beras, gas/elpigi.

2. *Harga Produk Pelengkap/ Komplementer*

Barang pelengkap merupakan barang-barang yang harus digunakan bersamaan dengan barang yang harus dilengkapinya. Jika tidak, barang ini tidak dapat digunakan secara maksimal dan mempengaruhi harga penjualannya. Contohnya: cabe merah, daging ayam, dan telur ayam.

3. Harga Produk Pengganti/ Substitusi

Barang pengganti yang sangat cocok untuk menggantikan barang utama bisa mempengaruhi harga jual masing-masing barang tersebut. Misalnya saja, masyarakat bisa mengganti beras dengan kentang yang sama-sama berfungsi sebagai sumber karbohidrat yang mengenyangkan.

4. Selera/ Minat Konsumen

Minat dan selera konsumen terhadap suatu kelompok barang sangat mempengaruhi elastisitas pendapatan. Jika preferensi masyarakat adalah barang yang berkualitas baik dan mahal, bisa jadi barang mewah memiliki peningkatan permintaan yang lebih tinggi daripada barang inferior. Menurut Kotler dan Keller minat beli konsumen adalah sebuah perilaku konsumen dimana konsumen mempunyai keinginan dalam membeli atau memilih suatu produk, berdasarkan pengalaman dalam memilih, menggunakan dan mengkonsumsi atau bahkan menginginkan suatu produk. Mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barangnya dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik maka perlu kebijakan penawaran terhadap konsumen.³

Penerapan elastisitas Pendapatan, dengan menghitung elastisitas pendapatan, pebisnis dapat mengetahui dengan pasti kapan harus menaikkan produksi barang mewah atau memperlambat produksi barang inferior. Ketika keadaan ekonomi negara sedang dalam keadaan yang sangat baik, bisnis barang mewah dan mahal bisa menarik minat konsumen yang pendapatannya sedang sejahtera juga. Saat itu pula, perusahaan akan menghindari untuk memproduksi barang-barang inferior karena pasti permintaannya akan jatuh. Demikian pula sebaliknya. Wah, ternyata elastisitas pendapatan ini sangat penting sekali untuk memutuskan strategi penjualan pebisnis.

V. Rangkuman

1. Teori dalam ekonomi syariah ada empat
 - Elastisitas harga permintaan (E_d)
 - Elastisitas harga penawaran (E_s)
 - Elastisitas silang (E_c)
 - Elastisitas pendapatan (E_y)
2. Bentuk-bentuk elastisitas dalam teori permintaan dan penawaran ada empat:
 - Price Elasticity of Demand (Elastisitas Harga Permintaan)
 - Income Elasticity of Demand (Elastisitas Pendapatan terhadap permintaan)
 - Cross-Price Elasticity of Demand (Elastisitas Harga Silang dari Permintaan) dan
 - Price Elasticity of Supply (Elastisitas Harga Penawaran).
3. Dasar dalam melakukan tindakan ekonomi ada dua
 - Ekonomi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dengan memperhatikan pengeluaran sebagai bagian dari perhitungan keuntungan.
 - Kedua, keuntungan yang diperoleh sebisa mungkin hanya memerlukan pengeluaran sesedikit mungkin.
4. Laba adalah selisih lebih dari hasil penjualan dari harga pokok dan biaya operasional.

³Sadono Sukirno, *Makroekonomi* (2019), Depok: Rajawali Pres.

5. Omset adalah jumlah modal dan keuntungan yang diperoleh oleh sipenjual sebelum adanya pengurangan operasional.

VI. Kesimpulan

Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang ia berikan kepada benda itu dihilangkan atau dibebaskan. Nilai slope (atau kemiringan) sebuah kurva bisa dikatakan sebagai ukuran tanggapan dari perubahan pada variabel-variabel di kedua sumber X dan Y. Meskipun demikian nilai slope bukanlah yang terbaik dalam ukuran formalnya. Kebijakan penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barangnya dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik. Elastisitas permintaan berbagai jenis faktor produksi berbeda (sangat besar dan sangat sedikit). Semakin elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan semakin elastisitas pula permintaan terhadap faktor produksi. Semakin besar bagian dari biaya produksi total yang dibayarkan kepada sesuatu faktor produksi, semakin lebih elastis permintaan faktor produksi tersebut.

VII. Daftar Pustaka

Ab Talib, M. S., Pang, L. L., & Ngah, A. H. (2020). The Role of Government in promoting Halal logistics: a systematic literature review

Gerry Phillip Rompas, dkk (2013) *Pengaruh Pemanfaatan Abu Ampas Tebu Sebagai Substitusi Parsial Semen dalam Campuran Beton Ditinjau Terhadap Kuat Tarik Lentur dan Modulus Elastisitas*, Manado: Universitas Sam Ratulangi

Daru Wahyuni, dkk (2016) *Analisis Elastisitas tiga Bahan Pangan Sumber Protein Hewani di Indonesia*, Jogjakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Heriswanto, dkk (2022), *Analisis Elastisitas Permintaan Produk Tempe Di Kelurahan Sendang Mulyasari Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe*, Balik Papan : Universitas Balik Papan.

Fransiska Sari Astuti, dkk. (2021), *Elastisitas Permintaan Cabai Merah di Kota Surabaya*, Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma. Volume.21

Asmuni Mth, *Penetapan Harga dalam Islam Perpektif Fikih dan Ekonomi (2004)*, Universitas Indonesia: Depok.

Sadono Sukirno, *Makroekonomi (2019)*, Depok: Rajawali Pres.

VIII. Glosarium

Elastis : benda yang lentur.

Penawaran : ketersediaan banyaknya barang

Miftakhul Anwar, MA.

INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID

Jl. Kapten Dasuki Bakri, Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Bogor, Jawa Barat 16810

anwar_unq17@yahoo.com

BAB 4 PRODUKSI

Sebuah Bunga Rampai Ilmu Ekonomi dari Literasi Pemikiran
dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Diterbitkan oleh:

INAIS Press

BAB 4 PRODUKSI

A. Definisi Produksi

Produksi merupakan salah satu bagian penting dalam ekonomi, barang-barang yang dibutuhkan masyarakat sebagian besar melalui proses produksi. Pakaian yang kita pakai sudah melalui proses produksi dari bahan kapas, motor dan mobil yang kita naiki ada pabrik yang memproduksinya, komponen komponennya seperti besi, logam, cat dan lain-lain ada yang memproduksi.

Dengan gambaran diatas kita akan lebih mudah memahami definisi produksi, menurut prof. Dr. Thamrin Abdullah definisi Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Produksi adalah sebuah kegiatan untuk menghasilkan atau menambah nilai suatu barang atau jasa sehingga memiliki kemampuan lebih untuk dapat digunakan.⁴ Produksi juga didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengubah input menjadi output. Dalam konteks ini, produksi mencakup semua aktivitas yang bertujuan untuk menciptakan atau meningkatkan nilai suatu barang atau jasa.⁵

Ada dua bentuk produksi yang disepakati dari dua definisi diatas, Jika pertambahan nilai guna dilakukan tanpa merubah bentuk produk, maka disebut sebagai produksi jasa seperti jasa konseling, jasa les pelajaran, jasa konsultan keuangan, dan sebagainya. Sementara pertambahan nilai guna yang diikuti dengan perubahan bentuk produk disebut produksi barang. Contoh produksi barang adalah seperti membangun rumah, membuat sepatu, memasak nasi, membuat kue, roti, membuat sepeda motor, mobil dan lain-lain.

Produksi barang terbagi menjadi dua, yaitu produksi menambah daya guna dan produksi menciptakan daya guna.⁶

1. Menambah Daya Guna

maksudnya adalah produksi tidak hanya berfokus bagaimana menciptakan sebuah produk atau jasa, namun memiliki pengertian lain yaitu bagaimana menambah daya guna sebuah produk atau jasa, artinya produk yang telah usang dapat direproduksi menjadi sesuatu yang lebih berguna, atau produk yang telah rusak dapat diperbaiki menjadi produk utuh kembali sehingga kembali dapat difungsikan atau digunakan seperti sedia kala.

Pengertian lain adalah produk di modifikasi atau dirubah sesuai kebutuhan dan peruntukan sehingga dapat lebih berfungsi dan memiliki manfaat lebih bagi pengguna tertentu dalam menjalankan aktifitasnya. Misal sepeda motor rodanya dua, dimodifikasi menjadi roda tiga sehingga motor yang telah dimodifikasi tersebut dapat dipergunakan untuk beraktifitas bagi pengguna yang memiliki keterbatasan atau cacat fisik. Sehingga motor tadi daya gunanya bertambah. Mobil angkutan untuk penumpang dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga saat digunakan maka penumpang yang menggunakan kursi roda bisa masuk ke dalam mobil, jelas ini berguna bagi anggota keluarga yang memiliki cacat fisik atau bagi penumpang manula.

⁴. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PKOP4424-M1.pdf>

⁵. <https://jurnal.stikes-ibnusina.ac.id/index.php/JUREKSI/article/view/179>

⁶. I putu artaya, dasar dasar manajemen oprsi dan produksi, Narotama university press, 2018



Gambar 1.8 Disain kendaraan roda empat untuk penyandang cacat
Sumber: <https://aplikasiergonomi.wordpress.com/>



Gambar 1.9 Disain sepeda motor untuk penyandang cacat
Sumber: <https://aplikasiergonomi.wordpress.com/>

2. Menciptakan Daya Guna

merupakan kegiatan untuk memproses sesuatu bahan baku secara bersama-sama dengan bahan baku lainnya untuk kemudian diolah sedemikian rupa menjadi sebuah produk tertentu yang memiliki manfaat dan daya guna. Pemahaman

disini adalah menghasilkan atau menciptakan benda atau barang yang awalnya tidak ada menjadi ada menggunakan kombinasi berbagai macam faktor produksi. Proses

penciptaan barang atau produk berawal dari munculnya kebutuhan yang ada di masyarakat konsumen. Sehingga melalui kegiatan produksi, berbagai macam bahan baku yang memiliki potensi

daya guna digabung sedemikian rupa melalui keahlian dan teknologi tertentu hingga terciptalah sebuah produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tertentu di mata konsumen. Misal sepotong kayu, karton/kertas dan kaca yang awalnya tidak memiliki daya guna sama sekali, kemudian dirangkai, digabung dan diproses dengan teknik dan cara tertentu, maka terciptalah sebuah pigura yang cantik dan memiliki daya seni, yang selanjutnya dapat digunakan untuk memajang sebuah foto di dinding. Kain dan kapuk yang awalnya tidak bermanfaat dan tidak memiliki daya guna, kemudian digabung melalui kreasi tertentu sehingga terciptalah sebuah bantal yang cantik. Dahulu kala jika seorang nasabah ingin menyetor dan mengambil uang di bank, harus bersedia datang dan antri berlama-lama di bank dengan nasabah lainnya dan sangat menyita waktu. Namun sekarang dengan hadirnya mesin dan kartu ATM, maka semuanya menjadi mudah dan praktis serta tidak lagi menyita banyak waktu hanya untuk sekedar menyetor, mengambil uang tunai atau urusan transaksi keuangan lainnya.



Gambar 1.10 Mesin ATM merupakan output dari *menciptakan daya guna*
Sumber: www.hukumonline.com/.../struk-atm-sebagai-bukti-transfer-dana

Dengan pendekatan manajemen produksi, produk atau jasa tidak mustahil untuk dibuat, semua berawal dari sebuah kebutuhan, lalu di sinergikan dengan kemajuan teknologi, maka proses inovasi akan lahir begitu saja menuju pada sebuah proses penciptaan produk. Kekuatan imajinasi seseorang (ahli) dapat mendorong dan memotivasi mengembangkan sebuah pemikiran guna mewujudkan produk yang ingin dibuat tersebut. Melalui proses pengujian dan percobaan berulang-ulang dan dukungan teknologi yang terbaru maka inovasi produk dapat dilakukan.

Dengan demikian, produksi mempunyai dua nilai pokok. Yang pertama untuk menciptakan nilai guna barang atau jasa. Kedua, menambah nilai guna barang atau jasa. Pada umumnya, produksi dari sudut pandang perusahaan bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Oleh karena itu, sebelum produksi dilakukan, perlu dilakukan persiapan dan manajemen yang cermat.

Produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran dapat tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. Orang atau perusahaan yang menjalankan suatu proses produksi disebut Produsen. Ada macam macam produsen, yaitu :

- Perusahaan perseroan, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh individu dan memiliki kebebasan tidak terbatas yang dimiliki pemilik namun modalnya kecil dan sulit untuk mendapat pinjaman. Contohnya : toko kelontong, restaurant, dan lain-lain.
- Perusahaan perkongsian (FIRMA), yaitu perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang memiliki modal lebih besar dari perseroan dan tanggung jawab bersama dalam menjalankan usahanya.
- Perseroan terbatas (PT), yaitu perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang pemegang saham, PT ini dapat mengumpulkan modal sesuai dengan yang diinginkan dengan cara menggunakan surat-surat berharga seperti saham.
- Perusahaan milik negara (BUMN), yaitu perusahaan yang sistemnya sama dengan PT namun pekerjaannya diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dan biasanya menyediakan jasa-jasa kebutuhan pokok masyarakat. Contoh : PLN, Telkom, PT.KAI, dll.
- Perusahaan koperasi, yaitu perusahaan yang tidak mencari keuntungan tetapi untuk melindungi anggotanya, koperasi dibagi menjadi 3, yaitu: koperasi konsumsi, koperasi produksi, dan koperasi kredit.

B. Fungsi Produksi

Kegiatan produksi memiliki fungsi yang sangat penting dalam ekonomi. Berikut ini merupakan fungsi-fungsi produksi⁷ :

1. Perencanaan

Perencanaan pada produksi dapat diartikan sebagai melaksanakan kegiatan produksi barang atau jasa pada waktu tertentu yang disesuaikan dengan *forecast* yang telah disusun. *forecast* dapat disusun dengan sistem yang terorganisir mulai dari sumber daya manusia, bahan baku, ketersediaan gudang yang memadai, alat, dan lain-lain.

Perencanaan produksi berpengaruh terhadap keuntungan yang akan dicapai oleh sebuah perusahaan. Karena perencanaan yang baik dapat memperkirakan produksi yang kualitas dan kuantitasnya tepat dan menjamin ketersediaan *stock*, Tidak kurang dan juga tidak terlalu banyak. *Stock* yang kurang atau minim bisa memberikan dampak beralihnya konsumen ke produk lain yang sejenis. Sementara kelebihan *stock* berisiko kadaluarsa sementara barang belum terjual habis.

Bisa disimpulkan, perencanaan produksi dilakukan agar perusahaan dapat bekerja secara efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan kuantitasnya tercukupi sehingga bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Karena *forecast* tersebut disesuaikan dengan permintaan pasar, maka diharapkan perencanaan dapat menjadikan kinerja perusahaan lebih baik.

Perencanaan produksi perlu mempengaruhi beberapa faktor di bawah ini, yaitu:

- a. Kualitas produk
- b. Biaya produk
- c. Waktu pengembangan produk
- d. Biaya pengembangan produk
- e. Kapabilitas pengembangan

⁷. Daryanto, . Sari Kuliah Manajemen Produksi. Bandung : Yrama Widya, 2012.

2. Pengolahan

Pengolahan dalam kegiatan produksi merupakan sebuah fase di mana bahan baku diolah menjadi barang mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi.

3. Pengendalian dan Perawatan

Pengendalian dan perawatan di sini berfungsi untuk mengevaluasi dan mengawasi jalannya produksi agar sesuai dengan perencanaan. Di dalam perusahaan, penting sekali untuk melakukan pembagian tugas antara perencana, pelaksana, dan pengawas agar produk yang dihasilkan sesuai dengan standar perusahaan.

4. Jasa penunjang

Fungsi ini untuk meningkatkan cara kerja produksi. Terkadang proses produksi begitu lamban, gemuk, dan ribet. Tidak jarang ada metode yang lebih efektif dan efisien dan jasa penunjang berfungsi untuk itu.

C. Tujuan Produksi

Pentingnya kegiatan produksi bukan tanpa tujuan. Produksi memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan konsumen

Masyarakat memiliki beragam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan yang tidak terpenuhi, Mulai dari kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier, dapat menjadikan kehidupan manusia tidak seimbang.

Pakaian, makanan dan minuman, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, informasi, komunikasi, gaya hidup, dan lain sebagainya merupakan contoh konkret dari kebutuhan manusia. Oleh karena itu, produsen memproduksi produk-produk yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut dengan cara menciptakan nilai guna atau menambahkan nilai guna.

2. Memperoleh keuntungan

Bagi produsen, produksi bertujuan agar perusahaan mendapatkan keuntungan. Dengan menciptakan atau memberikan nilai guna pada sebuah produk, produsen dapat mengambil selisih dari harga jual dan biaya produksi.

Produk yang dikonsumsi oleh masyarakat dibeli dan produsen mendapatkan pemasukan. Semakin baik perencanaan produksinya, semakin besar keuntungan yang didapatkan.

3. Menghasilkan barang setengah jadi

Barang setengah jadi yang diproduksi perlu diolah lebih lanjut sampai dapat dikonsumsi langsung oleh masyarakat.

4. Menjadi stimulan tumbuhnya usaha produksi lain

Adanya produksi suatu produk dapat memicu muncul usaha produk lain yang berkaitan. Misalnya institusi pendidikan tinggi sebagai produsen jasa pendidikan. Di area dekat kampus tersebut akan muncul usaha kos-kosan, usaha warung makan dan jajanan, pelayanan kesehatan, minimarket, pasar tradisional, angkutan, jasa terjemah, dan sebagainya.

5. Mengurangi angka pengangguran

Proses produksi perusahaan mulai dari skala kecil dan menengah tidak mungkin dilakukan seorang diri oleh *owner*-nya. Bagaimanapun ingin menekan biaya produksi memerlukan bantuan orang lain. Oleh karena itu, dibutuhkan karyawan dengan cara melakukan perekrutan. Dari rekrutmen ini menambah angka pekerja di Indonesia dan mengurangi angka pengangguran. Semakin besar perusahaan, semakin besar menyerap tenaga kerja.

6. Meningkatkan penghasilan masyarakat dan negara

Berkurangnya pengangguran tentu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang sejahtera, semakin banyak masyarakat membelanjakan keuangannya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman, berwisata, dan membayar pajak. Dengan demikian, semakin lancar pergerakan ekonomi negara dan pendapatan negara pun naik.

7. Menjadikan produksi Indonesia dikenal di dunia internasional

Kegiatan produksi seringkali tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan lokal atau domestik. Tidak jarang pasar luar negeri juga membutuhkan produk-produk yang dihasilkan oleh produsen Indonesia. Sebut saja sambal pecel, kerupuk, arang batok kelapa, sabut kelapa, *furniture*, rempah-rempah, dan lain-lain.

D. Rumus fungsi produksi

Rumus fungsi produksi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah maksimum hasil (output) yang dihasilkan dengan kombinasi masukan (input) tertentu. Rumus Fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan diantara input dan output yang dihasilkan⁸.

Rumus fungsi produksi :

$$Q = f (K,L,R,T)$$

Dimana :

Q = Jumlah hasil (output) yang dihasilkan

K = Jumlah Modal atau Kapital

L = Jumlah Tenaga Kerja

R = Sumber Daya

T = Teknologi yang digunakan

Fungsi produksi menunjukkan berapa banyak jumlah maksimum output yang dapat diproduksi apabila sejumlah input tertentu dipergunakan di dalam proses produksi.

Berikut hubungan antara input dan output :

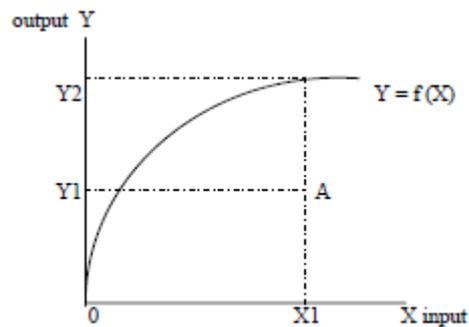
$$Y_{\max} = f (\text{input})$$

$$Y_{\max} = f (x_1, x_2, x_3 \dots x_n)$$

⁸. <http://eprints.umsida.ac.id/7013/>

Dimana :

Xn adalah sejumlah *input* yang digunakan dalam setiap *output*.



Padaxgambarxmenunjukkan bahwaxdenganxpenggunaan input sebesar, output maksimalxyang dapat dihasilkxadalah, yaitu tepatxpada fungsi produksi $Y = f(X)$. Sedangkanyproduksi dititikxA adalahxlayak dilaksanakxnamun belum optimalxsehingga produsenxyang rasionalxtidak akan memilihxberproduksi dititik A.

Fungsi produksixmenunjukkan jumlahxmaximum outputxyang dihasilk darixpemakaian sejumlahxinput denganxmenggunakanxteknologixtertentu.

Secarasistematis, dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Q = f(K, L, X, E)$$

Dimana :

- Q = Output
- K = Jumlah Modal atau Kapital
- L = Tenaga Kerja
- X = Bahan Baku
- E = Keahlian Kewirausahaan

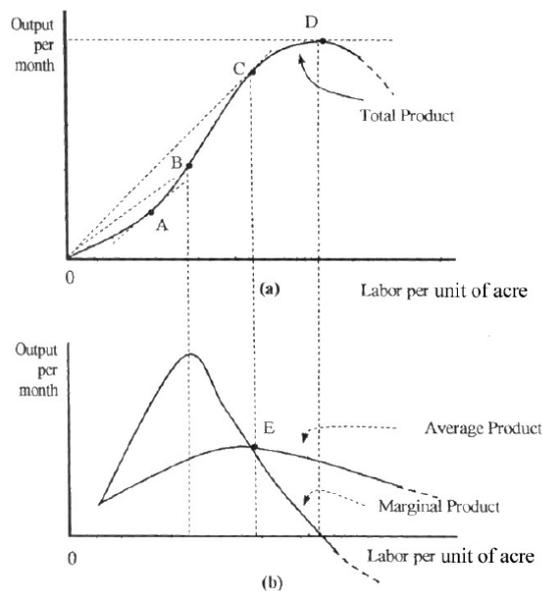
Hubungan input – output untuk setiap sistem produksi merupakan suatu fungsi dari tingkat teknologi dari pabrik, peralatan, tenaga kerja, bahan-bahan, dan lain-lain yang digunakan perusahaan tersebut. Suatu proses produksi dimana kombinasi 2 input (X dan Y) digunakan untuk memproduksi produk Q.

Secara sistematis fungsi tersebut dapat ditulis sebagai berikut :

$$Q = f(X, Y)$$

Fungsi produksi merupakan landasan teknis dari proses produksi yang menggambarkan hubungan antara faktor produksi dengan kuantitas produksi. Dalam teori ekonomi digunakan asumsi dasar mengenai sifat fungsi produksi dimana semua produsen tunduk pada hukum *The Law of Diminishing Return* (Hukum yang menyatakan bahwa semakin banyak variabel yang ditambahkan pada sejumlah sumber daya tetap, perubahan output yang diakibatkan akan mengalami penurunan dan bisa menjadi negatif).

Berikut grafik penambahan faktor-faktor produksi :



Hubungan antara ketiga kurva tersebut adalah pada saat semua masukan kecuali tenaga kerja adalah tetap, kurva *Total Product*, dalam grafik (a) memperlihatkan *output* produksi untuk tingkat masukan tenaga kerja yang berbeda. Pada *average* dan *marginal product* dalam grafik (b) seperti kurva *Total Product*. Dititik B pada grafik (a) *average product* dari masukan tenaga kerja memberikan garis yang naik dan cembung ke atas.

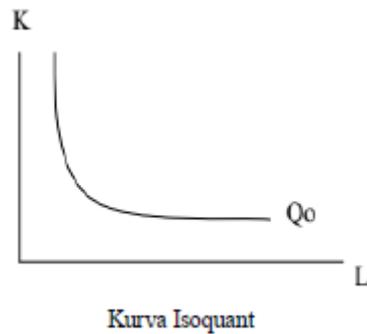
Dari kurva *Total Product* dapat dibagi menjadi tiga tahap daerah produksi, yaitu I, II, dan III. Sebagai seorang produsen yang rasional akan berproduksi pada tahap II dikarenakan pada daerah tersebut tambahan satu unit faktor produksi akan memberikan tambahan *Total Product*, walaupun *Average Product* dan *Marginal Product* menurun tetapi masih positif.

Dalam menggambarkan fungsi produksi dalam dua dimensi, dapat menggunakan kurva isoquant. Fungsi produksi menggambarkan kombinasi penggunaan input dan teknologi yang dipakai oleh suatu perusahaan. Suatu fungsi produksi menggambarkan kombinasi input yang dipakai dalam proses produksi, yang menghasilkan output tertentu dalam jumlah yang sama dapat digambarkan dengan kurva isoquant.

Kurva isoquant hanya menjelaskan keinginan suatu perusahaan berdasarkan fungsi produksi yang ditentukan dan tidak menjelaskan apa yang dapat diperbuat oleh perusahaan. Ada dua input yang sering digunakan dalam proses produksi menjadi variabel yaitu isoquant dan isocost.

Isoquant adalah kurva yang menunjukkan kombinasi input yang dipakai dalam proses produksi yang menghasilkan output tertentu dalam jumlah yang sama.

Berbagai kombinasi input yang menghasilkan tingkat output yang sama digambarkan dalam kurva isoquant. Kurva isoquant adalah kurva yang menunjukkan kombinasi input K (Jumlah Modal) dan L (Jumlah Tenaga Kerja).



Jika bentuk kurva isoquant cembung terhadap titik pusat (d), maka MRTS menurun dengan adanya banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan ($dk > dl$). Sedangkan jika bentuk kurva cekung, maka MRTS naik dengan adanya tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit ($dk < dl$). MRTS (*Marginal of Technical Substitution*) sendiri adalah berkurangnya satu input per unit akibat kenaikan input yang lain.

Fungsi produksi jika ditulis dalam sistem Matematika :

$$Q = f (x_1, x_2, x_3 \dots x_n)$$

Dimana :

Q = Tingkat produksi yang dihasilkan (output)

X = Input yang digunakan

Pentingnya fungsi produksi dalam teori produksi :

1. Dapat mengetahui hubungan antara faktor produksi (*input*) dan hasil produksi (*output*) secara langsung dan hubungan tersebut dapat dengan mudah dimengerti.
2. Dapat mengetahui hubungan antara variabel yang menjelaskan (X) sekaligus hubungan antar variabel penjelas.

E. Kesimpulan

Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Produksi adalah sebuah kegiatan untuk menghasilkan atau menambah nilai suatu barang atau jasa sehingga memiliki kemampuan lebih untuk dapat digunakan.

kegiatan produksi memiliki fungsi yang sangat penting dalam ekonomi. Berikut ini merupakan fungsi-fungsi produksi :

1. Perencanaan
2. Pengolahan
3. Pengendalian dan Perawatan
4. Jasa penunjang

Produksi memiliki tujuan sebagai berikut:

Memenuhi kebutuhan konsumen.

1. Memperoleh keuntungan.
2. Menghasilkan barang setengah jadi.
3. Menjadi stimulan tumbuhnya usaha produksi lain.
4. Mengurangi angka pengangguran.
5. Meningkatkan penghasilan masyarakat dan negara.
6. Menjadikan produksi Indonesia dikenal di dunia internasional.

Daftar Pustaka

Daryanto, Sari Kuliah Manajemen Produksi. Bandung : Yrama Widya. 2012.

<https://aplikasiergonomi.wordpress.com/>

<http://eprints.umsida.ac.id/7013/>

<https://jurnal.stikes-ibnusina.ac.id/index.php/JUREKSI/article/view/179>

<https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PKOP4424-M1.pdf>

I putu artaya, dasar dasar manajemen oprsi dan produksi, Narotama university press, 2018

www.hukumonline.com/.../struk-atm-sebagai-bukti-transfer-dana

Muhammad Kharis Mubarko, M.I.E.

INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID

Jl. Kapten Dasuki Bakri, Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Bogor, Jawa Barat 16810

aisosek.ief@gmail.com

BAB 5 BIAYA PRODUKSI

Sebuah Bunga Rampai Ilmu Ekonomi dari Literasi Pemikiran
dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Diterbitkan oleh:

INAIS Press

BAB 5 BIAYA PRODUKSI

1.1 Definisi Biaya Produksi

Biaya produksi adalah elemen kunci dalam ilmu ekonomi yang berkenaan dengan pengelolaan operasional rumah tangga individu ataupun di sebuah perusahaan. Memahami dan mengelola biaya produksi dengan efektif adalah langkah penting dalam mencapai keberhasilan bisnis jangka panjang. Dengan pemahaman yang baik tentang definisi, komponen, dan signifikansi biaya produksi, individu perusahaan dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan laba, dan mencapai keunggulan kompetitif di pasar.

Disamping itu, memahami biaya produksi juga menjadi kunci bagi pengusaha dan manajer untuk mengambil keputusan yang tepat dalam merencanakan, mengendalikan, dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Makalah ini akan menjelaskan secara mendalam tentang definisi biaya produksi, komponen-komponen biaya produksi, serta signifikansinya dalam konteks bisnis modern.

Menurut para ahli bahwa definisi biaya produksi adalah sebagai berikut :

- a. Mulyadi (2015:8), Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.
- b. Euis Rosidah (2015:2), Biaya merupakan pengeluaran sumber-sumber ekonomi dalam bentuk keuangan yang telah terjadi, sedang terjadi dan mungkin akan terjadi yang bertujuan untuk memperoleh pengembalian (return) yang lebih menguntungkan.
- c. Arief & Ishak (2015:16), Biaya (expenses) adalah merupakan penggunaan-penggunaan dari barang-barang dan jasa dalam rangka memperoleh suatu pendapatan (revenue) dalam suatu periode dan biaya-biaya tersebut menjadi kadaluarsa (expired) untuk masa yang akan.
- d. Juli & Retno (2015:271), Biaya merupakan pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan usaha dalam rangka untuk memperoleh, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- e. Emy & Monika (2019:4), Biaya yaitu manfaat yang dikorbankan untuk memperoleh barang dan jasa. Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa biaya adalah pengeluaran berupa uang yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu atau untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya produksi merujuk pada semua pengeluaran yang dikeluarkan dalam proses pembuatan barang atau jasa, mulai dari pengadaan bahan baku hingga penyelesaian produk akhir. Ini mencakup biaya langsung dan tidak langsung yang terkait dengan produksi. Biaya produksi tidak hanya mencakup biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung, tetapi juga biaya overhead pabrik, biaya penyusutan peralatan, dan biaya lainnya yang terkait langsung dengan kegiatan produksi.

1.2 Pentingnya Memahami Biaya Produksi dalam Ilmu Ekonomi

Memahami biaya produksi sangatlah penting dalam ilmu ekonomi karena memiliki dampak yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan produksi, alokasi sumber daya, harga jual, dan profitabilitas individu rumah tangga suatu perusahaan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pemahaman biaya produksi penting dalam ilmu ekonomi:

1. **Pengambilan Keputusan Optimal:** Pemahaman yang baik tentang biaya produksi membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang optimal terkait dengan jumlah produksi yang tepat, alokasi sumber daya yang efisien, dan penetapan harga yang sesuai dengan tujuan profitabilitas.
2. **Perencanaan Produksi dan Pengendalian Biaya:** Pengetahuan tentang biaya produksi membantu perusahaan dalam merencanakan dan mengendalikan biaya produksi dengan lebih efektif. Ini

termasuk penentuan sumber daya yang diperlukan, perencanaan anggaran produksi, dan evaluasi kinerja biaya.

3. **Pengembangan Strategi Bisnis:** Analisis biaya produksi memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan strategi bisnis yang sesuai dengan kondisi pasar, persaingan, dan tujuan jangka panjang. Ini termasuk keputusan tentang ekspansi produksi, diversifikasi produk, atau restrukturisasi operasi.
4. **Penetapan Harga yang Rasional:** Pemahaman yang baik tentang biaya produksi membantu perusahaan dalam menetapkan harga jual yang rasional, yang mencakup biaya produksi serta keuntungan yang diinginkan. Harga yang ditetapkan harus mencerminkan biaya produksi agar perusahaan dapat mencapai profitabilitas yang diinginkan.
5. **Analisis Kelayakan Investasi:** Dalam konteks investasi baru atau proyek pengembangan produk, pemahaman tentang biaya produksi sangat penting untuk melakukan analisis kelayakan yang akurat. Ini membantu mengevaluasi potensi profitabilitas investasi dan risiko yang terkait.
6. **Pemahaman tentang Efisiensi Produksi:** Dengan memahami biaya produksi, perusahaan dapat mengevaluasi tingkat efisiensi produksi mereka. Ini termasuk identifikasi potensi penghematan biaya, eliminasi pemborosan, dan peningkatan produktivitas.
7. **Pengambilan Keputusan Karyawan:** Pemahaman tentang biaya produksi juga penting bagi karyawan di semua tingkatan perusahaan. Hal ini membantu mereka memahami kontribusi individu mereka terhadap biaya produksi dan mendorong upaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Dengan memahami biaya produksi, perusahaan dapat meningkatkan kinerja operasional mereka, meningkatkan profitabilitas, dan tetap kompetitif di pasar. Oleh karena itu, konsep biaya produksi merupakan salah satu aspek kunci dalam pengelolaan perusahaan dan ekonomi secara keseluruhan.

1.3 Komponen Biaya Produksi

Dalam ilmu ekonomi, dalam suatu rumah tangga individu seperti perusahaan mungkin memiliki struktur biaya produksi yang berbeda tergantung pada jenis produk yang dihasilkan, metode produksi yang digunakan, dan faktor-faktor lainnya. Secara umum jika ditelusuri lebih mendalam maka komponen-komponen yang menjadi bagian dari biaya produksi adalah sebagai berikut :

1. **Biaya Bahan Baku:** Biaya yang terkait dengan pembelian atau pengadaan bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi. Sebagai contoh : kayu dan paku pada pembuatan furniture dan kerajinan kayu
2. **Biaya Tenaga Kerja:** Biaya yang terkait dengan pembayaran gaji dan tunjangan bagi pekerja langsung yang terlibat dalam proses produksi. Sebagai contoh gaji tetap dan tidak tetap (honorar) atau upah harian
3. **Biaya Overhead Pabrik:** Biaya tidak langsung yang terjadi selama proses produksi, seperti biaya utilitas pabrik, biaya perawatan peralatan, dan biaya sewa pabrik. Sebagai contoh biaya pemasaran, listrik, asuransi perlengkapan pabrik dan lain sebagainya
4. **Biaya Penyusutan:** Biaya yang terkait dengan pengurangan nilai aset fisik perusahaan, seperti mesin dan peralatan, selama masa pakainya dalam proses produksi. Sebagai contoh : penyusutan alat mesin pabrik, kendaraan pabrik dan komputer administrasi kantor
5. **Biaya Lainnya:** Biaya lain yang terkait dengan produksi, seperti biaya transportasi, biaya pemeliharaan, dan biaya pengemasan

1.4 Penghitungan Biaya Produksi

1. Metode Penghitungan Biaya Produksi : Biaya produksi merupakan total biaya yang dikeluarkan dalam proses pembuatan atau produksi suatu barang atau jasa. Umumnya dijabarkan kedalam

rumus umum perhitungan biaya produksi dan perhitungan tersebut dapat bervariasi tergantung pada jenis bisnis atau industri, tetapi secara umum dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{Biaya Produksi} = \text{Biaya Bahan Baku} + \text{Biaya Tenaga Kerja} + \text{Biaya Overhead}$$

Di mana:

- Biaya Bahan Baku: Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan-bahan mentah yang diperlukan dalam proses produksi.
- Biaya Tenaga Kerja: Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar gaji para pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi.
- Biaya Overhead Pabrik: Merupakan biaya produksi lainnya yang tidak dapat langsung diatribusikan ke produk tertentu, termasuk biaya utilitas, penyusutan peralatan, biaya administrasi pabrik, dan sebagainya.

Rumus di atas adalah rumus umum dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari perusahaan atau industri tertentu. Misalnya, dalam industri manufaktur yang lebih kompleks, mungkin ada lebih banyak komponen biaya yang perlu dipertimbangkan. Selain itu, sistem akuntansi biaya yang digunakan oleh perusahaan juga dapat memengaruhi bagaimana biaya produksi dihitung dan dilaporkan.

2. Metode Biaya Tetap dan Variabel :

- a. Biaya tetap adalah biaya yang tetap atau konstan dalam jumlah tertentu terlepas dari volume produksi atau penjualan suatu perusahaan.

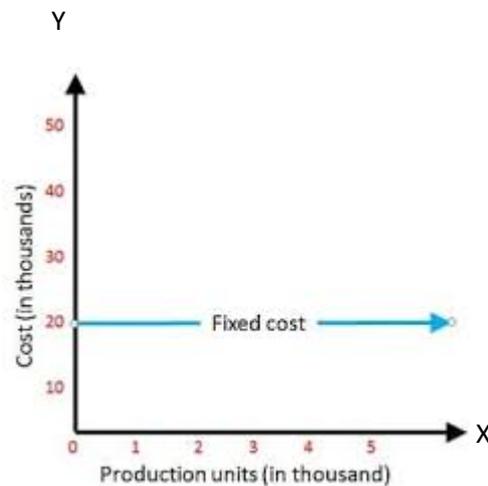
Rumus umum untuk menghitung biaya tetap adalah sebagai berikut:

$$\text{Biaya Tetap} = \text{Biaya Produksi Tetap} + \text{Biaya Operasional Tetap}$$

Dimana:

- Biaya Produksi Tetap: Merupakan biaya yang tetap terkait langsung dengan proses produksi dan tidak berubah meskipun volume produksi berubah. Contohnya termasuk sewa gedung pabrik, penyusutan peralatan produksi, dan asuransi pabrik.
- Biaya Operasional Tetap: Merupakan biaya yang tetap terkait dengan operasi bisnis secara umum dan tidak bergantung pada volume produksi atau penjualan. Contohnya termasuk biaya administrasi kantor, biaya bunga pinjaman, dan biaya sewa kantor.
- Dengan menggabungkan kedua komponen di atas, kita bisa mendapatkan total biaya tetap perusahaan.

Jika dilihat grafiknya, maka dapat dimisalkan suatu perusahaan memiliki biaya tetap sebesar \$20.000 per bulan. Biaya ini tidak bergantung pada volume produksi atau penjualan. Grafik biaya tetap akan menunjukkan bahwa biaya tetap tetap konstan pada setiap tingkat produksi atau penjualan.



Gambar Grafik Biaya Tetap (Fixed Cost)

Dalam grafik biaya tetap, sumbu y (vertikal) akan menunjukkan jumlah biaya dalam dolar, sedangkan sumbu x (horizontal) akan menunjukkan waktu (bulan, kuartal, tahun, dsb.).

Grafik tersebut akan menunjukkan garis lurus horizontal pada level biaya tetap yang dinyatakan. Ini menunjukkan bahwa biaya tetap tidak berubah terlepas dari perubahan dalam volume produksi atau penjualan. Meskipun perusahaan menghasilkan lebih banyak produk atau layanan, biaya tetap tetap pada level yang sama.

Dengan demikian, grafik biaya tetap akan terlihat seperti garis lurus horizontal pada tingkat biaya tetap yang telah ditentukan. Ini menunjukkan bahwa biaya tetap tetap konstan terlepas dari volume produksi atau penjualan.

- b. Biaya variabel adalah biaya yang berubah seiring dengan perubahan dalam volume produksi atau penjualan suatu produk atau jasa.

Rumus umum untuk menghitung biaya variabel adalah sebagai berikut:

$$\text{Biaya Variabel} = \text{Biaya Produksi Variabel per Unit} \times \text{Jumlah Unit Produksi}$$

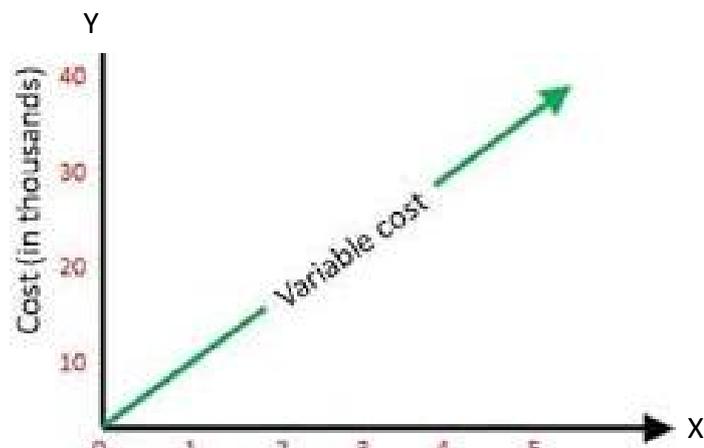
Di mana:

- Biaya Produksi Variabel per Unit: Merupakan biaya yang berhubungan langsung dengan produksi setiap unit produk atau layanan. Contoh biaya variabel termasuk bahan baku, upah tenaga kerja langsung, dan biaya langsung lainnya yang berubah secara proporsional dengan volume produksi.
- Jumlah Unit Produksi: Merupakan jumlah unit produk atau layanan yang diproduksi atau dijual.

Rumus ini menyatakan bahwa biaya variabel secara langsung tergantung pada jumlah unit yang diproduksi atau dijual. Semakin banyak unit yang diproduksi atau dijual, semakin tinggi biaya variabelnya, dan sebaliknya.

Perlu dicatat bahwa dalam beberapa kasus, biaya variabel per unit dapat berubah tergantung pada faktor-faktor tertentu seperti diskon pembelian dalam jumlah besar atau diskon volume. Namun, dalam rumus umum di atas, kita menganggap biaya variabel per unit tetap untuk setiap tingkat produksi.

Selanjutnya, jika dilihat secara grafiknya maka grafik biaya variabel, misal dalam sumbu x (horizontal) akan menunjukkan volume produksi atau penjualan, sedangkan sumbu y (vertikal) akan menunjukkan jumlah biaya variabel dalam unit mata uang yang sama seperti sumbu y (misalnya, dolar).



Gambar Grafik Biaya Variable

Grafik biaya variabel biasanya menunjukkan hubungan linear antara volume produksi atau penjualan dengan biaya variabel. Ini berarti bahwa semakin tinggi volume produksi atau penjualan, semakin tinggi biaya variabelnya, dan sebaliknya.

Grafik ini akan menunjukkan garis lurus yang naik ke atas dan ke kanan seiring dengan peningkatan volume produksi atau penjualan. Ini menunjukkan bahwa biaya variabel bertambah seiring dengan pertambahan unit yang diproduksi atau dijual.

Dalam beberapa kasus, grafik biaya variabel dapat menunjukkan kurva yang miring ke atas, yang menunjukkan bahwa biaya variabel per unit meningkat dengan bertambahnya volume produksi. Ini bisa terjadi jika ada efek dari hukum biaya yang mungkin menyebabkan biaya variabel per unit meningkat ketika kapasitas produksi maksimum didekati atau terlampaui.

3. Metode Aktivitas Berbasis Biaya (ABC)

Metode aktivitas berbasis biaya (Activity-Based Costing/ABC) adalah suatu pendekatan dalam akuntansi manajemen yang digunakan untuk menghitung biaya produk atau jasa dengan cara yang lebih akurat dan rinci daripada metode tradisional seperti metode biaya langsung atau biaya tenaga kerja langsung. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam penerapan metode aktivitas berbasis biaya:

1. **Identifikasi Aktivitas:** Identifikasi semua aktivitas yang terlibat dalam proses produksi atau penyediaan jasa. Aktivitas ini bisa mencakup setup mesin, pemrosesan pesanan, inspeksi kualitas, pemeliharaan peralatan, dan lain-lain.
2. **Penentuan Pembiayaan Aktivitas:** Tentukan biaya yang terkait dengan setiap aktivitas yang diidentifikasi. Ini termasuk biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang

secara langsung dapat diatribusikan ke aktivitas tertentu, sementara biaya tidak langsung adalah biaya yang terkait dengan lebih dari satu aktivitas.

3. **Penetapan Driver Aktivitas:** Tentukan faktor-faktor yang mempengaruhi biaya aktivitas. Faktor-faktor ini disebut sebagai driver aktivitas. Misalnya, jumlah setup mesin dapat menjadi driver untuk biaya setup mesin, atau jumlah pesanan dapat menjadi driver untuk biaya pemrosesan pesanan.
4. **Alokasi Biaya ke Produk atau Jasa:** Gunakan driver aktivitas untuk mengalokasikan biaya aktivitas ke produk atau jasa. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengetahui dengan lebih akurat berapa banyak biaya yang diperlukan untuk memproduksi setiap produk atau menyediakan setiap jasa.
5. **Analisis dan Pengambilan Keputusan:** Analisis biaya yang diperoleh dari metode aktivitas berbasis biaya dapat membantu manajemen dalam membuat keputusan yang lebih baik terkait harga produk, penentuan volume produksi yang optimal, identifikasi aktivitas yang tidak bernilai tambah, dan lain-lain.

Metode aktivitas berbasis biaya biasanya memberikan informasi yang lebih akurat dan relevan bagi manajemen dalam mengelola biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Hal ini karena pendekatan ini memperhitungkan hubungan yang lebih rinci antara biaya dan aktivitas yang menghasilkannya, daripada hanya mengandalkan faktor-faktor seperti biaya langsung atau jam kerja langsung.

Mari kita lihat contoh sederhana perhitungan biaya produksi menggunakan metode aktivitas berbasis biaya (ABC). Misalkan ada sebuah perusahaan yang memproduksi dua jenis produk: A dan B. Proses produksi melibatkan tiga aktivitas: pengaturan mesin, pemrosesan, dan inspeksi kualitas. Perusahaan telah mengidentifikasi driver aktivitas dan biaya terkait aktivitas tersebut sebagai berikut:

1. **Pengaturan Mesin:**
 - Biaya Aktivitas: \$5,000
 - Penggunaan Driver Aktivitas: 20 setup mesin
 - Driver Aktivitas: Jumlah setup mesin
2. **Pemrosesan:**
 - Biaya Aktivitas: \$10,000
 - Penggunaan Driver Aktivitas: 2,000 jam kerja langsung
 - Driver Aktivitas: Jam tenaga kerja langsung
3. **Inspeksi Kualitas:**
 - Biaya Aktivitas: \$3,000
 - Penggunaan Driver Aktivitas: 100 inspeksi
 - Driver Aktivitas: Jumlah inspeksi

Selanjutnya, mari kita asumsikan bahwa produk A memerlukan 10 setup mesin, 500 jam kerja langsung, dan menjalani 50 kali inspeksi. Sedangkan produk B memerlukan 5 setup mesin, 300 jam kerja langsung, dan menjalani 30 kali inspeksi.

Dengan menggunakan informasi di atas, kita dapat menghitung biaya produksi untuk setiap produk:

1. **Biaya Aktivitas Pengaturan Mesin (Setup Mesin):**
 - Biaya Aktivitas per Setup Mesin = $\$5,000 / 20 = \250 per setup mesin
 - Biaya Setup Mesin untuk Produk A = $\$250 * 10$ setup mesin = \$2,500
 - Biaya Setup Mesin untuk Produk B = $\$250 * 5$ setup mesin = \$1,250
2. **Biaya Aktivitas Pemrosesan:**
 - Biaya Aktivitas per Jam Kerja Langsung = $\$10,000 / 2,000$ jam = \$5 per jam kerja langsung

- Biaya Pemrosesan untuk Produk A = $\$5 * 500 \text{ jam} = \$2,500$ Biaya Pemrosesan untuk Produk B = $\$5 * 300 \text{ jam} = \$1,500$

3. Biaya Aktivitas Inspeksi Kualitas:

- Biaya Aktivitas per Inspeksi = $\$3,000 / 100 \text{ inspeksi} = \30 per inspeksi
- Biaya Inspeksi untuk Produk A = $\$30 * 50 \text{ inspeksi} = \$1,500$ Biaya Inspeksi untuk Produk B = $\$30 * 30 \text{ inspeksi} = \900

Jumlahkan biaya dari ketiga aktivitas untuk masing-masing produk untuk mendapatkan total biaya produksi untuk setiap produk:

- Total Biaya Produksi untuk Produk A = $\$2,500$ (setup mesin) + $\$2,500$ (pemrosesan) + $\$1,500$ (inspeksi) = $\$6,500$
- Total Biaya Produksi untuk Produk B = $\$1,250$ (setup mesin) + $\$1,500$ (pemrosesan) + $\$900$ (inspeksi) = $\$3,650$

Dengan demikian, menggunakan metode aktivitas berbasis biaya, perusahaan dapat menghitung biaya produksi untuk setiap produk dengan lebih akurat berdasarkan penggunaan driver aktivitas yang relevan oleh setiap produk.

4. Metode Persediaan FIFO dan LIFO

a. Metode FIFO (First In, First Out)

Metode FIFO adalah salah satu metode evaluasi persediaan yang umum digunakan dalam akuntansi dan manajemen persediaan. Metode ini mengasumsikan bahwa barang yang pertama masuk ke dalam gudang akan dikeluarkan terlebih dahulu. Dengan kata lain, barang yang paling awal dibeli atau diproduksi akan dijual atau digunakan terlebih dahulu.

Berikut adalah langkah-langkah untuk menerapkan metode FIFO dalam mengelola persediaan:

1. **Catat Persediaan Masuk:** Catat barang-barang yang masuk ke dalam gudang beserta tanggal penerimaannya. Informasi yang dicatat biasanya mencakup jumlah barang, harga beli, dan tanggal penerimaan.
2. **Hitung Persediaan Tersedia:** Saat akan melakukan penjualan atau penggunaan barang, identifikasi persediaan yang tersedia di gudang. Ini termasuk barang-barang yang masih ada dari pembelian sebelumnya serta barang-barang baru yang baru saja diterima.
3. **Tentukan Harga Pokok Penjualan (HPP):** Untuk menghitung harga pokok penjualan (HPP) menggunakan metode FIFO, gunakan harga beli barang yang paling awal masuk sebagai dasar perhitungannya. Dengan kata lain, ambil harga barang yang pertama kali masuk ke dalam persediaan sebagai harga per unit.
4. **Kelola Persediaan Keluar:** Saat terjadi penjualan atau penggunaan barang, kurangi jumlah yang digunakan dari persediaan yang ada menggunakan harga per unit yang sesuai dengan FIFO.
5. **Rekam Transaksi:** Catat setiap transaksi persediaan yang terjadi dengan menggunakan metode FIFO untuk memastikan akuntansi yang akurat dan kompatibilitas dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Manfaat dari penggunaan metode FIFO antara lain:

- **Akuntansi yang konsisten:** FIFO secara konsisten memprioritaskan persediaan yang lebih lama, menjaga konsistensi dalam penilaian persediaan.
- **Pengelompokan Persediaan:** Menggunakan FIFO membantu dalam pengelompokan persediaan berdasarkan urutan waktu penerimaan, yang bisa membantu manajer dalam pengambilan keputusan terkait dengan rotasi persediaan.

- **Penilaian Persediaan:** Metode ini memberikan gambaran yang akurat tentang nilai persediaan yang tersedia dan biaya barang yang dijual.

Namun, ada juga kelemahan, terutama jika harga pembelian berfluktuasi secara signifikan. Dalam situasi seperti itu, FIFO bisa menyebabkan perbedaan besar dalam nilai persediaan dan laba bersih, tergantung pada urutan penerimaan barang.

b. Metode LIFO (Last In, First Out)

Metode LIFO (Last In, First Out) adalah salah satu metode evaluasi persediaan yang bertentangan dengan metode FIFO. Berbeda dengan FIFO yang mengasumsikan bahwa barang yang pertama masuk ke dalam gudang akan dikeluarkan terlebih dahulu, metode LIFO mengasumsikan bahwa barang yang terakhir masuk ke dalam gudang akan dikeluarkan terlebih dahulu.

Berikut adalah langkah-langkah untuk menerapkan metode LIFO dalam mengelola persediaan:

1. **Catat Persediaan Masuk:** Catat setiap barang yang masuk ke dalam gudang beserta tanggal penerimaannya. Ini melibatkan mencatat jumlah barang, harga beli, dan tanggal penerimaan.
2. **Hitung Persediaan Tersedia:** Saat akan melakukan penjualan atau penggunaan barang, identifikasi persediaan yang tersedia di gudang. Ini termasuk barang-barang yang masih ada dari pembelian sebelumnya serta barang-barang baru yang baru saja diterima.
3. **Tentukan Harga Pokok Penjualan (HPP):** Untuk menghitung harga pokok penjualan (HPP) menggunakan metode LIFO, gunakan harga beli barang yang paling baru masuk sebagai dasar perhitungannya. Dengan kata lain, ambil harga barang yang terakhir kali masuk ke dalam persediaan sebagai harga per unit.
4. **Kelola Persediaan Keluar:** Saat terjadi penjualan atau penggunaan barang, kurangi jumlah yang digunakan dari persediaan yang ada menggunakan harga per unit yang sesuai dengan LIFO.
5. **Rekam Transaksi:** Pastikan setiap transaksi persediaan direkam dengan menggunakan metode LIFO untuk memastikan akuntansi yang akurat dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Beberapa manfaat dari penggunaan metode LIFO meliputi:

- **Efek Pajak:** Metode LIFO dapat menghasilkan laba bersih yang lebih rendah dan karenanya, pajak yang lebih rendah, karena mengasumsikan biaya barang yang lebih tinggi.
- **Pengendalian Pajak:** Dalam negara di mana pajaknya tinggi atau meningkat, metode LIFO dapat membantu perusahaan mengendalikan beban pajaknya.
- **Pendekatan Realistis:** Dalam lingkungan inflasi, metode LIFO lebih mencerminkan biaya aktual barang yang terjual.

Namun, metode LIFO juga memiliki beberapa kelemahan, termasuk kompleksitas akuntansi yang lebih tinggi, ketidakmampuan untuk memberikan gambaran akurat tentang nilai persediaan aktual dalam lingkungan deflasi, dan sulitnya perbandingan keuangan dengan perusahaan lain yang mungkin menggunakan metode FIFO atau metode lainnya.

1.5 Analisis Biaya Produksi

1. Analisis Break-Even Point

Analisis Break-Even Point (BEP) adalah alat yang digunakan dalam manajemen bisnis untuk menentukan titik di mana pendapatan dari penjualan produk atau layanan sama dengan biaya yang dikeluarkan

untuk memproduksi produk atau menyediakan layanan tersebut. Pada titik ini, sebuah perusahaan tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian, melainkan berada pada titik impas.

Berikut adalah langkah-langkah umum untuk melakukan analisis Break-Even Point:

1. **Identifikasi Biaya Tetap dan Biaya Variabel:** Pertama, identifikasi biaya tetap dan biaya variabel dari operasi bisnis Anda. Biaya tetap adalah biaya yang tetap, tidak peduli berapa banyak produk atau layanan yang Anda produksi (contohnya sewa gedung, biaya administrasi). Biaya variabel bervariasi tergantung pada volume produksi atau penjualan (contohnya bahan baku, tenaga kerja langsung).
2. **Hitung Kontribusi Margin:** Kontribusi margin adalah perbedaan antara pendapatan total dan biaya variabel total. Ini adalah jumlah uang yang tersedia untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan keuntungan. Perhitungan kontribusi margin adalah: Kontribusi Margin = Pendapatan Total - Biaya Variabel Total.
3. **Tentukan Harga Jual Per Unit:** Tentukan harga jual per unit untuk produk atau layanan Anda.
4. **Hitung Break-Even Point:** Break-Even Point adalah jumlah unit produk atau layanan yang harus Anda jual agar pendapatan sama dengan biaya total. Perhitungan BEP adalah: Break-Even Point (dalam unit) = Biaya Tetap / Kontribusi Margin per unit.
5. **Hitung Break-Even Point dalam Nilai Rupiah:** Setelah mengetahui jumlah unit yang diperlukan untuk mencapai BEP, Anda juga dapat menghitung nilai rupiahnya dengan mengalikan BEP dalam unit dengan harga jual per unit.
6. **Analisis Sensitivitas:** Selanjutnya, lakukan analisis sensitivitas untuk memahami bagaimana perubahan dalam variabel seperti harga jual per unit, biaya tetap, atau biaya variabel dapat mempengaruhi BEP.
7. **Interpretasi dan Pengambilan Keputusan:** Setelah mengidentifikasi BEP, interpretasikan hasilnya. Jika BEP tinggi, Anda mungkin perlu mengurangi biaya atau meningkatkan harga jual. Jika BEP rendah, Anda mungkin perlu meningkatkan volume penjualan atau mengurangi biaya.

Analisis Break-Even Point membantu perusahaan dalam merencanakan strategi harga, estimasi keuntungan potensial, dan mengevaluasi kinerja bisnis. Ini juga merupakan alat penting dalam pengambilan keputusan investasi dan pengembangan produk baru.

Rumus dasar untuk menghitung Break-Even Point (BEP) adalah:

$$\text{BEP} = \frac{\text{Biaya Tetap}}{\text{Harga Jual Per Unit} - \text{Biaya Variabel Per Unit}}$$

Di mana:

- **BEP** adalah Break-Even Point dalam unit atau jumlah barang.
- **Biaya Tetap** adalah total biaya tetap yang diperlukan untuk menjalankan bisnis (misalnya, biaya sewa, gaji karyawan, biaya administrasi).
- **Harga Jual per Unit** adalah harga jual satu unit produk atau layanan.
- **Biaya Variabel per Unit** adalah biaya yang berubah sesuai dengan volume penjualan atau produksi (misalnya, bahan baku, tenaga kerja langsung).

Rumus ini memberikan jumlah unit produk atau layanan yang harus dijual agar pendapatan sama dengan biaya total.

Atau rumus lain juga bisa disajikan kedalam rumus titik impas (dalam nilai uang) :

$$\text{BEP} = \frac{\text{Biaya Tetap}}{1 - \frac{\text{Biaya Pendapatan Total}}{\text{Pendapatan Total}}}$$

Rumus diatas bisa dilakukan jika perusahaan ingin mengetahui BEP dalam nilai rupiah (atau mata uang lokal), perusahaan bisa mengalikan jumlah unit yang dihasilkan dengan harga jual per unit. Jadi, BEP dalam nilai rupiah adalah:

$$\text{BEP (Nilai Rupiah)} = \text{BEP (Unit)} \times \text{Harga Jual per Unit}$$

Ini akan memberikan nilai uang yang harus diperoleh dari penjualan agar perusahaan mencapai titik impas.

Sebagai contoh sederhana untuk menghitung Break-Even Point (BEP) adalah sebagai berikut :
Misalkan sebuah perusahaan menghasilkan dan menjual produk sepatu olahraga. Biaya tetap bulanan untuk operasi perusahaan adalah \$5,000. Harga jual per pasang sepatu adalah \$50, dan biaya variabel per pasang sepatu adalah \$30. Kita akan menggunakan rumus BEP untuk menghitung jumlah pasang sepatu yang perlu dijual agar perusahaan mencapai titik impas.

$$\frac{\text{Biaya Tetap}}{\text{Harga Jual Per Unit} - \text{Biaya Variabel Per Unit}}$$

Dengan nilai yang diberikan:

- Biaya Tetap (Biaya Tetap/Biaya Tetap) = \$5,000
- Harga Jual per Unit (Harga Jual per Unit/Harga Jual per Unit) = \$50
- Biaya Variabel per Unit (Biaya Variabel per Unit/Biaya Variabel per Unit) = \$30

Mari kita hitung BEP:

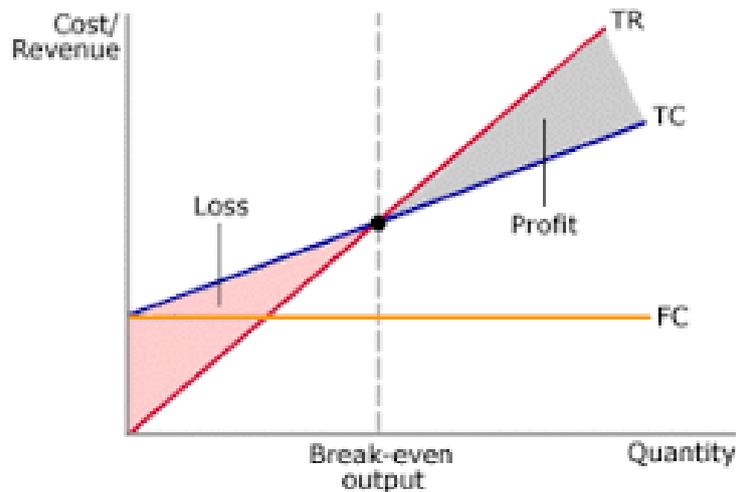
$$\text{BEP} = \frac{5000}{50 - 30}$$

$$\text{BEP} = \frac{5000}{20}$$

$$\text{BEP} = 250$$

Jadi, perusahaan harus menjual 250 pasang sepatu olahraga agar mencapai titik impas. Artinya, ketika perusahaan berhasil menjual 250 pasang sepatu olahraga, pendapatan dari penjualan akan sama dengan biaya total, dan perusahaan tidak akan mengalami keuntungan atau kerugian.

Jika dilihat secara grafik maka dapat kita saksikan pada gambar berikut :



Gambar BEP (Break Event Point) atau Titik Impas

Secara makna dari gambar Break-Even Point (BEP) tersebut adalah titik di mana pendapatan total dari penjualan sama dengan biaya total terletak dimana perusahaan harus menjual 250 pcs, Jika perusahaan berhasil menjual lebih dari atau > 250 pcs maka perusahaan akan memperoleh profit begitupula sebaliknya jika perusahaan hanya berhasil menjual < 250 PC maka perusahaan akan mengalami kerugian. Untuk itu titik break event point adalah titik di mana perusahaan telah mencapai titik impas dalam operasi bisnisnya.

2. Margin Kontribusi

Margin kontribusi adalah konsep yang penting dalam analisis biaya dan laba. Ini adalah selisih antara pendapatan total dari penjualan suatu produk atau layanan dengan biaya variabel total yang terkait dengan produk atau layanan tersebut. Dalam hal ini, biaya variabel adalah biaya yang berubah seiring dengan volume produksi atau penjualan, sementara biaya tetap konstan tidak peduli berapa banyak unit yang diproduksi atau dijual.

Dalam ilmu ekonomi, secara umum rumus perhitungan margin kontribusi adalah sebagai berikut:

$$\text{Margin Kontribusi} = \text{Pendapatan Total} - \text{Biaya Variabel Total}$$

Di mana:

- Pendapatan Penjualan adalah total pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk atau layanan.
- Biaya Variabel Total adalah total biaya yang berubah sejalan dengan volume penjualan, seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya variabel lainnya yang terkait langsung dengan produksi atau penjualan produk atau layanan.

Atau, jika dinyatakan dalam bentuk persentase:

$$\text{Margin Kontribusi (\%)} = \frac{(\text{Pendapatan Total} - \text{Biaya Variabel total})}{\text{Pendapatan Total}} \times 100\%$$

Margin kontribusi memberikan kontribusi langsung dari setiap unit penjualan terhadap biaya tetap dan keuntungan perusahaan. Ini adalah dana yang tersedia untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan keuntungan setelah biaya variabel telah dikurangkan.

Margin kontribusi adalah ukuran penting dalam analisis profitabilitas produk atau layanan tertentu. Dengan mengetahui margin kontribusi dari setiap produk atau layanan, perusahaan dapat membuat keputusan strategis tentang alokasi sumber daya, penetapan harga, dan pengembangan produk. Produk dengan margin kontribusi yang tinggi cenderung lebih menguntungkan daripada produk dengan margin kontribusi yang rendah, dan perusahaan dapat memprioritaskan upaya mereka untuk memaksimalkan keuntungan dengan memfokuskan pada produk-produk yang memberikan margin kontribusi yang lebih tinggi.

Adapun secara praktis perhitungan dari margin kontribusi ini secara sederhana perhitungannya sebagai berikut :

Misalkan sebuah perusahaan menjual kue dengan harga jual per kue sebesar \$5. Biaya variabel yang terkait dengan pembuatan satu kue adalah \$2, dan biaya tetap bulanan untuk operasi perusahaan adalah \$1,000.

Kita akan menggunakan informasi ini untuk menghitung margin kontribusi per kue dan margin kontribusi dalam persentase.

1. **Pendapatan Total:**

Harga jual per kue = \$5 Jumlah kue yang terjual (misalnya) = 500 kue

Pendapatan Total = Harga jual per kue × Jumlah kue terjual = \$5 × 500 = \$2,500

2. **Biaya Variabel Total:**

Biaya variabel per kue = \$2 Jumlah kue yang terjual (misalnya) = 500 kue

Biaya Variabel Total = Biaya variabel per kue × Jumlah kue terjual = \$2 × 500 = \$1,000

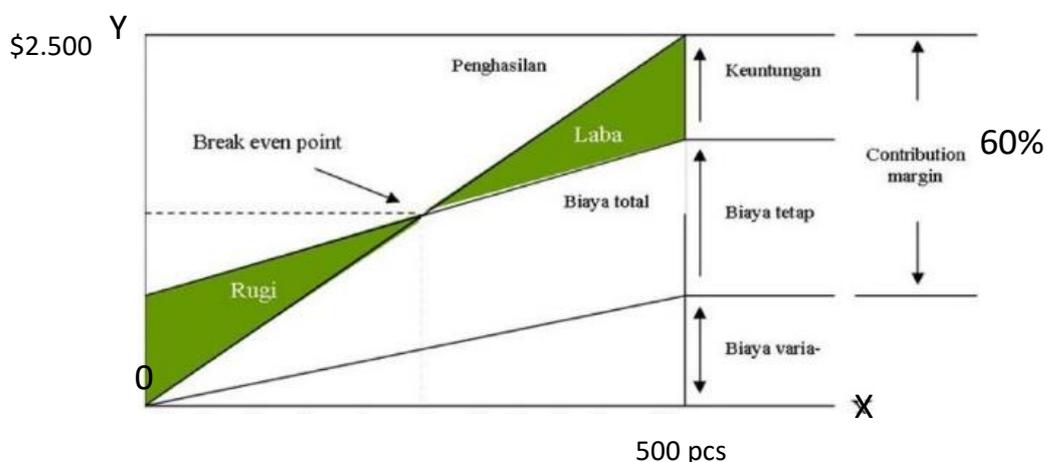
3. **Margin Kontribusi:**

Margin Kontribusi = Pendapatan Total - Biaya Variabel Total = \$2,500 - \$1,000 = \$1,500

4. **Margin Kontribusi dalam Persentase:**

Margin Kontribusi (%) = (Margin Kontribusi / Pendapatan Total) × 100% = (\$1,500 / \$2,500) × 100% = 60%

Jadi, margin kontribusi per kue adalah \$3 (\$5 - \$2) dan margin kontribusi dalam persentase adalah 60%. Ini berarti bahwa setiap kue yang dijual memberikan kontribusi sebesar \$3 terhadap biaya tetap dan keuntungan perusahaan, dan 60% dari pendapatan total adalah kontribusi keuntungan. Hal ini dapat tercermin dalam gambar grafik sebagai berikut :



Gambar Margin Kontribusi dari Penjualan Kue

3. Analisis Varians Biaya

Analisis varian biaya adalah proses membandingkan biaya sebenarnya dengan biaya yang diantisipasi atau dianggarkan. Ini membantu perusahaan untuk memahami penyebab perbedaan antara biaya aktual dan biaya yang diharapkan. Analisis ini memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi area di mana biaya melebihi atau kurang dari yang diharapkan, serta untuk mengambil tindakan korektif yang sesuai.

Langkah-langkah dalam melakukan analisis varian biaya umumnya melibatkan:

1. **Penentuan Standar Biaya:** Standar biaya adalah perkiraan biaya yang diharapkan untuk mencapai tingkat produksi atau penjualan tertentu. Ini dapat didasarkan pada pengalaman sebelumnya, penelitian pasar, atau perhitungan internal.
2. **Pengumpulan Data Biaya Aktual:** Data biaya aktual dikumpulkan dari catatan keuangan atau sistem pelacakan biaya perusahaan. Ini mencakup semua biaya yang terkait dengan produksi, operasi, atau kegiatan bisnis lainnya.
3. **Perhitungan Varians:** Setelah memiliki data biaya aktual, varian untuk setiap elemen biaya dihitung dengan membandingkan biaya aktual dengan standar biaya yang telah ditetapkan sebelumnya. Varians dapat dibagi menjadi dua jenis utama: varians biaya yang menguntungkan (favorable) dan varians biaya yang merugikan (unfavorable).
4. **Analisis Varians:** Setelah varians dihitung, manajemen menganalisis penyebab varian untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan antara biaya aktual dan biaya standar. Ini dapat melibatkan pemeriksaan faktor-faktor seperti perubahan harga bahan baku, efisiensi produksi, biaya tenaga kerja, atau faktor-faktor eksternal seperti fluktuasi pasar.
5. **Tindakan Korektif:** Berdasarkan analisis varian, manajemen dapat mengambil tindakan korektif yang sesuai. Ini bisa termasuk memperbaiki proses operasi, mengubah standar biaya untuk mencerminkan kondisi aktual, meningkatkan pengendalian biaya, atau menyesuaikan rencana keuangan.

Analisis varian biaya ini dalam ilmu ekonomi membantu perusahaan untuk memonitor kinerja keuangan mereka, mengidentifikasi potensi masalah, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan laba. Ini merupakan alat yang penting dalam pengelolaan biaya dan pengambilan keputusan bisnis yang efektif.

Rumus umum untuk menghitung analisis varian biaya adalah sebagai berikut:

$$\text{Varians Biaya} = \text{Biaya Aktual} - \text{Biaya Standar}$$

Di mana:

- Varians Biaya adalah selisih antara biaya aktual dengan biaya standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
- Biaya Aktual adalah biaya sebenarnya yang terjadi dalam periode tertentu.
- Biaya Standar adalah perkiraan biaya yang diharapkan untuk mencapai tingkat produksi atau penjualan tertentu.

Varians yang diperoleh dari rumus ini bisa positif atau negatif, tergantung pada apakah biaya aktual melebihi biaya standar (variens biaya merugikan) atau biaya aktual kurang dari biaya standar (variens biaya menguntungkan).

Selain itu, jika perusahaan ingin mendapatkan persentase varians biaya dalam persentase, bisa menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Varians Biaya} = \frac{\text{Varians Biaya}}{\text{Biaya Standar}} \times 100\%$$

Rumus ini akan memberikan persentase perubahan biaya aktual dibandingkan dengan biaya standar. Ini memungkinkan manajemen untuk lebih memahami seberapa besar perbedaan antara biaya aktual dan biaya yang diantisipasi.

Perlu dicatat bahwa analisis varian biaya harus dilakukan dengan hati-hati, dan perbedaan biaya harus dianalisis secara menyeluruh untuk memahami penyebabnya. Varians biaya yang merugikan atau menguntungkan harus dianalisis lebih lanjut untuk menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan.

Sebagai contoh sederhana dalam menghitung varian biaya ini adalah

Misalkan sebuah perusahaan memperkirakan biaya produksi suatu produk adalah sebagai berikut:

- Biaya bahan baku standar: \$5 per unit
- Biaya tenaga kerja langsung standar: \$3 per unit
- Total biaya variabel standar: \$8 per unit

Selama bulan tertentu, perusahaan memproduksi 10.000 unit produk. Namun, setelah meninjau laporan keuangan, mereka menemukan bahwa biaya aktual adalah sebagai berikut:

- Biaya bahan baku aktual: \$55.000
- Biaya tenaga kerja langsung aktual: \$30.000
- Total biaya variabel aktual: \$85.000

Sekarang kita akan menghitung varians biaya untuk bahan baku dan tenaga kerja langsung.

1. Varians Biaya Bahan Baku:

Varians Biaya Bahan Baku = Biaya Bahan Baku Aktual – Biaya Bahan Baku Standar

Varians Biaya Bahan Baku = \$55.000 – (10.000 × \$5)

Varians Biaya Bahan Baku = \$55.000 – \$50.000

Varians Biaya Bahan Baku = \$5.000

2. Varians Biaya Tenaga Kerja Langsung:

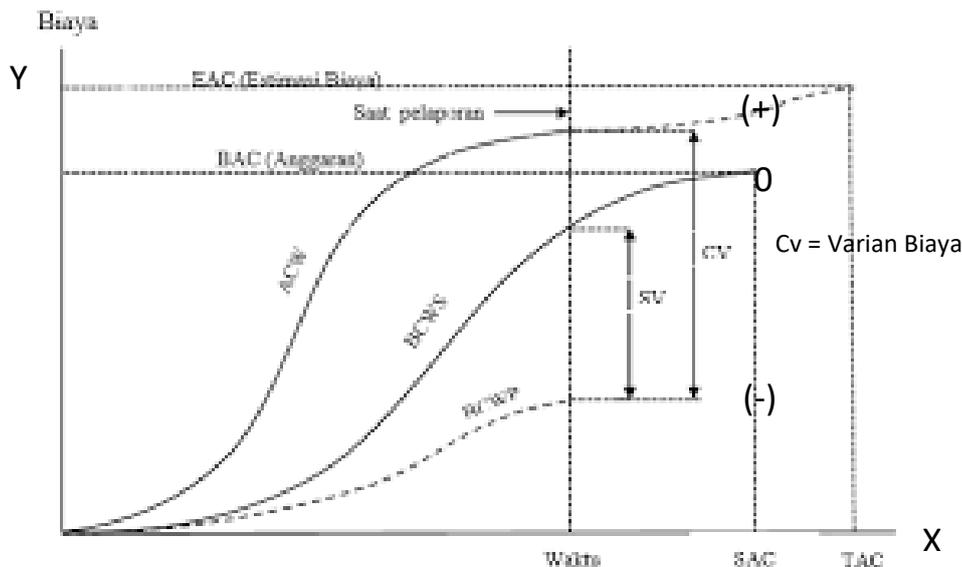
Varians Biaya Tenaga Kerja Langsung = Biaya Tenaga Kerja Langsung Aktual – Biaya Tenaga Kerja Langsung standar

Varians Biaya Tenaga Kerja Langsung = \$30.000 – (10.000 × \$3)

Varians Biaya Tenaga Kerja Langsung = \$30.000 – \$30.000

Varians Biaya Tenaga Kerja Langsung = \$0

Setelah menghitung kedua varian biaya, kita bisa menentukan apakah varian tersebut menguntungkan atau merugikan perusahaan. Dalam kasus ini, varian biaya bahan baku adalah menguntungkan sebesar \$5.000 (positif), sedangkan varian biaya tenaga kerja langsung adalah nol, artinya biaya tenaga kerja langsung sesuai dengan perkiraan. Ini hanya merupakan contoh sederhana, dan dalam praktiknya, perhitungan varian biaya bisa lebih kompleks tergantung pada situasi dan kondisi perusahaan.



Gambar Varian Biaya

Jika dilihat dari grafik tersebut menggambarkan bahwa dalam analisis varian biaya angka negatif yang terdapat pada varians biaya berarti biaya yang dikeluarkan lebih tinggi dari anggaran atau disebut cost overrun, angka nol berarti pekerjaan terlaksana sesuai dengan biaya yang dianggarkan, sedangkan angka positif berarti pekerjaan terlaksana dengan biaya kurang dari anggaran atau disebut cost underrun.

4. Analisis Sensitivitas Biaya

Analisis sensitivitas biaya ekonomi perusahaan adalah suatu metode yang digunakan untuk mengevaluasi bagaimana perubahan biaya tertentu akan mempengaruhi kinerja ekonomi keseluruhan dari perusahaan. Ini melibatkan pengidentifikasian variabel biaya yang signifikan dan kemudian menganalisis dampak perubahan dalam variabel tersebut terhadap kinerja finansial perusahaan.

Berikut adalah langkah-langkah yang umumnya dilakukan dalam analisis sensitivitas biaya ekonomi perusahaan:

1. Identifikasi Variabel Biaya Utama: Langkah pertama dalam analisis sensitivitas biaya ekonomi adalah mengidentifikasi variabel biaya yang memiliki dampak signifikan terhadap kinerja ekonomi perusahaan. Ini bisa mencakup biaya produksi, biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya overhead, biaya distribusi, dan lain sebagainya.
2. Tentukan Rentang Perubahan: Setelah variabel biaya utama diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menentukan rentang perubahan yang mungkin terjadi dalam setiap variabel tersebut. Misalnya, biaya bahan baku dapat mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 10%.
3. Evaluasi Dampak Perubahan Biaya: Selanjutnya, menggunakan model ekonomi perusahaan, atau alat analisis lainnya, untuk mengevaluasi dampak dari perubahan biaya tersebut terhadap kinerja finansial perusahaan. Ini bisa melibatkan analisis berbagai skenario untuk memperkirakan bagaimana perubahan biaya akan memengaruhi pendapatan, biaya, dan laba bersih perusahaan.
4. Analisis Sensitivitas: Dengan menggunakan hasil dari evaluasi dampak perubahan biaya, lakukan analisis sensitivitas untuk menentukan seberapa sensitif kinerja ekonomi perusahaan terhadap perubahan biaya tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan hasil dari berbagai skenario perubahan biaya yang telah dievaluasi.
5. Identifikasi Risiko dan Peluang: Berdasarkan hasil analisis sensitivitas, identifikasi risiko dan peluang yang terkait dengan perubahan biaya tersebut. Hal ini dapat membantu manajemen untuk

merencanakan strategi mitigasi risiko atau mengambil keputusan yang lebih baik terkait dengan manajemen biaya.

6. Pengambilan Keputusan: Terakhir, gunakan informasi dari analisis sensitivitas untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik terkait dengan manajemen biaya perusahaan. Ini dapat melibatkan penyesuaian rencana bisnis, strategi harga, atau kebijakan biaya lainnya untuk mengoptimalkan kinerja ekonomi perusahaan.

Analisis sensitivitas biaya ekonomi perusahaan adalah alat yang berguna dalam membantu manajemen untuk memahami dampak dari perubahan biaya terhadap kinerja finansial perusahaan dan mengambil keputusan yang lebih baik terkait dengan manajemen biaya.

Dalam analisis sensitivitas biaya, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur sensitivitas keuntungan atau laba perusahaan terhadap perubahan biaya. Salah satu metode yang umum digunakan adalah analisis sensitivitas berbasis persentase. Berikut adalah rumus umum untuk perhitungan sensitivitas biaya:

1. **Analisis Sensitivitas Biaya Berbasis Persentase:**

Dalam analisis ini, kita menghitung persentase perubahan dalam hasil atau keuntungan sebagai respons terhadap persentase perubahan dalam biaya. Rumusnya adalah :

$$\text{Sensitivitas} = \frac{\text{Perubahan dalam hasil/keuntungan}}{\text{Perubahan dalam biaya}}$$

Rumus Ini dapat dihitung dalam dua cara:

- a. **Sensitivitas Berbasis Persentase Total:**

$$\text{Sensitivitas} = \frac{\Delta \text{ Total Hasil/Keuntungan}}{\Delta \text{ Total Biaya}}$$

- b. **Sensitivitas Berbasis Persentase Satuan:**

$$\text{Sensitivitas} = \frac{\Delta \text{ Hasil/Keuntungan per satuan}}{\Delta \text{ Biaya per Satuan}}$$

Di sini, Δ menunjukkan perubahan atau selisih dari nilai awal ke nilai akhir.

2. **Metode Incremental atau Marginal:**

Dalam metode ini, kita mengukur sensitivitas biaya dengan memperhitungkan biaya tambahan yang dihasilkan oleh satu unit tambahan produksi atau aktivitas. Rumusnya adalah:

$$\text{Sensitivitas} = \frac{\text{Perubahan dalam hasil/keuntungan}}{\text{Perubahan dalam biaya}}$$

3. **Kembali pada Analisis Titik Impas (Break-even Analysis):**

Dalam analisis titik impas, kita menentukan titik di mana pendapatan sama dengan biaya, sehingga laba menjadi nol. Dengan mengidentifikasi titik impas, kita dapat memahami seberapa besar perubahan biaya yang diperlukan agar mencapai titik impas. Rumusnya telah dijelaskan sebelumnya.

Perlu dicatat bahwa rumus-rumus di atas memberikan gambaran umum tentang perhitungan sensitivitas biaya. Dalam praktiknya, perhitungan ini dapat disesuaikan dan diperluas tergantung pada konteks dan tujuan analisis. Dalam analisis sensitivitas biaya, penting untuk memahami bagaimana perubahan biaya akan memengaruhi kinerja atau hasil yang diinginkan, sehingga manajemen dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola biaya dan risiko.

Sebagai contoh Analisa sensitivitas biaya dapat disederhakan pada kasus soal sebagai berikut :

Sebuah perusahaan memproduksi dan menjual suatu produk dengan biaya variabel per unit sebesar \$20 dan biaya tetap sebesar \$10,000. Harga jual per unit produk adalah \$50. Hitunglah sensitivitas biaya perusahaan terhadap perubahan biaya variabel per unit.

Penyelesaian:

Langkah 1: Tentukan rumus sensitivitas biaya

Rumus sensitivitas biaya berbasis persentase adalah:

$$\text{Sensitivitas} = \frac{\Delta \text{ Total Hasil/Keuntungan}}{\Delta \text{ Total Biaya}}$$

Di sini, kita akan menghitung sensitivitas berbasis persentase total, karena kita ingin mengetahui respons total hasil/keuntungan terhadap perubahan total biaya.

Langkah 2: Hitung total hasil/keuntungan awal.

Total hasil/keuntungan awal adalah pendapatan total dikurangi total biaya:

$$\begin{aligned} \text{Total Hasil/Keuntungan Awal} &= (\text{Harga per unit} \times \text{Jumlah unit}) - \text{Biaya Tetap} \\ &= (50 \times \text{Jumlah unit}) - 10.000 \end{aligned}$$

Langkah 3: Hitung total biaya awal.

Total biaya awal adalah biaya tetap ditambah biaya variabel:

$$\begin{aligned} \text{Total Biaya Awal} &= \text{Biaya Tetap} + (\text{Biaya Variable per Unit} \times \text{Jumlah Unit}) \\ &= 10.000 + (20 \times \text{Jumlah Unit}) \end{aligned}$$

Langkah 4: Hitung total hasil/keuntungan setelah perubahan biaya.

Misalkan ada perubahan dalam biaya variabel per unit sebesar \$5. Kemudian, total hasil/keuntungan baru adalah:

$$\text{Total Hasil/Keuntungan Baru} = (50 \times \text{Jumlah Unit}) - 10.000$$

Langkah 5: Hitung total biaya setelah perubahan biaya.

$$\text{Total Biaya Baru} = 10.000 + (25 \times \text{jumlah Unit})$$

Langkah 6: Hitung perubahan total hasil/keuntungan dan total biaya.

$$\Delta \text{ Total Hasil/Keuntungan} = \text{Total Hasil/Keuntungan Baru} - \text{Total Hasil/Keuntungan Awal}$$

$$\Delta \text{ Total Biaya} = \text{Total Biaya Baru} - \text{Total Biaya Awal}$$

Langkah 7: Hitung sensitivitas biaya

$$\text{Sensitivitas} = \frac{\Delta \text{ Total Hasil/Keuntungan}}{\Delta \text{ Total Biaya}}$$

$$\text{Sensitivitas} = \frac{\Delta \text{ Total Hasil/Keuntungan Baru} - \text{Total Hasil/Keuntungan Awal}}{\text{Total Biaya Baru} - \text{Total Biaya Awal}}$$

$$\text{Sensitivitas} = \frac{(50 \times \text{Jumlah Unit} - 10.000) - ((50 \times \text{Jumlah Unit}) - 10.000)}{(10.000 + (25 \times \text{Jumlah Unit}) - (10.000 + (20 \times \text{Jumlah Unit})))}$$

$$\text{Sensitivitas} = \frac{5 \times \text{Jumlah Unit}}{5 \times \text{Jumlah Unit}}$$

Jadi Hasil perhitungan sensitivitas biaya nya adalah :

$$\text{Sensitivitas} = 1$$

Hasil angka positif tersebut menunjukkan bahwa setiap perubahan satu unit biaya variabel akan menyebabkan perubahan satu unit dalam hasil/keuntungan perusahaan. Artinya, perusahaan memiliki tingkat sensitivitas biaya yang tinggi terhadap perubahan biaya variabel per unit.

1.6 Strategi Mengelola dan Optimalisasi Biaya Produksi

Mengelola biaya produksi dengan cara yang optimal memerlukan pendekatan yang holistik dan strategis. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat membantu perusahaan mencapai manajemen biaya produksi yang optimal:

1. **Analisis Biaya:** Lakukan analisis menyeluruh terhadap semua biaya produksi, termasuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Identifikasi elemen-elemen yang paling signifikan dan kategorikan biaya menjadi tetap dan variabel untuk memahami pola dan tren biaya.
2. **Pengendalian Persediaan:** Optimalkan persediaan bahan baku dan produk jadi untuk menghindari biaya penyimpanan yang berlebihan. Gunakan metode seperti Just-in-Time (JIT) untuk mengurangi biaya persediaan dan meningkatkan efisiensi operasional.
3. **Peningkatan Efisiensi Operasional:** Identifikasi dan implementasikan proses-proses operasional yang lebih efisien untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Evaluasi ulang aliran kerja dan proses produksi untuk mengidentifikasi potensi peningkatan efisiensi.
4. **Outsourcing:** Pertimbangkan untuk outsourcing bagian-bagian produksi tertentu yang tidak menjadi inti kompetensi perusahaan. Outsourcing dapat membantu mengurangi biaya produksi dan meningkatkan fleksibilitas, terutama untuk kebutuhan produksi yang fluktuatif.
5. **Penggunaan Teknologi:** Manfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi. Investasikan dalam perangkat lunak dan peralatan yang dapat mengotomatisasi proses produksi dan meningkatkan kualitas produk.
6. **Negosiasi dengan Pemasok:** Lakukan negosiasi yang cerdas dengan pemasok untuk mendapatkan harga yang lebih baik untuk bahan baku dan komponen produk. Pertimbangkan untuk mengembangkan hubungan jangka panjang dengan pemasok yang dapat memberikan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik.
7. **Pengelolaan Tenaga Kerja:** Manajemen tenaga kerja yang efektif dapat membantu mengurangi biaya produksi. Pertimbangkan untuk menggunakan sistem insentif atau pelatihan yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas pekerjaan.
8. **Inovasi Produk dan Proses:** Selalu cari cara untuk mengembangkan produk baru atau meningkatkan proses produksi yang ada. Inovasi dapat membantu mengurangi biaya produksi dalam jangka panjang dan meningkatkan daya saing perusahaan.
9. **Evaluasi dan Pemantauan Terus-Menerus:** Terus-menerus tinjau dan pantau biaya produksi untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan atau area-area yang memerlukan perbaikan. Lakukan perbandingan dengan standar biaya dan benchmark industri untuk menilai kinerja perusahaan.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara berkelanjutan dan terus-menerus, perusahaan dapat mencapai manajemen biaya produksi yang optimal, yang pada gilirannya akan meningkatkan profitabilitas dan daya saing.

1.8 Studi Kasus: Implementasi Penerapan Just In Time sebagai Strategi Optimalisasi Biaya Produksi

Penerapan Just In Time (JIT) adalah strategi yang efektif dalam optimalisasi biaya produksi dengan fokus pada pengurangan persediaan dan peningkatan efisiensi. Berikut adalah beberapa cara di mana penerapan JIT dapat membantu dalam optimalisasi biaya produksi:

1. **Pengurangan Biaya Persediaan:** Salah satu prinsip utama JIT adalah mengurangi atau bahkan menghilangkan persediaan yang tidak perlu. Dengan meminimalkan persediaan bahan baku, produk dalam proses, dan produk jadi, perusahaan dapat mengurangi biaya penyimpanan, penanganan barang, dan risiko kepemilikan stok yang tidak terjual.
2. **Pengurangan Biaya Ruang Penyimpanan:** Dengan mengurangi jumlah persediaan yang disimpan dalam gudang, perusahaan dapat menghemat biaya penyewaan atau kepemilikan ruang

penyimpanan. Ini berarti perusahaan tidak perlu menyediakan ruang penyimpanan yang besar, yang bisa menjadi biaya yang signifikan.

3. **Penurunan Biaya Transportasi:** Dengan menggunakan JIT, perusahaan hanya memesan bahan baku saat diperlukan. Hal ini mengurangi frekuensi pengiriman dan kuantitas pengiriman, sehingga dapat mengurangi biaya transportasi secara keseluruhan.
4. **Peningkatan Efisiensi Produksi:** Dengan JIT, produksi hanya dimulai ketika pesanan diterima. Ini mengurangi waktu siklus produksi dan memungkinkan perusahaan untuk lebih responsif terhadap permintaan pelanggan. Selain itu, JIT juga mempromosikan produksi dalam volume yang lebih kecil dan lebih sering, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi pemborosan.
5. **Penurunan Biaya Kualitas:** Kualitas menjadi fokus utama dalam penerapan JIT. Dengan memperkecil jumlah persediaan, setiap produk yang diproduksi harus memenuhi standar kualitas yang ketat. Dengan demikian, biaya yang berkaitan dengan produk cacat atau penolakan dapat diminimalkan.
6. **Peningkatan Hubungan dengan Pemasok:** Penerapan JIT memerlukan hubungan yang kuat dengan pemasok. Perusahaan perlu memastikan bahwa pemasok dapat memberikan bahan baku tepat waktu dan dalam kuantitas yang diperlukan. Ini bisa menghasilkan diskon volume atau harga lebih baik, yang pada gilirannya dapat mengurangi biaya produksi.

Penerapan JIT membutuhkan komitmen dan koordinasi yang kuat di seluruh rantai pasokan perusahaan, tetapi manfaatnya dapat signifikan dalam mengoptimalkan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan.

Sebagai contoh sederhana dari penerapan *just in time* ini adalah sebuah studi kasus tentang bagaimana sebuah perusahaan manufaktur khususnya otomotif di Indonesia yang sebagian besar menerapkan Just In Time (JIT) sebagai strategi optimalisasi biaya produksi:

Perusahaan XYZ: Penerapan Just In Time untuk Optimalisasi Biaya Produksi

a. Latar Belakang Perusahaan:

Perusahaan XYZ adalah produsen mobil kecil yang beroperasi di sebuah negara dengan persaingan yang ketat dalam industri otomotif. Perusahaan ini menghadapi tekanan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya agar dapat bersaing secara lebih efektif di pasar.

b. Masalah yang Diidentifikasi:

Perusahaan XYZ mengidentifikasi beberapa masalah dalam operasi produksinya, termasuk biaya persediaan yang tinggi, ruang penyimpanan yang terbatas, dan waktu siklus produksi yang lambat. Hal ini menyebabkan pemborosan, biaya yang tidak perlu, dan ketidakmampuan untuk merespons permintaan pasar dengan cepat.

c. Penerapan Just In Time (JIT):

Perusahaan XYZ memutuskan untuk menerapkan JIT sebagai strategi untuk mengatasi masalah-masalah yang diidentifikasi. Berikut adalah langkah-langkah yang mereka ambil:

1. **Pembaruan Sistem Pesanan:** Perusahaan memperbarui sistem pesanan mereka untuk memungkinkan pesanan bahan baku hanya dilakukan ketika benar-benar diperlukan. Ini memungkinkan mereka untuk menghindari pembelian bahan baku dalam jumlah besar dan meminimalkan persediaan.
2. **Peningkatan Hubungan dengan Pemasok:** Perusahaan memperkuat hubungan dengan pemasok mereka. Mereka mengadakan negosiasi harga yang lebih baik dan berbagi informasi yang diperlukan untuk memastikan pengiriman bahan baku tepat waktu.

3. **Perubahan Proses Produksi:** Proses produksi diubah untuk menjadi lebih fleksibel dan responsif. Produksi dilakukan hanya ketika ada pesanan yang masuk, mengurangi waktu siklus produksi secara keseluruhan.
4. **Pengurangan Persediaan:** Perusahaan secara drastis mengurangi jumlah persediaan bahan baku dan produk dalam proses yang mereka simpan. Ruang penyimpanan yang diperlukan menjadi lebih kecil, sehingga menghemat biaya penyewaan dan biaya yang terkait dengan ruang penyimpanan.

d. Hasil Implementasi JIT:

Setelah menerapkan JIT, Perusahaan XYZ mencapai sejumlah hasil yang signifikan:

- Pengurangan biaya persediaan sebesar 30% dalam enam bulan pertama setelah implementasi.
- Peningkatan efisiensi produksi sebesar 25%, dengan waktu siklus produksi yang lebih pendek.
- Pengurangan biaya penyimpanan sebesar 20% karena ruang penyimpanan yang lebih kecil yang diperlukan.
- Peningkatan kepuasan pelanggan karena kemampuan perusahaan untuk merespons permintaan pasar dengan lebih cepat.

Dengan penerapan Just In Time, Perusahaan XYZ berhasil mengatasi masalah biaya produksi yang signifikan, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan daya saing mereka di pasar otomotif yang kompetitif.

1.10 Kesimpulan dan Rekomendasi

Pada Bab ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dalam ilmu ekonomi tentang biaya produksi, strategi pengelolannya, serta disertai implikasi dalam suatu bisnis yang relevan. Disamping itu dari bab ini dibahas secara menyeluruh tentang peran yang krusial dari analisis biaya produksi dalam teori ekonomi. Melalui pemahaman yang mendalam tentang biaya produksi, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi alokasi sumber daya dan keputusan produksi perusahaan.

Dalam bab ini, kami telah menguraikan konsep biaya produksi, termasuk biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total. Kami juga menjelaskan pentingnya analisis biaya dalam menentukan output optimal, tingkat produksi yang menguntungkan, dan harga pasar yang wajar.

Selain itu, kami menyoroti beberapa strategi untuk mengelola biaya produksi, seperti pengendalian persediaan, peningkatan efisiensi operasional, dan penerapan teknologi. Penggunaan strategi-strategi ini tidak hanya membantu perusahaan meningkatkan profitabilitas, tetapi juga dapat memengaruhi struktur pasar dan alokasi sumber daya dalam perekonomian secara keseluruhan.

Dengan pemahaman yang kokoh tentang biaya produksi dan penerapan strategi yang tepat, perusahaan dapat mencapai efisiensi ekonomi yang optimal, yang pada akhirnya akan menguntungkan masyarakat secara luas melalui penciptaan nilai tambah dan peningkatan kesejahteraan."

Daftar Pustaka

- Arief, Sugiono., & Ishak, The. (2015). Akuntansi-Informasi Dalam Pengambilan Keputusan. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Euis, Rosidah. (2015). Akuntansi Biaya. Banjaran Bandung: Mujahid Press.
- Helmi, H. 2015. Peningkatan Produktivitas Padi Lahan Rawa Lebak melalui Penggunaan Varietas Unggul Padi Rawa. *Pertanian Tropik*, 2(2), 156814.
- Husni, A., K. Hidayah, Maskan. 2014. Analisis Finansial Usahatani Cabai Rawit (*Capsicum frutescens*) di Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan. *Jurnal ARIFOR*. 13 (1) : 49-52.
- Iryani, Emy., dan Handayani, Monika. 2019. Akuntansi Biaya. Banjarmasin : Poliban Press.
- Isyanto, A.Y. 2012. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Produksi pada Usahatani Padi di Kabupaten Ciamis. *Cakrawala Galuh*, 1(8): 1-8.
- Juli Ratnawati, Retno Indah Hernawati. 2015. Dasar-Dasar Perpajakan. Deepublish. Yogyakarta
- Kasih, A. C., Zakaria, W. A., & Riantini, M. 2020. Analisis Pendapatan Usahatani dan Biaya Pokok Produksi Padi Rawa Lebak di Desa Serijabo Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Ilmu Ilmu Agribisnis: Journal of Agribusiness Science*, 8(3), 532-538.
- Mulyadi. 2015. Akuntansi Biaya, Edisi 5. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mursyidi. 2010. Akuntansi Biaya. Bandung: PT.Refika Aditama

Dr. Yaya Rahendra Casmita Pujiharto, S.Pi., ME.

INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID

Jl. Kapten Dasuki Bakri, Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Bogor, Jawa Barat 16810

yayarcpujiharto@gmail.com

BAB 6 BENTUK- BENTUK PASAR PERSAINGAN

Sebuah Bunga Rampai Ilmu Ekonomi dari Literasi Pemikiran
dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Diterbitkan oleh:

INAIS Press

BAB 6 BENTUK - BENTUK PASAR PERSAINGAN

6.1 Definisi Pasar

Pasar adalah suatu mekanisme sosial di mana pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan pertukaran barang dan jasa. Dalam konteks ekonomi, pasar mengacu pada interaksi antara penawaran dan permintaan untuk suatu produk atau jasa, yang memungkinkan harga ditentukan. Pasar dapat berwujud fisik, seperti pasar tradisional di tempat tertentu, atau dapat bersifat virtual, seperti pasar daring atau *e-commerce* (Tokopedia, Shopee, Lazada dll). Saat ini pasar virtual menunjukkan tren yang makin meningkat. Syarat terbentuknya pasar adalah adanya penjual, pembeli barang atau jasa yang diperjualbelikan serta terjadinya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Menurut Stanton WJ, 1985; Secara lebih luas pasar juga diartikan sebagai orang-orang yang mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan, uang untuk belanja serta kemauan untuk membelanjakannya.

Menurut Zahara dan Anwar (2020) Berdasarkan jumlah penjual yang ada, struktur pasar output dibedakan menjadi empat, yaitu a. Pasar Persaingan Sempurna (*perfect competitive market*), b. Pasar Monopoli, c. Pasar Oligopoli dan d. pasar persaingan monopolistic. Ketiga pasar terakhir termasuk dalam pasar persaingan tidak sempurna (*imperfect competitive market*).

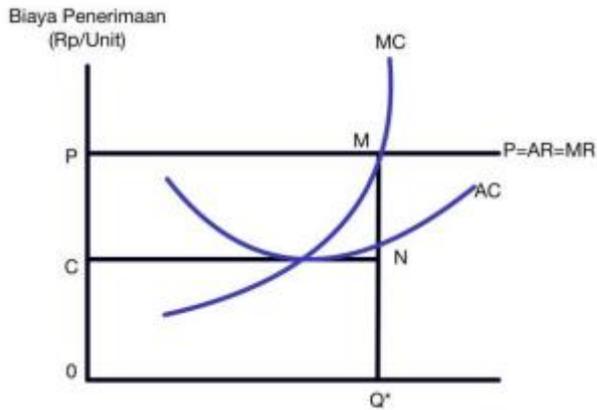
6.1. Pasar Persaingan Sempurna : Ini adalah bentuk pasar di mana ada banyak penjual dan pembeli, produk yang dijual seragam, tidak ada hambatan masuk atau keluar dari pasar, dan informasi lengkap tersedia bagi semua pihak. Contoh dari pasar ini mungkin adalah pasar komoditas seperti gandum atau beras.

Ciri-ciri pasar persaingan sempurna :

- a. Jumlah pembeli dan penjual banyak, sehingga masing-masing pembeli dan penjual secara sendiri-sendiri tidak mampu mempengaruhi harga pasar.
- b. Tidak ada paksaan untuk menjual atau membeli
- c. Setiap penjual dan pembeli sebagai pengambil harga (*price taker*)
- d. Komoditas yang diperjualbelikan homogen (serupa)
- e. Setiap perusahaan bebas keluar masuk pasar (*free entry and exit*)
- f. Sumber produksi bebas bergerak ke manapun.
- g. Pembeli dan penjual mempunyai pengetahuan yang sempurna terhadap pasar (*perfect knowledge*).

Penentuan Harga dan Output dalam Pasar Persaingan Sempurna

Misalnya sebuah perusahaan memilih untuk memproduksi pada tingkat output Q^* , di mana harga (P) sama dengan biaya marjinal (MC) dan laba adalah maksimum.



Gambar 1. Kombinasi harga/ output pada pasar persaingan sempurna

Keadaan produk yang homogen sempurna sehingga konsumen tidak ada pilihan dan produsen tidak dapat menetapkan harga yang lebih rendah/tinggi yang mengakibatkan harga sama/seragam diseluruh pasar. Jumlah produsen yang sangat banyak sehingga tidak ada produsen yang dapat melakukan tindakan apapun yang dapat mempengaruhi pasar. Setiap produsen adalah “Price Taker” bukan “Price Maker”, Karena hal-hal tersebut dalam pasar Persaingan Sempurna kurva penerimaan rata-rata (Average Revenue) akan berbentuk garis lurus horizontal (Zahara dan Anwar, 2020).

Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi agar perusahaan berada dalam keseimbangan pada pasar persaingan sempurna, diantaranya:

- Perusahaan sebaiknya hanya berproduksi, paling tidak bila biaya variabel (VC) adalah sama dengan penerimaan total (TR), atau biaya variabel rata-rata (AVC) sama dengan harga (P). Dalam keadaan demikian perusahaan hanya menanggung kerugian biaya tetap.
- Perusahaan memproduksi pada saat $MR = MC$ agar perusahaan memperoleh laba maksimum atau dalam keadaan buruk, kerugiannya minimum

Dalam pasar persaingan sempurna, harga dan output ditentukan oleh kekuatan pasar, di mana permintaan dan penawaran berinteraksi untuk mencapai titik keseimbangan. Berikut adalah rumus untuk menentukan harga dan output dalam pasar persaingan sempurna:

Permintaan:

$$Q_d = D(P)$$

Q_d adalah kuantitas yang diminta oleh konsumen.

$D(P)$ adalah fungsi permintaan yang menunjukkan hubungan antara harga (P) dan kuantitas yang diminta

Penawaran:

$$Q_s = S(P)$$

Q_s adalah kuantitas yang ditawarkan oleh produsen

$S(P)$ adalah adalah fungsi penawaran yang menunjukkan hubungan antara harga (P) dan kuantitas yang ditawarkan.

Titik keseimbangan pasar

$$Q_d = Q_s$$

Dalam keseimbangan pasar, kuantitas yang diminta Q_d sama dengan kuantitas yang ditawarkan Q_s

Penentuan Harga Keseimbangan:

$$P^* = P(Q_d = Q_s)$$

P^* adalah harga keseimbangan dimana kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan.

Kuantitas produksi (output) pada keseimbangan

$$Q^* = Q_d = Q_s$$

Q^* adalah kuantitas produksi atau output pada harga keseimbangan

rumus-rumus ini digunakan untuk menganalisis dan memprediksi perilaku pasar persaingan sempurna di mana tidak ada produsen atau konsumen yang memiliki kekuatan pasar untuk memengaruhi harga

Contoh Soal 1

Dalam suatu pasar persaingan sempurna untuk produk beras, fungsi permintaan yang diberikan adalah $Q_d = 100 - 2P$ dan fungsi penawaran adalah $Q_s = 2P$ di mana Q_d dan Q_s adalah kuantitas (dalam ton) yang diminta dan ditawarkan pada harga P (dalam ribu rupiah) masing-masing.

1. Tentukan kuantitas dan harga keseimbangan di pasar tersebut?
2. Berapa besar kuantitas dan harga keseimbangan?

Pembahasan:

1. **Penentuan Kuantitas dan Harga Keseimbangan:**

Pertama, kita set Q_d sama dengan Q_s :

$$Q_d = Q_s$$

$$100 - 2P = 2P$$

Selanjutnya, kita selesaikan untuk P :

$$100 = 4P \text{ dan } P = 25 \text{riburupiah}$$

Sekarang, untuk menentukan kuantitas keseimbangan, kita masukkan nilai P kembali ke salah satu fungsi Q_d atau Q_s . Kita akan menggunakan fungsi penawaran:

$$Q_s = 2P$$

$$Q_s = 2 \times 25$$

$$Q_s = 50 \text{ton}$$

Jadi, kuantitas keseimbangan adalah 50 ton dan harga keseimbangan adalah 25 ribu rupiah.

Contoh soal 2 :

Dalam pasar persaingan sempurna, kurva permintaan industri diberikan oleh persamaan $Q = 100 - 2P$ dan kurva marginal cost (MC) perusahaan $MC = 10 + 0.4Q$. Tentukan kuantitas dan harga keseimbangan, serta hitung keuntungan maksimum perusahaan.

Pembahasan:

1. Kuantitas dan Harga Keseimbangan:

Untuk menentukan kuantitas dan harga keseimbangan, kita harus mencari titik di mana permintaan sama dengan penawaran, atau $Q_d=Q_s$.

Kurva permintaan: $Q_d=100-2P$ Kurva penawaran: $Q_s=Q$ (diketahui dalam pasar persaingan sempurna, Q_s sama dengan Q)

Jadi, kita dapatkan persamaan:

$$100-2P=10+0.4Q$$

Kita juga memiliki persamaan untuk kurva permintaan: $Q=100-2P$

Kita dapat memasukkan nilai Q dari kurva permintaan ke persamaan kurva penawaran:

$$Q_s=100-2P$$

Sekarang, kita set $Q_d=Q_s$:

$$100-2P=100-2P$$

Jadi, pada keseimbangan, kuantitas (Q) tidak akan terpengaruh oleh harga (P).

Untuk menentukan harga, kita bisa menggunakan salah satu persamaan, misalnya kurva permintaan:

$$Q=100-2P$$

$$0=100-2P$$

$$P=50$$

Jadi, kuantitas dan harga keseimbangan adalah $Q=50$ dan $P=50$.

2. Keuntungan Maksimum Perusahaan:

Keuntungan maksimum perusahaan terjadi saat pendapatan total (total revenue) minus biaya total (total cost) mencapai nilai maksimum.

Pendapatan total (TR) adalah hasil kali kuantitas dengan harga: $TR=P \times Q$ Biaya total (TC) adalah integral dari kurva cost: $TC=\int MCdQ$

Mari kita hitung keuntungan maksimum:

$$TR=P \times Q$$

$$TR=50 \times 50=2500$$

$$TC=\int (10+0.4Q)dQ$$

$$TC=10Q+0.2Q^2+C$$

$$TC=10(50)+0.2(50)^2+C$$

$$TC=500+500+C$$

$$TC=1000+C$$

Kita tahu bahwa pada pencapaian keuntungan maksimum, total fixed cost (C) adalah 13,50.

$$TC=1000+13.50=1013.50$$

Keuntungan (π) adalah selisih antara TR dan TC:

$$\pi=TR-TC=2500-1013.50=1486.50$$

Jadi, keuntungan maksimum perusahaan adalah 1486.50.

6.2. Pasar Monopoli: Monopoli terjadi ketika hanya ada satu penjual dalam pasar. Penjual tunggal ini memiliki kekuatan besar dalam menentukan harga dan jumlah produk yang dijual. Monopoli sering kali diatur oleh pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan pasar.

Ciri-ciri Pasar Monopoli

- 1) Hanya ada satu produsen/penjual yang menguasai seluruh atau sebagian besar supply suatu barang/jasa tertentu.
- 2) Barang/jasa yang dijual tidak ada pengganti (substitusi) yang sempurna
3. Seluruh pasar dikuasai sendiri, tidak terdapat barang sejenis sehingga tidak ada yang dapat mempengaruhi harga maupun jumlah yang diperdagangkan
- 4) Ada hambatan-hambatan produsen lain untuk masuk/keluar pasar (entry barriers)

Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Monopoli Monopoli dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu ;

1) Monopoli Yang Ditetapkan Pemerintah (Monopoli Negara).

- a) Monopoli yang dipegang pemerintah biasanya berdasarkan pertimbangan kepentingan umum, misalnya;
- b) Cabang produksi yang penting untuk pertahanan nasional atau yang menguasai hajat hidup orang banyak.
- c) Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan ekonomi
- d) Berdasarkan pertimbangan ekonomi

Misalnya lebih baik hanya ada satu sistem telepon, satu sistem kereta api, dan sebagainya.

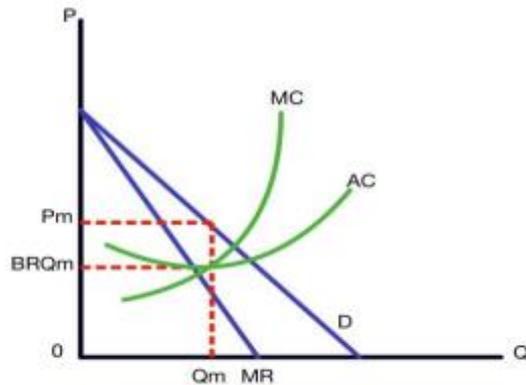
2) Monopoli Dikalangan Swasta. Bisa terjadi karena beberapa hal;

- a) Faktor skala ekonomi (*economic of scale*) yang memungkinkan produksi besar-besaran dengan biaya produksi persatuan yang lebih rendah, cabang produksi yang memerlukan modal dan jumlah yang begitu besar sehingga praktis tidak mungkin dilaksanakan banyak produsen dan lebih efisien dikerjakan oleh satu perusahaan saja. Misalnya pabrik pesawat terbang atau pabrik baja.
- b) Perusahaan menguasai pengadaan suatu sumber daya tertentu. Misalnya bahan galian tertentu, atau keadaan alam/iklim khusus, sumber air dan pantai indah, menguasai teknologi, menguasai keahlian dan lain-lain.
- c) Karena diberi kedudukan monopoli oleh pemerintah atau undang-undang. Misalnya hak cipta, hak paten, dan hak okrol (hak atas karya ilmiah atau penemuan ilmiah).

d) Karena kerja sama beberapa perusahaan dengan maksud menghilangkan persaingan antar mereka seperti persekongkolan atau kolusi

Keseimbangan Perusahaan Jangka Pendek.

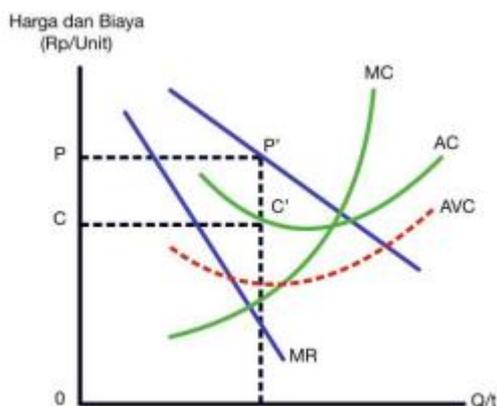
Sebagaimana halnya perusahaan yang bergerak dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan monopoli juga harus menyamakan MR dengan MC agar mencapai laba maksimum.



Gambar 2. Maksimisasi Laba Monopolis

Monopoli juga akan menderita rugi. Namun, apabila rugi akan diusahakan agar kerugiannya adalah minimum, juga pada tingkat output dimana $MR = MC$

Keseimbangan Jangka Panjang Perusahaan monopoli tidak mempunyai masalah besar dengan keseimbangan, selama jangka jangka pendek memperoleh laba maksimum. Dalam pasar persaingan sempurna, laba supernormal akan menarik perusahaan lain untuk masuk kedalam industri sehingga dalam jangka panjang perusahaan hanya menikmati laba normal saja. Hal ini tidak berlaku dalam pasar monopoli. Hambatan untuk masuk menyebabkan perusahaan monopoli mampu menikmati laba super normal, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan monopoli hanya akan kehilangan laba super normal jangka panjang, bila tidak mampu mempertahankan daya monopolinya. Keseimbangan dalam jangka panjang akan menjadi masalah bila dalam jangka pendek perusahaan mengalami kerugian. Bila ingin mempertahankan eksistensinya dalam jangka panjang, perusahaan harus berusaha mencapai laba. Salah satu cara yang harus ditempuh adalah meningkatkan efisiensi agar biaya produksi menjadi lebih murah.



Gambar 3. Penentuan Harga Atau Output dalam Monopoli

Penentuan Harga Atau Output dalam Monopoli

Dalam monopoli, perusahaan tunggal mengendalikan penawaran produk atau jasa tertentu di pasar. Oleh karena itu, dalam menentukan harga atau output, perusahaan monopoli tidak mengikuti mekanisme pasar persaingan sempurna. Sebaliknya, perusahaan monopoli memiliki kekuasaan pasar untuk menentukan harga dan outputnya sendiri.

Rumus umum untuk menentukan harga atau output dalam monopoli adalah sebagai berikut:

1. Rumus Penentuan Harga Monopoli: $MR=MC$ Dimana:

- MR adalah pendapatan marjinal.
- MC adalah biaya marjinal.

Perusahaan monopoli akan memproduksi pada tingkat output di mana pendapatan marjinal sama dengan biaya marjinal untuk memaksimalkan keuntungan.

2. Rumus Penentuan Output Monopoli:

$$MR=MC$$

$$TR=TC$$

Dimana:

- TR adalah pendapatan total.
- TC adalah biaya total.

Perusahaan monopoli akan memproduksi pada tingkat output di mana pendapatan total sama dengan biaya total untuk memaksimalkan keuntungan.

Contoh Soal:

Sebuah perusahaan monopoli menghasilkan dan menjual satu jenis produk. Kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan tersebut adalah $P=200-0.5Q$, di mana P adalah harga dan Q adalah kuantitas yang diminta. Biaya total perusahaan dinyatakan oleh $TC=50Q+5000$, di mana Q adalah kuantitas yang diproduksi.

Tentukan tingkat output yang akan memaksimalkan keuntungan perusahaan monopoli dan harga yang sesuai. Hitung juga keuntungan maksimum yang dapat diperoleh perusahaan tersebut

Pembahasan:

1. Tingkat Output yang Memaksimalkan Keuntungan:

Pendapatan marjinal (MR) diberikan oleh turunan pertama dari fungsi pendapatan total (TR). Biaya marjinal (MC) diberikan oleh turunan pertama dari fungsi biaya total (TC).

$$TR=P \times Q$$

$$TC=50Q+5000$$

Turunan pertama dari TR adalah MR dan turunan pertama dari TC adalah MC .

$$MR=d(TR) / dQ$$

$$MC=d(TC)/dQ$$

Kita menyeimbangkan MR dan MC untuk menentukan tingkat output yang memaksimalkan keuntungan.

$$MR=MC$$

$$200-0.5Q=50$$

$$0.5Q=150$$

$$Q=300$$

Jadi, tingkat output yang akan memaksimalkan keuntungan perusahaan monopoli adalah 300 unit.

2. Harga yang Sesuai:

Setelah menentukan tingkat output, kita bisa mencari harga yang sesuai dengan menggunakan fungsi permintaan:

$$P=200-0.5Q$$

$$P=200-0.5(300)$$

$$P=200-150$$

$$P=50$$

Jadi, harga yang sesuai adalah 50 unit.

2. Harga yang Sesuai:

Setelah menentukan tingkat output, kita bisa mencari harga yang sesuai dengan menggunakan fungsi permintaan:

$$P=100-0.5Q$$

$$P=100-0.5(196)$$

$$P=100-98$$

$$P=2$$

Jadi, harga yang sesuai adalah 2 unit.

3. Keuntungan Maksimum:

Untuk menghitung keuntungan maksimum, kita perlu mencari pendapatan total (TR) dan biaya total (TC) pada tingkat output yang telah ditentukan.

$$TR=P \times Q$$

$$TR=50 \times 300$$

$$TR=15000$$

$$TC=50Q+5000$$

$$TC=50(300)+5000$$

$$TC=15000+5000$$

$$TC=20000$$

Keuntungan maksimum (π) adalah selisih antara pendapatan total dan biaya total:

$$\pi=TR-TC=15000-20000=-5000$$

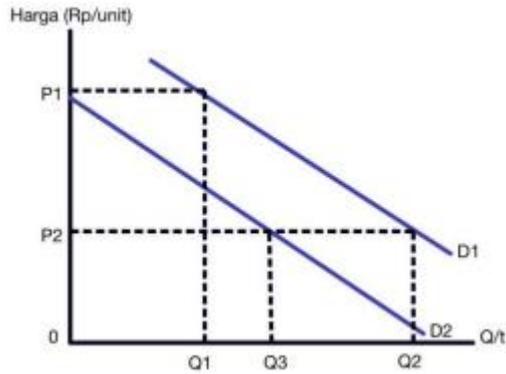
Jadi, keuntungan maksimum yang dapat diperoleh perusahaan monopoli adalah -5000 unit. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian pada tingkat output yang memaksimalkan keuntungan.

7. Pasar Oligopoli: Dalam oligopoli, hanya ada beberapa penjual besar yang mengontrol mayoritas pangsa pasar. Karena jumlah penjual terbatas, tindakan satu perusahaan dapat mempengaruhi harga dan strategi pesaing. Industri otomotif dan industri pesawat terbang adalah contoh oligopoli.

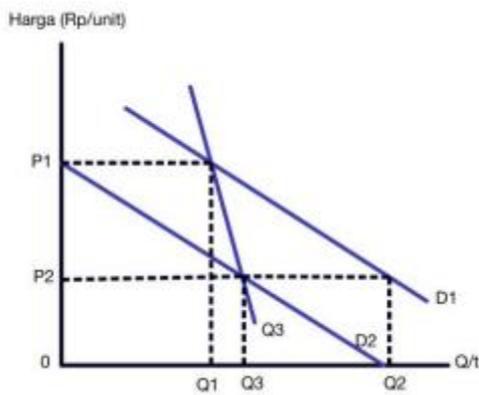
Karakteristik Pasar Oligopoli

- 1) Hanya sedikit perusahaan dalam industri (few number of firm),
- 2) Produk homogen atau terdiferensiasi (homogen or differentiated product)
- 3) Pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi (interdependence decision)

Kompetisi non harga Terdapat dua perusahaan yang menguasai pasar yang menghasilkan suatu produk atau yang biasa disebut dengan duopoli. Untuk sederhananya, anggap bahwa produk tersebut homogen dan para pembeli memilih produk di antara kedua perusahaan tersebut semata-mata berdasarkan harganya. Anggap pula bahwa kedua perusahaan tersebut menetapkan harga yang sama dan masing-masing mempunyai pangsa (share) pasar yang sama. Sekarang misalkan perusahaan A berusaha untuk meningkatkan penjualannya dengan cara menurunkan harganya, maka semua pembeli akan membeli produk perusahaan A tersebut dan perusahaan B akan kehilangan pangsa pasar yang cukup besar. Untuk mempertahankan para pembelinya, maka perusahaan B akan bereaksi dengan cara menurunkan harganya pula. Maka tidak ada satu perusahaan pun yang bisa bertindak secara bebas. Tindakan yang diambil suatu perusahaan pasti akan menimbulkan reaksi perusahaan lainnya.



Gambar 4. Kurva Permintaan sebelum ada reaksi



Gambar 5. Kurva Permintaan Setelah ada Reaksi

Dalam pasar oligopoli, terdapat beberapa perusahaan yang mendominasi pasar dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi harga atau output secara kolektif. Keputusan tentang harga atau output dalam oligopoli dapat bervariasi tergantung pada strategi yang diadopsi oleh perusahaan-perusahaan dalam industri tersebut. Beberapa pendekatan umum dalam menentukan harga atau output dalam oligopoli meliputi:

1. **Koordinasi Harga:** Dalam beberapa kasus, perusahaan-perusahaan dalam oligopoli dapat mencapai kesepakatan untuk mengkoordinasikan harga mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama informal atau melalui bentuk koordinasi yang lebih terstruktur seperti kartel. Dalam strategi ini, perusahaan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan kolektif mereka.
2. **Penentuan Harga Berdasarkan Perilaku Pesaing:** Perusahaan dalam oligopoli harus memperhitungkan tindakan dan reaksi pesaingnya dalam menentukan harga. Jika satu perusahaan mengubah harga atau outputnya, pesaingnya mungkin akan merespons dengan tindakan tertentu. Oleh karena itu, perusahaan harus memperkirakan bagaimana tindakan mereka akan mempengaruhi tindakan pesaing dan bagaimana reaksi pesaing akan mempengaruhi keuntungan mereka sendiri.
3. **Model Perilaku Berbasis Game:** Pendekatan ini melibatkan analisis perilaku pesaing dalam bentuk permainan strategi, seperti teori permainan. Perusahaan memperkirakan reaksi pesaing terhadap berbagai strategi yang mereka pilih dan memilih tindakan yang akan memaksimalkan keuntungan mereka dalam konteks interaksi dengan pesaing.

Berikut adalah contoh penerapan beberapa pendekatan tersebut:

Contoh:

Misalkan terdapat dua perusahaan besar dalam industri otomotif yang mendominasi pasar. Kedua perusahaan tersebut, Perusahaan X dan Perusahaan Y, mengendalikan sebagian besar pangsa pasar. Mereka dapat mengambil beberapa pendekatan dalam menentukan harga atau output:

1. **Koordinasi Harga:** Perusahaan X dan Perusahaan Y dapat mencapai kesepakatan untuk mempertahankan harga tertentu untuk mobil mereka. Dengan demikian, mereka dapat menghindari persaingan harga yang intensif dan memastikan keuntungan yang stabil.
 2. **Penentuan Harga Berdasarkan Perilaku Pesaing:** Jika Perusahaan X menurunkan harga mobil mereka, Perusahaan Y harus mempertimbangkan bagaimana mereka akan merespons. Jika Perusahaan Y juga menurunkan harga, hal ini dapat mengarah pada penurunan keuntungan bagi kedua perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan X harus memperkirakan reaksi Perusahaan Y sebelum membuat keputusan tentang harga.
 3. **Analisis Game Strategi:** Perusahaan X dan Perusahaan Y dapat menggunakan model permainan strategi untuk menganalisis berbagai skenario dan memilih tindakan yang paling menguntungkan dalam konteks interaksi mereka. Mereka dapat mempertimbangkan tindakan seperti menawarkan program insentif, meningkatkan kualitas mobil, atau bahkan memasuki pasar baru.
8. Pasar persaingan Monopolistik adalah pasar di mana terdapat banyak penjual, tetapi setiap penjual menawarkan produk yang sedikit berbeda. Ini memungkinkan perusahaan untuk mempengaruhi harga produk mereka dalam batas tertentu. Contoh dari pasar ini termasuk industri mode dan restoran.

Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik selengkapnya adalah sebagai berikut:

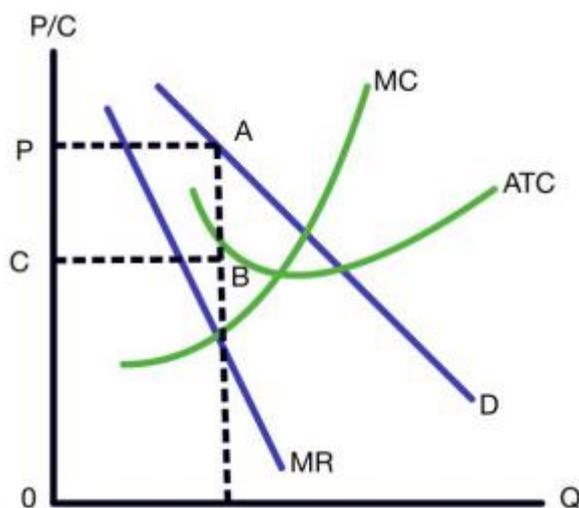
- Terdapat banyak penjual. Terdapat banyak penjual tetapi tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna. Perusahaan-perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik mempunyai ukuran yang relatif sama.
- Produknya tidak homogen (berbeda corak). Produk perusahaan persaingan monopolistik berbeda coraknya dan secara fisik mudah untuk membedakan antara produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan lainnya. Sifat ini adalah sifat yang penting untuk membedakannya dengan sifat pada pasar persaingan sempurna. Perbedaan-perbedaan lain dapat berupa packaging, promosi, cara pembayaran dalam pembelian, pelayanan penjualan, dan sebagainya. Karena perbedaan corak tersebut maka produk perusahaan-perusahaan persaingan monopolistik tidak bersifat substitusi sempurna. Mereka hanya bersifat substitusi dekat (close substitute). Beberapa perbedaan inilah yang menjadi sumber kekuatan monopoli dari perusahaan-perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik.
- Perusahaan mempunyai sedikit kekuatan mempengaruhi harga. Kekuatan mempengaruhi harga tidak sebesar pada pasar monopoli dan oligopoli. Kekuatan mempengaruhi harga bersumber dari perbedaan corak produk. Perbedaan ini mengakibatkan para pembeli akan memilih. Pembeli dapat lebih menyukai produk suatu perusahaan tertentu dan kurang menyukai produk perusahaan lainnya. Sehingga jika suatu perusahaan menaikkan harga, ia masih dapat menarik pembeli walaupun tidak sebanyak sebelum

kenaikan harga. Sebaliknya jika suatu perusahaan menurunkan harga, belum tentu diikuti oleh kenaikan permintaan produk yang dihasilkan.

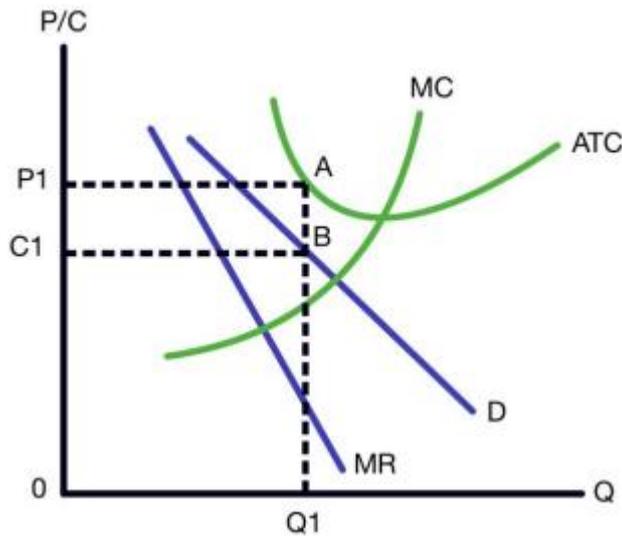
- Masuk ke dalam industri/pasar relatif mudah. Masuk ke dalam pasar persaingan monopolistik tidak seberat masuk pasar monopoli dan oligopoli tetapi tidak semudah masuk pasar persaingan sempurna. Hal ini disebabkan oleh modal yang diperlukan relatif besar dibandingkan dengan perusahaan pada pasar persaingan sempurna dan harus menghasilkan produk yang berbeda dengan produk yang sudah ada di pasar. Persaingan promosi penjualan sangat aktif. Dalam pasar persaingan monopolistik harga bukan penentu utama besarnya pasar. Suatu perusahaan mungkin menjual produknya dengan harga cukup tinggi tetapi masih dapat menarik banyak pelanggan. Sebaliknya mungkin suatu perusahaan menjual produknya dengan harga yang cukup murah tetapi tidak banyak menarik pelanggan. Oleh karena itu untuk menarik para pelanggan, perusahaan harus aktif melakukan promosi, memperbaiki pelayanan, mengembangkan desain produk, meningkatkan mutu produk, dan sebagainya.

Setiap bentuk pasar memiliki karakteristik uniknya sendiri yang mempengaruhi perilaku perusahaan dan hasil ekonomi secara keseluruhan.

Keseimbangan Jangka Pendek Kurva permintaan perusahaan persaingan monopolistik merupakan peralihan dari kurva permintaan persaingan sempurna dan kurva permintaan monopoli. Maka, kurva tersebut sedikit miring dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya bahwa elastisitas permintaannya lebih kecil dari pada elastisitas permintaan persaingan sempurna tetapi lebih besar dari elastisitas permintaan monopoli. Analisis keseimbangan pada perusahaan persaingan monopolistik sama dengan analisis pada perusahaan monopoli. Bedanya, permintaan yang dihadapi perusahaan monopoli adalah seluruh permintaan pasar, sedang yang dihadapi perusahaan persaingan monopolistik adalah sebagian dari permintaan pasar. Terdapat 2 keadaan keseimbangan pasar persaingan monopolistik yang menunjukkan keadaan dimana pasar dalam hal ini perusahaan mendapatkan keuntungan, dan mendapatkan kerugian.

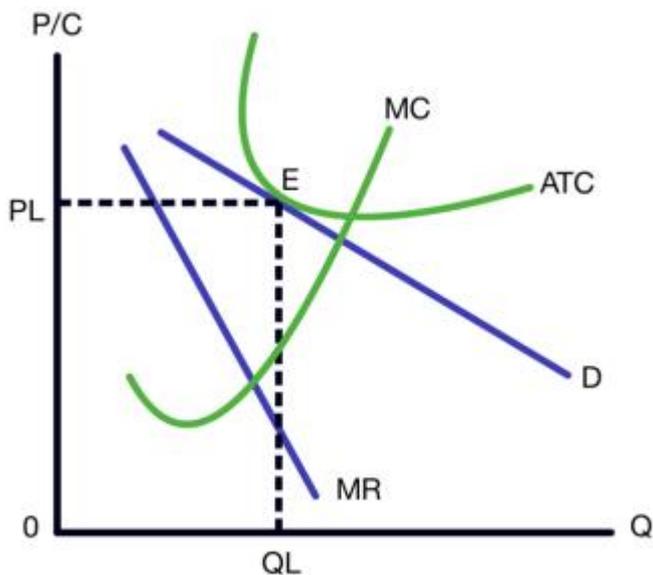


Gambar 7. Kurva Keadaan Perusahaan Memperoleh Keuntungan



Gambar 8. Kurva Keadaan Perusahaan Mengalami Kerugian Berdasarkan gambar tersebut, menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh keuntungan maksimum pada tingkat produksi dan penjualan sebesar Q dan tingkat harga sebesar P karena pada keadaan ini terpenuhinya syarat keuntungan yaitu ($MR = MC$). Luas PABC menunjukkan jumlah keuntungan maksimum yang diperoleh. Sedangkan pada gambar 8 menunjukkan bahwa kerugian minimum pada tingkat produksi dan penjualan sebesar Q1 dan tingkat harga P1. Kerugian minimum sebesar P1ABC1

Keseimbangan Jangka Panjang Perolehan keuntungan diatas normal seperti yang ditunjukkan dalam gambar 7, mengundang masuknya perusahaan-perusahaan baru. Akibatnya, setiap perusahaan akan menghadapi permintaan yang lebih sedikit pada berbagai tingkat harga. Artinya bahwa masuknya perusahaan-perusahaan baru mengakibatkan kurva permintaan dan tentunya juga kurva MR perusahaan persaingan monopolistik bergeser ke kiri. Masuknya perusahaan-perusahaan baru akan berlangsung terus sehingga perusahaan hanya menerima keuntungan normal. Jadi, dalam jangka panjang, perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik hanya menerima keuntungan normal, seperti halnya perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Gambar 9 menunjukkan keseimbangan perusahaan persaingan monopolistik dalam jangka panjang.



Gambar 9. Keseimbangan Jangka Panjang Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa PL adalah sama dengan biaya total rata-rata (ATC) yang artinya perusahaan memperoleh laba normal. Sifat perusahaan persaingan monopolistik ketika memperoleh laba normal berbeda dengan sifat perusahaan persaingan sempurna yang juga ketika memperoleh laba normal. Perbedaan tersebut adalah (1) harga jual produk dan biaya produksi pada perusahaan persaingan monopolistik lebih tinggi dibanding pada perusahaan persaingan sempurna, dan (2) kegiatan produksi pada perusahaan persaingan monopolistik belum mencapai tingkat optimal (tingkat produksi dengan biaya per unit paling rendah). Beberapa sifat perusahaan persaingan monopolistik tersebut tentu akan merugikan konsumen, karena apabila mereka beroperasi seperti perusahaan persaingan sempurna maka masyarakat konsumen akan dapat membeli produk dengan harga yang lebih rendah dan jumlah produk yang lebih banyak

Rumus Penentuan Harga Atau Output dalam pasar persaingan monopolistik

Dalam pasar persaingan monopolistik, rumus untuk menentukan harga atau output tidaklah setara seperti dalam model persaingan sempurna atau monopoli murni. Pasar persaingan monopolistik adalah suatu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen kecil yang menawarkan produk yang mirip tetapi tidak identik. Di sini, setiap produsen memiliki sedikit kekuasaan pasar, tetapi mereka masih mampu mempengaruhi harga produk mereka dalam batas tertentu.

Rumus umum untuk menentukan harga atau output dalam pasar persaingan monopolistik biasanya melibatkan pertimbangan atas permintaan dan biaya:

1. **Permintaan Produk:** Produsen dalam pasar persaingan monopolistik biasanya mempertimbangkan elastisitas permintaan produk mereka. Mereka akan memperhatikan seberapa responsif konsumen terhadap perubahan harga. Semakin elastis permintaan, semakin sulit bagi produsen untuk menaikkan harga tanpa kehilangan sebagian besar pangsa pasar mereka.
2. **Biaya Produksi:** Produsen juga harus memperhitungkan biaya produksi mereka, termasuk biaya tetap dan variabel. Ini termasuk biaya untuk bahan baku, tenaga kerja, sewa, utilitas, dan lain-lain.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, produsen dalam pasar persaingan monopolistik akan mencoba untuk menetapkan harga atau output yang mengoptimalkan keuntungan mereka. Namun, tidak ada rumus tunggal yang dapat diterapkan seperti dalam model pasar yang lebih sederhana seperti persaingan sempurna. Setiap produsen akan menggunakan pendekatan yang berbeda berdasarkan pada karakteristik unik dari produk mereka, preferensi konsumen, biaya produksi, dan strategi pemasaran mereka.

Pasar Persaingan menurut Islam

Pasar Persaingan Sempurna Menurut Perspektif Islam Menurut islam ini adalah struktur pasar yang ideal terjadi, dimana penentuan harga sepenuhnya ditentukan oleh tarikan permintaan dan penawaran di pasar, tidak ada intervensi pasar. Rasulullah SAW sangat menjunjung tinggi pembentukan harga yang terjadi akibat pembentukan mekanisme pasar yang terjadi. Apabila Adam Smith mengatakan bahwasanya mekanisme pasar terjadi oleh adanya invisible hand (tangan –tangan ghaib) sebenarnya yang dikatakan tersebut terinspirasi oleh pemikiran ekonom muslim terdahulu. Namun, struktur pasar persaingan sempurna tidaklah mungkin dapat terjadi dalam kehidupan nyata meskipun baik dalam ekonomi konvensional, maupun islam keduanya mengatakan bahwa struktur persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling baik dibandingkan dengan struktur pasar yang lainnya.

Pasar Monopolistik Dalam Perspektif Islam Monopoli secara harfiah berarti di pasar hanya ada satu penjual. Frank Fisher menjelaskan kekuatan monopoli sebagai "the ability to act in unconstrained way" (kemampuan bertindak dalam menentukan harga) dengan caranya sendiri), sedangkan Besanko (et. Al) menjelaskan monopoli sebagai penjual yang menghadapi "Little or no competition" (kecil atau tidak ada persaingan) di pasar. Dalam islam keberadaan satu penjual di pasar, atau adanya pesaing, atau kecilnya persaingan di pasar, bukanlah suatu hal yang terlarang, siapapun boleh berdagang tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain. Jadi monopoli dalam artian harfiah, boleh-boleh saja. Akan tetapi, siapapun dia tidak boleh melakukan ihtikar. Pandangan Islam terhadap keberadaan satu penjual di pasar (pasar monopoli), atau tidak adanya pesaing, atau kecilnya persaingan di pasar, bukanlah suatu hal yang terlarang. Namun perlu diketahui bahwa Islam tidak membolehkan adanya Ihtikhar. Ihtikhar adalah mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Abu Hurairah r.a meriwayatkan hadis Nabi SAW, sebagai berikut: "Barangsiapa yang melakukan ihtikar untuk merusak harga pasar sehingga harga pasar naik secara tajam, maka ia berdosa." (Riwayat Ibnu Majah dan Ahmad) Secara lebih spesifik mazhab Syafi'i dan Hanbali mendefinisikan ihtikar sebagai: "Menimbun barang yang telah dibeli pada saat harga bergejolak tinggi untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi pada saat dibutuhkan oleh penduduk setempat atau lainnya"

Pasar Monopoli Dalam Perspektif Islam Menurut M.N. Siddiqi (1992), monopoli adalah "...as a firm producing a product whose cross-elasticity of demand is small". Sementara, Qardhawi (1997) mengartikan monopoli adalah menahan barang untuk tidak beredar di pasar supaya naik harganya. Dari defenisi ini terlihat bahwa tindakan monopoli dilakukan atas dorongan untuk mendapatkan laba maksimal. Dalam Islam, siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain. Menyimpan stok barang untuk keperluan persediaanpun tidak dilarang dalam Islam.⁹⁴ Akan tetapi siapapun dia tidak boleh melakukan ikhtikar. Ikhtikar adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Abu Hurairah r.a. meriwayatkan hadits Rasulullah SAW. sebagai berikut "Barangsiapa yang melakukan ikhtikar untuk merusak harga naik secara tajam, maka ia berdosa". (H.R. Ibnu Majah dan Ahmad)⁹⁵ Struktur pasar yang bersifat monopoli bukanlah suatu hal yang haram apabila situasi dan kondisi perekonomian mengarah pada struktur pasar monopoli seperti pada kasus monopoli alamiah. Namun yang tidak diperkenankan adalah perilaku monopolistic (monopolistic behavior) seperti menetapkan harga di atas harga pasar demi menarik keuntungan yang sebanyakbanyaknya atau menurunkan kuantitas produksi agar dapat menaikkan harga yang tinggi seperti pada defenisi monopoli yang dinyatakan oleh M.N. Siddiqi dan Qardhawi. Demikian pula, menyimpan persediaan. Yang dilarang adalah ikhtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya disebut monopoly's rent tidak boleh. Selama ini banyak ekonom muslim menyamakan antara arti ikhtikar dan penimbunan, kedua defenisi tersebut tidak bisa disamakan sebab dalam islam menimbun barang tidaklah suatu hal yang salah selama penimbunan barang yang dilakukan murni untuk persediaan dan bukan untuk mengacaukan mekanisme pasar. Terakhir perlu dijelaskan bahwa perusahaan monopoli dalam banyak kasus tidaklah begitu disukai dalam praktek ekonomi, alasannya dengan status monopolinya maka perusahaan dapat bertindak sewenang-wenang kepada masyarakat melalui penjualan produknya. Perusahaan dapat saja menaikkan harga produknya sewaktu-waktu tanpa memperhatikan kemampuan/daya beli sebagian masyarakat, di sisi lain manakala perusahaan ini menganggap tidak semua produknya dapat diserap oleh masyarakat, maka dengan mudahnya ia memperkecil jumlah produknya untuk menyeimbangkan biaya produksi dengan jumlah yang ditawarkan agar masih memperoleh keuntungan yang besar.

Tubagus Rifqy Thantawi, M.Si.

INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID

Jl. Kapten Dasuki Bakri, Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Bogor, Jawa Barat 16810

rifqyt@yahoo.com

BAB 7 PRODUK NASIONAL DAN PENDAPATAN NASIONAL

Sebuah Bunga Rampai Ilmu Ekonomi dari Literasi Pemikiran
dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Diterbitkan oleh:

INAIS Press

BAB 7 PRODUK NASIONAL DAN PENDAPATAN NASIONAL

PENDAHULUAN

Arus perputaran mesin ekonomi adalah gambaran dari suatu kegiatan perekonomian negara yang paling sederhana, karena di dalam perekonomian terdapat dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Hal ini berarti di dalam perekonomian diibaratkan tidak terdapat kegiatan pemerintah dan perdagangan luar negeri. Sektor rumah tangga terdiri dari orang-orang baik perorangan maupun kelompok orang, lembaga maupun badan yang fungsinya dalam perekonomian sebagai:

1. Konsumen, yaitu pihak yang membeli barang-barang dan jasa-jasa dengan jalan membelanjakan sarana pendapatannya, yang berarti tidak ada orang yang menabung.
2. Pemilik faktor-faktor produksi yaitu pihak yang menawarkan berbagai jenis faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor perusahaan untuk digunakan dalam memproduksi barang dan jasa.

Sektor perekonomian terdiri dari perusahaan-perusahaan swasta asing dan nasional, perusahaan negara, dan koperasi yang fungsinya dalam perekonomian sebagai:

1. Penjual, yaitu mereka yang menjual semua barang yang diproduksinya. Ini berarti bahwa jumlah barang-barang yang berada di produsen tidak pernah mengalami perubahan, dan
2. Produsen, yaitu mereka yang mengombinasikan berbagai jenis faktor produksi untuk memproduksi barang dan jasa yang diperlukan masyarakat, serta membayar faktor produksi yang mereka gunakan dengan semua pendapatan dari penjualan hasil produksinya.

Arus barang dan jasa yang mengalir dari sektor perusahaan yang memproduksi barang dan jasa ke sektor rumah tangga yang membeli untuk memenuhi segala kebutuhannya. Kemudian arus uang mengalir dari sektor rumah tangga dalam bentuk pengeluaran uang atau belanja ke sektor perusahaan. Kemudian pula, arus berbagai jenis faktor produksi yang mengalir dari perusahaan ke rumah tangga sebagai pembayaran atas penggunaan berbagai jenis faktor produksi yang dapat dikelompokkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel I. Tabel Jenis Faktor Produksi dan Ragam Pembayaran

Jenis Faktor Produksi	Ragam Pembayaran
Tenaga kerja	Upah atau gaji
Modal	Bunga atau Bagi hasil
Tanah	Sewa
Wirausaha atau Pengusaha	Laba

Nilai barang dan jasa yang dihasilkan sektor perusahaan yang kemudian dibeli oleh sektor rumah tangga yang disebut dengan produk nasional, sama dengan nilai dari pengeluaran atau belanja sektor rumah tangga untuk memperoleh barang dan jasa yang disebut dengan pengeluaran nasional atau belanja nasional. Sama nilainya juga dengan penerimaan sektor rumah tangga sebagai balas jasa penggunaan faktor-faktor produksi yang disebut dengan pendapatan nasional. Oleh karena nilai dari masing-masing arus itu sama, maka perputaran mesin ekonomi tersebut berlangsung secara terus-menerus. Ini lah arus perputaran mesin ekonomi yang memberikan kemakmuran negara dan masyarakat yang

menghasilkan barang dan jasa, memberikan pendapatan, pekerjaan, mengharuskan pengeluaran, dan menimbulkan pertukaran antara sektor rumah tangga dan perusahaan.

RINCIAN PEMBAHASAN MATERI

PRODUK NASIONAL DAN PENDAPATAN NASIONAL

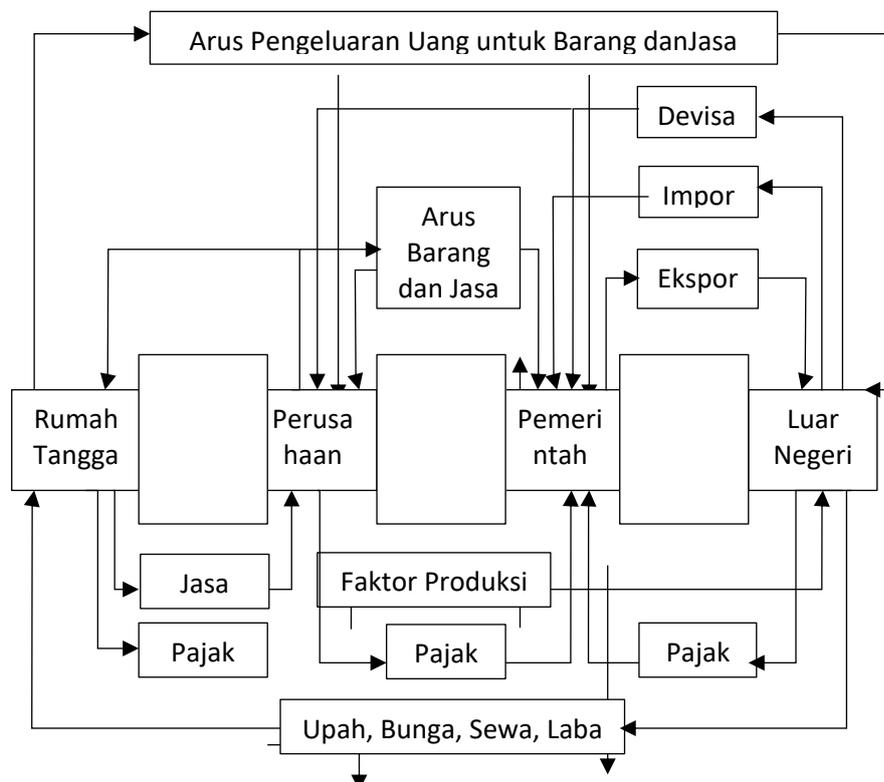
PERPUTARAN MESIN EKONOMI

Dalam masyarakat yang terlibat dalam perputaran mesin ekonomi ada empat yaitu:

1. Sektor rumah tangga.
2. Sektor perusahaan.
3. Sektor pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota yang membiayai pengeluaran-pengeluarannya dengan pendapatan yang diperoleh sebagian besar dari penerimaan pajak.
4. Sektor luar negeri, yang membiayai pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh barang-barang dari luar negeri (barang impor) dengan devisa yang diperoleh sebagian dari penjualan barang-barang ekspor atau barang-barang yang dijual ke luar negeri.

Dengan dimasukkannya sektor pemerintah dan sektor luar negeri ke dalam arus perputaran mesin ekonomi, maka gambarannya nampak lebih rumit seperti di dalam gambar di bawah ini.

Gambar I. Gambar Perputaran Mesin Ekonomi.



Kerumitan itu muncul karena arus barang dan jasa dari sektor perusahaan tidak hanya mengalir ke sektor rumah tangga, melainkan juga ke sektor pemerintah dan sektor luar negeri sebagai ekspor. Pemerintah adalah konsumen bagi barang-barang dan jasa yang dihasilkan sektor perusahaan dan bagian pemerintah yang lain. Pemerintah dalam perekonomian Indonesia juga sebagai produsen barang dan jasa yang sangat besar, seperti pertahanan keamanan, listrik, air, gas, pendidikan, kesehatan, pertambangan, pengangkutan, dan lainnya. Arus uang dari sektor rumah tangga, perusahaan, dan sektor luar negeri ke sektor pemerintah berupa pembayaran pajak, cukai dan pungutan-pungutan lain. Sebaliknya arus uang dari pemerintah ke sektor lainnya itu berupa subsidi, hadiah, bantuan, upah dan gaji, pembelian barang dan lainnya.

Arus barang dan jasa dari sektor perusahaan dan pemerintah ke sektor luar negeri merupakan ekspor. Sebaliknya, arus uang luar negeri merupakan penerimaan devisa bagi sektor pemerintah dan perusahaan, barang dan jasa dari luar negeri ke sektor pemerintah, perusahaan, dan rumah tangga merupakan arus barang-barang impor. Sebaliknya arus uang sebagai pembayaran ke luar negeri. Demikian pula halnya dengan faktor-faktor produksi selain digunakan oleh sektor perusahaan, juga digunakan oleh sektor pemerintah dan sektor luar negeri, dan tentunya sebagai balas jasa atas pembayarannya, arus uang mengalir ke rumah tangga berupa upah atau gaji, sewa dan laba. Dengan demikian, arus barang dan jasa di satu pihak dan arus pengeluaran uang di lain pihak, juga arus faktor produksi di satu pihak dan arus pembayaran sebagai balas jasa di lain pihak mengalir dari dan ke empat sektor tersebut empat sektor tersebut mempunyai nilai yang sama, Dengan demikian, perputaran mesin ekonomi berlangsung terus-menerus.

Apabila arus perputaran mesin ekonomi ini berhenti, berarti berhenti pula kegiatan produksi barang dan jasa, berhenti pula arus pendapatan, sehingga terjadi pengangguran faktor-faktor produksinya. Penghentian arus perputaran mesin ekonomi berarti suatu bencana. Sebaliknya, semakin giat perputaran mesin ekonominya, berarti semakin besar pula produk nasionalnya atau pendapatan nasionalnya.

PERHITUNGAN NILAI PRODUKSI

Untuk menghitung nilai produksi yang dihasilkan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu, dapat digunakan tiga cara perhitungan. Ketiga cara perhitungan tersebut ialah:

1. Cara Produksi.

Dengan cara produksi, yaitu nilai seluruh hasil produksi yang diperoleh dari menjumlahkan nilai-nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh berbagai lapangan usaha yang ada dalam perekonomian. Hasil perhitungannya disebut produk domestik bruto.

2. Cara Pengeluaran.

Dengan cara pengeluaran atau menurut penggunaan nilai seluruh hasil produksi yang diperoleh dari penjumlahan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga dan perusahaan, pemerintah dan luar negeri atas produk barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara. Pengeluaran dari semua sektor perekonomian itu disebut pengeluaran nasional. Dapat pula disebut belanja nasional.

3. Cara Pendapatan.

Dengan cara pendapatan, yaitu nilai seluruh hasil produksi dalam perekonomian yang diperoleh dengan menjumlahkan pendapatan seluruh faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, yaitu pendapatan dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal yang ditawarkan, dan keahlian kepemimpinan. Hasil perhitungan dengan cara pendapatan dinamakan pendapatan nasional.

Nilai seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam suatu periode tertentu (1 tahun) dinamakan produk domestik bruto atau *gross domestic bruto* disingkat PDB (GDP). Dinamakan produk karena yang dijumlahkan adalah nilai tambah produk yang berbentuk barang dan jasa. Nilai tambah produksi barang dan jasa ini tidak dihitung satu per satu, tetapi dikelompokkan ke dalam sebelas kelompok berdasarkan lapangan usaha. Dinamakan domestik karena produk yang dihitung itu adalah yang dihasilkan dalam batas-batas wilayah suatu negara, tanpa memperhatikan apakah produksi itu dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang berasal dari dalam negeri, atau faktor-faktor produksi yang berasal dari negara-negara lain yang digunakan oleh negara itu (dalam negeri). Dinamakan bruto karena di dalamnya termasuk sejumlah penyusutan barang-barang modal yang digunakan untuk memproduksi.

Pemerintah Republik Indonesia menganut sistem ekonomi pintu terbuka bagi modal asing, maka banyak pula modal asing dan tenaga asing, khususnya yang memiliki keahlian kepemimpinan yang digunakan dalam berbagai lapangan usaha, ikut menghasilkan berbagai macam barang dan jasa. Dengan sendirinya barang-barang dan jasa ini tetap menjadi milik negara lain, yang pada suatu saat harus dikirimkan atau diperhitungkan ke dalam produksi negara asalnya. Di samping itu ada pula tenaga kerja Indonesia dan modal yang digunakan oleh negara lain. Dari pendapatan yang diperoleh, juga harus diperhitungkan ke dalam produk nasional.

Perbedaan nilai dan pendapatan faktor-faktor produksi yang dimiliki negara lain yang digunakan negara itu dan pendapatan yang diperoleh dari faktor-faktor produksi negara itu yang digunakan oleh negara lain dinamakan pendapatan faktor neto terhadap luar negeri (*net factor income from abroad*). Hasil pengurangan produk domestik bruto dengan pendapatan neto faktor terhadap luar negeri dinamakan produk nasional bruto (*gross national product*) disingkat PNB (GNP). Dinamakan produk karena yang dihitung adalah nilai tambah produk yang berbentuk barang dan jasa. Dinamakan nasional karena yang dihitung adalah produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara itu tanpa membedakan apakah faktor produksi tersebut berada di dalam atau luar negeri, sedangkan produksi dengan penggunaan faktor-faktor produksi negara lain tidak diperhitungkan. Dinamakan bruto karena di dalamnya termasuk penyusutan.

Dengan demikian, yang dimaksud produk nasional bruto adalah penjumlahan dari semua barang dan jasa akhir atau semua nilai tambah yang dihasilkan oleh warga dari suatu negara tertentu dalam periode waktu tertentu (1 tahun). Produk nasional bruto dapat lebih besar atau lebih kecil dari produk domestik bruto. Jika produk nasional bruto suatu negara lebih kecil dibandingkan produk domestik brutonya, maka suatu negara lebih banyak menggunakan sumber-sumber produksi luar negeri dibandingkan sumber-sumber produksi warga negaranya yang digunakan di luar negeri.

Sampai saat ini jika terdapat suatu negara produk domestik brutonya lebih besar dibandingkan produk nasional brutonya, maka lebih banyak pembayaran faktor produksi luar negeri oleh negara tersebut, jika dibandingkan balas jasa faktor produksi milik warga negara tersebut yang digunakan di luar negeri. Sebaliknya untuk negara-negara yang sudah maju yang lebih banyak menanamkan modalnya di luar negeri dibandingkan modal yang masuk ke negaranya, maka produk nasional brutonya lebih besar dibandingkan produk domestik brutonya. Contoh negara-negara yang mempunyai produk nasional brutonya lebih besar dibandingkan produk domestik brutonya ialah Amerika Serikat, Jepang, Inggris, dan Jerman.

BARANG DAN JASA MENURUT PENGGUNAAN ATAS PRODUK NASIONAL.

Barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor dalam masyarakat dapat digolongkan menurut macam penggunaan atas produk nasional, yaitu:

1. Konsumsi Rumah Tangga.

Konsumsi rumah tangga yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga atas barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh berbagai perusahaan. Di Indonesia angka pengeluaran konsumsi rumah tangga diperoleh dari produk domestik bruto setelah dikurangi dengan pengeluaran pemerintah, investasi (pembentukan modal tetap domestik bruto) dan ekspor neto, sehingga dapat dilihat bahwa untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga terdapat sisa (residual).

2. Investasi.

Investasi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh para pengusaha untuk membeli barang-barang modal guna mendirikan perusahaan atau memperluas perusahaannya. Investasi terdiri dari:

- a. Barang-barang modal.
- b. Persediaan bahan mentah.
- c. Persediaan barang jadi dan barang setengah jadi.

Sebagian dari barang-barang modal yang dapat dibuat pada masa lampau, mengalami penyusutan pada saat ini, baik karena digunakan maupun karena disimpan. Angka investasi yang masih mengandung angka penyusutan ini disebut investasi bruto. Hasil pengurangan angka penyusutan dan investasi bruto dinamakan investasi neto. Dengan demikian, investasi neto sama dengan investasi bruto dikurangi penyusutan.

3. Pengeluaran pemerintah.

Pengeluaran pemerintah yaitu pengeluaran yang dilakukan pemerintah atas berbagai barang dan jasa, baik konsumsi maupun investasi. Misalnya pemerintah membeli peralatan kantor atau beras (barang konsumsi) atau membeli kapal, mesin-mesin atau membuat kontrak atau perjanjian untuk membuat pembangkit listrik, atau membangun sekolah (barang produksi), atau menggaji pegawai untuk menjaga pengrusuhan barang (jasa). Pembelian barang-barang dan jasa-jasa oleh pemerintah merupakan bagian dari produk nasional. Lain halnya dengan pengeluaran-pengeluaran pemerintah untuk pembayaran dana pensiun, tunjangan veteran, bantuan-bantuan sosial dan lainnya. Pembayaran seperti itu disebut pembayaran transfer yaitu suatu transfer pendapatan diantara para anggota masyarakat melalui pemerintah, dari pembayar pajak kepada yang berhak memperolehnya. Oleh karena pembayaran-pembayaran seperti itu tidak merupakan pembelian barang dan jasa, pembayaran itu tidak diperhitungkan di dalam produk nasional bruto.

4. Ekspor Neto.

Ekspor neto ialah penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di negara itu ke negara-negara lain (yang disebut ekspor bruto), kemudian dikurangi dengan pengeluaran atas barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di negara-negara lain oleh penduduk negara itu (yang disebut impor). Dengan demikian, ekspor neto adalah ekspor bruto dikurangi dengan impor.

Barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan suatu negara yang disebut produk nasional bruto, menurut penggunaannya terdiri dari:

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga (C).
2. Pengeluaran pemerintah (G).

3. Investasi atau pembentukan modal domestik bruto (I).
4. Ekspor Neto (X-M) atau disingkat PNB = C + I + G + (X – M).

Dengan demikian $PNB = C + I + G + (X - M)$. Istilah, singkatan, dan persamaan ini akan terus digunakan. Pengetahuan mengenai komponen ini berguna untuk mengamati dan mengendalikan perkembangan perekonomian suatu negara dari tahun ke tahun.

Faktor-faktor produksi (alam, tenaga kerja, modal, dan kepemimpinan) yang digunakan dalam proses produksi akan memperoleh pendapatan, yaitu sewa atas penggunaan sumber daya alam, tenaga kerja memperoleh gaji dan upah, modal memperoleh bunga atau bagi hasil, serta kepemimpinan memperoleh keuntungan. Dengan menjumlahkan pendapatan-pendapatan itu akan diperoleh suatu nilai pendapatan nasional yang lain, yang berbeda dari nilai pendapatan nasional yang diperoleh dengan cara produksi dan cara pengeluaran. Pendapatan nasional yang diperoleh dinamakan pendapatan nasional atau produk nasional neto menurut harga faktor.

PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL

Pada umumnya perhitungan pendapatan nasional dengan cara pendapatan menggunakan penggolongan pendapatan yang diterima faktor-faktor produksi sebagai berikut:

1. Pendapatan para pekerja, yaitu gaji dan upah.
2. Pendapatan dari perusahaan perseorangan meliputi jumlah gaji dan upah bunga atau bagi hasil, sewa dan keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan yang dijalankan oleh pemiliknya sendiri atau keluarganya.
3. Pendapatan sewa.
4. Bunga neto, yaitu seluruh nilai pembayaran bunga yang dilakukan dikurangi bunga atas pinjaman konsumsi (yaitu bunga yang dibayar konsumen untuk membeli televisi, mobil, perabot rumah tangga secara kredit), dan bunga atas pinjaman pemerintah (yaitu bunga yang dibayar pemerintah atas pinjamannya untuk membiayai pengeluaran gaji pegawai, dan
5. Keuntungan perusahaan.

Perhitungan pendapatan nasional dengan cara pendapatan tersebut belum sering digunakan saat ini. Perhitungan dengan cara pengeluaran atau belanja nasional yang sering digunakan saat ini meskipun belum secara lengkap karena data untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga tidak dikumpulkan sendiri melainkan didapatkan dari pengeluaran-pengeluaran pemerintah, investasi dan ekspor neto.

Istilah pendapatan nasional merupakan pengertian yang kompleks. Dalam istilah pendapatan nasional terkandung lima jenis pendapatan, yaitu:

1. Produk nasional bruto.
2. Produk nasional neto.
3. Pendapatan nasional.
4. Pendapatan personal.
5. Pendapatan disposabel.

Produk nasional bruto (GNP) adalah nilai total dari produk barang-barang dan jasa-jasa yang dihitung menurut harga pasar, yang dihasilkan oleh masyarakat selama satu periode (satu tahun). Barang yang dihasilkan dapat dibagi menjadi barang konsumsi dan barang modal atau barang industri. Barang konsumsi ada yang tahan lama dan tidak tahan lama. Barang investasi sebagian untuk perluasan produksi, sehingga menambah peralatan produksi yang sudah ada dan sebagian lagi adalah untuk penggantian peralatan produksi yang sudah rusak.

Produk nasional neto (NNP) dapat diperoleh dengan mengurangi (GNP) dengan barang modal untuk penggantian atau penyusutan, sehingga produk nasional neto adalah barang konsumsi yang

dihasilkan ditambah barang-barang modal baru, yang merupakan tambahan pada jumlah peralatan modal yang sudah ada (investasi neto).

Pendapatan nasional (NI) adalah jumlah seluruh penerimaan para anggota masyarakat sebagai balas jasa karena mereka ikut serta dalam proses produksi, atau penjumlahan dari upah, sewa, bunga, dan laba. Jumlah pendapatan nasional ini dapat diperoleh dari produk nasional neto setelah dikurangi dengan pajak tidak langsung. Oleh karena besarnya produk nasional neto itu diperhitungkan atas dasar harga pasar, maka semua pajak tidak langsung (misalnya pajak penjualan) yang dimasukkan dalam harga pasar, juga masuk dalam perhitungan produk nasional neto.

Pendapatan personal (PI) adalah semua jenis pendapatan termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan sesuatu kegiatan apapun yang diterima oleh penduduk suatu negara atau sektor rumah tangga. Pendapatan yang tergolong dalam pendapatan nasional tetapi tidak termasuk pendapatan perseorangan adalah:

1. Keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan.
2. Pajak yang dikenakan pemerintah atas keuntungan perusahaan (pajak perusahaan).
3. Iuran yang dipungut oleh perusahaan untuk jaminan sosial (iuran jaminan sosial).

Di samping itu dalam pendapatan personal itu termasuk pula pendapatan yang tidak tergolong dalam pendapatan nasional yaitu yang disebut pembiayaan transfer. Contoh pengeluaran pemerintah yang tergolong dalam pembayaran transfer antara lain:

1. Uang pensiun yang dibayarkan kepada pegawai negeri yang telah pensiun.
2. Bantuan pada kaum veteran.
3. Bantuan-bantuan pada penderita cacat.
4. Bantuan-bantuan untuk dana bencana alam.
5. Beasiswa.

Para penerima bantuan ini tidak perlu melakukan suatu pekerjaan apapun pada pemerintah untuk memperoleh bantuan tersebut, sehingga pembayaran transfer itu bukanlah pendapatan yang diperoleh sebagai akibat dari penggunaan sesuatu jenis faktor produksi dalam tahun perhitungan pendapatan nasional.

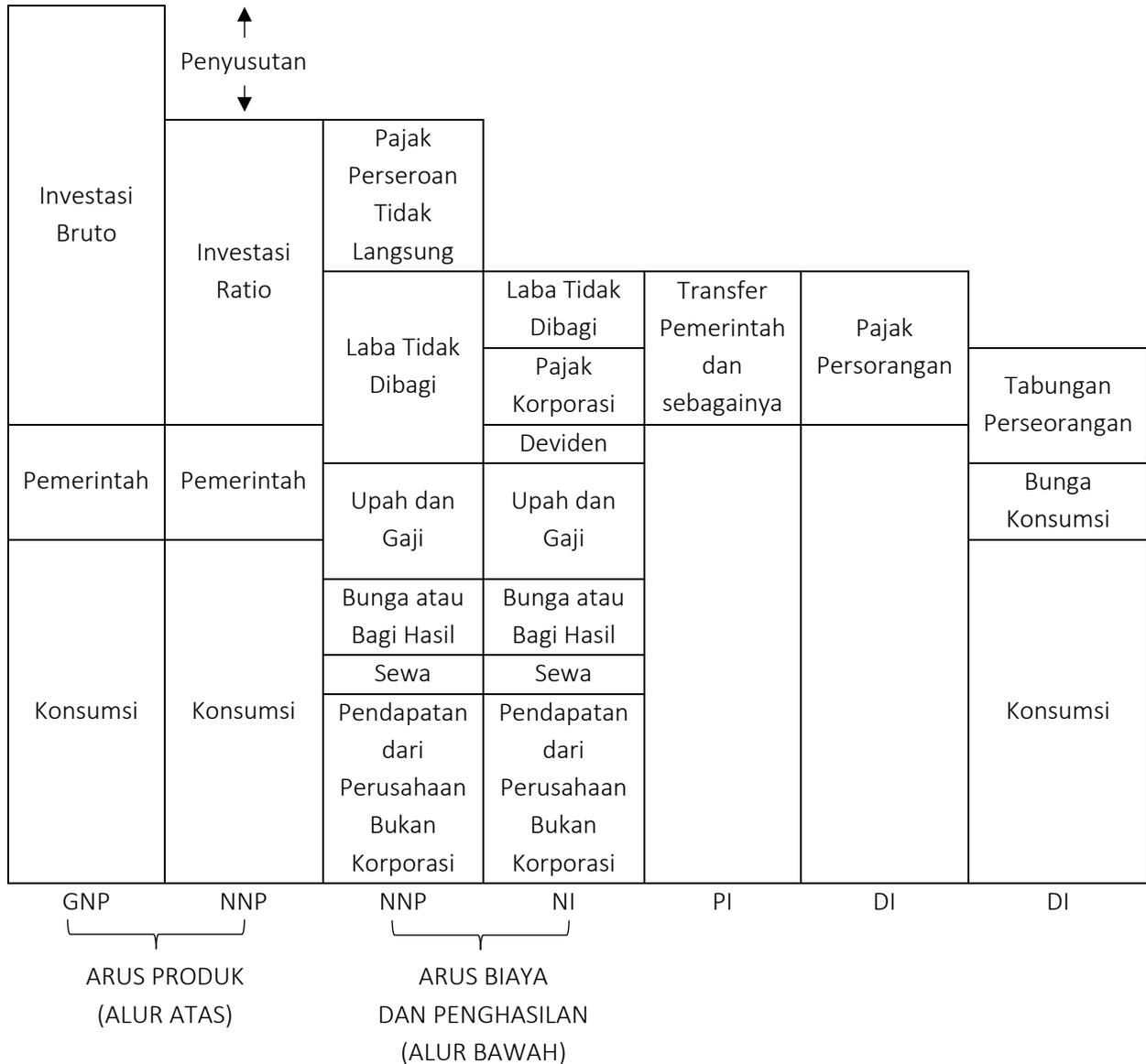
Hubungan antara pendapatan nasional dan pendapatan perseorangan adalah sebagai berikut:

Tabel II. Tabel Hubungan Antara Pendapatan Nasional dan Pendapatan Perseorangan

Pendapatan Nasional		
Dikurangi	:	Pajak perseorangan
	:	Keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan
	:	Iuran jaminan sosial
Ditambah	:	Pembayaran transfer
Didapatkan hasil	:	Pendapatan personal

Pendapatan disposabel (DI) adalah pendapatan yang diperoleh dari pendapatan personal setelah dikurangi dengan pajak yang harus dibayar para penerima pendapatan (pajak perseorangan), seperti pajak pendapatan, pajak kekayaan, dan sebagainya. Dengan demikian pendapatan disposabel adalah pendapatan yang siap untuk segera dibelanjakan atau dikonsumsi oleh sektor rumah tangga dan sisanya ditabung.

Gambar II. Gambar Hubungan antara Data Pendapatan Nasional.



Gambar di atas memperlihatkan proses peralihan dari konsep yang satu kepada konsep lainnya. Bila produk nasional bruto dengan jumlah penduduk, maka akan didapatkan pendapatan per kapita (pendapatan rata-rata per kapita). Dengan membandingkan pendapatan per kapita antara negara-negara di dunia, dapat diketahui sampai berapa jauh suatu negara tertinggal atau lebih maju dibandingkan dengan negara-negara lain yang lebih maju atau lebih terbelakang. Bila suatu negara pendapatan per kapita sangat rendah dibandingkan dengan negara lainnya, maka hal ini berarti produk per kapita atau jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh orang-orang negara tersebut lebih rendah dibandingkan dengan produk per kapita negara lainnya.

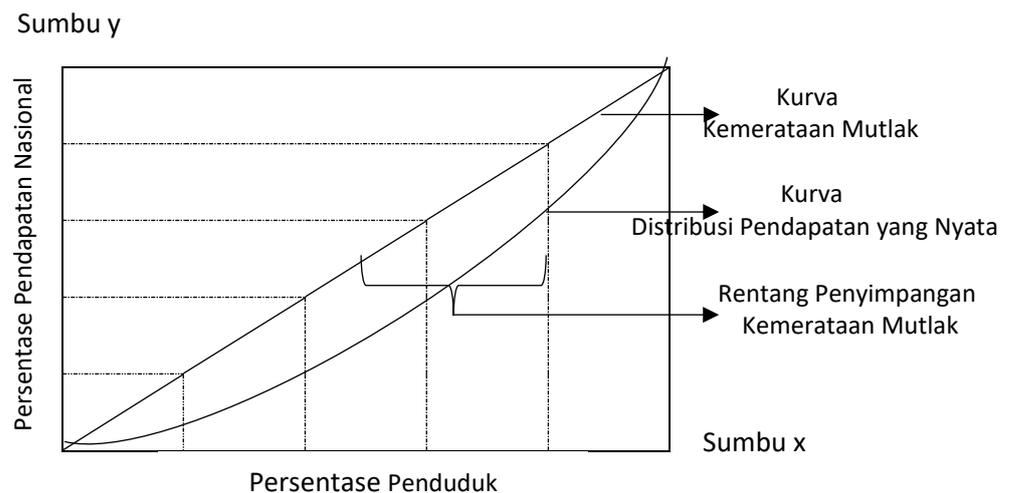
Rendahnya pendapatan per kapita di suatu negara, antara lain disebabkan oleh:

1. Pendidikan yang rendah sehingga pengetahuan juga sedikit.
2. Keterampilan dan kecakapan yang rendah.

3. Modal per karyawan sedikit.
4. Miskin sumber daya alam.
5. Kemalasan dan ketidakdisiplinan.
6. Sikap yang tidak mendorong berproduksi dan lain-lain.

Meskipun pendapatan per kaptita suatu negara, baik dalam arti uang maupun riil, baik dalam harga konstan maupun dalam harga yang berlaku semakin meningkat dari tahun ke tahun, tidak berarti setiap orang mempunyai pendapatan yang sama seperti dalam pendapatan per kapita. Sebagian penduduk menerima pendapatan lebih kecil dan sebagian penduduk menerima lebih banyak dari pendapatan per kapita. Oleh karena itu perlu diketahui berapa persen dari penduduk yang menerima di atas angka pendapatan per kapita tersebut. Hal itu lah yang disebut dengan distribusi pendapatan. Jika produk nasional bruto dibagi secara merata kepada berbagai lapisan penduduk, misalnya 20 % dari penduduk menerima 20 % dari pendapatan nasional, 60 % penduduk menerima 60 % dari pendapatan nasional, dapat disebut distribusi pendapatan merata. Namun demikian jika 20 % penduduk yang terkaya menerima 40 % dari pendapatan, sedangkan 20 % penduduk yang termiskin menerima kurang dari 10 %, maka hal tersebut menunjukkan distribusi pendapatan yang tidak merata. Gambar di bawah ini menunjukkan distribusi pendapatan.

Gambar III. Gambar Distribusi Pendapatan.



Jika distribusi pendapatan itu merata, maka 20 % penduduk dalam urutan bawah akan memperoleh 20 % dari pendapatan total, dan 20 % penduduk menerima 80 % pendapatan total, dan 20 % penduduk yang termasuk kelas pendapatan tertinggi juga hanya memperoleh 20 %. Hal ini digambarkan oleh kurva pemerataan mutlak (garis diagonal pada Gambar III. Gambar Distribusi Pendapatan).

PERANAN PEMERINTAH, KEUANGAN NEGARA DAN BEBAN PAJAK.

Sebelum terjadinya depresi besar atau kemunduran perekonomian dunia dalam tahun 1930-an, para ahli ekonomi berpendapat bahwa perekonomian yang dikendalikan dengan sistem persaingan sempurna akan selalu dapat berjalan dengan efisien. Dengan demikian, semua faktor produksi akan digunakan sepenuhnya, tidak ada pengangguran dan menciptakan tingkat kesejahteraan untuk semua orang. Dengan adanya depresi ekonomi yang melanda dunia tersebut di atas, terjadilah penurunan tingkat produksi yang berarti penurunan penggunaan faktor-faktor produksi dan terjadilah

pengangguran. Akhirnya tumbuh kesadaran bahwa perekonomian dengan sistem pasar bebas (persaingan sempurna) tidak selalu menciptakan tingkat kesejahteraan yang maksimum untuk semua orang. Oleh karenanya pada saat ini para ahli ekonomi berpendapat bahwa pemerintah perlu mengatur kegiatan ekonomi agar sistem pasar bebas dapat berjalan secara efisien sehingga tanpa adanya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi, tidak akan tercapai tujuan seperti kesempatan kerja penuh, keadaan perekonomian yang stabil, distribusi pendapatan yang lebih merata diantara berbagai golongan masyarakat di berbagai daerah, pertumbuhan ekonomi yang berlangsung terus-menerus, dan yang lainnya.

Para ahli ekonomi dan ahli politik tidak mempunyai satu kesatuan pendapat mengenai sejauh mana pemerintah campur tangan dalam mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara. Negara-negara yang menganut sistem kapitalisme menghendaki agar campur tangan pemerintah sedikit saja, sedangkan negara-negara yang menganut sistem sosialisme menghendaki campur tangan pemerintah yang sebanyak-banyaknya dalam kegiatan ekonomi. Dengan adanya perbedaan itu, tingkat dan bentuk campur tangan pemerintah dalam berbagai perekonomian campuran (kapitalisme dan sosialisme) berbeda satu sama lain. Perlunya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi karena menurut kenyataan banyak kelemahan yang ditimbulkan dari sistem persaingan sempurna. Kelemahan sistem persaingan sempurna adalah sebagai berikut:

1. Keadaan-keadaan yang diasumsikan dalam persaingan sempurna sangat jauh dari kenyataan. Misalnya asumsi mengenai:
 - a. Faktor modal dan tenaga kerja dapat saling menggantikan satu sama lain.
 - b. Setiap jenis faktor produksi bersifat homogen (bersamaan).
 - c. Produsen dan konsumen mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan pasar dan mempunyai kebebasan dalam bertindak.

Akibat perkembangan ekonomi, maka persaingannya tidak terjadi sempurna. Hal ini karena adanya perusahaan-perusahaan yang berkembang lebih cepat dibandingkan yang lainnya sehingga dapat memengaruhi keadaan pasar, dalam hal penentuan tingkat upah, tingkat harga barang, dan beragam barang yang dihasilkan. Terlebih lagi dengan penggunaan teknologi modern sehingga perusahaan-perusahaan dapat menghasilkan barang-barang dalam jumlah yang sangat besar, dan jumlah produsennya menjadi sedikit. Hal ini juga menimbulkan ketidakseimbangan dalam persaingan karena persaingan sempurna hanya akan berlaku apabila dalam perekonomian terdapat banyak produsen sehingga masing-masing produsen tidak dapat menguasai keadaan pasar. Selain itu produsen akan sulit untuk selalu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan keinginan pembeli di pasar karena kenyataannya faktor-faktor produksi tidak mudah dipertukarkan dan dipindah-pindah.

2. Adanya perbedaan antara keuntungan yang didapat pengusaha dan keuntungan yang dapat dinikmati oleh masyarakat seluruhnya yang mengakibatkan ketidakpuasan dalam sistem persaingan sempurna.

Setiap pengusaha berusaha mendapatkan keuntungan yang maksimum. Keuntungan yang diperoleh pengusaha perseorangan ini dapat menguntungkan masyarakat seluruhnya jika barang-barang yang dihasilkan itu adalah barang-barang yang berguna bagi masyarakat seluruhnya. Namun demikian dapat terjadi barang-barang yang dihasilkan adalah barang-barang yang dapat merugikan masyarakat, misalnya barang-barang yang berbahaya jika ditangani oleh yang bukan berwenang. Oleh karenanya diperlukan campur tangan pemerintah agar usaha memaksimalkan keuntungan para pengusaha tidak merugikan masyarakat.

3. Distribusi pendapatan yang tidak merata.

Sistem persaingan sempurna cenderung memberikan balas jasa yang lebih besar kepada pihak-pihak yang mempunyai kesanggupan bekerja lebih efektif dan efisien, yang mempunyai kepandaian dan keahlian yang lebih baik dan orang-orang yang kreatif berimprovisasi dan berinovasi. Dengan demikian, dalam perekonomian terdapat segolongan masyarakat yang memperoleh pendapatan yang sangat tinggi, yaitu jauh lebih tinggi dibandingkan segolongan masyarakat lainnya yang jumlahnya jauh lebih besar. Perbedaan pendapatan dan kekayaan yang sangat besar ini mendorong pemerintah untuk melakukan campur tangan agar distribusi pendapatan di dalam masyarakat menjadi lebih adil dan merata.

4. Tingkat penggunaan tenaga kerja.

Adanya kesadaran bahwa sistem pasar bebas tidak selalu menjamin penggunaan faktor-faktor produksi secara merata, efektif dan efisien, maka terdapat pandangan bahwa tanpa adanya campur tangan pemerintah akan selalu terjadi pengangguran. Kesadaran ini membuat berkembangnya teori ekonomi makro yang dipelopori oleh John Maynard Keynes. Pada dasarnya peranan pemerintah dalam setiap perekonomian campuran dapat digolongkan ke dalam:

a. Membuat peraturan-peraturan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan ekonomi.

Peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah dalam usahanya untuk mempertinggi efisiensi kegiatan ekonomi dapat mencapai dua tujuan utama, yaitu:

1) Membuat suasana ekonomi dan sosial yang memberikan dorongan ke arah terciptanya kegiatan ekonomi yang efisien.

Dalam usaha untuk memaksimalkan keuntungan, ternyata pengusaha telah menghasilkan barang yang dapat merugikan masyarakat, misalnya barang yang berbahaya, atau barang kualitas rendah, atau barang yang berkualitas tinggi namun dapat menimbulkan pengurangan tenaga kerja. Dalam hal lainnya dapat juga dengan meminimumkan biaya produksi dengan menekan upah tenaga kerja dan menetapkan syarat-syarat kerja yang berat sehingga keuntungan perusahaan bertambah tetapi para pekerja dirugikan. Untuk menghindari hal tersebut, pemerintah membuat peraturan di dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Peraturan tersebut berisi hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh produsen dan konsumen dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dalam hal ini pemerintah melanjutkan peraturan tersebut dengan langkah kebijaksanaan seperti pengarahan, bimbingan, perizinan dan pengawasan. Pemerintah juga mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi kepada semua pihak yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

2) Membuat persaingan bebas dan menghapuskan monopoli.

Dalam persaingan sempurna, produsen tidak dapat memengaruhi harga di pasar. Produsen dapat memaksimalkan keuntungan dengan cara menaikkan produktivitas faktor-faktor produksi yang digunakan dan menekan biaya produksi serendah-rendahnya. Keuntungan maksimum dapat tercapai jika perusahaan mencapai tingkat efisiensi yang maksimum. Jika dalam perekonomian terdapat kekuatan monopoli, maka pengusaha ini lah yang mempunyai kekuatan untuk mengawasi jumlah produksi sampai pada tingkat keuntungan yang maksimum. Pada umumnya keadaan ini tercapai sebelum perusahaan-perusahaan mencapai tingkat efisiensi produksi yang maksimum.

Oleh karena produsen dapat memengaruhi harga pasar dengan menaikkan harga (tanpa khawatir kehilangan pembeli karena tidak ada persaingan), keuntungan perusahaan akan bertambah. Perusahaan-perusahaan yang bersifat monopoli ini merugikan pihak konsumen dan produsen kecil. Oke karena itu, untuk menghindari timbulnya kekuasaan monopoli dalam kegiatan produksi dan perdagangan, pemerintah membuat beberapa peraturan yang sifatnya mencegah timbulnya berbagai bentuk kekuatan monopoli.

b. Menyelenggarakan sendiri berbagai kegiatan ekonomi.

Dalam beberapa kegiatan tertentu, peraturan-peraturan saja belum dapat memberi jaminan bahwa kegiatan-kegiatan itu dapat dilaksanakan secara efisien atau akan memberikan keuntungan yang paling tinggi yang dapat dicapai oleh masyarakat. Bahkan ada kalanya masyarakat akan memperoleh keuntungan yang lebih besar jika kegiatan-kegiatan tersebut diserahkan penguasaannya kepada pihak pemerintah. Untuk kegiatan-kegiatan yang mempunyai sifat seperti itu, pemerintah melakukan campur tangan secara langsung atau pemerintah sendiri lah yang menyelenggarakan berbagai kegiatan ekonomi. Misalnya:

- 1) Memproduksi barang masyarakat, yaitu barang-barang yang tidak dapat digunakan secara perorangan tetapi harus digunakan secara bersama oleh masyarakat dan pembayarannya sangat sukar dipungut dari para pemakainya.

Misalnya:

- a) Penyediaan tentara dan polisi.
 - b) Penyediaan radio dan televisi.
 - c) Peramalan cuaca.
 - d) Penyediaan mercu suar.
- 2) Memproduksi barang semi masyarakat, yaitu barang-barang yang biasanya digunakan secara bersama oleh masyarakat dan pembayaran dari pemakainya menimbulkan biaya sosial yang besar sekali sehingga lebih baik jika kegiatan ini dilakukan oleh pemerintah. Misalnya:
 - a) Penyediaan lampu lalu lintas.
 - b) Jasa unit pemadam kebakaran.
 - c) Pelabuhan-pelabuhan.
 - d) Bendungan-bendungan dan irigasi.
 - 3) Memproduksi barang dan jasa yang tidak digunakan bersama oleh masyarakat, atau barang-barang yang dapat dijual kepada perorangan dalam masyarakat (barang pribadi).

Oleh karena pembayaran atau penggunaan barang dan jasa ini mudah dipungut biaya, maka pihak swasta dapat memproduksinya secara efisien.

Dalam hal ini pemerintah ikut memproduksi barang dan jasa dengan alasan:

- a) Barang dan jasa itu dapat tersedia di masyarakat dengan harga murah tanpa mengurangi efisiensinya. Misalnya jasa kereta, bus, kapal laut dan udara, air minum, listrik, gas, telepon dan lainnya.
- b) Kegiatan ekonomi dalam memproduksi barang-barang penting agar tidak dikuasai oleh pihak swasta. Misalnya minyak bumi, bank perdagangan, perusahaan perkebunan dan lainnya.

- c. Menjalankan kebijaksanaan moneter dan kebijaksanaan fiskal untuk menghindari akibat buruk yang ditimbulkan oleh sistem persaingan sempurna.

Kebijaksanaan moneter adalah kebijaksanaan yang dijalankan oleh Bank Sentral untuk mengawasi jumlah peredaran uang dalam masyarakat. Kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan pemerintah di dalam memungut pajak dan membelanjakan pendapatan dari pajak tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Kedua kebijaksanaan ini digunakan oleh pemerintah untuk:

- 1) Mengatasi masalah-masalah ekonomi makro, seperti inflasi, harga, valuta asing dan pengangguran.
- 2) Menjaga agar faktor-faktor produksi digunakan dan dialokasikan ke berbagai kegiatan ekonomi secara efisien. Misalnya pemerintah memberikan fasilitas kredit dengan bunga yang lebih rendah dan dibebaskan membayar pajak selama beberapa tahun kepada para pengusaha untuk menanam modal ke sektor-sektor yang relatif kurang berkembang.
- 3) Memperbaiki distribusi pendapatan, untuk lebih meratakan pendapatan masyarakat sehingga perbedaan antara golongan masyarakat yang kaya dan yang miskin tidak sangat jauh. Hal tersebut dapat dilakukan dengan kebijaksanaan sebagai berikut:
 - a) Menjalankan tarif pajak yang progresif. Suatu tarif yang persentasenya semakin besar dengan semakin besar jumlah yang harus dikenakan pajak. Di samping itu dikenal pula:
 - i. Tarif pajak yang proporsional (sebanding) adalah tarif yang merupakan persentase tetap.
 - ii. Tarif tetap adalah tarif pajak yang besarnya tetap dan tidak tergantung pada nilai obyek yang dikenakan pajak.
 - iii. Tarif regresif adalah tarif yang besarnya persentase semakin menurun dengan semakin besar jumlah yang harus dikenakan pajak.
 - b) Menjalankan kebijaksanaan pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan, yaitu pengeluaran yang bersifat membantu golongan masyarakat yang miskin. Misalnya pengeluaran pemerintah untuk dana pensiun, tunjangan pengangguran, tunjangan untuk veteran perang, beasiswa, dana bencana alam, atau pemberian bantuan untuk proyek-proyek sosial keagamaan. Pengeluaran pemerintah tersebut dinamakan pembayaran transfer, yaitu tranfer pendapatan dari para pembayar pajak kepada mereka yang berhak menerimanya.

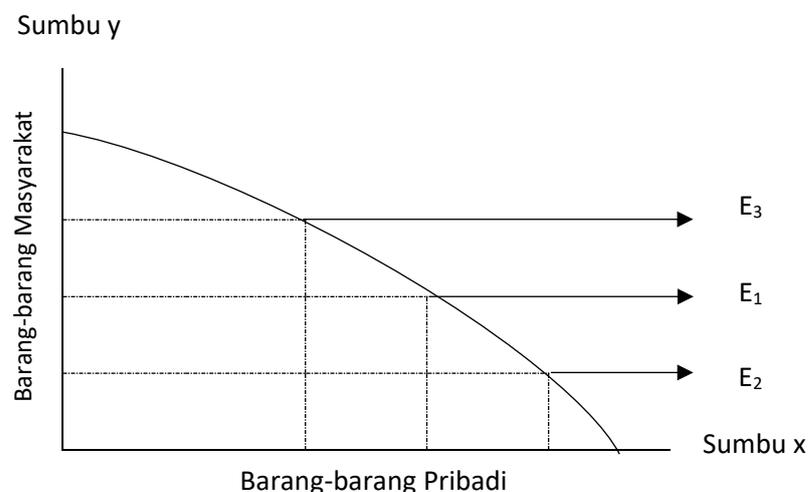
Uang yang diberikan pemerintah kepada para pensiun, para cacat veteran secara ekonomi berbeda dengan uang yang diterima oleh para pegawai negeri atau oleh orang-orang yang memproduksi barang dan jasa. Hal ini penting karena dalam uraian tentang pendapatan nasional juga ada perbedaan antara unsur-unsur yang merupakan transfer dan unsur-unsur yang langsung merupakan bagian dari produksi nasional atau bagian dari pendapatan nasional. Pembayaran pemerintah kepada pegawai kantor pajak, kepada guru, kepada produsen dan karyawan merupakan bagian dari pendapatan dan output nasional karena pembayaran tersebut berhubungan dengan jasa yang dihasilkan, memproduksi dengan menggunakan sumber-sumber produksi, dan menghasilkan konsumsi langsung atau tidak langsung bagi penduduk di dalam negaranya. Untuk melaksanakan

kegiatan pemerintah, baik menghasilkan jasa bagi penduduknya atau ikut menghasilkan barang-barang yang sangat memengaruhi kehidupan rakyat banyak, pemerintah memerlukan banyak biaya. Sumber pembiayaan pemerintah ini dapat melalui pemungutan pajak, hasil penjualan materai, bagian labar perusahaan atau bank pemerintah. Uang yang digunakan pemerintah ini adalah bagian dari pendapatan nasional sebagaimana halnya uang yang digunakan oleh perusahaan angkutan untuk menghasilkan jasa transportasi bagi para pemakainya.

Pembayaran pemerintah kepada para pensiun, berupa uang pensiun, atau kepada penderita bencana alam berupa dana bencana alam atau kepada para pelajar berupa beasiswa adalah sangat bijaksana karena membantu mereka yang benar-benar membutuhkan. Dalam tolok ukuran sosial, pengeluaran pemerintah ini dibenarkan, tetapi dalam tolok ukur ekonomi, pengeluaran pemerintah ini bukan merupakan bagian dari output nasional atau pendapatan nasional karena pensiun, atau kepada penderita bencana alam berupa dana bencana alam atau kepada para pelajar berupa beasiswa tersebut tidak menghasilkan suatu jasa bagi pemerintah atau masyarakat sebagai imbalan bagi dana yang diterimanya. Uang tersebut memang menambah daya belinya, memungkinkannya untuk hidup lebih baik dan untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan. Barang dan jasa yang dibelinya tersebut merupakan bagian dari output nasional atau pendapatan nasional, tetapi barang dan jasa tersebut adalah barang dan jasa yang dapat ditimbulkan oleh orang-orang atau produsen swasta yang telah menghasilkannya, bukan oleh ia sendiri. Pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan ini tidak langsung untuk konsumsi barang dan jasa, melainkan untuk menambah daya beli orang-orang yang menerimanya. Oleh karena itu hal ini membentuk pesanan-pesanan dan pekerjaan-pekerjaan bagi perusahaan swasta. Dengan demikian, produksi yang didorong oleh proses ini adalah dihasilkan oleh swasta dan juga dikonsumsi juga oleh swasta. Lain halnya jika pengeluaran untuk kesejahteraan ini dibiayai dengan pembuatan uang baru atau melalui pinjaman obligasi, maka pajak yang lebih besar perlu dikenakan kepada masyarakat umum. Berdasarkan alasan ini maka pengeluaran tersebut biasanya dinamakan pengeluaran transfer atau pembiayaan transfer.

Konsep kemungkinan produksi yang telah diterangkan di atas sangat bermanfaat untuk menjelaskan sifat kegiatan pemerintah. Dalam gambar di bawah ini akan ditambahkan penjelasan mengenai hal tersebut.

Gambar IV. Gambar Barang-barang Pribadi dan Barang-barang Masyarakat.



Gambar di atas memperlihatkan masyarakat mengadakan pilihan antara barang-barang pribadi (seperti beras, gula, sepatu, pakaian) yang dibeli oleh rumah tangga berdasarkan kehendak mereka sendiri

dengan menggunakan pendapatan yang disposabelnya pada tingkat harga yang ditentukan oleh pasar, dan barang-barang masyarakat (jalan, jembatan dan jasa pegawai negeri dan tentara polisi, ramalan cuaca) yang digunakan secara bersama-sama dan yang memerlukan pengeluaran pemerintah (dibiayai melalui pajak, pinjaman-pinjaman untuk menutup defisit, percetakan uang baru).

Posisi E1 menggambarkan bahwa kira-kira seperempat dari produk total dipergunakan untuk barang-barang masyarakat dan sisanya untuk barang-barang pribadi. Komposisi sektor swasta ini tergantung pada keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah yaitu dalam aspek-aspek sebagai berikut:

1. Pembayaran transfer ikut menentukan distribusi pendapatan disposabel masyarakat yang akan digunakan untuk konsumsi berbagai macam barang dan jasa di pasar.
2. Undang-undang perpajakan yang ditetapkan oleh para wakil rakyat, akan menentukan pengalokasian beban pajak di antara berbagai individu, dan juga berpengaruh terhadap distribusi pendapatan dari barang-barang pribadi E1.

Disamping pengaruh pembiayaan transfer dan pajak ini, konsumsi barang-barang pribadi terutama ditentukan oleh keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan kehendaknya sendiri, yaitu pada waktu para individu mengambil keputusan untuk membeli roti dan minuman, pakaian atau sepatu dan lainnya di pasar. Andaikan keadaan politik di negara tersebut stabil, memungkinkan pemerintah mengurangi biaya pertahanan dan keamanan serta pajak sehingga masyarakat memiliki uang yang lebih besar untuk dibelanjakan sesuai dengan keinginannya. Hal ini mengakibatkan titik E1 berpindah ke titik E2 yang berada pada titik di bawah dalam gambar di atas (dalam kurva batas kemungkinan produksi yang sama) yang berarti bertambahnya pengeluaran untuk barang-barang pribadi dan berkurangnya pengeluaran untuk barang-barang masyarakat.

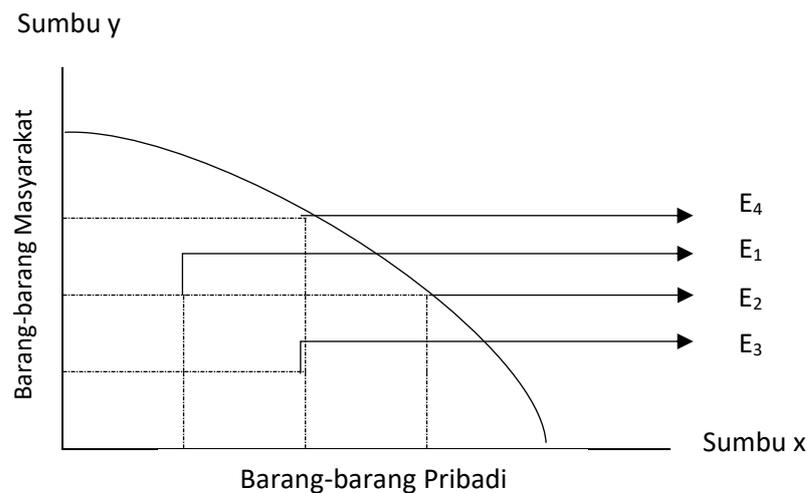
Jika wakil rakyat melalui kebijakan anggarannya memutuskan untuk mengurangi pengeluaran untuk barang-barang yang sifatnya konsumtif dan memperbesar pengeluaran untuk barang-barang masyarakat seperti sekolah dan rumah sakit, jalan dan jembatan, maka akan digambarkan oleh perpindahan titik E1 ke titik E3 yang berada di atasnya. Hal ini berarti bertambahnya pengeluaran untuk barang-barang masyarakat dan berkurangnya pengeluaran untuk barang-barang pribadi. Gambar di atas dengan kurva batas kemungkinan produksi, masyarakat yang menggambarkan pilihan antara pengeluaran pribadi, kekuasaan legislatif dan eksekutif yang menentukan posisi di masyarakat di titik E1, atau E2 atau E3.

Pengeluaran pemerintah dapat disederhanakan dengan cara yang berlainan, yaitu:

1. Masyarakat dapat meningkatkan efisiensi dari kegiatan-kegiatan pemerintah. Mereka dapat menghilangkan kebocoran dan pemborosan dan berpegang teguh pada perencanaan program yang lebih baik dan administrasi yang lebih efektif dan efisien.
2. Masyarakat dapat mengubah luas lingkup pemerintah, mengurangi pengeluaran pemerintah dengan jalan melepaskan fungsi-fungsi yang semula dikerjakan oleh pemerintah. Pemerintah dapat mengurangi pembuatan jalan, mengurangi pegawai negeri atau mengurangi penyediaan informasi cuaca.

Dalam hal yang lainnya terdapat juga perbedaan antara masalah efisien pemerintah dan masalah luas lingkup kegiatan pemerintah seperti tergambar di bawah ini.

Gambar V. Gambar Efisiensi Pemerintah dan Luas Lingkup Kegiatan Pemerintah.



Berdasarkan gambar di atas, posisi masyarakat mula-mula di titik E1 yang berada di bagian dalam kurva kemungkinan produksi:

1. Dengan mengurangi pemborosan dan peningkatan efisiensi pemerintah, posisi masyarakat berpindah dari titik E1 ke E2. E2 letaknya akan tepat di sebelah kanan E1 apabila tingkat barang-barang masyarakat tetap sedangkan barang-barang pribadi bertambah.
2. Dengan hanya pengurangan luas lingkup kegiatan pemerintah, posisi masyarakat berpindah dari E1 ke E3 yang berada di sebelah dalam kurva kemungkinan produksi.
3. Dengan efisiensi dan alokasi kelimpahan untuk memperbesar barang-barang masyarakat dan barang-barang pribadi, posisi masyarakat berpindah dari titik E1 ke E4 yang terletak pada kurva kemungkinan produksi.

Perpindahan dari titik E1 ke titik E2 pada kurva kemungkinan produksi menggambarkan akibat berhasilnya suatu program peningkatan efisiensi kegiatan pemerintah. Dalam hal ini masyarakat dapat memperoleh barang-barang masyarakat yang sama dan barang-barang pribadi dalam jumlah yang lebih banyak. Hal ini disebabkan oleh peningkatan efisiensi pemerintah mengakibatkan berkurangnya pajak dalam jumlah yang cukup untuk menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat sedemikian rupa sehingga cukup untuk memanfaatkan semua sumber yang dilepaskan pemerintah. Apabila masyarakat berhasil mengurangi pengeluaran pemerintah hanya dengan jalan mengurangi luas lingkup kegiatan pemerintah, sedangkan efisiensi pemerintah tidak berubah, maka titik E1 akan berpindah ke titik E3 yaitu ke arah bawah kanan di bagian dalam kurva kemungkinan produksi. Hal ini berarti tingkat konsumsi barang-barang masyarakat berkurang, tetapi konsumsi barang-barang pribadi bertambah. Apabila masyarakat menghendaki efisiensi dan berhasil ke luar dari kurva batas kemungkinan produksi, dan wakil rakyat menghendaki agar kelimpahan yang bertambah besar itu digunakan untuk memperbesar barang-barang masyarakat dan swasta, dan jika masyarakat memutuskan untuk membelanjakan pendapatannya itu untuk kedua barang tersebut, maka posisi masyarakat pun berpindah ke atas kanan, yaitu dari titik E1 ke titik E4 dalam kurva kemungkinan produksi. Berarti masyarakat dapat memperoleh barang-barang masyarakat dan barang-barang pribadi dalam jumlah lebih banyak.

Peranan pemerintah dalam perekonomian tersebut memerlukan dana diterima dari berbagai sumber yang dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan APBN inilah kita dapat mengetahui berapa rencana dan realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahun.

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH

Penerimaan terdiri dari penerimaan dalam negeri, yaitu penerimaan yang berasal dari sumber-sumber di dalam negeri dan penerimaan pembangunan berasal dari luar negeri berupa pinjaman-pinjaman, pemberian dan lain-lain. Pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin, yaitu pengeluaran untuk kegiatan rutin yang permanen dan terus-menerus dan pengeluaran pembangunan. Selisih antara penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin dinamakan tabungan pemerintah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan bersama-sama dengan bantuan luar negeri. Untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban pemerintah dalam rangka memenuhi peranannya dalam perekonomian, diperlukan pengeluaran-pengeluaran negara. Dengan demikian, pengeluaran negara mempunyai hubungan kewajiban-kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang. Pengeluaran pemerintah itu dibedakan menjadi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran-pengeluaran rutin digunakan untuk membiayai kebutuhan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Pengeluaran ini mutlak harus dilaksanakan. Pengeluaran ini untuk bekerja dan untuk konsumsi yang harus selalu disediakan dalam keadaan apapun agar peranan pemerintah dalam tugas sehari-hari dapat berjalan lancar. Pengeluaran pembangunan digunakan untuk membiayai fungsi sebagai agen pembangunan. Pengeluaran-pengeluaran ini akan menghasilkan kembali produk-produk yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kemajuan tingkat perekonomian selanjutnya, antara lain berupa:

1. Proyek-proyek fisik seperti pembangunan proyek-proyek *social overhead projector* (prasarana umum) dan *public utilities*. Misalnya dengan selesai dibangunnya waduk atau irigasi oleh pemerintah, maka produksi beras dan listrik akan meningkat, atau dengan selesainya dibangun jalan-jalan dan jembatan oleh pemerintah akan memperlancar perhubungan sehingga harga-harga barang jauh lebih murah dibandingkan sebelumnya.
2. Proyek-proyek non fisik seperti penataran pimpinan, proyek pembinaan mental masyarakat dan spiritual akan mengakibatkan peningkatan pendayagunaan aparatur negara, serta memperbaiki perilaku aparatur negara agar timbul kesadaran, yang akan timbul perasaan pentingnya memberikan partisipasi terhadap pelaksanaan program-program pemerintah agar tercapai tujuan.

Sifat pengeluaran pembangunan ini semakin lama semakin besar tetapi untuk pembiayaan suatu proyek akan mempunyai batas tertentu karena setelah suatu proyek selesai, maka pembiayaannya akan berpindah ke proyek-proyek lainnya. Lain halnya dengan pengeluaran rutin, walaupun setiap tahunnya akan membesar, sifat pengeluaran ini tidak mempunyai batas waktu. Selain setiap jenis pengeluaran rutin tidak mempunyai batas waktu, juga dengan selesainya pembangunan proyek-proyek, maka pembiayaannya akan beralih ke pengeluaran rutin karena proyek tersebut perlu diadakan pemeliharaan. Dengan demikian, pemeliharaan termasuk pengeluaran rutin.

Penerimaan pemerintah merupakan dasar untuk melaksanakan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah terdiri dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam negeri adalah penerimaan yang berasal dari segala macam perpajakan (pajak langsung, pajak tidak langsung termasuk bea dan cukai) dan penerimaan-penerimaan yang bersifat bukan pajak. Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan langsung kepada orang yang harus menanggung dan membayarnya. Yang termasuk pajak langsung adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak atas setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan pada barang yang harus

menanggung dan membayarkan melalui orang lain atau melalui suatu peristiwa, atau melalui suatu barang dan jasa. Yang termasuk pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, cukai, bea masuk, bea materai dan bea lelang.

Penerimaan bukan pajak adalah penerimaan kementerian dan lembaga pemerintah meliputi penerimaan-penerimaan dari:

1. Hasil usaha kontrak karya pertambangan minyak.
2. Hasil usaha production sharing minyak.
3. Hasil usaha perusahaan negara seperti Pertamina.
4. Bagian laba perusahaan negara seperti bank-bank pemerintah.
5. Uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan atau Uang Kuliah Tetap.
6. Penjualan hasil pertanian atau perkebunan atau perikanan.
7. Penjualan barang-barang bergerak yang tidak dipergunakan lagi.
8. Penerimaan jasa yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.
9. Penerimaan kejaksaan atau pengadilan.
10. Penerimaan kembali dan penerimaan lain-lain karena pemerintah berlebih melaksanakan pengeluaran kepada yang tidak berhak menerimanya.
11. Penerimaan khusus dan penerimaan kembali sisa anggaran pembangunan yang proyeknya telah selesai, dan
12. Sisa anggaran lebih.

Penerimaan pembangunan adalah penerimaan yang berasal dari luar negeri dalam bentuk pinjaman-pinjaman, pemberian-pemberian dan lainnya. Penerimaan ini terdiri dari bantuan program, bantuan proyek, fasilitas kredit ekspor dan pengeluaran obligasi luar negeri. Penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan akan menjadi sumber pengeluaran dalam negeri sejauh mungkin, selain membiayai pengeluaran rutin juga diharapkan akan membiayai pengeluaran-pengeluaran pembangunan. Jika dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara jumlah penerimaannya sama dengan jumlah pengeluarannya, maka anggaran belanja pemerintah yang demikian ini dinamakan anggaran belanja yang seimbang (*balanced budget*). Pemerintah Republik Indonesia juga menerapkan anggaran belanja yang seimbang.

Sekarang ini banyak pemerintah negara yang tidak selalu berusaha agar anggaran belanjanya seimbang. Anggaran belanja pemerintah selalu disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada suatu waktu tertentu. Pada suatu tingkat kegiatan ekonomi rendah dan terdapat banyak pengangguran, pemerintah akan melakukan pengeluaran yang melebihi pendapatannya. Anggaran belanja yang demikian dinamakan anggaran belanja defisit. Pengeluaran pemerintah yang melebihi penerimaannya ini mengharuskan pemerintah meminjam kepada masyarakat, pada bank-bank atau mencetak uang baru. Jika pemerintah menghadapi keadaan yang memperlihatkan tingkat kegiatan ekonomi tinggi, penggunaan tenaga secara penuh telah tercapai dan harga-harga mulai bergerak naik, maka pemerintah akan berusaha agar pengeluarannya lebih sedikit daripada penerimaannya sehingga pemerintah dapat membuat tabungan dari pendapatannya. Anggaran belanja yang demikian dinamakan anggaran surplus. Jika pemerintah telah merencanakan anggaran belanjanya seimbang, tetapi realisasinya terdapat surplus (hal ini dapat terjadi karena ketidakmampuan kementerian dan lembaga pemerintah untuk menggunakan uang sesuai dengan rencana) akan salah hitung harga barang, atau kesulitan teknis administratif dalam mencari uang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ini tidak hanya dibuat oleh pemerintah pusat saja melainkan juga oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam kenyataannya, bagian terbesar dari jumlah penerimaan daerah

dipergunakan untuk keperluan rutin, tugas-tugas administratif pemerintah daerah. Bagian yang relatif kecil digunakan bagi pengeluaran pembiayaan pembangunan daerah.

Pemerintah memerlukan uang untuk membayar kewajiban-kewajibannya. Sumber utama uang yang diperlukan untuk memenuhi pengeluaran-pengeluarannya adalah pajak. Siapakah yang harus dibebani dan berapakah banyaknya merupakan persoalan dalam filsafat pajak. Dari sekian banyak prinsip yang berhubungan dengan perpajakan maksimum ada dua kelompok yang dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Kelompok yang menyatakan bahwa berbagai macam orang itu haruslah dibebani pajak secara proporsional karena memperoleh manfaat (*benefit*) dari kegiatan pemerintah. Pendapat ini dinamakan (*benefit theory*).

Contoh: Orang-orang yang tinggal di kota sama-sama memperoleh manfaat dari adanya perlindungan polisi, jalan-jalan umum, taman-taman dan pelayanan pemerintah. Dengan demikian mereka harus membayar pajak yang sama. Lain halnya orang yang tinggal di desa pedalaman yang tidak memperoleh manfaat apapun dari pemerintah, misalnya tidak ada jalan-jalan, tidak ada perlindungan polisi dan pelayanan pemerintah, karenanya mereka tidak perlu membayar pajak.

2. Kelompok yang menghendaki agar yang dibebani pajak adalah orang-orang yang mampu sedemikian rupa sehingga terjadi redistribusi pendapatan. Pendapatan ini dinamakan dengan *sacrifice theory*. Hasil akhirnya adalah semacam kompromi. Secara teoritis orang yang sama dibebani pajak yang sama besarnya, dan orang yang tidak sama berbeda pula pajaknya. Apabila persentase pajak ini semakin tinggi dengan semakin tingginya penghasilan seseorang, maka sistem perpajakan yang bersifat progresif ini dinamakan pajak progresif. Apabila persentase pajaknya tidak berubah dengan semakin tingginya penghasilan, maka dinamakan pajak proporsional. Bilamana persentase pajaknya semakin kecil dengan semakin besarnya penghasilan seseorang, dinamakan pajak regresif. Kenyataannya banyak pajak yang sifatnya campuran, yang tidak dapat secara tepat dimasukkan pajak progresif, pajak proporsional, atau pajak regresif.

Contoh: Kendaraan bermotor yang sama, tarif pajaknya sama. Pajak ini merupakan pajak langsung, dan pajak regresif karena jika dihitung sebagai persentase dari pendapatan, maka pajak ini lebih besar bagi orang-orang berpendapatan rendah dibandingkan orang-orang kaya.

KONSUMSI DAN TABUNGAN

Istilah konsumsi selalu dihubungkan dengan kegiatan makan dan minum. Sebenarnya tidak hanya itu, dapat pula berarti menggunakan atau memakai barang dan jasa yang secara langsung dapat memuaskan kebutuhan. Dengan demikian konsumsi berarti kegiatan memuaskan kebutuhan. Tabungan adalah pendapatan yang tidak dikonsumsi. Sekalipun begitu, tabungan bukan merupakan konsep sisa dalam arti setelah semua keperluan dipenuhi. Fungsi konsumsi dapat ditulis dalam persamaan linier sebagai berikut:

$$C = a + bY.$$

Dengan keterangan:

C = pengeluaran konsumsi.

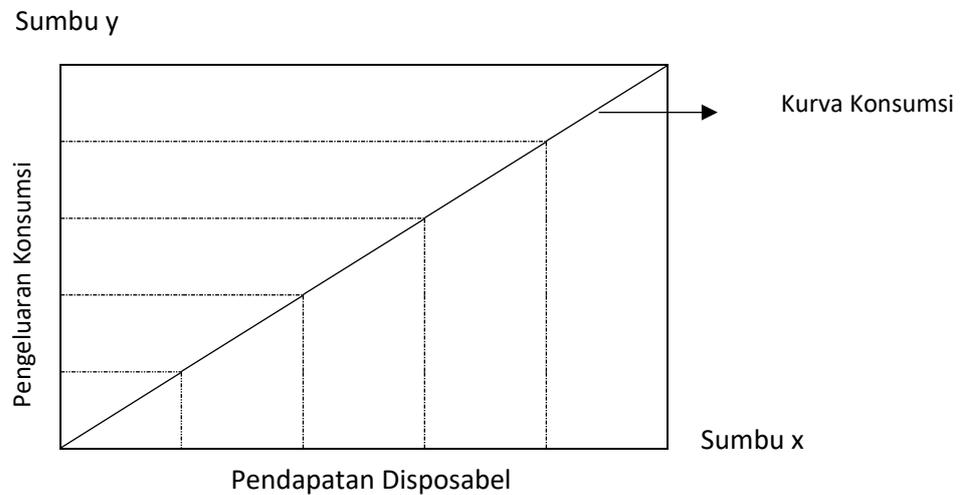
a = besarnya konsumsi pada tingkat pendapatan sama dengan nol.

b = hasrat konsumsi marginal (MPC).

Y = pendapatan disposabel.

Dengan kurva konsumsi sebagai berikut:

Gambar VI. Gambar Kurva Konsumsi.



Pendapatan disposabel rumah tangga yang tidak digunakan untuk pengeluaran konsumsi merupakan tabungan (*saving*) yang dilakukan oleh rumah tangga. Dengan demikian, antara pendapatan disposabel, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan tabungan terdapat hubungan. Hubungan tersebut sebagaimana terdapat di dalam persamaan matematika kurva tersebut di atas. Begitu halnya tabungan dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut:

$$S = a + (1 - b) Y.$$

Dengan keterangan:

S = tabungan.

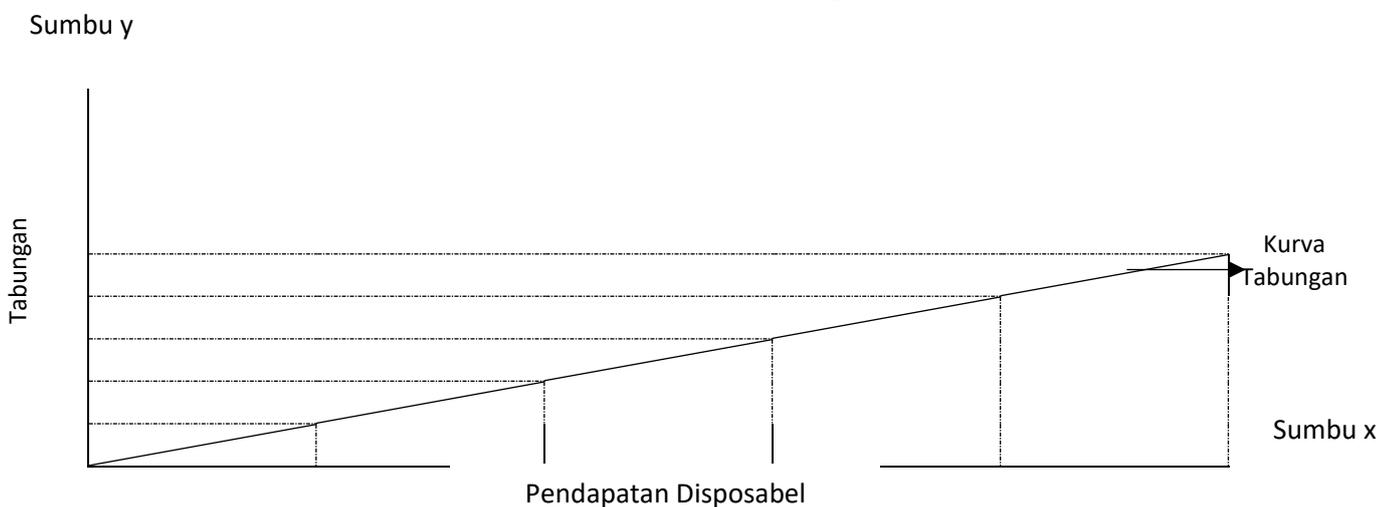
a = besarnya konsumsi pada tingkat waktu pendapatan Y sama dengan nol.

(1 - b) = hasrat tabungan marginal (MPS).

Y = pendapatan disposabel.

Dengan kurva konsumsi sebagai berikut:

Gambar VII. Gambar Kurva Tabungan.



Alasan yang mendorong untuk mengadakan tabungan diantaranya ialah:

1. Sebagai cadangan untuk hari tuanya atau untuk dibelanjakan pada masa yang akan datang (guna keperluan rekreasi atau untuk membeli kendaraan).
2. Karena merasa kurang pasti mengenai masa yang akan datang, dan mengantisipasi terhadap hal yang tidak terduga.
3. Karena ingin meninggalkan sesuatu kekayaan pada anak-anak dan cucu-cucunya.
4. Karena telah menandatangani kontrak program tabungan dengan petugas asuransi.
5. Karena tindakan berhemat sudah merupakan suatu kebiasaan bagi penabung.

INVESTASI DAN KESEIMBANGAN PENDAPATAN

Investasi atau pembentukan modal adalah tambahan barang-barang produksi. Pertambahan jumlah barang-barang modal sebenarnya adalah pertambahan atas barang-barang modal yang ditimbulkan oleh investasi yang harus dilakukan dikurangi dengan penyusutan barang modal lama. Investasi dapat dipandang sebagai suatu variabel yang eksogen maupun variabel yang endogen. Variabel yang eksogen ialah variabel yang nilainya dianggap sebagai suatu datum yaitu suatu variabel yang nilainya tidak dicari asal-usulnya, sedangkan suatu variabel endogen ialah variabel yang nilainya diperoleh sesudah dihubungkan dengan variabel lainnya dalam model yang digunakan. Fungsi investasi dapat dituliskan sebagai berikut:

$$I = I_0 + aY.$$

Dengan keterangan:

I = jumlah pengeluaran investasi dalam masyarakat.

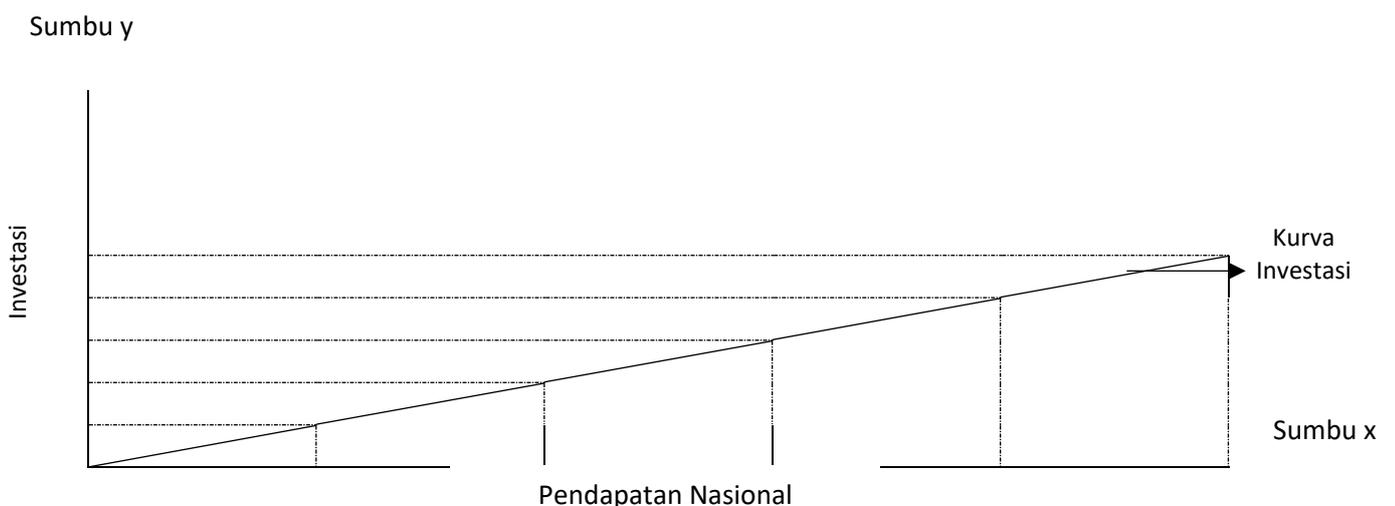
I_0 = jumlah pengeluaran investasi pada tingkat pendapatan nasional sebesar nol.

a = hasrat investasi marginal (I/Y) disingkat MPI.

Y = pendapatan nasional.

Dengan kurva investasi sebagai berikut:

Gambar VIII. Gambar Kurva Investasi.

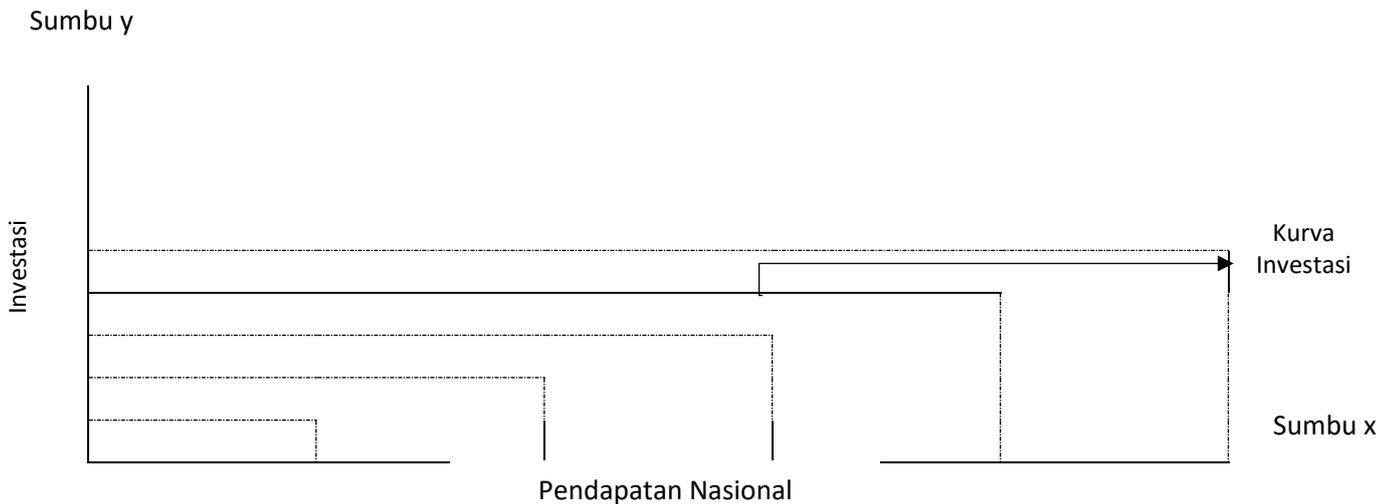


Dalam hubungannya dengan pendapatan nasional, investasi dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Investasi otonom (*autonomous investment*), yaitu investasi yang tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan dalam pendapatan nasional maupun tingkat bunga. Investasi otonom dalam

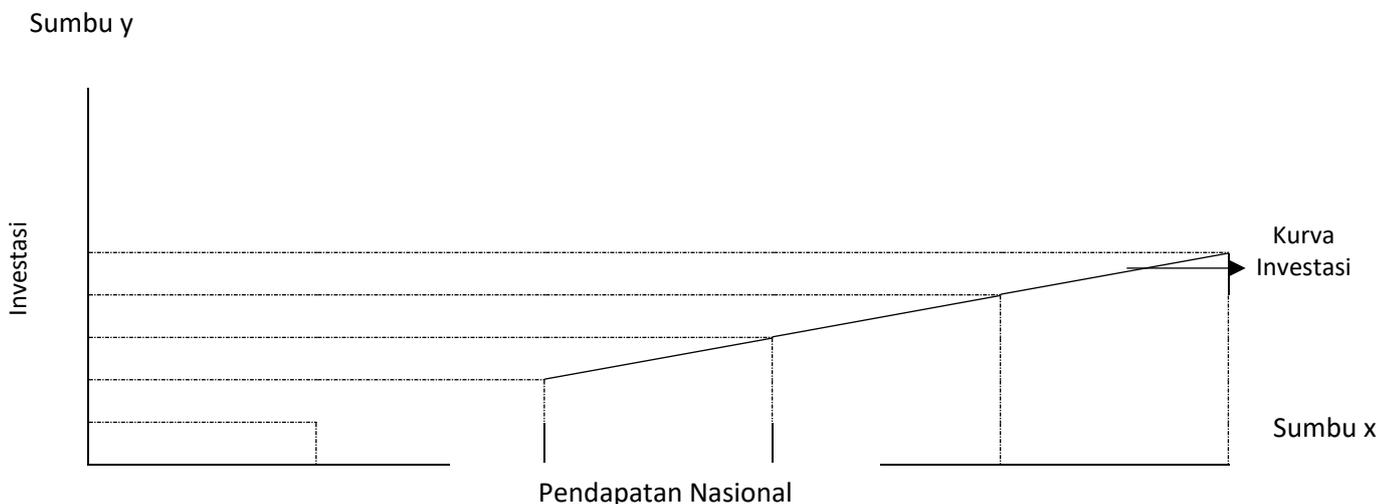
persamaan fungsi di atas dinyatakan dalam I_0 , nilainya akan berubah sebagai akibat adanya penemuan-penemuan baru, seperti teknologi baru ataupun produk baru. Di negara yang sedang berkembang investasi yang diadakan oleh pemerintah pada umumnya nilai yang relatif besar, dan dapat dikategorikan sebagai investasi otonom karena besar kecilnya investasi pemerintah pada umumnya tidak dipengaruhi oleh perubahan pendapatan nasional. Dalam kurva tergambar sebagai berikut:

Gambar IX. Gambar Kurva Investasi Otonom



2. Investasi dorongan (*induced investment*) yaitu investasi yang didorong oleh adanya perubahan dalam pendapatan nasional. Jika pendapatan nasional naikakan membawa serta kenaikan konsumsi, yang berarti bertambahnya permintaan barang dan jasa. Oleh karena itu akan menambah produksi, dan menambah pula investasi. Semakin tinggi pendapatan nasional akan semakin tinggi pula investasinya. Demikian pula sebaliknya. Dalam kurva tergambar sebagai berikut:

Gambar X. Gambar Kurva Investasi Dorongan.



PERLIPATAN

Pendapatan nasional yang seimbang akan tercapai selama konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor tidak berubah. Apabila salah satu dari komponen itu berubah, maka pendapatan yang seimbang juga akan berubah. Apabila salah satu dari komponen itu naik, maka pendapatan nasional yang seimbang juga akan naik, tetapi dengan jumlah yang berlipat. Angka yang menunjukkan berapa kali pertambahannya dinamai angka pelipat atau koefisien *multiplier* atau pelipatan. Pelipatan adalah suatu proses yang menunjukkan berapa besar perubahan pendapatan nasional sebagai akibat adanya perubahan investasi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kenaikan pendapatan nasional berlipat ganda dibandingkan dengan bertambahnya pengeluaran investasi adalah sebagai berikut:

1. Apabila penerima pendapatan membelanjakan kembali uang yang diterimanya. Jika mereka menahannya, maka proses pengembangan pendapatan akan berhenti, sekurang-kurangnya diperlambat waktunya.
2. Apabila uang yang diterima ini dibelanjakan pada barang buatan dalam negeri. Jika dibelanjakan pada barang-barang buatan luar negeri. Proses pemindahan ke luar negeri inilah yang disebut kebocoran (*leakage*). Agar proses perlipatan pendapatan ini terjadi di dalam negeri, maka tidak ada boleh kebocoran. Dalam sistem ekonomi, hubungan dagang dengan luar negeri adalah penting, maka adanya kebocoran tidak dapat dan tidak perlu dihindarkan.

Proses perlipatan (*multiplier*) terjadi karena adanya perubahan investasi. Apabila investasi berubah, maka pendapatan nasional akan berubah juga. Berubahnya pendapatan nasional akan menyebabkan berubahnya konsumsi dan tabungan. Dalam proses selanjutnya tambahan pengeluaran konsumsi ini (ΔC) akan menjadi tambahan pendapatan (ΔY) bagi produsen barang-barang konsumsi. Selanjutnya pendapatan ini akan terus mengalir. Aliran ini semakin lama akan semakin kecil dan lemah, bilamana golongan-golongan penerima pendapatan yang dilalui oleh arus pendapatan itu semakin banyak, karena setiap golongan penerima pendapatan akan menabung. Jumlah tabungan akan semakin besar jika semakin banyak golongan penerima pendapatan yang melakukannya. Pengaruh perlipatan tersebut akan semakin kecil jika semakin banyak golongan yang dilalui.

RANGKUMAN MATERI

1. Arus perputaran mesin ekonomi dapat dinyatakan dalam dua arus kegiatan ialah arus barang dan jasa, dan arus uang yang mengalir dari dan keempat sektor:
 - a. Rumah tangga.
 - b. Perusahaan.
 - c. Pemerintah.
 - d. Luar negeri.
2. Semakin giat perputaran mesin ekonominya berarti semakin besar pula produk nasional brutonya atau pendapatan nasionalnya. Ada tiga cara untuk menghitung pendapatan nasional, yaitu dengan cara:
 - a. Produksi.
 - b. Pengeluaran.
 - c. Pendapatan.
3. Tingkat kemakmuran suatu negara tidak cukup jika dilihat pada tingkat tingginya pendapatan nasional atau pendapatan perkapitanya saja, melainkan juga harus dilihat pada distribusi pendapatannya.

4. Adanya kelemahan-kelemahan dari sistem persaingan sempurna mendorong semakin besarnya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Campur tangan pemerintah dapat dalam bentuk pembuatan peraturan-peraturan, penyelenggaraan sendiri berbagai kegiatan ekonomi atau dengan menjalankan kebijaksanaan moneter dan kebijaksanaan fiskal.
5. Untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya, pemerintah memerlukan dana baik dari dalam negeri maupun dari bantuan luar negeri. Rencana dan realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahun dapat diketahui dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Pengeluaran konsumsi akan berubah-ubah sesuai dengan naik turunnya pendapatan disposabel. Meskipun pendapatan itu berbeda-beda tetapi ada kesamaan tingkah laku di dalam membelanjakan barang-barang konsumsi. Besarnya pengeluaran konsumsi dan tabungan ditentukan oleh besarnya disposabel sehingga apabila pendapatan disposabel bertambah, maka konsumsi dan tabungan akan bertambah juga.
7. Hubungan antara pendapatan disposabel dengan konsumsi dan pendapatan disposabel dengan tabungan dapat dijelaskan dengan konsep hasrat konsumsi dan hasrat menabung karena keduanya itu merupakan kurva yang sama.
8. Dalam perhitungan pendapatan nasional, investasi meliputi pengertian yang luas, tetapi pengertian yang paling penting dari investasi adalah sebagai pengeluaran yang dilakukan oleh pengusaha untuk membeli barang-barang modal dan membina industri. Investasi dipengaruhi oleh banyak faktor tetapi yang paling penting adalah tingkat harga dan pendapatan nasional.
9. Keseimbangan pendapatan nasional adalah suatu tingkat pendapatan nasional yang setiap kali ada gangguan akan menimbulkan gerakan menuju ke keseimbangan yang baru. Dalam perekonomian dua sektor keseimbangan pendapatan terjadi pada saat $Y = C + I$ atau $S = I$. Dalam perekonomian tiga sektor keseimbangan pendapatan terjadi saat $y = C + I + G$, sedangkan dalam perekonomian empat sektor keseimbangan pendapatan terjadi pada saat $Y = C + I + G + (X - M)$.
10. Pendapatan nasional yang seimbang akan berubah apabila salah satu komponen pendapatan nasional berubah. Perubahan salah satu komponen tersebut menyebabkan pendapatan bertambah berlipat ganda. Angka yang menentukan tingkat pertambahan pendapatan dinamakan angka pelipat (*multiplier*). Keseimbangan pendapatan nasional terjadi baik dalam keadaan kesempatan kerja penuh maupun dalam kesempatan kerja kurang. Apabila dalam kesempatan kerja penuh produksi masih terus ditambah akan terjadi jurang inflasi. Dapat juga terjadi jurang inflasi yaitu bila tidak semua kapasitas produksi dipakai dalam sistem produksi.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Apakah penjelasan mengenai perputaran mesin ekonomi, produk nasional dan pendapatan nasional?
2. Bagaimanakah penjelasan mengenai campur tangan pemerintah dalam perekonomian nasional?
3. Bagaimanakah penjelasan mengenai pendapatan disposabel dalam hubungannya dengan pendapatan nasional?
4. Bagaimanakah penjelasan mengenai pendapatan disposabel dalam hubungannya dengan konsumsi dan tabungan?
5. Bagaimanakah penjelasan mengenai keseimbangan pendapatan nasional?

DAFTAR PUSTAKA

Partadiredja, Ace. 1983. Pengantar Ekonomika. Yogyakarta: BPFE.

Samuelson, P.A.. 1975. Teori Ekonomi -Terjemahan Paul Sitohang. Jakarta: Bhatara.

Sukirno, Sadono. 1982 Pengantar Teori Makro Ekonomi. Jakarta: Bina Grafika.

H. Rully Trihantana, M.Si.
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jl. Kapten Dasuki Bakri, Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Bogor, Jawa Barat 16810
taft1trihantana@gmail.com

BAB 8 KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
Sebuah Bunga Rampai Ilmu Ekonomi dari Literasi Pemikiran
dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Diterbitkan oleh:
INAIS Press

BAB 8 KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER

A. Pendahuluan

Hingga tahun 1970-an, makroekonomi Keynesian merupakan landasan intelektual yang mendominasi kebijakan fiskal yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian. Selain tidak adanya teori makroekonomi yang diakui secara umum, ada alasan penting mengapa hal ini terjadi (disarikan dari tahun-tahun yang penuh gejolak di beberapa negara saat ini. setelah perang) adalah tingkat inflasi yang secara umum rendah selama dua dekade pertama setelah Perang Dunia II. Namun, ada dua periode inflasi yang lebih tinggi. Yang pertama terjadi selama perang Korea tahun 1950–53, yang kedua terjadi pada akhir tahun 1960an dan awal tahun 1970an sehubungan dengan perang di Vietnam. Kejadian inflasi yang kedua mengawali revisi teori makroekonomi yang diprakarsai oleh Milton Friedman dan Edmund Phelps serta analisis mereka terhadap kurva Phillips. Yang pertama berdurasi lebih pendek dan tidak mengakibatkan gangguan signifikan terhadap pembangunan. makroekonomi berdasarkan teori pendapatan-pengeluaran Keynesian. Terdapat pengecualian penting, yaitu analisis Bent Hansen tentang bagaimana menggunakan kebijakan fiskal untuk menjamin lapangan kerja penuh dan tingkat harga yang stabil. Hansen (1951) menganalisis inflasi terbuka dan tertekan dimulai dari model agregat dengan kelebihan permintaan baik di pasar barang maupun pasar tenaga kerja. Ketika beberapa tahun kemudian dalam *The Economic Theory of Fiscal Policy* menganalisis bagaimana menggabungkan lapangan kerja penuh dengan nilai uang yang stabil, ia malah menggunakan model makroekonomi dengan landasan teori pilihan di mana pasar berada dalam keseimbangan yang tidak dijatah (Siven, 2023: h.1).

Sementara itu Ilmu ekonomi moneter menyelidiki hubungan antara variabel ekonomi riil pada tingkat agregat (seperti output riil, tingkat bunga riil, lapangan kerja, dan nilai tukar riil) dan variabel nominal (seperti tingkat inflasi, suku bunga nominal, nilai tukar nominal, dan pasokan uang). Jika didefinisikan demikian, ekonomi moneter memiliki banyak tumpang tindih dengan ekonomi makro secara umum, dan kedua bidang ini memiliki sejarah yang sama selama hampir 50 tahun terakhir. Pernyataan ini terutama berlaku pada tahun 1970an setelah perdebatan kaum monetaris/Keynesian mengarah pada reintegrasi ekonomi moneter dengan makroekonomi. Karya penting Robert Lucas (1972) memberikan landasan teoretis bagi model fluktuasi ekonomi di mana uang merupakan faktor pendorong mendasar di balik pergerakan output riil. Munculnya model siklus bisnis riil selama tahun 1980an dan awal 1990an, berdasarkan kontribusi Kydland dan Prescott (1982) dan secara eksplisit berfokus pada faktor nonmoneter sebagai kekuatan pendorong di belakang siklus bisnis, cenderung memisahkan ekonomi moneter dari makroekonomi. Baru-baru ini, pendekatan siklus bisnis riil terhadap pemodelan agregat telah digunakan untuk memasukkan faktor moneter ke dalam model keseimbangan umum yang dinamis. Saat ini, ekonomi makro dan ekonomi moneter memiliki alat yang sama yang terkait dengan pendekatan stokastik dinamis untuk memodelkan perekonomian agregat. Fokus dalam ekonomi moneter berbeda-beda, menekankan pada penentuan tingkat harga, inflasi, dan peran kebijakan moneter. Saat ini, ekonomi moneter didominasi oleh tiga strategi pemodelan alternatif. Dua model pertama, model perwakilan-agen dan model generasi yang tumpang tindih, memiliki pendekatan metodologis yang sama dalam membangun hubungan keseimbangan secara eksplisit atas dasar optimalisasi perilaku masing-masing agen. Pendekatan ketiga didasarkan pada

serangkaian hubungan keseimbangan yang seringkali tidak diturunkan secara langsung dari setiap permasalahan pengambilan keputusan. Sebaliknya, hal tersebut digambarkan sebagai hal yang bersifat ad hoc oleh para kritikus dan sebagai perkiraan yang tepat bagi para pendukungnya. Karakterisasi yang terakhir ini umumnya lebih tepat, dan model-model ini telah menunjukkan nilai yang besar dalam membantu para ekonom memahaminya permasalahan dalam ekonomi moneter (Walsh, 2010).

B. Kebijakan Fiskal

1. Teori umum kebijakan fiskal

Musgrave (1959) membahas tiga cabang kebijakan fiskal, alokasi sumber daya, distribusi pendapatan dan stabilisasi perekonomian secara keseluruhan. Dari cabang-cabang ini, diskusi Hansen terkonsentrasi pada cabang ketiga. Pertanyaan yang diajukan oleh komite adalah bagaimana kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mencapai lapangan kerja penuh dan tingkat harga yang stabil. Hal ini sangat penting untuk diketahui tentang bagaimana kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mencapai berbagai tujuan. Hansen berpendapat bahwa perekonomian dapat digambarkan dengan sistem persamaan yang luas dimana tujuan kebijakan fiskal dapat dirumuskan sebagai pembatasan pada beberapa variabel endogen. Jika nilai variabel tujuan sudah ditentukan, langkah berikutnya adalah memilih sejumlah parameter kebijakan fiskal (misalnya tarif pajak atau keputusan pengeluaran) dan menyelesaikan nilai yang memberikan nilai variabel tujuan yang diperlukan.

Disamping hal tersebut, parameter kebijakan moneter dimana kebijakan moneter berbeda dengan kebijakan fiskal diartikan sebagai tindakan yang berhubungan langsung dengan transaksi di pasar kredit. Sasaran tertentu dapat dipenuhi secara otomatis, misalnya lapangan kerja penuh dengan menemukan konstelasi parameter (tarif pajak dan/atau norma pengeluaran) yang membuat tujuan-tujuan lain mencapai nilai yang diinginkan. Aturan praktisnya adalah jumlah sarana harus sama dengan jumlah yang dihasilkan. Namun, jumlah tujuan harus sama dengan jumlah parameter yang ada bukanlah suatu kondisi yang perlu atau cukup.

Secara umum tidak mungkin untuk menghubungkan parameter tertentu ke tujuan tertentu, tetapi hal ini mungkin terjadi jika model tidak sepenuhnya simultan. Jika semua variabel endogen saling bergantung (semua persamaan dalam sistem adalah fungsi dari semua variabel endogen), perubahan nilai parameter akan mengubah nilai semua variabel endogen. Dalam kasus khusus dimana variabel tujuan tertentu hanya muncul di salah satu persamaan (dan merupakan satu-satunya variabel endogen dalam persamaan), maka variabel tersebut merupakan fungsi dari parameter persamaan tersebut. Model tersebut kemudian (sebagian) bersifat rekursif. Nilai parameter kebijakan mempengaruhi variabel endogen. Namun tidak mungkin membicarakan pengaruh variabel endogen, misalnya surplus anggaran. Misalnya, surplus anggaran tertentu dapat mempunyai dampak yang berbeda-beda, bergantung pada volume pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Di sini Hansen mengacu pada karya mengenai efek pengganda anggaran berimbang yang ditulis oleh Gelting (1941) dan Haavelmo (1945). Nilai yang sama dari suatu variabel endogen tertentu dapat disebabkan oleh konstelasi parameter yang berbeda yang pada gilirannya mempunyai pengaruh yang berbeda pula terhadap variabel endogen lainnya. Hal ini tidak bertentangan dengan

pernyataan bahwa defisit akan menambah utang bersih pemerintah dan meningkatkan pembayaran bunga bersih di masa depan.

Keseimbangan anggaran akan mempengaruhi perekonomian pada periode mendatang. Myrdal (1934) menekankan pentingnya keseimbangan anggaran sepanjang siklus. Namun kebijakan fiskal yang aktif berarti kurangnya keseimbangan pada masa kemerosotan dan keseimbangan yang berlebihan pada masa booming. Keyakinan lama mengenai "keuangan yang sehat" didasarkan pada pemikiran bahwa apa yang bijaksana bagi individu atau keluarga juga akan menjadi kebijakan yang bijaksana untuk mengarahkan perekonomian secara keseluruhan. Myrdal menerjemahkan prinsip yang berlaku dari satu tahun fiskal menjadi beberapa tahun yang terdiri dari satu siklus bisnis. Asumsikan bahwa tujuan kebijakan ekonomi telah terpenuhi pada awalnya namun perekonomian terganggu dan akibatnya nilai variabel tujuan berubah. Kemungkinannya adalah sejumlah variabel kebijakan fiskal diubah agar tujuannya kembali terpenuhi. Namun meskipun tidak ada variabel kebijakan fiskal yang diubah, ada kemungkinan bahwa (beberapa) variabel tujuan tidak akan menyimpang terlalu jauh dari nilai aslinya. Salah satu contohnya adalah skala pajak dibuat sedemikian rupa sehingga sistem tidak terlalu bereaksi terhadap guncangan. Efek stabilisasi otomatis mungkin berbeda untuk guncangan yang berbeda dan untuk tujuan yang berbeda. Konstelasi parameter yang berbeda mungkin lebih atau kurang efektif dari sudut pandang stabilisasi.

Hansen menekankan bahwa untuk membicarakan efek stabilisasi otomatis, diperlukan norma perbandingan. Salah satu normanya adalah bahwa item-item anggaran yang berbeda dijaga tetap konstan melalui variasi parameter. Namun, mungkin terdapat rangkaian variasi parameter berbeda yang menjaga item anggaran tetap konstan. Ini berarti bahwa tidak mungkin untuk secara jelas membicarakan sifat stabilisasi otomatis anggaran. Alasan di atas didasarkan pada asumsi bahwa kebijakan ekonomi (Siven, 2023: p,4-6).

2. Kebijakan Fiskal Pada Perekonomian Tertutup

Analisis terhadap kebijakan fiskal untuk perekonomian tertutup dimulai dari model makro sederhana dengan pasar barang konsumsi, pasar barang investasi, dan sektor publik. Mengingat tingkat upah yang eksogen dan persaingan sempurna di pasar barang konsumsi dan investasi, maka kondisi ini merupakan kondisi urutan pertama bagi permintaan tenaga kerja oleh perusahaan. Pemerintah dapat menggunakan variasi parameter untuk mempertahankan lapangan kerja penuh dan tingkat harga konsumen yang konstan dalam menghadapi berbagai guncangan.

Salah satu contoh guncangan dapat berasal dari pemerintah itu sendiri, yaitu mobilisasi, yaitu kondisi dimana sebagian angkatan kerja akan ditarik dari produksi. Asumsikan bahwa laki-laki akan diambil dari produksi barang konsumsi. Produktivitas marjinal tenaga kerja di sektor ini akan meningkat sehingga pajak tidak langsung harus ditingkatkan untuk menjaga tingkat harga pasar barang konsumsi tetap konstan. Permintaan barang investasi turun ketika produksi di sektor barang konsumsi turun. Hal ini dapat diatasi dengan penurunan suku bunga atau pemerintah membeli lebih banyak barang investasi.

Di sisi lain, Permintaan barang-barang konsumsi akan menurun jika pendapatan rumah tangga penerima upah dan pengusaha lebih rendah. Keuntungan para pengusaha industri barang konsumsi juga menurun karena harga sebelum pajak dan volume produksi lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Jika permintaan terhadap barang-barang konsumsi turun

lebih besar dari pada produksi, pajak pendapatan harus diturunkan untuk menjaga keseimbangan.

Contoh lain dari guncangan ini adalah peningkatan produktivitas marjinal atau rata-rata tenaga kerja di industri barang konsumsi. Dalam kasus pertama, pajak tidak langsung harus ditingkatkan untuk menjaga harga pasar tetap konstan. Tingkat upah tidak akan terpengaruh namun pendapatan para pengusaha di sektor tersebut akan turun sehingga tarif pajak penghasilan harus diturunkan. Jika hanya produktivitas rata-rata yang meningkat, maka produktivitas marjinal dan tingkat upah akan konstan. Meningkatnya produksi barang-barang konsumsi meningkatkan pendapatan wirausaha, namun tidak cukup untuk membiarkan permintaan barang-barang konsumsi meningkat sebanyak produksi (akibat pajak pendapatan dan kecenderungan mengkonsumsi marjinal kurang dari satu kesatuan). Oleh karena itu, perlu penurunan pajak penghasilan. Meningkatnya produksi barang konsumsi dapat meningkatkan permintaan barang investasi. Hal ini dapat diatasi dengan menaikkan suku bunga (Siven, 2023: p, 9-15)

3. Kebijakan Fiskal Pada Perekonomian Terbuka

Pada kebijakan perekonomian terbuka, selain parameter rumah tangga, perusahaan dan pajak, pemerintah mempunyai dua parameter lagi, yaitu tarif bea masuk dan imbalan ekspor. Selain itu, hal ini juga dapat mempengaruhi nilai tukar dengan menjual atau membeli mata uang asing, yang memerlukan cadangan mata uang. Terdapat asumsi bahwa tidak ada pengaruh langsung tingkat bunga terhadap nilai tukar (namun permintaan domestik atas barang-barang investasi dan ekspor dipengaruhi oleh tingkat bunga). Alasannya mungkin karena peraturan pembayaran luar negeri (termasuk pergerakan modal) pada saat itu.

Perluasan model untuk mencakup perekonomian yang sangat terbuka menyiratkan bahwa harga barang konsumsi dan investasi dalam negeri tidak lagi ditentukan secara simultan dengan variabel endogen lainnya. Variabel endogen lainnya tersebut adalah total lapangan kerja produksi barang konsumen dan investasi, pendapatan yang dapat dibelanjakan dari rumah tangga penerima upah dan wirausaha, dan pada akhirnya neraca surplus perdagangan juga dapat ditentukan secara berturut-turut jika kita mengetahui nilai-nilai variabel endogen dengan tingkat yang lebih rendah. Berbeda dengan model perekonomian tertutup yang variabel-variabel endogennya ditentukan secara bersamaan, model perekonomian yang sangat terbuka bersifat rekursif.

Berbeda dengan perekonomian tertutup, tingkat harga barang konsumsi tidak bergantung pada pembangunan di negara tersebut. Tingkat harga ditentukan oleh tingkat harga pasar dunia, nilai tukar, dan tingkat bea masuk. Tindakan kebijakan fiskal yang mempengaruhi kondisi penawaran dan permintaan tidak lagi diperlukan untuk mencapai tingkat harga yang stabil.

Peningkatan produktivitas rata-rata dan marjinal yang sama besarnya baik di industri konsumen maupun investasi dapat (jika kita ingin menjaga alokasi tenaga kerja antar industri tetap konstan) diimbangi dengan peningkatan tarif pajak tidak langsung sebesar persentase yang sama di kedua industri. Hal ini akan menyebabkan surplus neraca perdagangan yang dapat diimbangi dengan penurunan tarif pajak penghasilan atau penurunan suku bunga. Meningkatnya produksi barang konsumsi akan meningkatkan permintaan barang investasi. Dampak ini mungkin memerlukan perubahan kebijakan lebih lanjut.

Peningkatan harga pasar dunia secara proporsional dapat dipenuhi dengan penurunan nilai tukar dalam proporsi yang sama untuk menjaga harga internal tetap konstan (apresiasi mata uang). Namun negara tersebut mungkin terikat oleh perjanjian internasional untuk menjaga nilai tukar tetap dan oleh karena itu mungkin harus menerima perubahan tingkat harga. Namun ada kemungkinan tambahan. Jika pajak penjualan (pajak omzet) dipungut di dalam negeri, pajak ini (berbeda dengan pajak produksi) dapat digunakan untuk melawan perubahan tingkat harga internasional. Kombinasi antara peningkatan pajak omzet dan penurunan pajak produksi misalnya akan mempunyai dampak yang sama dengan peningkatan bea masuk atau peningkatan imbalan ekspor.

Diketahui bahwa kebijakan fiskal pada perekonomian terbuka harga impor dan/atau ekspor tidak bersifat eksogen seperti pada model perekonomian yang sangat terbuka. Harga pasar dunia kemungkinan besar akan dipengaruhi oleh impor dan ekspor dari negara dengan perekonomian “besar” seperti Amerika Serikat. Hal ini juga mungkin terjadi pada negara dengan perekonomian “kecil”. Misalnya, suatu negara mungkin merupakan produsen utama beberapa barang yang sangat teknis. Beberapa harga rumah mungkin sampai batas tertentu tidak bergantung pada harga internasional karena tingginya biaya transportasi. Jasa dan perumahan bisa dijadikan contoh. Ketika harga dalam negeri sampai batas tertentu tidak bergantung pada sistem harga internasional, maka model tersebut akan kembali bersifat interdependen, tidak bersifat rekursif seperti dalam kasus perekonomian yang sangat terbuka (Siven, 2023: p, 16-17).

C. Kebijakan Moneter

1. Tinjauan Umum dan Konsep Kebijakan Moneter

Salah satu kunci kebijakan ekonomi adalah kebijakan moneter (monetary policy), yang merupakan setiap tindakan atau kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral dengan maksud untuk mengubah kondisi-kondisi moneter dan keuangan dalam perekonomian yang bersangkutan pada suatu negara. Tujuan dari kebijakan moneter salah satunya adalah untuk mengendalikan dan menciptakan tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Namun demikian terdapat tujuan kebijakan moneter lainnya seperti terciptanya inflasi yang rendah dan stabil dengan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, suku bunga dan kurs yang stabil serta terciptanya neraca pembayaran yang seimbang. Instrumen kebijakan yang digunakan bank sentral demi menciptakan perubahan kondisi moneter dan finansial itu meliputi pengaturan suku bunga jangka pendek, kontrol terhadap kredit perbankan, serta pengelolaan dana cadangan perbankan. Semua instrumen ini terkait anata satu dengan lainnya, dan kebijakan instrumen mana yang dipilih serta sejauhmana efektifitasnya ditentukan oleh rezim atau pengaturan kurs yang ada, kerangka kerja kebijakan moneternya sendiri, serta ada tidaknya kontrol dan aturan terhadap arus-arus permodalan (Hossain, 2009: p, 87).

Pada tataran operasional, kebijakan moneter secara konseptual dilihat sebagai instrumen kebijakan yang terpisah dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu sendiri berkaitan dengan kas yang dimiliki oleh pemerintah (pajak dan penerimaan pemerintah) serta tata cara pembiayaan atau penutupan defisit anggaran yang bisa dilakukan dengan sarana moneter dan non-moneter. Disamping itu mekanisme transmisi kebijakan moneter berbeda dengan mekanisme transmisi kebijakan fiskal. Dampak yang ditimbulkan kebijakan fiskal terhadap permintaan agregat bersifat langsung karena kebijakan ini beroperasi melalui pembelanjaan

pemerintah dan pendapatan siap pakai sektor swasta (melalui pajak) juga langsung mempengaruhi tingkat belanja konsumsi swasta (Haliassos dan Tobin, 1990).

Sedangkan dampak kebijakan moneter terhadap permintaan agregat bersifat tidak langsung, karena masih ditentukan oleh respons konsumen dan para investor dalam menanggapi perubahan kondisi moneter dan finansial yang disebabkan oleh tindakan kebijakan bank sentral itu (Friedman, 1991; Modigliani, 1971). Namun, ada pula instrumen kebijakan moneter, seperti kontrol kredit yang secara langsung mempengaruhi permintaan sekaligus penawaran agregat (Agenor dan Montiel, 1996). Hanya saja kebijakan moneter ini hanya dapat dilakukan jika sistem finansialnya masih penuh tekanan, sistem finansial seperti demikian belakangan mulai menghilang karena kian banyak negara berkembang yang telah melakukan deregulasi sektor finansial dan pembukaan ekonomi (Hossain, 2009: p, 88).

2. Uang Dalam Fungsi Utility

Pertanyaan mendasar dalam ekonomi moneter adalah sebagai berikut: Bagaimana kita memodelkan permintaan uang? Apa perbedaan perekonomian riil dengan perekonomian dalam hal meningkatkan nilai uang yang positif? Tiga pendekatan umum untuk memasukkan uang ke dalam model keseimbangan umum yang telah banyak dianut adalah: (1) berasumsi bahwa uang menghasilkan utilitas langsung dengan memasukkan saldo uang ke dalam fungsi utilitas dari agen model (Sidrauski 1967); (2) membebaskan biaya transaksi dalam beberapa bentuk yang menimbulkan permintaan akan uang, dengan membuat pertukaran aset menjadi mahal (Baumol 1952; Tobin 1956), mengharuskan uang digunakan untuk jenis transaksi tertentu (Clower 1967), dengan asumsi bahwa waktu dan uang dapat digabungkan untuk menghasilkan layanan transaksi yang diperlukan untuk memperoleh barang konsumsi (Brock 1974; McCallum dan Goodfriend 1987; Croushore 1993), atau dengan asumsi bahwa barter komoditas secara langsung membutuhkan biaya yang mahal (Kiyotaki dan Wright 1989); atau (3) memperlakukan uang seperti aset lainnya yang digunakan untuk mentransfer sumber daya antarwaktu (Samuelson 1958).

Ketiga pendekatan tersebut melibatkan jalan pintas dalam satu bentuk atau lainnya; beberapa aspek lingkungan ekonomi secara sederhana dispesifikasikan secara eksogen untuk memperkenalkan peran uang. Ini bisa menjadi alat yang berguna, memungkinkan seseorang memusatkan perhatian pada pertanyaan-pertanyaan yang menjadi kepentingan utama tanpa terlalu terganggu oleh masalah-masalah sekunder. Namun keyakinan terhadap kemampuan suatu model untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan akan berkurang jika aspek-aspek yang ditentukan secara eksogen tampak penting dalam isu fokus. Pertimbangan penting dalam mengevaluasi pendekatan-pendekatan yang berbeda adalah untuk menentukan apakah kesimpulan-kesimpulan tersebut bersifat umum di luar model yang spesifik atau bergantung pada cara yang tepat dalam memperkenalkan peran uang. Contoh berikutnya mencakup hasil yang kuat, seperti hubungan antara pertumbuhan uang dan inflasi, dan hasil lain yang sensitif terhadap spesifikasi peran uang, seperti dampak inflasi terhadap persediaan modal dalam kondisi mapan.

Dengan adanya pembatasan yang sesuai pada fungsi utilitas, pendekatan seperti ini dapat menjamin bahwa agen dalam keseimbangan memilih untuk memegang sejumlah uang yang positif, dan uang akan dinilai secara positif. Model fungsi uang dalam utilitas (MIU) awalnya dibuat oleh Sidrauski (1967) dan telah digunakan secara luas. Hal ini dapat digunakan untuk mengkaji beberapa isu penting dalam ekonomi moneter—hubungan antara uang dan

harga, dampak inflasi terhadap keseimbangan, dan tingkat inflasi yang optimal. Untuk lebih memahami peran uang dalam kerangka tersebut, disajikan pendekatan linier. Perkiraan ini dapat digunakan untuk memperoleh beberapa implikasi analitis dan mempelajari secara numerik implikasi model MIU terhadap makrodinamika (Walsh, 2010: p, 35).

Analisis pendekatan MIU, hingga saat ini, berfokus pada properti kondisi stabil. Penting juga untuk memahami implikasi model terhadap perilaku dinamis perekonomian seiring dengan penyesuaian terhadap gangguan yang berasal dari luar. Bahkan model dasar Sidrauski dapat menunjukkan nonsupernetralitas selama transisi ke kondisi stabil. Misalnya, S. Fischer (1979a) menunjukkan bahwa untuk kelas fungsi utilitas penghindaran risiko relatif konstan, tingkat akumulasi modal berhubungan positif dengan tingkat pertumbuhan uang kecuali untuk kasus utilitas yang dapat dipisahkan sebelumnya telah disebutkan bagaimana kondisi mapan dapat dipengaruhi ketika pertumbuhan uang bervariasi dari waktu ke waktu (Reis 2007).

Selain itu, penelitian teoritis dan empiris dalam ekonomi makro dan ekonomi moneter saling terkait erat, dan penting untuk merefleksikan bagaimana model teoritis dapat menjelaskan pengamatan aktual terhadap pengalaman inflasi. Salah satu cara untuk mempelajari dinamika model adalah dengan menggunakan metode numerik untuk melakukan simulasi menggunakan model tersebut. Hasilnya kemudian dapat dibandingkan dengan data aktual yang dihasilkan oleh perekonomian riil. Pendekatan ini dipopulerkan oleh literatur siklus bisnis nyata (lihat Cooley 1995). Karena parameter model teoritis dapat divariasikan dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh karakteristik perekonomian riil, metode simulasi memungkinkan menjawab berbagai pertanyaan “bagaimana jika”. Misalnya, bagaimana respons dinamis terhadap perubahan sementara dalam tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar bergantung pada tingkat substitusi antarwaktu yang menjadi ciri preferensi individu atau bertahannya gangguan tingkat pertumbuhan uang?

Memiliki solusi analitik terhadap suatu model juga dapat membantu; seringkali solusi eksplisit membantu menunjukkan apakah hasil simulasi cenderung sensitif terhadap nilai parameter dan untuk menyoroiti secara langsung mekanisme melalui mana perubahan dalam proses yang diikuti oleh variabel eksogen menyebabkan dampak pada variabel endogen dan terhadap perubahan aturan keputusan keseimbangan agen dalam model. Selain itu, program yang mudah diadaptasi untuk menyelesaikan model ekspektasi rasional stokastik dinamis linier kini tersedia secara bebas. Pengembangan versi linear dari model MIU yang juga mencakup pilihan tenaga kerja-waktu senggang. Hal ini memperkenalkan keputusan pasokan tenaga kerja ke dalam analisis, sebuah perluasan yang penting dan diperlukan untuk mempelajari fluktuasi siklus bisnis, karena variasi lapangan kerja merupakan karakteristik penting dari siklus. Penting juga untuk memperhitungkan ketidakpastian dengan menambahkan guncangan eksogen yang mengganggu keseimbangan sistem. Dua jenis guncangan yang dipertimbangkan adalah guncangan produktivitas, kekuatan pendorong dalam model siklus bisnis riil, dan guncangan terhadap tingkat pertumbuhan persediaan uang nominal (Walsh, 2010: p, 61-62).

3. Uang dan Transaksi

Sebagaimana diketahui peran uang yaitu dengan mengasumsikan bahwa individu memperoleh utilitas langsung dari memegang saldo uang riil. Oleh karena itu, keseimbangan uang riil muncul dalam fungsi utilitas bersamaan dengan konsumsi dan waktu. Namun uang biasanya dianggap menghasilkan utilitas secara tidak langsung melalui penggunaan atau transaksi. Hal ini dinilai karena berguna dalam memperlancar transaksi untuk memperoleh

barang konsumsi yang secara langsung memberikan utilitas. Seperti dijelaskan oleh Clower (1967), barang membeli uang, dan uang membeli barang, namun barang tidak membeli barang. Dan karena barang tidak dapat membeli barang, maka alat tukar moneter yang berfungsi untuk membantu proses transaksi akan memiliki nilai.

Alat tukar yang memfasilitasi transaksi menghasilkan utilitas secara tidak langsung dengan memungkinkan terjadinya transaksi tertentu yang tidak akan terjadi atau dengan mengurangi biaya yang terkait dengan transaksi. Permintaan uang kemudian ditentukan oleh sifat teknologi transaksi perekonomian. Model formal pertama dari permintaan uang yang menekankan peran biaya transaksi disebabkan oleh Baumol (1952) dan Tobin (1956). Niehans (1978) mengembangkan perlakuan sistematis terhadap teori uang di mana biaya transaksi memainkan peran penting. Model ini merupakan model ekuilibrium parsial, yang berfokus pada permintaan uang sebagai fungsi dari tingkat bunga nominal dan pendapatan. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam mengkaji model money-in-the-utility (MIU), Oleh karenanya pada model keseimbangan umum dimana permintaan uang muncul dari penggunaannya dalam melakukan transaksi perlu untuk diperhitungkan.

Model pertama yang adalah model yang menggunakan sumber daya dan uang riil untuk menghasilkan jasa transaksi, dan jasa tersebut diperlukan untuk membeli barang konsumsi. Sumber daya nyata ini dapat berbentuk waktu atau barang. Model cash-in-advance (CIA), seperti model MIU, berasumsi bahwa uang itu istimewa; tidak seperti aset keuangan lainnya, aset tersebut menghasilkan utilitas langsung dan oleh karena itu termasuk dalam fungsi utilitas, atau memiliki sifat unik yang memungkinkannya digunakan untuk memfasilitasi transaksi (Walsh, 2010: p, 91-93).

Model-model yang disebutkan di atas merupakan kerangka dasar yang dianggap berguna oleh para ekonom moneter untuk memahami implikasi inflasi pada kondisi stabil dan implikasi tingkat inflasi alternatif terhadap kesejahteraan pada kondisi stabil. Model-model tersebut mengasumsikan harga-harga benar-benar fleksibel, dan melakukan penyesuaian untuk memastikan keseimbangan pasar terus terpelihara. MIU, CIA, waktu belanja, dan model pencarian semuanya mewakili cara untuk memperkenalkan nilai uang ke dalam kerangka keseimbangan umum. Setiap pendekatan menangkap beberapa aspek peran uang dalam memfasilitasi transaksi. Meskipun terdapat pendekatan yang berbeda, terdapat beberapa kesimpulan yang bersifat umum bagi semua pihak. Pertama, karena tingkat harga benar-benar fleksibel, nilai uang, sama dengan 1 terhadap harga barang, berperilaku seperti harga aset. Namun, pengembalian uang yang dihasilkan berbeda-beda dalam berbagai pendekatan. Dalam model MIU, utilitas marjinal uang adalah keuntungan langsung, sedangkan dalam model CIA, keuntungan ini diukur dengan pengganda Lagrangian pada batasan CIA. Dalam model waktu belanja, keuntungan timbul dari penghematan waktu yang diberikan oleh uang dalam melakukan transaksi, dan nilai penghematan waktu tersebut bergantung pada upah riil. Dalam model pencarian, hal ini bergantung pada kemungkinan peluang perdagangan.

Semua model ini mempunyai implikasi serupa terhadap tingkat inflasi yang optimal. Keseimbangan yang efisien akan ditandai dengan kesetaraan antara biaya sosial dan swasta. Karena biaya sosial dalam memproduksi uang dianggap nol, maka biaya peluang privat dalam memegang uang harus nol agar dapat mencapai optimalitas. Biaya peluang swasta diukur dengan tingkat bunga nominal, sehingga tingkat inflasi optimal pada kondisi tunak adalah tingkat yang mencapai tingkat bunga nominal nol. Meskipun hasil ini cukup umum, ada dua pertimbangan penting yaitu dampak inflasi terhadap pendapatan pemerintah dan interaksi

inflasi dengan pajak lain dalam sistem pajak yang tidak diindeks sehingga diabaikan (Walsh, 2010: p.93).

4. Kerangka Kebijakan Moneter dan Fiskal

Sebagian besar analisis fenomena moneter dan kebijakan moneter berasumsi, biasanya tanpa pernyataan, bahwa variasi dalam persediaan uang merupakan hal yang penting, namun bagaimana variasi tersebut terjadi tidaklah penting. Jumlah uang beredar nominal dapat berubah karena pergeseran dari belanja pemerintah yang dibiayai pajak ke belanja yang dibiayai hak milik negara. Atau hal ini dapat berubah sebagai akibat dari operasi pasar terbuka di mana bank sentral membeli utang berbunga, mendanai pembelian tersebut dengan menambah utang tanpa bunga, dan menetapkan pajak lainnya tetap. Karena kedua cara meningkatkan persediaan uang ini mempunyai implikasi yang berbeda terhadap pajak dan persediaan utang pemerintah yang berbunga, maka kedua cara tersebut dapat menimbulkan dampak yang berbeda pula terhadap harga dan/atau tingkat suku bunga. Batasan anggaran sektor pemerintah menghubungkan kebijakan moneter dan fiskal dengan cara yang penting dalam menentukan bagaimana perubahan dalam persediaan uang mempengaruhi tingkat harga keseimbangan.⁷ Kaitan anggaran juga berarti bahwa seseorang harus secara tepat mendefinisikan kebijakan moneter sebagai kebijakan yang berbeda dari kebijakan fiskal. Pembelian di pasar terbuka meningkatkan persediaan uang, namun dengan mengurangi utang pemerintah yang berbunga oleh masyarakat, hal ini mempunyai implikasi terhadap aliran pajak di masa depan yang diperlukan untuk membiayai biaya bunga utang pemerintah. Jadi operasi pasar terbuka berpotensi memiliki sisi fiskal, dan fakta ini dapat menimbulkan ambiguitas dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan perubahan kebijakan moneter, dan menganggap kebijakan fiskal tetap konstan.

Literatur ekonomi moneter telah menganalisis beberapa asumsi alternatif tentang hubungan antara kebijakan moneter dan fiskal. Dalam sebagian besar analisis tradisional, kebijakan fiskal diasumsikan mengalami penyesuaian untuk memastikan bahwa anggaran antarwaktu pemerintah selalu seimbang sementara kebijakan moneter bebas menentukan jumlah persediaan uang nominal atau tingkat bunga nominal. Situasi ini digambarkan sebagai dominasi moneter, atau situasi di mana kebijakan fiskal bersifat pasif dan kebijakan moneter bersifat aktif (Leeper 1991). Model-model tersebut secara implisit masuk dalam kategori ini karena kebijakan fiskal diabaikan dan kebijakan moneter menentukan tingkat harga.

Jika kebijakan fiskal mempengaruhi tingkat bunga riil, maka tingkat harga tidak bergantung pada kebijakan fiskal, bahkan di bawah rezim dominasi moneter. Peningkatan anggaran berimbang dalam pengeluaran yang menaikkan tingkat bunga riil akan menaikkan tingkat bunga nominal dan menurunkan permintaan uang riil. Mengingat jalur eksogen untuk jumlah uang beredar nominal, tingkat harga harus melonjak untuk mengurangi jumlah uang beredar riil.

Rezim kebijakan kedua adalah rezim dimana otoritas fiskal menetapkan pengeluaran dan pajaknya tanpa memperhatikan persyaratan keseimbangan anggaran antar waktu. Jika nilai potongan pajak saat ini tidak cukup untuk membiayai pengeluaran (dalam nilai sekarang), seigniorage harus disesuaikan untuk memastikan bahwa batasan anggaran antarwaktu pemerintah dapat dipenuhi. Rezim ini merupakan rezim yang menerapkan dominasi fiskal (atau kebijakan fiskal aktif) dan kebijakan moneter pasif, karena kebijakan moneter harus melakukan penyesuaian untuk menghasilkan tingkat seigniorage yang diperlukan untuk

menyeimbangkan anggaran pemerintah. Harga dan inflasi dipengaruhi oleh perubahan kebijakan fiskal karena perubahan fiskal ini, jika memerlukan perubahan dalam seigniorage, akan mengubah jumlah uang beredar saat ini dan/atau di masa depan. Rezim apa pun yang pajak dan/atau seignioragenya selalu disesuaikan untuk memastikan bahwa batasan anggaran antarwaktu pemerintah terpenuhi disebut rezim Ricardian (Sargent 1982).

Rezim terakhir mengarah pada apa yang dikenal sebagai teori fiskal tingkat harga (Sims 1994; Woodford 1995; 2001a; Cochrane 1999). Dalam rezim ini, batasan anggaran antarwaktu pemerintah mungkin tidak dapat dipenuhi dengan tingkat harga yang sewenang-wenang. Mengikuti Woodford (1995), rezim-rezim ini digambarkan sebagai rezim non-Ricardian.

Sebagian besar analisis fenomena moneter dan kebijakan moneter berasumsi, biasanya tanpa pernyataan, bahwa variasi dalam persediaan uang merupakan hal yang penting, namun bagaimana variasi tersebut terjadi tidaklah penting. Jumlah uang beredar nominal dapat berubah karena pergeseran dari belanja pemerintah yang dibiayai pajak ke belanja yang dibiayai hak milik negara. Atau hal ini dapat berubah sebagai akibat dari operasi pasar terbuka di mana bank sentral membeli utang berbunga, mendanai pembelian tersebut dengan menambah utang tanpa bunga, dan menetapkan pajak lainnya tetap. Karena kedua cara meningkatkan persediaan uang ini mempunyai implikasi yang berbeda terhadap pajak dan persediaan utang pemerintah yang berbunga, maka kedua cara tersebut dapat menimbulkan dampak yang berbeda pula terhadap harga dan/atau tingkat suku bunga. Batasan anggaran sektor pemerintah menghubungkan kebijakan moneter dan fiskal dengan cara yang penting dalam menentukan bagaimana perubahan dalam persediaan uang mempengaruhi tingkat harga keseimbangan. Kaitan anggaran juga berarti bahwa seseorang harus secara tepat mendefinisikan kebijakan moneter sebagai kebijakan yang berbeda dari kebijakan fiskal. Pembelian di pasar terbuka meningkatkan persediaan uang, namun dengan mengurangi utang pemerintah yang berbunga oleh masyarakat, hal ini mempunyai implikasi terhadap aliran pajak di masa depan yang diperlukan untuk membiayai biaya bunga utang pemerintah. Jadi operasi pasar terbuka berpotensi memiliki sisi fiskal, dan fakta ini dapat menimbulkan ambiguitas dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan perubahan kebijakan moneter, dan menganggap kebijakan fiskal tetap konstan.

Literatur ekonomi moneter telah menganalisis beberapa asumsi alternatif tentang hubungan antara kebijakan moneter dan fiskal. Dalam sebagian besar analisis tradisional, kebijakan fiskal diasumsikan mengalami penyesuaian untuk memastikan bahwa anggaran antarwaktu pemerintah selalu seimbang sementara kebijakan moneter bebas menentukan jumlah persediaan uang nominal atau tingkat bunga nominal. Situasi ini digambarkan sebagai dominasi moneter, atau situasi di mana kebijakan fiskal bersifat pasif dan kebijakan moneter bersifat aktif (Leeper 1991). Model-model tersebut secara implisit masuk dalam kategori ini karena kebijakan fiskal diabaikan dan kebijakan moneter menentukan tingkat harga.

Jika kebijakan fiskal mempengaruhi tingkat bunga riil, maka tingkat harga tidak bergantung pada kebijakan fiskal, bahkan di bawah rezim dominasi moneter. Peningkatan anggaran berimbang dalam pengeluaran yang menaikkan tingkat bunga riil akan menaikkan tingkat bunga nominal dan menurunkan permintaan uang riil. Mengingat jalur eksogen untuk jumlah uang beredar nominal, tingkat harga harus melonjak untuk mengurangi jumlah uang beredar riil.

Rezim kebijakan kedua adalah rezim dimana otoritas fiskal menetapkan pengeluaran dan pajaknya tanpa memperhatikan persyaratan keseimbangan anggaran antar waktu. Jika

nilai potongan pajak saat ini tidak cukup untuk membiayai pengeluaran (dalam nilai sekarang), seigniorage harus disesuaikan untuk memastikan bahwa batasan anggaran antarwaktu pemerintah dapat dipenuhi. Rezim ini merupakan rezim yang menerapkan dominasi fiskal (atau kebijakan fiskal aktif) dan kebijakan moneter pasif, karena kebijakan moneter harus melakukan penyesuaian untuk menghasilkan tingkat seigniorage yang diperlukan untuk menyeimbangkan anggaran pemerintah. Harga dan inflasi dipengaruhi oleh perubahan kebijakan fiskal karena perubahan fiskal ini, jika memerlukan perubahan dalam seigniorage, akan mengubah jumlah uang beredar saat ini dan/atau di masa depan. Rezim apa pun yang pajak dan/atau seignioragenya selalu disesuaikan untuk memastikan bahwa batasan anggaran antarwaktu pemerintah terpenuhi disebut rezim Ricardian (Sargent 1982).

Rezim terakhir mengarah pada apa yang dikenal sebagai teori fiskal tingkat harga (Sims 1994; Woodford 1995; 2001a; Cochrane 1999). Dalam rezim ini, batasan anggaran antarwaktu pemerintah mungkin tidak dapat dipenuhi dengan tingkat harga yang sewenang-wenang. Mengikuti Woodford (1995), rezim-rezim ini digambarkan sebagai rezim non-Ricardian.

D. Kebijakan Moneter Kuantitatif dan Kualitatif

Terdapat beberapa kebijakan moneter yang merupakan kebijakan moneter yang umum telah diterapkan di berbagai negara dengan maksud pengendalian moneter. Kebijakan tersebut adalah kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Kebijakan moneter kuantitatif antara lain adalah :

1. *Open Market Operation (OMO)* dan *Discount Rate (DR)*, atau biasa disebut sebagai operasi pasar terbuka dan Tingkat Diskonto. OMO dan DR merupakan langkah yang diambil oleh Bank Sentral dalam mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan memperjualbelikan surat-surat berharga. Pada kondisi dimana uang beredar dirasakan terlalu banyak, maka bank sentral akan melakukan tindakan menjual surat berharga atau dengan meningkatkan suku bunga simpanan pada bank sentral. Dengan tindakan ini maka dana-dana yang banyak dimiliki oleh bank-bank umum akan digerakkan untuk membeli surat berharga bank sentral tersebut, selain aman, pembelian surat berharga bank sentral ini pun menguntungkan karena tingkat suku bunga yang tinggi. Sebaliknya, jika pada kondisi yang dirasakan bahwa uang beredar di masyarakat dirasakan sangat sedikit dan dirasakan bahwa investor sulit mendapatkan pinjaman dari bank umum, maka bank sentral akan membeli surat berharga tersebut dari bank umum. Dengan demikian, bank-bank umum akan segera untuk menjual surat berharga dari bank sentral, dengan demikian bank umum akan lebih likuid dan memiliki dana yang berasal dari penjualan surat berharga bank sentral tersebut (Putong, 2003: p, 231).
2. *Reserve Requirement* (Merubah Cadangan Minimum). Setiap bank umum yang beroperasi, oleh bank sentral diwajibkan untuk menyetor sejumlah uang dari sekian persen modal (sesuai ketentuan) atau kekayaannya yang diperuntukan bagi cadangan modal bank tersebut yang sewaktu-waktu digunakan dalam kondisi tertentu, misalnya ketika terjadi kalah kliring atau bank umum yang dilanda *rush* . Bila bank sentral menganggap uang beredar terlalu banyak dan bank umum terlalu berlebihan dalam melakukan ekspansi kreditnya, maka bank sentral dapat meningkatkan setoran minimum bank umum menjadi sekian % sesuai aturan yang berlaku sehingga bank tersebut akan lebih berhati-hati dalam penyaluran kreditnya. sebaliknya jika dirasakan uang yang beredar sedikit dan bila bank umum tersebut

tidak likuid dalam arti kesulitan memberikan kredit potensial, maka bank sentral dapat menurunkan cadangan minimum bank umum (Putong, 2003: p, 232).

Selain kebijakan moneter kuantitatif, terdapat juga tindakan yang berhubungan dengan kebijakan kualitatif, diantaranya adalah :

1. Pengawasan Pinjaman Selektif. Merupakan tindakan bank sentral dalam menentukan jenis pinjaman apa saja yang boleh diberikan dan diwajibkan oleh bank sentral dan pinjaman yang tidak dibolehkan atau pinjaman yang diberikan dengan sangat ketat.
2. Himbauan moral (Moral Suasion), merupakan tindakan bank sentral yang meminta kepada bank-bank umum agar melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk menstabilkan peredaran uang dan suku bunga agar tetap berada pada tingkat yang wajar, atau dapat juga dengan pemberian informasi kepada masyarakat agar tidak terpancing isu, atau khawatir terhadap sistem perbankan, membantah isu devaluasi dan pelarian modal serta mengajiah hidup bijak dalam pengelolaan keuangan (Putong, 2003: p, 233).

E. Tugas dan Evaluasi

1. Jelaskan perbedaan antara kebijakan moneter dan fiskal ditinjau dari masalah ekonomi makro!
2. Dalam konteks penanganan masalah inflasi dan tingkat suku bunga, kebijakan moneter mana yang perlu lebih difokuskan? Kuantitatif atau kualitatif? Jelaskan!
3. Jelaskan tindakan moral suasion yang dilakukan untuk menghimbau bank umum agar tidak melakukan penyaluran kredit secara berlebihan!
4. Jelaskan perbedaan nyata antara kebijakan fiskal pada perekonomian tertutup dan terbuka!
5. Jelaskan situasi apa yang menyebabkan tindakan Open Market Operation (OMO) perlu dijalankan !

DAFTAR PUSTAKA

- Claes-Henric Siven.(2023). *Bent Hansen's theory of fiscal policy*. The European Journal of the History of Economic Thought, DOI: [10.1080/09672567.2023.217219](https://doi.org/10.1080/09672567.2023.217219), Published by Informa UK Limited, Trading as Taylor and Francis Group
- Putong, Iskandar. (2003). *Pengantar Mikro dan Makro Ekonomi* (Edisi 2). Penerbit Ghalia Indonesia.
- Walsh, Carl E.(2010). *Monetary Theory and Policy*. (Third Edition). The MIT Press, Cambridge, Massachusetts

Glosarium

A

Agregat : Keseluruhan atau gabungan

C

CIA : Cas in Advance

D

Defisit : Penerimaan yang lebih kecil dari pengeluaran
Deregulasi

E

Eksplisit : Secara jelas, gamblang

F

Fluktuasi : Gejala yang menunjukkan adanya kenaikan atau penurunan

I

Inflasi : Naiknya harga-harga secara umum dalam waktu yang lama
Interdependensi : Keadaan saling ketergantungan atau saling membutuhkan

K

Keynesian : Teori yang dikembangkan oleh Keynes tentang Makroekonomi, tentang Penerimaan dan pengeluaran agregat menuju tenaga kerja penuh
Konstelasi : Susunan, bentuk atau bangunan

M

MIU : Money in the Utility

P

Produktivitas Marjinal : Tambahan kuantitas output yang dihasilkan dengan menambah satu unit input
Dengan menganggap bahwa variabel lainnya adalah konstan

R

Rekursif : Bentuk pengulangan yang melibatkan penggunaan diri sendiri

S

Seigniorage : Perbedaan antara nilai nominal koin/ uang dengan biaya produksinya

Simultan : Sesuatu yang terjadi secara bersamaan

Surplus : Penerimaan lebih besar dari pengeluaran

U

Utilitas : Kegunaan atau manfaat

V

Variabel Endogen : Variabel yang dipengaruhi secara langsung atau tidak langsung oleh variabel Lain

Variabel Eksogen : Variabel yang mempengaruhi variabel lain dalam suatu model

Ria Kusumaningrum, M.Si.
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jl. Kapten Dasuki Bakri, Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Bogor, Jawa Barat 16810
riakusum@gmail.com

BAB 9 PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
Sebuah Bunga Rampai Ilmu Ekonomi dari Literasi Pemikiran
dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Diterbitkan oleh:

INAIS Press

BAB 9 PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah dua konsep yang saling terkait dalam konteks perekonomian suatu negara. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan secara kuantitatif dari output ekonomi suatu negara selama periode waktu tertentu, seperti peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan menggunakan indikator-indikator ekonomi seperti tingkat pertumbuhan PDB, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, dan lain-lain. Di sisi lain, pembangunan ekonomi mengacu pada perubahan yang lebih luas dan berkelanjutan dalam perekonomian suatu negara. Pembangunan ekonomi melibatkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk peningkatan akses terhadap pendidikan, perbaikan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pengurangan kesenjangan ekonomi. Pembangunan ekonomi juga berfokus pada keberlanjutan, yaitu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi secara seimbang dan berkelanjutan dalam jangka panjang, tanpa merusak lingkungan atau mengorbankan kepentingan generasi mendatang. Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi faktor penting dalam mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang atau tidak berkelanjutan dapat memiliki dampak negatif, seperti ketimpangan pendapatan, pengangguran, atau kerusakan lingkungan.

RINCIAN PEMBAHASAN MATERI

PERTUMBUHAN EKONOMI

Teori pertumbuhan ekonomi yang telah dikembangkan oleh para ahli ekonomi. Berikut adalah beberapa teori yang paling terkenal:

1. Teori Pertumbuhan Klasik

Teori pertumbuhan klasik dikembangkan oleh ekonom seperti Adam Smith dan David Ricardo. Teori pertumbuhan klasik adalah suatu pendekatan dalam ekonomi yang menjelaskan faktor-faktor yang mendasari pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara. Teori ini berfokus pada peran akumulasi modal fisik (seperti mesin dan peralatan) dan peningkatan produktivitas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Adam Smith berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui kebebasan ekonomi, di mana individu dan perusahaan memiliki kebebasan untuk berusaha dan berdagang tanpa campur tangan pemerintah yang berlebihan. Menurut Smith, mekanisme pasar yang berdasarkan pada tangan tak terlihat (*invisible hand*) akan mengarah pada efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Smith juga menekankan pentingnya pembagian kerja atau spesialisasi dalam meningkatkan produktivitas. Dengan membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan spesifik, individu dapat mengembangkan keterampilan yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi produksi.

David Ricardo mengemukakan salah satu konsep utama yaitu teori keunggulan komparatif. Ricardo berpendapat bahwa perdagangan internasional dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, setiap negara seharusnya memproduksi barang atau jasa di mana mereka memiliki keunggulan komparatif, yaitu kemampuan untuk memproduksi dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan negara lain. Dengan melakukan perdagangan berdasarkan keunggulan komparatif ini, negara-negara dapat meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Ricardo juga

mengemukakan teori nilai tenaga kerja, yang menyatakan bahwa nilai suatu barang atau jasa ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam produksinya. Dia percaya bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada peningkatan produktivitas tenaga kerja dan peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Kedua teori yang dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo, memberikan dasar pemahaman yang penting dalam teori pertumbuhan klasik. Konsep pasar bebas, pembagian kerja, keunggulan komparatif, dan nilai tenaga kerja tetap relevan dalam menjelaskan faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Selain itu, terdapat satu teori pertumbuhan klasik lainnya, yaitu teori pertumbuhan Solow-Swan, yang dikembangkan oleh Robert Solow dan Trevor Swan pada tahun 1950-an. Teori ini mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang tergantung pada pertumbuhan faktor-faktor produksi, yaitu tenaga kerja, modal, dan teknologi. Menurut teori Solow-Swan, pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui peningkatan akumulasi modal. Akumulasi modal terjadi ketika suatu negara menginvestasikan lebih banyak sumber daya dalam pembangunan infrastruktur, peralatan, dan teknologi. Semakin besar jumlah modal yang tersedia, semakin tinggi tingkat produksi dan pendapatan nasional.

Teori pertumbuhan klasik menekankan pentingnya peningkatan produktivitas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produktivitas dapat terjadi melalui inovasi teknologi, peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, serta efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Namun, teori pertumbuhan klasik memiliki beberapa kritik. Salah satunya adalah ketidakmampuannya menjelaskan perbedaan pertumbuhan ekonomi antara negara-negara yang memiliki tingkat akumulasi modal dan tingkat produktivitas yang relatif sama. Selain itu, teori ini cenderung mengabaikan faktor-faktor sosial, politik, dan institusional yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

2. Teori Pertumbuhan Neoklasik

Teori pertumbuhan neoklasik adalah suatu pendekatan dalam ekonomi yang mengembangkan dan memperluas teori pertumbuhan klasik. Teori ini menggabungkan elemen-elemen teori pertumbuhan klasik dengan analisis mikroekonomi modern, termasuk fungsi produksi, investasi, dan inovasi teknologi. Teori ini menekankan pentingnya investasi dalam penelitian dan pengembangan serta peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Teori pertumbuhan neoklasik Harrod-Domar adalah suatu pendekatan dalam ekonomi yang menjelaskan hubungan antara tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Teori ini dikembangkan oleh Sir Roy Harrod dan Evsey Domar pada tahun 1930-an dan 1940-an. Teori Harrod-Domar berfokus pada konsep multiplier investasi, yang menyatakan bahwa peningkatan investasi dapat menghasilkan efek berganda atau multiplier pada pertumbuhan ekonomi. Menurut teori ini, tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang tergantung pada tingkat investasi yang dilakukan oleh suatu negara.

Dalam teori Harrod-Domar, terdapat dua konsep penting yang digunakan, yaitu tingkat pertumbuhan harapan (*expected growth rate*) dan rasio modal-output (*capital-output ratio*). Tingkat pertumbuhan harapan adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan oleh suatu negara. Harrod berpendapat bahwa untuk mempertahankan tingkat pengangguran yang konstan, tingkat pertumbuhan harapan harus sama dengan tingkat pertumbuhan alami atau tingkat pertumbuhan potensial. Sedangkan, rasio modal-output adalah rasio antara investasi dan output

ekonomi. Domar berpendapat bahwa untuk mencapai tingkat pertumbuhan harapan yang diinginkan, negara harus menginvestasikan sejumlah dana yang cukup besar sesuai dengan rasio modal-output. Semakin tinggi rasio modal-output, semakin tinggi tingkat investasi yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang diharapkan.

Berdasarkan konsep tersebut, teori Harrod-Domar menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang dapat dicapai dengan meningkatkan tingkat investasi. Apabila tingkat investasi lebih tinggi dari rasio modal-output, maka akan terjadi efek multiplier yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan harapan. Namun, jika tingkat investasi lebih rendah dari rasio modal-output, maka pertumbuhan ekonomi akan lebih lambat dari tingkat pertumbuhan harapan. Meskipun teori Harrod-Domar memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi, teori ini juga memiliki keterbatasan. Teori ini mengabaikan faktor-faktor seperti inovasi teknologi dan peningkatan produktivitas yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selain itu, teori ini juga tidak mempertimbangkan faktor-faktor sosial, politik, dan institusional yang dapat mempengaruhi tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Teori pertumbuhan neoklasik merupakan pengembangan lanjutan dari teori pertumbuhan klasik yang memadukan analisis mikroekonomi modern dengan konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya. Teori ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memberikan dasar bagi kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan dan pembangunan. Pendekatan neoklasik dalam teori pertumbuhan menekankan peran faktor-faktor produksi, inovasi, dan investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Beberapa konsep utama dalam teori pertumbuhan neoklasik antara lain:

- a. Fungsi produksi: Teori pertumbuhan neoklasik menggunakan fungsi produksi untuk menggambarkan hubungan antara input (tenaga kerja, kapital, dan teknologi) dengan output (barang dan jasa). Fungsi produksi neoklasik sering kali didasarkan pada pendekatan produksi Cobb-Douglas, di mana produksi dipengaruhi oleh kombinasi faktor-faktor produksi dengan tingkat elastisitas tertentu.
- b. Investasi: Investasi merupakan faktor penting dalam teori pertumbuhan neoklasik. Teori ini mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi didorong oleh akumulasi modal fisik (seperti mesin, peralatan, dan infrastruktur) yang dihasilkan dari investasi. Pertumbuhan ekonomi jangka panjang terjadi ketika tingkat investasi lebih tinggi dari tingkat tabungan, sehingga memungkinkan peningkatan akumulasi modal.
- c. Inovasi teknologi: Teori pertumbuhan neoklasik mengakui peranan inovasi teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Inovasi teknologi dapat memperbaiki efisiensi produksi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan peluang baru. Dalam teori ini, peningkatan produktivitas yang dihasilkan dari inovasi teknologi dianggap sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
- d. Modal manusia: Teori pertumbuhan neoklasik juga memperhatikan peran modal manusia, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan individu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan modal manusia melalui pendidikan dan pelatihan dianggap dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan kemampuan inovatif masyarakat.

Selain itu, teori pertumbuhan neoklasik juga mengakui pentingnya kelembagaan, stabilitas politik, dan faktor sosial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Teori ini menekankan perlunya kebijakan publik yang mendukung investasi, inovasi, pendidikan, dan pengembangan sektor swasta.

3. Teori Pertumbuhan Endogen

Teori pertumbuhan endogen merupakan suatu pendekatan dalam ekonomi yang menjelaskan faktor-faktor internal yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Teori ini berbeda dengan pendekatan tradisional yang menganggap pertumbuhan ekonomi tergantung pada faktor-faktor eksternal seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi. Teori ini lebih menekankan faktor internal dalam proses pertumbuhan ekonomi. Teori ini berpendapat bahwa investasi dalam modal manusia, seperti pendidikan dan keterampilan, serta penelitian dan pengembangan teknologi, adalah faktor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam teori pertumbuhan endogen, pengetahuan memiliki sifat kumulatif. Hal ini berarti bahwa semakin banyak pengetahuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat, semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonominya. Pengetahuan dapat berkembang melalui inovasi, penelitian dan pengembangan, serta pengalaman dan pembelajaran.

Salah satu konsep utama dalam teori pertumbuhan endogen adalah akumulasi modal manusia dan pengetahuan. Modal manusia merujuk pada investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan keterampilan individu yang meningkatkan produktivitas mereka. Peningkatan dalam modal manusia dianggap sebagai sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selain itu, pengetahuan juga dianggap sebagai faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Inovasi, penelitian dan pengembangan, serta penyebaran pengetahuan merupakan elemen-elemen kunci dalam teori pertumbuhan endogen. Meningkatnya pengetahuan dan inovasi dapat menghasilkan efek jangka panjang yang positif terhadap produktivitas, menciptakan peluang baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Teori pertumbuhan endogen juga menekankan pentingnya eksternalitas positif dalam pertumbuhan ekonomi. Eksternalitas positif terjadi ketika aktivitas ekonomi atau investasi individu memiliki dampak positif pada pihak lain atau pada seluruh ekonomi. Contohnya adalah penelitian dan pengembangan yang dapat menghasilkan pengetahuan baru yang dapat dimanfaatkan oleh banyak orang atau perusahaan. Selain itu, teori pertumbuhan endogen juga menganggap bahwa kebijakan ekonomi dan pengaruh institusi penting dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang. Kebijakan yang mendukung investasi dalam pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta perlindungan hak kekayaan intelektual dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

Salah satu teori pertumbuhan endogen adalah teori pertumbuhan Solow atau model neoklasik pertumbuhan, dikembangkan oleh Robert Solow, seorang ekonom Amerika Serikat dan penerima Nobel dalam Ilmu Ekonomi pada tahun 1987. Teori ini memberikan kerangka kerja untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Model pertumbuhan Solow didasarkan pada asumsi-asumsi dasar sebagai berikut:

- a. Model ini menggunakan tiga faktor produksi utama, yaitu modal (K), tenaga kerja (L), dan teknologi (A). Modal merujuk pada jumlah dan kualitas modal fisik dalam ekonomi, sedangkan

tenaga kerja merujuk pada jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia. Teknologi mengacu pada kemajuan dalam pengetahuan dan inovasi yang meningkatkan efisiensi penggunaan faktor produksi.

- b. Model ini menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas, yang mengasumsikan bahwa output (Y) dihasilkan oleh input modal (K) dan tenaga kerja (L) dengan tingkat elastisitas substitusi yang tetap. Fungsi produksi ini dapat ditulis sebagai $Y = A * K^\alpha * L^{(1-\alpha)}$, di mana α adalah parameter yang menunjukkan proporsi pendapatan yang diterima oleh modal, dan $(1-\alpha)$ adalah proporsi pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja.
- c. Model ini mengasumsikan bahwa modal dapat tumbuh melalui investasi dalam ekonomi. Tingkat investasi (I) dalam modal diwakili oleh proporsi pendapatan nasional (savings rate) yang diinvestasikan kembali. Dalam model ini, akumulasi modal terjadi melalui investasi dan depresiasi modal.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa model Solow dapat menjelaskan pertumbuhan pendapatan jangka panjang dengan mengamati perubahan dalam akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Pertumbuhan pendapatan dapat terjadi ketika tingkat investasi dalam modal dan teknologi meningkat. Selain itu, model ini mengemukakan konsep konvergensi, yaitu bahwa negara-negara dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah cenderung tumbuh lebih cepat daripada negara-negara dengan pendapatan yang lebih tinggi. Ini berarti negara-negara dengan pendapatan rendah memiliki potensi pertumbuhan yang lebih tinggi untuk mengejar negara-negara dengan pendapatan tinggi. Namun, dalam jangka panjang, tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita akan mencapai tingkat yang stabil yang ditentukan oleh tingkat pertumbuhan teknologi dan tingkat investasi dalam modal. Namun, model ini tidak menjelaskan sumber pertumbuhan teknologi itu sendiri.

Teori pertumbuhan endogen dikembangkan lebih lanjut oleh ekonom lain, Paul Romer, untuk memperluas pemahaman tentang faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Teori pertumbuhan endogen Paul Romer adalah salah satu kontribusi penting dalam pengembangan teori pertumbuhan endogen. Paul Romer, seorang ekonom Amerika Serikat dan penerima Nobel dalam Ilmu Ekonomi tahun 2018, memperluas pemahaman tentang faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, terutama melalui penekanan pada peran pengetahuan dan inovasi. Beberapa poin penting dalam teori pertumbuhan endogen Paul Romer adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan sebagai sumber pertumbuhan: Romer mengemukakan bahwa pengetahuan adalah salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pengetahuan mencakup penemuan baru, inovasi, dan penyebaran teknologi. Dalam teori ini, pengetahuan bukanlah faktor yang tetap atau eksogen, melainkan dapat dipengaruhi dan ditingkatkan melalui upaya manusia.
- b. Inovasi dan eksternalitas positif: Romer menekankan peran inovasi dalam pertumbuhan ekonomi. Inovasi menciptakan eksternalitas positif, yaitu dampak positif dari kegiatan ekonomi atau investasi individu yang dapat dinikmati oleh orang lain atau seluruh ekonomi. Misalnya, penemuan baru atau peningkatan teknologi dapat memberikan manfaat kepada banyak orang atau perusahaan dan secara kolektif mendorong pertumbuhan ekonomi.
- c. Pengaruh institusi dan kebijakan: Romer juga memperhatikan pentingnya institusi dan kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Institusi yang baik, seperti perlindungan

hak kekayaan intelektual atau kelembagaan yang mendukung inovasi, dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan.

Selain itu terdapat teori pertumbuhan endogen lain yang dikembangkan oleh Robert Lucas. Teori ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dalam suatu negara. Awalnya, teori pertumbuhan endogen menolak pandangan tradisional bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang ditentukan oleh faktor eksternal seperti investasi, teknologi, atau sumber daya alam. Sebaliknya, Lucas berpendapat bahwa faktor-faktor internal, seperti pengetahuan, inovasi, dan kebijakan ekonomi, memainkan peran yang lebih penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Teori pertumbuhan endogen Lucas menyoroti pentingnya manusia sebagai agen utama dalam proses pertumbuhan ekonomi. Manusia merupakan sumber daya yang dapat menghasilkan dan memperoleh pengetahuan baru, serta mengimplementasikan inovasi dalam kegiatan ekonomi. Dalam teori ini, investasi dalam pendidikan dan pelatihan dianggap sebagai faktor penting yang dapat meningkatkan kapasitas manusia dalam menghasilkan dan menggunakan pengetahuan.

4. Teori Pertumbuhan Baru

Teori pertumbuhan baru mengintegrasikan faktor-faktor seperti inovasi teknologi, dan kebijakan pemerintah dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Teori ini menekankan pentingnya kegiatan inovasi dan pengetahuan baru untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Teori Pertumbuhan Baru adalah suatu pendekatan dalam ekonomi yang bertujuan untuk menjelaskan sumber-sumber dan faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Teori ini berbeda dengan pendekatan tradisional yang lebih menekankan pada faktor produksi seperti modal dan tenaga kerja. Pendekatan baru ini lebih menekankan pentingnya pengetahuan, inovasi, dan teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa konsep kunci dalam teori pertumbuhan baru, yaitu:

- a. Pengetahuan: Teori pertumbuhan baru menganggap pengetahuan sebagai faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi. Pengetahuan tidak hanya terbatas pada pengetahuan teknis, tetapi juga mencakup pengetahuan tentang cara mengatur dan mengelola sumber daya ekonomi secara efisien. Pengetahuan dapat berkembang melalui penelitian dan pengembangan, inovasi, transfer teknologi, dan pengalaman.
- b. Inovasi: Inovasi merupakan proses menciptakan dan menerapkan pengetahuan baru dalam kegiatan ekonomi. Inovasi dapat berupa pengembangan produk baru, proses produksi baru, atau metode bisnis baru. Teori pertumbuhan baru menganggap inovasi sebagai pendorong utama pertumbuhan jangka panjang, karena inovasi meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi.
- c. Teknologi: Teknologi memainkan peran penting dalam teori pertumbuhan baru. Pengembangan dan adopsi teknologi baru dapat meningkatkan efisiensi produksi, memperluas batas-batas produksi, dan membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini, teknologi tidak hanya dilihat sebagai suatu faktor eksternal, tetapi juga merupakan hasil dari pengetahuan dan inovasi yang terjadi di dalam sistem ekonomi.
- d. Eksternalitas: Teori pertumbuhan baru mengakui adanya eksternalitas positif dalam pertumbuhan ekonomi. Eksternalitas positif adalah efek positif dari kegiatan individu atau perusahaan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Misalnya, penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh satu perusahaan dapat menghasilkan

pengetahuan baru yang secara tidak langsung bermanfaat bagi perusahaan lain dalam industri yang sama.

- e. Kebijakan Publik: Kebijakan publik juga menjadi faktor penting dalam teori pertumbuhan baru. Kebijakan yang mendukung penelitian dan pengembangan, inovasi, transfer teknologi, dan pendidikan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selain itu, kebijakan yang mendorong persaingan, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan investasi dalam infrastruktur juga dianggap penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

Teori pertumbuhan baru telah memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan menekankan peran pengetahuan, inovasi, dan teknologi, teori ini memberikan dasar untuk mengembangkan kebijakan dan strategi yang dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Teori Pertumbuhan Akumulatif

Teori pertumbuhan akumulatif berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi melalui akumulasi modal, baik fisik maupun manusia. Investasi yang berkelanjutan dalam modal akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Teori pertumbuhan akumulatif, juga dikenal sebagai teori pertumbuhan kumulatif, adalah suatu pendekatan dalam ekonomi yang menjelaskan bahwa akumulasi modal atau sumber daya ekonomi yang bertahan lama dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Teori ini menekankan pentingnya investasi dan akumulasi modal dalam meningkatkan produktivitas dan output ekonomi.

Pada dasarnya, teori pertumbuhan akumulatif berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang bergantung pada tingkat investasi yang tinggi dan peningkatan modal yang berkelanjutan. Akumulasi modal dapat terjadi melalui investasi dalam aset fisik seperti infrastruktur, pabrik, mesin, dan peralatan produksi. Investasi ini meningkatkan kapasitas produksi suatu negara, yang pada gilirannya dapat meningkatkan output dan pendapatan nasional. Beberapa konsep kunci dalam teori pertumbuhan akumulatif meliputi:

- a. Tabungan dan Investasi: Teori pertumbuhan akumulatif menekankan pentingnya tingkat tabungan yang tinggi dalam membiayai investasi. Tabungan memungkinkan masyarakat dan perusahaan untuk mengumpulkan dana yang akan digunakan untuk membeli aset produktif dan meningkatkan kapasitas produksi. Investasi ini kemudian meningkatkan output dan pendapatan nasional, serta menciptakan lapangan kerja.
- b. Skala Ekonomi: Teori pertumbuhan akumulatif juga mengakui adanya skala ekonomi, yaitu keuntungan yang diperoleh dari meningkatnya ukuran produksi. Dengan meningkatnya akumulasi modal dan ekonomi yang lebih besar, perusahaan dapat memanfaatkan efisiensi skala untuk mengurangi biaya produksi per unit dan meningkatkan produktivitas.
- c. Produktivitas Margin: Teori ini juga menyoroti pentingnya peningkatan produktivitas dalam pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produktivitas dapat dicapai melalui inovasi teknologi, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan efisiensi produksi. Dengan meningkatkan produktivitas, output yang dihasilkan dari setiap unit input akan meningkat, memicu pertumbuhan ekonomi.
- d. Eksternalitas: Teori pertumbuhan akumulatif juga mengakui adanya eksternalitas positif dalam pertumbuhan ekonomi. Eksternalitas positif adalah manfaat yang diperoleh oleh pihak lain atau sektor lain sebagai hasil dari aktivitas investasi dan akumulasi modal. Misalnya, investasi dalam

pendidikan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja secara keseluruhan dan memberikan manfaat bagi berbagai sektor ekonomi.

- e. Kebijakan Publik: Kebijakan publik juga memainkan peran penting dalam teori pertumbuhan akumulatif. Kebijakan yang mendukung investasi, seperti insentif pajak atau subsidi, serta kebijakan yang memfasilitasi akses terhadap modal dan teknologi, dapat mendorong akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selain itu, kebijakan yang mendukung stabilitas ekonomi, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan pembangunan infrastruktur juga dapat mendukung pertumbuhan akumulatif.

Secara keseluruhan, teori pertumbuhan akumulatif menekankan pentingnya investasi dan akumulasi modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan meningkatkan tingkat tabungan, investasi dalam aset produktif, dan peningkatan produktivitas, suatu negara dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Perkembangan teori pertumbuhan ekonomi terus berlanjut seiring waktu, dan ada banyak variasi dan pendekatan lain yang telah dikembangkan. Teori-teori ini memberikan kerangka kerja untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi proses tersebut.

PEMBANGUNAN EKONOMI

Perbedaan antara ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi terletak pada fokus utama dan perspektif yang digunakan. Ekonomi pembangunan adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari prinsip-prinsip dan kebijakan yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perubahan ekonomi suatu negara atau wilayah. Fokus utama ekonomi pembangunan adalah pada aspek-aspek ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti investasi, sumber daya manusia, perdagangan internasional, dan kebijakan pemerintah. Tujuan ekonomi pembangunan adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan pembangunan. Sedangkan pembangunan ekonomi lebih mengacu pada proses dan hasil pembangunan yang luas, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ini melibatkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, peningkatan pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan lingkungan. Pembangunan ekonomi berfokus pada penciptaan kesempatan dan pemerataan akses terhadap sumber daya dan manfaat ekonomi bagi seluruh masyarakat.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi suatu negara atau wilayah. Definisi ini mencakup berbagai aspek, termasuk peningkatan produksi dan pendapatan, penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan infrastruktur dan sektor ekonomi lainnya. Pengertian pembangunan ekonomi melibatkan penciptaan kebijakan dan strategi yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mendistribusikan manfaat ekonomi secara adil, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini melibatkan pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, pengembangan industri, dan promosi investasi dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

Konsep pembangunan ekonomi melibatkan penerapan prinsip-prinsip dasar seperti pembagian kerja, alokasi sumber daya yang efisien, inovasi teknologi, pasar yang efisien.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi saling terkait dan saling mempengaruhi. Kombinasi yang tepat dari faktor-faktor ini dapat memberikan dasar yang kuat untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, antara lain:

1. **Investasi:** Investasi dalam infrastruktur, industri, dan sumber daya manusia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi yang cukup akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi.
2. **Kebijakan fiskal dan moneter:** Kebijakan pemerintah terkait pengeluaran dan pendapatan serta kebijakan bank sentral terkait suku bunga dan pasokan uang dapat mempengaruhi tingkat investasi, konsumsi, dan inflasi yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
3. **Perdagangan internasional:** Pertumbuhan ekonomi dapat didorong oleh ekspor dan impor yang sehat. Perdagangan internasional dapat membuka peluang pasar yang lebih besar, meningkatkan produktivitas, dan memperluas cakupan industri.
4. **Inovasi dan teknologi:** Pengembangan teknologi baru dan inovasi dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Inovasi dapat meningkatkan efisiensi produksi, menciptakan peluang baru, dan meningkatkan daya saing suatu negara di pasar global.
5. **Pendidikan dan keterampilan:** Investasi dalam pendidikan dan pengembangan keterampilan masyarakat dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
6. **Kestabilan politik dan hukum:** Kestabilan politik dan hukum yang baik menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Investasi dan aktivitas bisnis cenderung meningkat dalam lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi.
7. **Infrastruktur yang memadai:** Pembangunan infrastruktur yang baik, seperti jaringan transportasi, energi, dan telekomunikasi yang efisien, mendukung pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas.
8. **Kualitas lingkungan:** Perlindungan lingkungan yang baik dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya untuk mengurangi dampak negatif industri terhadap lingkungan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
9. **Distribusi pendapatan yang adil:** Pemerataan pendapatan dan mengurangi kesenjangan ekonomi dapat menjaga stabilitas sosial dan menciptakan permintaan yang lebih luas, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

TUJUAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Tujuan pembangunan ekonomi dapat bervariasi dari negara ke negara, tergantung pada kondisi dan prioritas masing-masing. Tujuan pembangunan ekonomi dapat saling terkait dan saling mempengaruhi. Untuk mencapai tujuan ini, negara biasanya mengadopsi kebijakan ekonomi, mengembangkan program pembangunan, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembangunan. Namun, secara umum, ada beberapa tujuan yang umumnya dikejar dalam pembangunan ekonomi, diantaranya:

1. **Peningkatan pertumbuhan ekonomi:** Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan per kapita, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan investasi, inovasi teknologi, dan pembangunan infrastruktur.

2. Peningkatan kualitas hidup: Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini melibatkan peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak, air bersih, dan sanitasi. Selain itu, pembangunan ekonomi juga berusaha meningkatkan akses terhadap layanan publik, transportasi yang efisien, dan lingkungan yang bersih.
3. Pengurangan kemiskinan: Salah satu tujuan penting pembangunan ekonomi adalah mengurangi tingkat kemiskinan. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan harus memperhatikan kesenjangan ekonomi dan sosial serta menciptakan peluang ekonomi bagi kelompok masyarakat yang rentan.
4. Peningkatan ketahanan ekonomi: Tujuan lain dari pembangunan ekonomi adalah meningkatkan ketahanan ekonomi suatu negara. Ini melibatkan pengembangan sektor ekonomi yang beragam, diversifikasi sumber pendapatan, dan pengurangan ketergantungan pada sektor ekonomi tunggal. Ketahanan ekonomi yang kuat dapat membantu mengatasi tantangan ekonomi, seperti fluktuasi harga komoditas atau krisis keuangan global.
5. Perlindungan lingkungan: Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan juga harus memperhatikan perlindungan lingkungan. Tujuan ini melibatkan penggunaan sumber daya alam secara bijaksana, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan mempromosikan praktik-produksi yang ramah lingkungan.
6. Peningkatan pemerataan ekonomi: Tujuan penting lainnya adalah mendorong pemerataan ekonomi, yaitu memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi didistribusikan secara adil dan merata di seluruh masyarakat. Ini melibatkan mengurangi kesenjangan pendapatan, kesenjangan akses terhadap peluang ekonomi, dan kesenjangan pembangunan antar wilayah.

MANFAAT DAN KERUGIAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Pembangunan ekonomi yang berhasil dapat membawa manfaat yang signifikan bagi suatu negara atau wilayah. Manfaat utama dari pembangunan ekonomi diantaranya:

1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Pembangunan ekonomi yang berhasil dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini terjadi melalui peningkatan pendapatan per kapita, penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik. Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, tingkat harapan hidup dan kualitas hidup secara umum juga dapat ditingkatkan.
2. Penciptaan Lapangan Kerja: Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan menciptakan peluang kerja bagi penduduk. Peningkatan investasi, pertumbuhan sektor ekonomi, dan pengembangan industri berkontribusi pada peningkatan kesempatan kerja. Hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan keberlanjutan ekonomi.
3. Peningkatan Pendapatan dan Pengeluaran: Pembangunan ekonomi yang berhasil dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Peningkatan pendapatan dapat mendorong pengeluaran konsumen, yang pada gilirannya dapat memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Selain itu, pendapatan yang lebih tinggi juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat, memicu pertumbuhan sektor usaha, dan mendorong investasi.
4. Peningkatan Infrastruktur: Pembangunan ekonomi seringkali melibatkan pengembangan infrastruktur yang memadai. Pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, jaringan telekomunikasi, dan sumber daya energi yang baik meningkatkan konektivitas dan efisiensi ekonomi. Infrastruktur yang memadai juga dapat membuka akses ke wilayah yang terisolasi, memfasilitasi perdagangan, dan meningkatkan produktivitas.

5. Peningkatan Akses Terhadap Pendidikan dan Kesehatan: Pembangunan ekonomi yang berhasil cenderung meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Investasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan kualitas dan ketersediaan layanan tersebut. Hal ini memberikan kesempatan yang lebih baik bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup.
6. Peningkatan Inovasi dan Teknologi: Pembangunan ekonomi yang berhasil mendorong inovasi dan adopsi teknologi baru. Inovasi dan teknologi berperan penting dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing suatu negara atau wilayah. Meningkatnya investasi dalam penelitian dan pengembangan, serta transfer teknologi, dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pengembangan industri.
7. Peningkatan Ketahanan Ekonomi: Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan meningkatkan ketahanan ekonomi suatu negara atau wilayah. Diversifikasi sektor ekonomi, perkembangan industri, dan investasi dalam sumber daya manusia dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi tunggal atau sumber pendapatan yang terbatas. Hal ini dapat membantu mengatasi fluktuasi ekonomi global dan mengurangi dampak krisis ekonomi.

Selain memberikan manfaat yang signifikan bagi suatu negara, pembangunan ekonomi juga memiliki beberapa kerugian yang perlu diperhatikan. Namun, kerugian ini tidak selalu terjadi dalam setiap situasi pembangunan ekonomi. Untuk dapat membantu meminimalkan kerugian dan memaksimalkan manfaat dari pembangunan ekonomi dibutuhkan upaya yang tepat untuk mengelola dan mengurangi dampak negatif tersebut. Berikut adalah beberapa kerugian yang mungkin timbul akibat pembangunan ekonomi:

1. Ketimpangan sosial dan ekonomi: Pembangunan ekonomi yang tidak adil dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan dapat menyebabkan ketegangan sosial, ketidakstabilan politik, dan konflik di masyarakat.
2. Kerusakan lingkungan: Pembangunan ekonomi yang tidak berkelanjutan sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, polusi, deforestasi, dan perubahan iklim adalah beberapa contoh dampak negatif yang dapat terjadi. Kerusakan lingkungan ini dapat mengancam keberlanjutan jangka panjang dan kualitas hidup manusia.
3. Hilangnya keanekaragaman budaya: Pembangunan ekonomi yang cepat dan modernisasi dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman budaya. Nilai-nilai tradisional, bahasa, dan praktik budaya dapat terancam oleh dominasi budaya luar yang lebih besar.
4. Ketergantungan ekonomi: Pembangunan ekonomi yang terlalu bergantung pada sektor tertentu atau negara-negara tertentu dapat menyebabkan kerentanan ekonomi yang tinggi. Fluktuasi harga komoditas atau perubahan kebijakan perdagangan global dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada perekonomian negara yang tergantung.
5. Urbanisasi yang tidak terkendali: Pembangunan ekonomi yang cepat sering kali diikuti oleh urbanisasi yang tidak terkendali. Pertumbuhan perkotaan yang tidak teratur dapat menyebabkan masalah seperti kemacetan, kepadatan penduduk yang tinggi, kekurangan perumahan, dan kesenjangan dalam akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar.

6. Kerentanan terhadap krisis ekonomi: Negara-negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat juga dapat menjadi lebih rentan terhadap krisis ekonomi. Ketidakstabilan dalam pasar keuangan global, perubahan kebijakan luar negeri, atau ketidakseimbangan makroekonomi dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan kontraksi ekonomi yang tajam.

PERMASALAHAN DASAR PEMBANGUNAN EKONOMI DI NEGARA BERKEMBANG

Negara-negara berkembang menghadapi sejumlah masalah dasar dalam pembangunan ekonomi mereka. Masalah umum yang sering dihadapi oleh negara berkembang diantaranya:

1. Kemiskinan: Kemiskinan adalah masalah yang mendalam di negara-negara berkembang. Banyak penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, dengan akses terbatas terhadap pendidikan, layanan kesehatan, makanan, dan pekerjaan yang layak. Kurangnya kesempatan ekonomi dan ketimpangan pendapatan merupakan faktor yang berkontribusi pada kemiskinan ini.
2. Ketimpangan ekonomi: Ketimpangan pendapatan dan kekayaan yang tinggi adalah masalah serius di negara-negara berkembang. Kelompok masyarakat tertentu sering kali mendapatkan manfaat yang tidak adil dari pertumbuhan ekonomi, sementara sebagian besar penduduk tetap miskin. Ketimpangan ini dapat mengganggu stabilitas sosial dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
3. Infrastruktur yang kurang berkembang: Banyak negara berkembang menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur yang kurang berkembang, seperti jaringan transportasi yang buruk, akses terbatas ke listrik dan air bersih, serta kurangnya fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai. Infrastruktur yang buruk dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
4. Ketergantungan pada sektor primer: Banyak negara berkembang masih sangat bergantung pada sektor primer, seperti pertanian, pertambangan, atau ekstraksi sumber daya alam. Ketergantungan ini dapat membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan menghambat diversifikasi ekonomi yang lebih luas.
5. Kurangnya akses ke modal dan kredit: Banyak usaha kecil dan menengah di negara-negara berkembang menghadapi kesulitan dalam mengakses modal dan kredit yang diperlukan untuk memperluas usaha mereka. Kurangnya akses ini dapat membatasi pertumbuhan dan inovasi ekonomi.
6. Korupsi dan birokrasi yang buruk: Korupsi dan birokrasi yang buruk adalah masalah serius di banyak negara berkembang. Korupsi dapat menghambat investasi, meningkatkan biaya bisnis, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Birokrasi yang buruk dan proses regulasi yang rumit juga dapat menghambat kemajuan ekonomi.

Untuk mengatasi masalah-masalah ini, negara-negara berkembang perlu mengadopsi kebijakan dan strategi yang tepat. Hal ini meliputi upaya untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, memperbaiki infrastruktur, mendorong diversifikasi ekonomi, memperkuat lembaga dan tata kelola yang baik, serta mempromosikan investasi dan inovasi. Kerjasama internasional juga penting dalam mendukung pembangunan ekonomi negara-negara berkembang.

HAMBATAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Hambatan pembangunan ekonomi dapat bervariasi tergantung pada kondisi dan konteks suatu negara atau wilayah. Dalam mengatasi hambatan pembangunan ekonomi, perlu adanya kebijakan yang tepat, reformasi struktural, investasi dalam sumber daya manusia, dan kerja sama antara pemerintah, sektor

swasta, dan masyarakat sipil. Berikut adalah beberapa hambatan umum yang dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi:

1. Ketergantungan pada sumber daya alam terbatas: Jika suatu negara terlalu bergantung pada ekspor sumber daya alam tertentu, fluktuasi harga komoditas dapat memiliki dampak negatif pada perekonomian. Selain itu, ketergantungan pada sumber daya alam dapat menghambat diversifikasi ekonomi dan inovasi.
2. Ketidakstabilan politik dan konflik: Ketidakstabilan politik, konflik, atau kekerasan dapat menghambat pembangunan ekonomi dengan mengganggu aktivitas bisnis, investasi, dan perdagangan. Ketidakpastian politik juga dapat membuat investor ragu untuk menanamkan modal di suatu negara.
3. Keterbatasan infrastruktur: Infrastruktur yang tidak memadai, seperti jalan raya yang rusak, sistem transportasi yang tidak efisien, atau kurangnya akses listrik, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang baik diperlukan untuk mendukung aktivitas bisnis, perdagangan, dan investasi.
4. Ketidakseimbangan fiskal: Kebijakan fiskal yang tidak seimbang, seperti defisit anggaran yang tinggi atau beban pajak yang berlebihan, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Defisit anggaran yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan utang publik, sedangkan beban pajak yang berlebihan dapat menghambat investasi dan konsumsi.
5. Ketidaksetaraan ekonomi dan kesenjangan sosial: Kesenjangan pendapatan dan ketidaksetaraan ekonomi dapat menjadi hambatan bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang tinggi dapat menghambat mobilitas sosial, menciptakan ketegangan sosial, dan mengurangi daya beli masyarakat.
6. Kurangnya kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja: Kualitas pendidikan yang rendah atau tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja dapat menghambat pembangunan ekonomi. Kurangnya keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan permintaan pasar dapat menghambat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang inovatif dan berdaya saing.
7. Korupsi dan birokrasi yang buruk: Korupsi dan birokrasi yang buruk dapat menghambat investasi dan aktivitas bisnis dengan meningkatkan biaya transaksi, memperlambat proses regulasi, dan merusak kepercayaan pelaku ekonomi. Hal ini dapat menghambat efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.
8. Perubahan iklim dan kerentanan terhadap bencana: Perubahan iklim dapat memiliki dampak negatif pada sektor-sektor ekonomi tertentu, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Kerentanan terhadap bencana juga dapat menghambat pembangunan ekonomi dengan merusak infrastruktur dan mengganggu aktivitas produksi.
9. Ketergantungan pada Sektor Ekonomi Tertentu: Ketergantungan yang berlebihan pada sektor ekonomi tertentu, seperti sumber daya alam atau industri tunggal, dapat menjadi hambatan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Fluktuasi harga komoditas atau perkembangan teknologi yang menggantikan sektor ekonomi tertentu dapat merusak perekonomian dan menciptakan ketidakstabilan.
10. Keterbatasan Akses terhadap Pasar dan Investasi: Keterbatasan akses terhadap pasar internasional dan investasi asing dapat membatasi pertumbuhan ekonomi. Kendala perdagangan, hambatan tarif, regulasi yang kompleks, dan ketidakpastian kebijakan dapat menghalangi akses ke pasar global dan investasi yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

TAHAPAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Tahapan dalam pembangunan ekonomi dapat bervariasi tergantung pada konteks dan strategi pembangunan yang diadopsi oleh suatu negara atau wilayah. Di bawah ini adalah tahapan umum yang sering digunakan dalam pembangunan ekonomi:

1. Tahap Pertumbuhan Awal

Tahap pertumbuhan awal ditandai dengan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi dan produktivitas. Fokus utama pada tahap ini adalah pengembangan sektor-sektor ekonomi seperti pertanian, industri ringan, dan sektor manufaktur. Investasi dalam infrastruktur dasar dan pengembangan sumber daya manusia penting untuk menciptakan dasar yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Tahapan pertumbuhan awal dalam pembangunan ekonomi adalah fase di mana suatu negara atau wilayah berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada peningkatan produksi dan produktivitas. Tahapan ini sering kali merupakan awal dari pembangunan ekonomi dan menciptakan dasar/pondasi yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun, harus ditambah dengan adanya kebijakan yang mendukung, stabilitas politik, dan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Berikut adalah tahapan pertumbuhan awal yang umum dalam pembangunan ekonomi:

- a. Pengembangan sektor pertanian: Pada tahap awal pembangunan ekonomi, sektor pertanian sering menjadi fokus utama. Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk yang besar yang masih bergantung pada pertanian sebagai mata pencaharian utama. Peningkatan produktivitas pertanian melalui modernisasi, penggunaan teknologi, dan pengembangan infrastruktur pertanian menjadi prioritas.
- b. Investasi dalam infrastruktur dasar: Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan raya, pelabuhan, bandara, listrik, dan air bersih sangat penting dalam tahap pertumbuhan awal. Infrastruktur yang memadai membantu memfasilitasi mobilitas tenaga kerja, distribusi barang, dan aktivitas bisnis. Investasi ini juga dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas ke pasar dalam negeri dan luar negeri.
- c. Pengembangan sektor industri ringan: Pada tahap ini, fokus beralih ke pengembangan sektor industri ringan. Industri-industri seperti tekstil, garmen, makanan dan minuman, serta pengolahan kayu dapat menjadi sektor-sektor yang berkembang. Pemerintah sering kali memberikan insentif untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan sektor ini.
- d. Peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja: Investasi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja menjadi penting untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja. Peningkatan pendidikan memungkinkan masyarakat untuk mengakses pekerjaan yang lebih berkualitas dan berkontribusi pada peningkatan produktivitas ekonomi.
- e. Stimulasi sektor manufaktur: Tahap pertumbuhan awal sering kali melibatkan upaya untuk mendorong pertumbuhan sektor manufaktur yang lebih maju. Pemerintah dapat memberikan insentif untuk menarik investasi dalam sektor ini dan mendorong penggunaan teknologi yang lebih maju. Pengembangan sektor manufaktur yang kompetitif dapat membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian.
- f. Peningkatan akses ke modal dan sumber daya: Pada tahap ini, penting untuk memfasilitasi akses ke modal dan sumber daya bagi pelaku usaha. Pemerintah dapat mendukung lembaga

keuangan untuk memberikan kredit dan pembiayaan yang terjangkau kepada pelaku usaha. Peningkatan akses ke modal membantu mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan sektor swasta.

2. Tahap Industrialisasi

Pada tahap industrialisasi, pemerintah dan sektor swasta bekerja sama untuk mendorong pertumbuhan sektor industri yang lebih maju. Investasi dalam teknologi, riset dan pengembangan, serta pengembangan keterampilan tenaga kerja menjadi kunci dalam mendorong inovasi dan peningkatan daya saing. Pemerintah juga dapat menerapkan kebijakan untuk melindungi industri dalam negeri dan mempromosikan ekspor. Tahapan industrialisasi dalam pembangunan ekonomi mengacu pada proses di mana suatu negara bergerak dari sektor pertanian yang dominan ke sektor industri yang lebih maju dan berkembang. Berikut adalah tahapan utama dalam industrialisasi:

- a. Tahap Pertanian Pre-Industrial: Pada tahap ini, sektor pertanian menjadi tulang punggung ekonomi dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor ini. Produksi pertanian masih bersifat tradisional, dengan teknologi sederhana dan rendahnya produktivitas.
- b. Perkembangan Sektor Manufaktur: Pada tahap ini, negara mulai mengembangkan sektor manufaktur. Investasi dilakukan dalam pembangunan industri dan pabrik, dengan pengenalan teknologi dan mesin baru yang meningkatkan efisiensi produksi. Tenaga kerja beralih dari sektor pertanian ke sektor manufaktur.
- c. Industrialisasi Terkonsentrasi: Pada tahap ini, sektor manufaktur berkembang pesat. Ada peningkatan dalam skala produksi dan diversifikasi industri. Pusat-pusat industri berkembang, dan konsentrasi populasi dan kegiatan ekonomi terjadi di kota-kota besar. Urbanisasi dan migrasi dari pedesaan ke perkotaan menjadi fenomena umum.
- d. Diversifikasi Ekonomi: Pada tahap ini, ekonomi negara semakin beragam dengan sektor jasa yang berkembang, seperti keuangan, perdagangan, dan jasa. Ini membantu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan nasional.
- e. Inovasi Teknologi dan Otomatisasi: Pada tahap ini, inovasi teknologi dan otomatisasi menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi produksi. Penggunaan teknologi canggih seperti komputer, robot, dan kecerdasan buatan semakin meningkat. Ini menyebabkan pergeseran tenaga kerja dari sektor manufaktur ke sektor jasa yang lebih berbasis pengetahuan.
- f. Masyarakat Berbasis Pengetahuan dan Ekonomi Digital: Pada tahap ini, ekonomi negara mengalami transformasi menjadi masyarakat berbasis pengetahuan dan ekonomi digital. Pendidikan dan keterampilan berbasis pengetahuan menjadi sangat penting. Inovasi teknologi digital menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, dan e-commerce serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi faktor kunci dalam perdagangan dan bisnis.

3. Tahap Diversifikasi Ekonomi

Pada tahap diversifikasi ekonomi, negara berupaya untuk mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu dan menciptakan keragaman dalam struktur ekonomi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan sektor-sektor baru yang berpotensi memberikan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Investasi dalam sektor jasa seperti keuangan, pariwisata, dan teknologi informasi dapat menjadi fokus pada tahap ini. Tahapan diversifikasi ekonomi dalam pembangunan ekonomi mengacu pada proses di mana suatu negara berusaha memperluas sektor ekonominya agar tidak tergantung pada sektor utama yang dominan. Diversifikasi ekonomi bertujuan untuk menciptakan keberagaman dalam kegiatan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan nasional, dan mengurangi risiko yang terkait dengan ketergantungan pada sektor tunggal. Berikut adalah tahapan umum dalam diversifikasi ekonomi:

- a. Analisis Potensi Sektor: Pada tahap ini, negara melakukan analisis menyeluruh terhadap potensi sektor-sektor ekonomi yang mungkin dapat dikembangkan. Faktor-faktor seperti sumber daya alam, keunggulan komparatif, teknologi, pasar, dan kebijakan pemerintah dievaluasi untuk menentukan sektor-sektor yang memiliki potensi untuk diversifikasi.
- b. Pengembangan Infrastruktur: Infrastruktur yang memadai merupakan prasyarat penting untuk diversifikasi ekonomi. Pemerintah perlu menginvestasikan sumber daya dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, listrik, dan telekomunikasi. Infrastruktur yang baik akan mendukung pertumbuhan sektor-sektor baru dan memfasilitasi perluasan kegiatan ekonomi.
- c. Kebijakan Pemerintah: Pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong diversifikasi ekonomi melalui kebijakan yang mendukung sektor-sektor baru. Ini bisa termasuk insentif fiskal, deregulasi, perlindungan pasar, subsidi, dan kebijakan perdagangan yang menguntungkan. Pemerintah juga dapat mengadopsi program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan yang diperlukan dalam sektor-sektor baru.
- d. Investasi dan Akses Keuangan: Diversifikasi ekonomi membutuhkan investasi yang signifikan dalam sektor-sektor baru. Pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memfasilitasi akses keuangan bagi para pengusaha dan perusahaan kecil dan menengah yang ingin berinvestasi dalam sektor-sektor baru. Ini dapat melibatkan pembentukan lembaga keuangan yang mendukung pengembangan sektor-sektor baru dan memberikan pinjaman dengan bunga rendah.
- e. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Diversifikasi ekonomi membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan terlatih dalam sektor-sektor baru. Pendidikan dan pelatihan vokasional harus ditingkatkan untuk mempersiapkan tenaga kerja dengan keterampilan yang diperlukan dalam sektor-sektor baru. Pemerintah juga dapat memfasilitasi kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
- f. Promosi dan Pemasaran: Untuk menarik investasi dan meningkatkan daya saing sektor-sektor baru, promosi dan pemasaran yang efektif diperlukan. Pemerintah dapat melakukan promosi ekonomi, mengadakan pameran perdagangan internasional, dan memberikan informasi yang akurat dan terkini tentang peluang investasi dan potensi pasar.

4. Tahap Inovasi dan Peningkatan Produktivitas

Pada tahap inovasi dan peningkatan produktivitas, fokus utama adalah meningkatkan inovasi dan produktivitas di berbagai sektor ekonomi. Pemerintah dan sektor swasta bekerja sama untuk mendorong riset dan pengembangan, memfasilitasi transfer teknologi, dan mempromosikan kewirausahaan. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja juga penting untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja. Tahapan inovasi dan peningkatan produktivitas dalam pembangunan ekonomi melibatkan pengenalan dan penerapan teknologi baru serta strategi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Berikut adalah tahapan utama dalam inovasi dan peningkatan produktivitas:

1. Penelitian dan Pengembangan (R&D): Tahap ini melibatkan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan pengetahuan baru, teknologi, dan produk yang dapat meningkatkan produktivitas. Pemerintah, universitas, dan sektor swasta dapat berperan dalam mendanai dan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan ini.
2. Inovasi Teknologi: Inovasi teknologi adalah pengenalan dan penerapan teknologi baru atau pengembangan teknologi yang ada untuk meningkatkan proses produksi. Inovasi teknologi

dapat melibatkan pengembangan perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan sistem yang lebih efisien, serta penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan teknologi digital lainnya.

3. **Difusi Teknologi:** Tahap ini melibatkan penyebaran teknologi inovatif ke sektor-sektor ekonomi yang lebih luas. Difusi teknologi dapat terjadi melalui transfer teknologi, pelatihan, kemitraan, atau investasi langsung dalam sektor-sektor yang menggunakan teknologi baru. Difusi teknologi membutuhkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan untuk memastikan penyebaran yang efektif.
4. **Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja:** Peningkatan produktivitas seringkali terkait erat dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Pemerintah dan sektor pendidikan harus bekerja sama untuk mengembangkan program pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan sektor ekonomi yang berkembang. Ini dapat mencakup pelatihan vokasional, program sertifikasi, dan pendidikan tinggi yang berfokus pada keterampilan teknis dan pemecahan masalah.
5. **Perbaikan Proses Produksi:** Tahap ini melibatkan evaluasi dan perbaikan terus-menerus terhadap proses produksi yang ada. Metode seperti Lean Manufacturing dan Six Sigma digunakan untuk mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan, mempercepat waktu siklus, dan meningkatkan efisiensi operasional.
6. **Kultur Inovasi:** Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan adanya kultur inovasi di masyarakat dan organisasi. Pemerintah dapat mendorong kultur inovasi melalui insentif, dukungan keuangan, dan regulasi yang memfasilitasi kolaborasi dan eksperimen.
7. **Investasi dalam Modal Fisik dan Teknologi:** Peningkatan produktivitas juga membutuhkan investasi dalam modal fisik dan teknologi. Pemerintah dan sektor swasta perlu berinvestasi dalam infrastruktur teknologi, peralatan produksi yang modern, dan aksesibilitas sumber daya yang memadai.
8. **Monitoring dan Evaluasi:** Tahap ini melibatkan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi inovasi dan peningkatan produktivitas. Pemerintah dan sektor swasta harus melacak dan menganalisis data untuk mengukur dampak inovasi terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat.

5. Tahap Pembangunan Berkelanjutan

Tahap pembangunan berkelanjutan melibatkan upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan ramah lingkungan. Pemerintah berfokus pada integrasi sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam kebijakan pembangunan. Investasi dalam energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan pengentasan kemiskinan menjadi prioritas. Tahapan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi mencakup serangkaian langkah yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berikut adalah tahapan utama dalam pembangunan berkelanjutan:

- a. **Identifikasi dan Analisis:** Tahap pertama adalah mengidentifikasi dan menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pembangunan berkelanjutan. Ini melibatkan evaluasi terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan saat ini, serta mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki potensi untuk pertumbuhan berkelanjutan.
- b. **Perencanaan dan Kebijakan:** Tahap ini melibatkan pengembangan perencanaan jangka panjang dan kebijakan yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan. Pemerintah harus mengadopsi

kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk kebijakan lingkungan, kebijakan energi, dan kebijakan sosial yang berorientasi pada inklusivitas dan keadilan.

- c. **Infrastruktur Berkelanjutan:** Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan menjadi tahapan penting dalam pembangunan berkelanjutan. Ini meliputi pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, seperti transportasi berkelanjutan, pengelolaan air yang efisien, dan sumber energi terbarukan. Infrastruktur yang berkelanjutan juga harus mempertimbangkan aspek sosial, seperti aksesibilitas bagi masyarakat yang rentan.
- d. **Pengembangan Sumber Daya Manusia:** Tahapan ini melibatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Pendidikan yang berkualitas dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja akan membantu menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan adaptif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan ekonomi.
- e. **Diversifikasi Ekonomi:** Tahapan ini melibatkan upaya untuk mengembangkan sektor ekonomi yang beragam untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tunggal. Diversifikasi ekonomi menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan nasional, dan mengurangi risiko yang terkait dengan ketergantungan pada sektor tunggal.
- f. **Konservasi dan Perlindungan Lingkungan:** Tahap ini melibatkan perlindungan dan konservasi lingkungan. Pemerintah harus menerapkan kebijakan dan peraturan yang memastikan pengelolaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya alam, pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah, dan perlindungan keanekaragaman hayati.
- g. **Partisipasi Masyarakat:** Tahapan ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan berkelanjutan. Masyarakat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan, implementasi proyek, dan pemantauan terhadap dampak pembangunan. Partisipasi masyarakat akan memastikan keberlanjutan dalam jangka panjang dan memperkuat kualitas kebijakan dan program pembangunan.
- h. **Pemantauan dan Evaluasi:** Tahap ini melibatkan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi dan dampak pembangunan berkelanjutan. Pemerintah dan lembaga terkait harus melakukan pemantauan terhadap indikator pembangunan berkelanjutan dan mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program yang diterapkan.

Tahapan pembangunan ekonomi harus menjadi siklus yang berkelanjutan, dengan pembaruan dan penyesuaian berkelanjutan berdasarkan evaluasi dan perubahan kondisi. Pembangunan berkelanjutan membutuhkan komitmen jangka panjang dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan lembaga internasional untuk mencapai hasil yang berkelanjutan. Selain itu, penting untuk adanya kebijakan yang mendukung, reformasi struktural, dan stabilitas politik.

MASALAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Masalah dalam pembangunan ekonomi dapat bervariasi tergantung pada konteks dan negara tertentu. Selain itu, masalah ini saling terkait dan seringkali membutuhkan pendekatan yang holistik dalam upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Beberapa masalah umum yang sering muncul dalam pembangunan ekonomi meliputi:

1. **Ketimpangan ekonomi:** Ketimpangan pendapatan dan kekayaan antara individu dan kelompok dapat menghambat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ketimpangan yang tinggi dapat menyebabkan ketidakadilan sosial, konflik, dan ketidakstabilan ekonomi.

2. Kemiskinan: Kemiskinan adalah masalah yang sering terkait dengan pembangunan ekonomi. Ketika sebagian besar penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, sulit mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kemiskinan dapat menghambat akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi, serta menyebabkan ketidakstabilan sosial.
3. Pengangguran: Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menjadi hambatan dalam pembangunan ekonomi. Pengangguran menyebabkan konsekuensi ekonomi dan sosial negatif, seperti hilangnya pendapatan, penurunan produktivitas, dan ketidakstabilan sosial.
4. Kurangnya infrastruktur: Infrastruktur yang memadai, seperti jaringan transportasi, energi, dan telekomunikasi, penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, banyak negara menghadapi tantangan dalam pembangunan infrastruktur yang memadai karena keterbatasan sumber daya dan kekurangan manajemen proyek.
5. Ketidakstabilan keuangan: Ketidakstabilan keuangan, termasuk inflasi yang tinggi, defisit anggaran yang besar, dan utang publik yang tidak terkendali, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Ketidakstabilan keuangan dapat mengurangi kepercayaan investor dan mempengaruhi investasi dan konsumsi.
6. Ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu: Ketergantungan yang berlebihan pada sektor ekonomi tertentu, seperti industri ekstraktif atau pariwisata, dapat membuat ekonomi menjadi rentan terhadap fluktuasi harga dan permintaan global. Diversifikasi ekonomi menjadi penting untuk mengurangi risiko dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
7. Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan: Masalah lingkungan seperti perubahan iklim, deforestasi, dan polusi dapat memiliki dampak negatif pada pembangunan ekonomi. Kerusakan lingkungan dapat merusak sumber daya alam, mengganggu produksi pertanian, meningkatkan risiko bencana alam, dan mengurangi daya tarik pariwisata.
8. Ketidakadilan gender: Ketimpangan gender dalam akses ke pendidikan, peluang kerja, dan pengambilan keputusan ekonomi dapat menghambat pembangunan ekonomi yang inklusif. Memperkuat peran perempuan dalam ekonomi dapat meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan secara keseluruhan.

Kebijakan pembangunan ekonomi adalah serangkaian langkah dan tindakan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas ekonomi untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan mencapai tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang. Berikut adalah beberapa kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam pembangunan ekonomi:

1. Kebijakan fiskal: Kebijakan fiskal melibatkan pengaturan pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi. Ini termasuk pengaturan anggaran negara, pajak, subsidi, dan pengeluaran publik. Misalnya, pemerintah dapat mengadopsi kebijakan pengeluaran publik untuk memperbaiki infrastruktur, mempromosikan sektor tertentu, atau memberikan insentif pajak untuk mendukung investasi dan pertumbuhan sektor swasta.
2. Kebijakan moneter: Kebijakan moneter melibatkan pengaturan suku bunga, jumlah uang beredar, dan kebijakan lain yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengendalikan inflasi, mengelola ketersediaan kredit, dan menjaga stabilitas keuangan. Bank sentral dapat menggunakan instrumen seperti suku bunga acuan, cadangan wajib bank, dan operasi pasar terbuka untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi.
3. Kebijakan perdagangan: Kebijakan perdagangan bertujuan untuk meningkatkan akses pasar internasional, mendorong ekspor, dan mengurangi hambatan perdagangan. Pemerintah dapat

mengadopsi kebijakan tarif dan non-tarif yang mengatur perdagangan luar negeri, serta melakukan perjanjian perdagangan dengan negara lain untuk meningkatkan akses pasar.

4. Kebijakan investasi: Kebijakan investasi bertujuan untuk meningkatkan investasi dalam sektor-sektor yang strategis dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Ini dapat mencakup insentif pajak, peraturan yang ramah investasi, perlindungan hukum, dan fasilitasi investasi asing.
5. Kebijakan sektor riil: Pemerintah dapat mengadopsi kebijakan yang fokus pada pengembangan sektor-sektor utama dalam perekonomian, seperti industri manufaktur, pertanian, atau sektor jasa. Ini dapat melibatkan pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan teknologi.
6. Kebijakan pendidikan dan pelatihan: Kebijakan pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja, yang merupakan aset penting dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah dapat memperluas akses ke pendidikan formal, memperkuat pelatihan keterampilan, dan mengembangkan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
7. Kebijakan infrastruktur: Pembangunan infrastruktur yang memadai sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah dapat mengadopsi kebijakan untuk memperbaiki jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, dan infrastruktur lainnya. Hal ini dapat melibatkan investasi publik, kemitraan publik-swasta, atau pengaturan kebijakan yang menguntungkan bagi investor infrastruktur.
8. Kebijakan pengembangan sektor: Kebijakan ini bertujuan untuk mengembangkan sektor ekonomi tertentu yang memiliki potensi pertumbuhan dan kompetitif. Pemerintah dapat memberikan insentif, dukungan keuangan, dan pengaturan yang menguntungkan bagi sektor-sektor seperti industri manufaktur, teknologi informasi, pariwisata, pertanian, atau sektor kreatif.
9. Kebijakan perlindungan sosial: Kebijakan perlindungan sosial bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, ketimpangan sosial, dan memberikan jaminan keamanan sosial bagi masyarakat yang rentan. Ini meliputi program bantuan sosial, sistem jaminan sosial, akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi.

Kebijakan pembangunan ekonomi harus didasarkan pada analisis yang cermat, pemantauan yang berkelanjutan, dan evaluasi kebijakan yang efektif. Setiap negara memiliki konteks dan tantangan yang berbeda, sehingga kebijakan pembangunan ekonomi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan masing-masing negara.

RANGKUMAN MATERI

1. Beberapa teori pertumbuhan ekonomi adalah teori pertumbuhan klasik, teori pertumbuhan neoklasik, teori pertumbuhan endogen, teori pertumbuhan baru, dan teori pertumbuhan ekumulatif.
2. Ekonomi pembangunan adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari prinsip-prinsip dan kebijakan yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perubahan ekonomi suatu negara atau wilayah. Sedangkan pembangunan ekonomi lebih mengacu pada proses dan hasil pembangunan yang luas, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi saling terkait dan saling mempengaruhi, diantaranya investasi, kebijakan fiskal dan moneter, perdagangan internasional, inovasi dan teknologi, pendidikan dan keterampilan, kestabilan politik dan hukum, infrastruktur yang memadai, kualitas lingkungan, dan distribusi pendapatan yang adil.

4. Tujuan pembangunan ekonomi adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, pengurangan kemiskinan, peningkatan ketahanan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan peningkatan pemerataan ekonomi.
5. Manfaat utama dari pembangunan ekonomi adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan pengeluaran, peningkatan infrastruktur, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, peningkatan inovasi dan teknologi, dan peningkatan ketahanan ekonomi.
6. Kerugian yang perlu diperhatikan dalam pembangunan ekonomi adalah Ketimpangan sosial dan ekonomi, Kerusakan lingkungan, Hilangnya keanekaragaman budaya, Ketergantungan ekonomi, Urbanisasi yang tidak terkendali, dan Kerentanan terhadap krisis ekonomi.
7. Permasalahan dasar pembangunan ekonomi di negara berkembang adalah kemiskinan, ketimpangan ekonomi, infrastruktur yang kurang berkembang, ketergantungan pada sektor primer, kurangnya akses ke modal dan kredit, dan korupsi dan birokrasi yang buruk.
8. Hambatan pembangunan ekonomi diantaranya ketergantungan pada sumber daya alam terbatas, ketidakstabilan politik dan konflik, keterbatasan infrastruktur, ketidakseimbangan fiskal, ketidaksetaraan ekonomi dan kesenjangan sosial, kurangnya kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, korupsi dan birokrasi yang buruk, perubahan iklim dan kerentanan terhadap bencana, ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu, dan keterbatasan akses terhadap pasar dan investasi.
9. Tahapan pembangunan ekonomi meliputi: (1) Tahap pertumbuhan awal, (2) Tahap industrialisasi, (3) Tahap diversifikasi ekonomi, (4) Tahap inovasi dan peningkatan produktivitas, dan (5) Tahap pembangunan berkelanjutan.
10. Masalah umum yang sering muncul dalam pembangunan ekonomi adalah ketimpangan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, kurangnya infrastruktur, ketidakstabilan keuangan, ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu, perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, dan ketidakadilan gender.
11. Beberapa kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam pembangunan ekonomi adalah kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan perdagangan, kebijakan investasi, kebijakan sektor riil, kebijakan pendidikan dan pelatihan, kebijakan infrastruktur, kebijakan pengembangan sektor, dan kebijakan perlindungan sosial.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Apa perbedaan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi dan ekonomi pembangunan? Jelaskan.
2. Jelaskan manfaat dan kerugian dari pembangunan ekonomi.
3. Jelaskan permasalahan dasar dalam pembangunan ekonomi pada negara berkembang.
4. Sebutkan dan jelaskan masalah umum yang sering terjadi dalam pembangunan ekonomi.
5. Sebutkan dan jelaskan kebijakan dalam pembangunan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia F, R Sinaga, Asyari, RF Soeyatno, D silitonga, A Solikin, AK Hubbansyah, RT Siregar, D Maulina, R Kusumaningrum, NF Sahamony, E Litriani, dan N Ladjin. *Ekonomi Pembangunan*. Penerbit Widina, Bandung.
- Barro, RJ and X Sala-i-Martin. 2004. *Economic Growth*. Second Edition. The MIT Press, London.
- Bornschieer, V. 2005. *Culture and Politics in Economic Development*. First Edition. Routledge, New York.
- Cypher, JM and JL Dietz. 1997. *The Process of Economic Development*. Routledge, London.
- Krugman, P. 1998. *Development, Geography, and Economic Theory*. Fourth Edition. The MIT Press, London.
- Nafziger, EW. 2006. *Economic Development*. Fourth Edition. Cambridge University Press, UK.
- Piketty, T. 2014. *Capital in Twenty-First Century*. Cambridge, London.
- Stathakis, G and G Vaggi. 2006. *Economic Development and Social Change: Historical Roots and Modern Perspectives*. Routledge, New York.

Bayu Purnama Putra, M.Si.

INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID

Jl. Kapten Dasuki Bakri, Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Bogor, Jawa Barat 16810

bayu.purnamaputra@gmail.com

BAB 10 EKONOMI INTERNASIONAL

Sebuah Bunga Rampai Ilmu Ekonomi dari Literasi Pemikiran
dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Diterbitkan oleh:

INAIS Press

BAB 10 EKONOMI INTERNASIONAL

Konsep-konsep Inti dari Hukum Ekonomi Internasional

Secara umum, hukum ekonomi mendefinisikan dan membatasi jumlah kesempatan yang tersedia bagi setiap orang serta keadilan distribusi masyarakat. Hukum Ekonomi, lapangan hukum yang mencakup berbagai pokok bahasan. Hukum memiliki banyak asas.

Contohnya mencakup perpajakan, asas-asas hukum perusahaan, persaingan usaha, pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, penanaman modal asing dan domestik, hak-hak intelektual, pengaturan perdagangan dan pembiayaan, sistem penjaminan dan hukum keuangan, perlindungan kesehatan, lingkungan hidup, dan ketenagakerjaan, serta hubungan industrial. Konvensi elektronik, atau "cyber", dan konvensi konvensional masih berbeda satu sama lain. Karena itu, diusahakan untuk digabungkan ke dalam cabang hukum tertentu, seperti hukum ekonomi (6). Tidak jelas apakah hukum ekonomi akan mempertimbangkan hal-hal tertentu, seperti hak kekayaan intelektual (Kameo 2020).

Prinsip dan asas hukum yang disebutkan sebelumnya saat ini mengatur berbagai macam pelaku atau subyek hukum. Ada bisnis, produsen, konsumen, pekerja, dan buruh, serta warga negara dan orang lain. Secara luas, hukum ekonomi yang disebutkan di atas mempengaruhi dan bahkan mengubah orang-orang yang hidup di wilayah yang secara historis terbagi menjadi publik dan privat. Hukum Ekonomi (Internasional) terdiri dari bidang-bidang hukum perdata yang paling penting, seperti hukum perjanjian dan hukum yang mengatur perbuatan melawan hukum. Namun, hingga saat ini, tidak ada yang telah menetapkan bahwa hukum perjanjian, misalnya, dapat dianggap sebagai hukum ekonomi. Hukum tata negara dan hukum administrasi negara membentuk dan menjalankan hukum ekonomi (internasional). Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan adalah bagian dari pemerintahan dan banyak negara di dunia melakukan hal yang serupa atau hampir sama dengan urusan negara (*para-statal activities*) (Kameo 2020). Ini adalah komponen penting dari dasar hukum ekonomi internasional.

Semua orang setuju bahwa hampir semua bidang hukum, termasuk Hukum Pidana klasik, terkait dengan ekonomi. Hukum ekonomi terdiri dari undang-undang yang mengatur semua tingkat pemerintahan—lokal, nasional, regional, dan internasional. Sebagai cabang hukum, hukum ekonomi juga dianggap unggul dan menikmati sifat hukum. Dengan menggunakan hukum dan regionalisasi hukum, ia memimpin globalisasi hukum, tetapi pada dasarnya tujuannya adalah keinginan negara bangsa berdaulat.

Substansi dan proses hukum dalam dunia hukum ekonomi internasional diatur oleh banyak aturan yang kompleks. Hukum ekonomi (internasional) mengatur produksi, perdagangan, dan konsumsi barang dan jasa baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk mencapai tujuan ini, hukum ekonomi (internasional) menggunakan teknik yang luas.

Sistem hukum setiap negara berdaulat didasarkan pada asas-asas hukum ekonomi, yang juga dikenal sebagai hukum internasional. Oleh karena itu, hukum nasional tidak perlu takut pada "wajah" hukum ekonomi internasional. Selain itu, dari sudut pandang teori keadilan bermartabat, hukum ekonomi (internasional) di Indonesia disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, atau *Volkgeist* Indonesia, yang merupakan bahasa resmi untuk hukum nasional. Dalam hal ini, orang tidak perlu khawatir tentang potensi ancaman terhadap demokrasi dan kedaulatan negara karena peningkatan hukum ekonomi internasional. Meskipun kedaulatan selalu penting

Hukum ekonomi (internasional) telah menjadi lebih kuat dalam beberapa tahun terakhir, memengaruhi konstitusi setiap negara. Hukum ekonomi internasional telah menyebabkan masalah struktural yang dihadapi oleh negara-negara berdaulat, termasuk Indonesia. Indonesia tidak perlu khawatir tentang potensi ancaman instrumen ratifikasi terhadap demokrasi dan kedaulatan hukumnya.

Defenisi hukum ekonomi internasional dapat dibuat dalam dua cara. Pertama, analisis berfokus pada prinsip-prinsip hukum yang mengaturnya; kedua, analisis berfokus pada subjek hukum internasional.

Menurut Older, seorang sarjana Jerman, metode kedua adalah yang terbaik. Ini menunjukkan bahwa hukum perdata, publik, dan nasional mengenai hubungan ekonomi internasional merupakan hukum ekonomi internasional secara keseluruhan.

Selain hukum ekonomi internasional, ada pula cabang-cabang baru hukum ekonomi internasional lainnya. Cabang-cabang ini muncul sebagai hasil dari pertumbuhan transaksi ekonomi internasional saat ini (Utama 2012).

Hukuman Ekonomi Dunia

Hukum ini mengawasi transaksi antara pihak swasta. Dengan kata lain, aturan hukum terdiri dari komponen dan prinsip-prinsip hukum perdata. Namun, karena transaksi komersial internasional telah berkembang, mereka sekarang menjadi subjek studi hukum internasional publik. Ini dapat disebabkan oleh sedikitnya tiga perkembangan: pertama, karena pertimbangan komersial perdata kini mengatur urusan bisnis atau perdata daripada keterlibatan negara dalam hubungan tersebut. Kedua, munculnya lebih banyak perjanjian internasional tentang eksploitasi kekayaan alam seperti gas dan minyak, bersama dengan pembangunan sarana umum. Ketiga, fungsi perusahaan multinasional sebagai duta besar dalam transaksi global

Kerugian dari Perkembangan Ekonomi Global

Bidang penelitian ini lebih menekankan analisis sosiologis dan politik. Lord McNair memberikan penjelasan tentang ciri-ciri perjanjian pinjaman internasional oleh lembaga internasional publik dan lembaga keuangan internasional;

perjanjian ini dibuat antara perusahaan asing dan pemerintah;

Perjanjian biasanya mengatur eksploitasi kekayaan alam untuk jangka waktu yang lama;

Selain itu, perjanjian-perjanjian ini seringkali memberikan hak kekayaan;

Pihak swasta biasanya mendapat perlakuan khusus dalam perjanjian-perjanjian ini; e. Sebagian dari perjanjian ini diatur oleh hukum perdata, dan sebagian lainnya oleh hukum publik; f. Seringkali, perjanjian ini mendapat perlindungan dari negara mana perusahaan induk berada; g. Dalam kebanyakan kasus, tidak ada perbedaan yang signifikan antara sistem hukum negara mana perusahaan induk didirikan dan sistem hukum negara mana perusahaan didirikan; Perjanjian-perjanjian ini biasanya menyebabkan konflik.

Ketika Pengaturan Empat muncul dan hubungan ekonomi internasional menjadi semakin kompleks, muncul Hukum Pembangunan Internasional. Dalam kebanyakan kasus, pengaturan seperti ini dibuat untuk keuntungan ekonomi negara-negara yang kurang maju. Deklarasi, Undang-Undang Terakhir, Resolusi, atau Rekomendasi adalah beberapa bentuk perjanjian yang dapat digunakan untuk menyampaikan undang-undang tersebut.

Perbedaan antara Hukum Nasional dan Hukum Internasional

Ketika masyarakat internasional berkembang, pelanggaran hukum internasional meningkat. Negara-negara diwajibkan untuk mematuhi hukum internasional saat menyelesaikan sengketa karena mereka adalah subyek hukum internasional. Dalam struktur masyarakat internasional yang koordinatif, badan supra nasional berada di atas subyek atau anggota masyarakat internasional yang sama. Apa yang dianggap sebagai dasar hukum internasional yang sah? Namun, fakta bahwa tidak ada badan supra nasional yang memiliki otoritas untuk menetapkan dan memaksakan hukum internasional dapat menimbulkan pertanyaan tentang apakah hukum internasional itu sebenarnya ada atau memenuhi syarat sebagai hukum. Dalam situasi ini, hukum hanya dilihat sebagai prosedur untuk menerapkan dan memaksakan aturan dengan adanya lembaga penegak hukum dan sanksi sebagai upaya memaksakan dan mendayausahakan hukum itu sendiri. Namun, hukum sebenarnya lebih dari sekedar prosedur untuk menerapkan dan memaksakan aturan; dalam tata masyarakat internasional, tidak ada badan legislatif maupun kekuatan legislatif yang memiliki kekuatan untuk memaksakan hukum. Hukum internasional disebut oleh para ahli sebagai "rule of positive morality", serta "laws of honour" dan "laws set by fashion." Menurut Mochtar Kusumaatmadja (1989, 35)

Selain itu, Austin berpendapat bahwa hukum adalah arahan yang diberikan oleh penguasa kepada pihak yang dikuasainya. Salah satu wewenang yang dimiliki oleh seorang penguasa adalah untuk menetapkan undang-undang yang akan diterapkan kepada entitas di bawah kekuasaannya. Ini menunjukkan bahwa undang-undang tidak dapat dianggap sebagai hukum kecuali dibuat oleh pemerintahan yang berdaulat. Sebaliknya, hal-hal seperti kesusilaan dan kesopanan dapat dianggap sebagai standar moral yang lebih tinggi. Konsep Austin berpendapat bahwa hukum didasarkan pada badan yang memiliki kekuatan dan otoritas untuk memaksakan hukum kepada pihak yang dikuasainya. Selain itu, pendapat ini bertentangan dengan hukum kebiasaan, yang berasal dari budaya. Austin berpendapat bahwa hukum kebiasaan hanyalah aturan moral daripada hukum. Karena masyarakat internasional dan tata hukum internasional tidak mengenal badan supra nasional, Austin memandang hukum internasional sebagai norma moral internasional daripada hukum dalam arti sebenarnya.

Austin menyatakan bahwa, meskipun hukum internasional tidak lagi dianggap sebagai standar hukum, para ahli hukum internasional sering mengingatkannya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kita telah terbiasa dengan masyarakat dan hukum nasional yang telah diuraikan di atas, di mana puma memiliki lembaga yang diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk memaksakan hukum nasional yang berlaku untuk subjeknya. Tampaknya lembaga dan aparat penegak hukum, bersama dengan sanksi mereka dalam tata masyarakat dan hukum nasional, bertanggung jawab atas pembentukan, pelaksanaan, dan pemaksaan hukum. Dalam kenyataannya, ketika lembaga dan aparat penegak hukum tidak berfungsi dengan baik, sistem hukum nasional sering menjadi kelumpuhan. Jika lembaga dan aparat penegak hukum tidak ada sama sekali, hal itu terjadi dalam hukum internasional. Oleh karena itu, tidak mengherankan bagi beberapa ahli hukum, terutama orang yang awam dengan hukum, bahwa lembaga dan aparat penegak hukum yang kuat serta sanksi hukum yang kuat adalah syarat utama untuk

adanya kaidah hukum. Oleh karena itu, hukum selalu terkait dengan lembaga dan aparat penegak hukum karena hukum dianggap tidak ada tanpa mereka. Pandangan ini telah ditinggalkan sejak lama. Lembaga dan aparat penegak hukum, serta sanksi hukum, bukanlah komponen paling penting dari sistem hukum. Cara masyarakat melihat dan memahami hukum memengaruhi keberadaan norma hukum. Jika norma tersebut dianggap sebagai norma hukum oleh masyarakat umum dan dipatuhi dengan kesadaran hukum, tanpa lembaga atau aparat yang memaksakannya, maka norma tersebut dianggap sebagai norma hukum. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa pendapat Austin tentang hukum salah karena kemajuan ilmu hukum. Ini dapat diterima karena hukum adat Indonesia merupakan sistem hukum yang berbeda dari sistem hukum yang lebih luas. Meskipun badan legislatif, badan kehakiman, dan polisi merupakan bagian dari sistem hukum yang berfungsi dengan baik, itu tidak berarti bahwa hukum tidak ada tanpa mereka. Hukum internasional telah lama dipengaruhi oleh teori hukum alam dan teori kekuatan mengikat karena pentingnya dan eksistensinya. Dalam definisi yang disekularisir, hukum alam didefinisikan sebagai hukum ideal yang didasarkan pada hakikat manusia sebagai makhluk yang berakal atau sekelompok prinsip yang diilhamkan alam pada akal manusia. Para pendukung teori hukum alam ini berpendapat bahwa hukum internasional tidak dapat dipisahkan dari agama karena fakta bahwa hukum internasional tidak dapat dipisahkan dari agama. Karena hukum internasional merupakan bagian dari "hukum alam", negara terikat atau tunduk pada hukum internasional dalam hubungan internasionalnya dengan negara lain. Pendapat ini ditingkatkan oleh ahli hukum dan diplomat Swiss Emmerich Vattel (1714-1767) dalam buku *Droit des Gens*. Persepsi subjektif tentang hal-hal seperti "keadilan" dan kepentingan masyarakat internasional sangat tidak jelas dalam teori hukum alam. Ada banyak pendapat yang subjektif tentang makna dan isi hukum alam karena kaidah moral dan keadilan ditafsirkan dengan cara yang berbeda oleh berbagai ahli, bahkan dalam hukum internasional. Ini diakui karena perbedaan budaya, sistem nilai, dan tingkat integrasi yang rendah di antara negara-negara dan masyarakat internasional modern. Orang-orang mungkin memiliki perspektif yang berbeda tentang prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan hukum alam, meskipun kata-kata tersebut digunakan dengan cara yang sama. Namun, dasar-dasar hukum internasional sangat sulit diban. Hukum internasional menjadi standar internasional tanpa dibuat atau dipaksakan oleh lembaga supra nasional. Tidak diragukan lagi, masyarakat internasional diatur oleh hukum internasional. Ini dapat dilihat dari hal-hal sehari-hari seperti ini:

Alat-alat negara, terutama yang menangani masalah di luar negeri, menghormati kaidah hukum internasional yang mengatur hubungan mereka dengan sesama alat-alat negara. Mereka bertindak untuk negara mereka masing-masing dan atas nama mereka sendiri. Ini adalah bukti bahwa negara mengikuti hukum internasional. Sebagai contoh, perjanjian yang dibuat antara dua negara mengenai batas wilayah, perjanjian perdagangan, dan lainnya dianggap sebagai hukum internasional yang mengikat kedua negara tersebut. Meskipun ada peluang dan kemungkinan untuk melanggarnya, mereka atau salah satu pihak tidak mau melakukannya.

Untuk menyelesaikan perselisihan internasional, terutama yang memiliki unsur hukum, proses hukum internasional, seperti melakukan upaya ke Mahkamah Internasional dan Mahkamah Arbitrase Internasional, sering digunakan. Demikian pula, keputusan yang diakui oleh para pihak oleh badan peradilan, meskipun kadang-kadang tidak ditaati, mengandung dasar hukum internasional. Hal ini tidak berdampak pada nilai hukumnya.

Negara-negara yang mematuhi hukum internasional melakukan banyak hal, termasuk melakukan pelanggaran hukum internasional dan konflik internasional. Hal serupa juga terjadi di negara-negara dengan hukum yang jelas dan aparat penegak hukum yang kuat. Selain itu, pelanggaran hukum nasional terjadi hampir setiap hari, tidak seperti pelanggaran hukum internasional; oleh karena itu, pelanggaran hukum nasional tidak dapat digunakan sebagai bukti bahwa hukum tidak ada. Tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa tidak ada hukum internasional dalam hal pelanggaran hukum internasional. Jumlah orang yang mentaati hukum internasional lebih besar daripada yang melanggarnya.

Negara-negara dapat memasukkan hukum internasional ke dalam undang-undang mereka, menunjukkan bahwa mereka telah mengakui hukum internasional sebagai bidang hukum yang independen, yang dapat diintegrasikan ke dalam hukum domestik mereka dengan cara tertentu. Dengan demikian, negara-negara selalu mempertimbangkan hukum internasional saat mereka membuat perundang-undangan mereka tentang masalah tertentu. Sebagai contoh, negara tidak dapat meninggalkan Konvensi Internasional tentang kejahatan penerbangan seperti Konvensi Tokyo tahun 1963, Konvensi Den Haag tahun 1970, Konvensi Montreal tahun 1971, dan Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Modern standar hukum laut menggantikan konvensi lama. Sudah jelas bahwa meratifikasi Konvensi akan memaksa negara untuk menyesuaikan peraturan hukum lautnya dengan isi dan arti Konvensi Hukum Laut 1982.

Karena hukum internasional pada dasarnya berfungsi untuk mengatur hubungan antara negara, perdebatan tentang supremasi hukum internasional tidak penting karena hukum internasional mengatur hak dan kewajiban negara dalam hubungan internasional. Karena mayoritas negara mengikuti perjanjian internasional, bahkan tanpa kekuasaan tertinggi

dasar hukum ekonomi global

Prinsip-prinsip dasar pada dasarnya membahas dua prinsip kebebasan: kebebasan berbicara dan berdagang.

Setiap negara berhak atas kebebasan berkomunikasi, menurut prinsip kebebasan berkomunikasi. Termasuk kebebasan untuk berdagang secara ekonomi dengan negara lain, seperti navigasi, transit, perjalanan darat, kereta api, atau pesawat.

Kebebasan Berdagang: Setiap negara memiliki hak untuk berdagang dengan siapa pun dan di mana pun di planet ini. Karena sistem ekonomi, filosofi, dan politik sebuah negara berbeda dari sistem negara lain, tidak ada alasan untuk menghalangi kebebasan ini.

SUMBER-SUMBER HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL

Definisi klasik hukum internasional diberikan oleh Pasal 38 Statuta Pengadilan Internasional (ICJ), yang mencakup empat sumber hukum internasional yang diakui oleh ICJ pada ayat 1 pasal 38. Keempat sumber ini adalah:

1. Perjanjian Dunia

Konvensi) adalah aturan khusus dan umum yang disepakati oleh negara-negara peserta.

1. Konvensi yang diakui dan diterapkan oleh semua negara di seluruh dunia disebut kebiasaan internasional.

c) Konsep umum hukum yang diakui secara global

c. Pendapat sarjana dan keputusan hakim—para pakar dan ahli dalam bidang hukum internasional yang relevan.

Namun, ayat (2) menyatakan bahwa itu memberi ICJ kemampuan untuk memutuskan kasus secara adil dan adil (*ex aequo et bono*) berdasarkan prinsip-prinsip umum ("This provision shall not prejudice the Court's power to decide a case *ex aequo et bono*, if the parties agree thereto"). Tanpa mempertimbangkan aturan yang berlaku, Mahkamah Internasional dapat membuat keputusan berdasarkan pertimbangan hakim atau arbitrator sebagai pilihan terbaik untuk situasi tertentu. Hugh Thirlway, dalam *Jawahir Thontowi*, 2003, halaman 122

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa, untuk memudahkan, urutan dalam Pasal 38, Ayat (1) di atas tidak menunjukkan urutan atas yang paling penting dan utama. Sumber hukum utama, yang diwakili oleh primer (urutan a, b, dan c), dan sumber hukum tambahan, yang diwakili oleh subsidi (urutan d). Hakim memilih masalah sumber hukum mana yang paling signifikan saat memutus sengketa. Sebagaimana dijelaskan oleh Mochtar Kusumaatmadja (1989, hlm.), :33). Karena negara-negara yang ingin menjadi negara merdeka menentanginya, Statuta MI menempatkan traktat dan perjanjian di atas. Selama masa lalu, hukum internasional berkonsentrasi pada kebiasaan internasional Eropa. Namun, hukum internasional kontemporer (sejak tahun 1945) lebih banyak berfokus pada masalah sosial ekonomi, yang tidak ada dalam kebiasaan internasional modern. Perjanjian internasional memberi kepastian hukum, karena

Hukum Komersial Internasional Menurut Perjanjian Internasional

Dalam bahasa Indonesia, "konvensi" berarti "perjanjian internasional". Kadang-kadang, istilah yang digunakan dalam bahasa Inggris untuk perjanjian internasional berbeda, seperti "perjanjian", "perjanjian", "protokol", "instrumen", atau "pertukaran catatan", tetapi pada dasarnya, semua istilah tersebut memiliki dua belas arti yang sama. konsep. Konsepnya adalah bahwa sebuah negara kemudian memutuskan untuk tidak mengambil tindakan tertentu. Sebagian besar, perjanjian internasional dibuat dalam bentuk multilateral—di mana ada lebih dari satu negara—atau bilateral—di mana ada hanya dua negara. Problem perjanjian internasional diatur oleh Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional. Ini mencakup aturan untuk pembuatan, interpretasi, dan penutup perjanjian.

Fungsi Hukum Internasional

Hukum internasional, terutama perjanjian dan kesepakatan antara negara, sangat penting untuk memberikan kewajiban kepada subjek hukum tersebut pada tingkat hukum ekonomi internasional. Ini akan terungkap selama percakapan.

Hukum ekonomi internasional berkaitan dengan individu perdata, termasuk korporasi, yang mungkin memiliki kewajiban tertentu untuk menghormati perjanjian yang ditandatangani oleh pemerintah mereka yang berdaulat.

Fungsi hukum internasional, menurut Brierly dalam Law of Nations, adalah:

Undang-undang internasional memungkinkan negara menjalankan kehidupan sehari-hari mereka dengan cara yang teratur. Negara-negara telah membuat keputusan untuk melakukannya, dan mereka telah menyediakan alat yang diperlukan untuk melakukannya.

Kontrak Sosial dan Ekonomi Internasional

Komponen utama hukum internasional adalah keinginan dan kesadaran negara untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh hukum internasional, terutama dalam hal hukum perjanjian. Selain itu, ada kemungkinan bahwa hubungan ini dapat dibandingkan dengan gagasan filosofi politik tentang kontrak sosial, yaitu ketika individu menyerahkan sebagian hak mereka untuk mendapatkan jaminan keamanan negara. Namun demikian, prinsip persamaan dan kapasitas, yang merupakan perbedaan yang paling penting antara negara dan individu perdata tersebut, dihormati.

dalam konteks kedaulatan dan hak teritorial.

Dalam hal ini, hukum internasional, terutama perjanjian antar negara, dapat dianalogikan dengan suatu kontrak di mana masing-masing pihak setuju untuk melepaskan sebagian keuntungan mereka atau menghilangkan hambatan untuk menerima keuntungan tersebut.

Secara khusus, Hukum Internasional

Malcolm N. W. Wow:

Pada tahun 1600 dan 1700-an, Eropa adalah rumah bagi konvensi hukum internasional modern. Although communities of states with laws had existed in Europe and other places in the past, it is clear from subsequent history that the law that governed the diplomatic, commercial, military, and other relations of the society of Christian states forming the Europe of that time provides the basis for the present law.

Menurut Shaw, konsep hukum internasional berkembang di Eropa "...when by the mid-nineteenth century Turkey had been accepted as the first non-Christian subject of international law." China dan Jepang masuk pada tahun 1914. Namun, dasar hukum internasional ini dibuat ketika Liga Bangsa-Bangsa didirikan pada tahun 1920-an.

Setelah itu, komunitas negara telah meningkat pesat hingga hampir 200'.

Hukum Internasional, Persoalan Penegakan Hukum, dan Hukum Tahan Lama atau Tahan Lama

Tujuan utama dari undang-undang internasional adalah:

1. Integritas area

1. Negara lain tidak terlibat.

c) Perlindungan rakyat

c. Menjaga keuntungan ekonomi

Namun, bagaimana dengan penegakan hukum ketika negara tidak memiliki persamaan kedaulatan dan pengadilan nasional tidak ada? Jadi, pertanyaannya adalah apakah hukum internasional benar-benar hukum? Namun demikian, hukum internasional masih ada. Ini adalah ringkasan singkat dari masalah ini.

Konsep-konsep utama yang membentuk sistem penegakan hukum

Konsep-konsep berikut diakui sebagai cara hukum internasional diterapkan:

1. Sanksi ekonomi kolektif
2. Sanksi militer gabungan

Mahkamah Agung Dunia ketiga

Untuk mempertimbangkan masalah penegakan hukum ini, penting untuk membahas tindakan negara-negara itu dan apakah hukum internasional dianggap sebagai "soft law" atau "hard law" dalam hukum nasional mereka. Martin Dixon menyatakan:

"...the most convincing evidence of the existence of international law is that the overwhelming majority of international legal rules are consistently followed."

Negara biasanya mematuhi hukum internasional karena itu menguntungkan negara mereka sendiri dan meningkatkan kekuatan mereka. Contoh

Menurut Richard Edney, Morgenthau mengatakan, "...a nation will be likewise reluctant to disregard its obligations under a commercial treaty, since the benefit that it expects from the execution of the treaty by the other contracting parties are complementary to those anticipated by the latter." Ia mungkin kehilangan lebih banyak dari apa yang dia dapatkan jika dia tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam perjanjian. Ini terutama berlaku dalam jangka panjang karena suatu negara yang terkenal sering melanggar janjinya akan sulit untuk menandatangani perjanjian dagang yang menguntungkannya.

Selain itu, ada pendapat yang berbeda yang perlu dipertimbangkan, seperti yang disampaikan oleh Fitzmaurice dalam Richard Edney, dengan mengatakan, "The assumed certainty of enforcement in the national society masks the fact that in general the law does not have to be enforced not so much because it is taken for granted that it would be, but because it in practice commands the general assent or tolerance of the community." Similarly, the foundation of international law's authority lies in the fact that the states that make up the international society recognize it as binding upon them and as a system that ipso facto binds them as members of the society regardless of their individual wills.

Perjanjian dan Hukum Ekonomi Internasional

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, hukum ekonomi internasional yang paling penting adalah hukum yang berkaitan dengan perjanjian bilateral dan multilateral, serta hukum yang terkait dengan masalah apa pun. Sehubungan dengan Dixon dan McCorqudale:

Perjanjian saat ini merupakan sumber hukum internasional yang paling penting. Mereka membantu negara-negara membuat undang-undang internasional yang kuat.

Perjanjian, menurut hukum internasional, adalah dasar dari perjanjian antara negara-negara yang mengikat satu sama lain. Ketika sebuah negara membuat perjanjian, formatnya tidak penting; perjanjian itu akan menjadi hukum internasional yang mengikat. Karena perjanjian dibuat secara sukarela, suatu negara pasti akan kehilangan kebebasan dan kekuatan untuk bertindak dalam situasi tertentu. Setiap negara yang berdaulat memiliki kemampuan untuk mencapai perjanjian juga. Namun, metode yang digunakan setiap negara untuk mengubah perjanjian menjadi hukum nasionalnya berbeda. Undang-Undang Nomor untuk informasi lebih lanjut tentang perjanjian internasional yang berlaku di Indonesia. 24 Maret 2000, Perjanjian Internasional

Seperti kebanyakan perjanjian, negara yang menandatangani memiliki kewajiban untuk melaksanakan perjanjian yang ditandatangani. Selain itu, hal ini dapat mencakup penghapusan hukum atau undang-undang negara yang bertentangan dengan perjanjian internasional.

Praktek Penggunaan Hukum Internasional di Negara Bagian

Teori "inkorporasi" dan "transformasi" berbicara tentang bagaimana hukum internasional diterapkan di pengadilan nasional suatu negara. Doktrin integrasi menyatakan bahwa hukum internasional dapat secara langsung dimasukkan ke dalam hukum nasional. Apabila suatu negara menandatangani dan meratifikasi traktat atau perjanjian dengan negara lain, perjanjian tersebut dapat secara langsung mengikat terhadap warga negara negara tersebut tanpa adanya undang-undang sebelumnya. Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, dan beberapa negara dengan sistem AngloSaxon adalah beberapa negara yang menerapkan doktrin ini. Sebaliknya, Doktrin Transformasi berpendapat bahwa pernyataan negara yang bersangkutan sebelumnya tentang hukum internasional harus menjadi titik awal proses transformasi. Sampai perjanjian atau traktat internasional "ditransformasi" ke dalam hukum nasional, mereka tidak dapat digunakan sebagai sumber hukum di pengadilan nasional. Malcolm D. Evans, 2003, hal 147

Menurut Doktrin Integrasi, hukum internasional secara otomatis menyatu dengan hukum nasional. Teori ini lebih dekat dengan monisme, yang berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara hukum nasional dan internasional. Namun, doktrin transformasi mengatakan bahwa negara yang bersangkutan harus bertindak positif, mendekatkan teori dualisme. Teori ini diterapkan di Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya.

Metode Pelaksanaan Hukum Internasional di Indonesia dan Sejumlah Negara Lain

Amerika Serikat (AS) adalah

Doktrin inkorporasi menyatakan bahwa Amerika Serikat merupakan bagian dari hukum internasional dan hukum nasional. Konstitusi Amerika Serikat mengatur hubungan antara hukum nasional dan hukum perjanjian internasional yang jelas. Selama perjanjian internasional termasuk dalam kategori perjanjian yang "self-executing" dan tidak bertentangan dengan konstitusi, isi perjanjian dianggap menjadi bagian dari hukum yang berlaku di Amerika Serikat tanpa memerlukan pengundangan melalui perundang-undangan nasional. Sebaliknya, setelah undang-undang menjadikannya berlaku sebagai hukum dan tidak memerlukan persetujuan badan legislatif, perjanjian yang tidak termasuk golongan yang berlaku dengan sendirinya (non-self-executing) baru dianggap mengikat pengadilan di Amerika Serikat.

Traktat yang telah diratifikasi dan dipublikasikan berlaku sebagaimana hukum nasional Perancis, menurut Konstitusi Perancis tahun 1958. Namun, Konstitusi membatasi bahwa status tertentu harus diratifikasi melalui proses legislasi parlemen dan penafsiran oleh Dewan Konstitusi, yang memungkinkan pengadilan lokal untuk melakukannya. Malcolm N Menurut Shaw, 1997, halaman 125

Indonesia

Meskipun implementasi Indonesia mengakui supremasi hukum internasional, itu tidak berarti kita menerimanya begitu saja. Perspektif kita terhadap hukum internasional dipengaruhi oleh tempat kita di masyarakat internasional yang berkembang. Meskipun Indonesia tunduk pada hukum internasional, itu tidak berarti bahwa hukum nasional tunduk pada hukum internasional. Pada kenyataannya, Indonesia tidak setuju dengan teori transformasi dan lebih memilih untuk bergabung dengan sistem negara-negara Eropa kontinental. Mereka percaya bahwa mereka dapat melaksanakan dan mematuhi semua perjanjian dan konvensi yang telah disahkan, sehingga mereka tidak perlu membuat lagi perundang-undangan untuk melakukannya. Hukum kebiasaan internasional di Indonesia belum jelas. Namun, karena beberapa alasan, Indonesia menerima hukum kebiasaan di laut tentang hak lintas damai kapal asing di laut teritorial Indonesia. Sifat Indonesia terhadap perjanjian internasional didasarkan pada kepentingan dan partisipasinya dalam perjanjian tersebut. Perjanjian internasional yang dibuat dan disetujui oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya sangat penting karena mengikat negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Oleh karena itu, perjanjian internasional dibuat dan disetujui oleh hukum sebelum Undang-Undang Nomor. Menurut Perjanjian Internasional 24 Tahun 2000, Presiden dapat membuat perjanjian internasional dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, menurut Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 11 UUD 1945 memerlukan penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana perjanjian internasional dapat menjadi hukum di Indonesia. Dengan demikian, melalui Surat Presiden No. 2826/HK/1960 mencoba memberikan penjelasan lebih lanjut tentang Pasal 11 UUD 1945. (Sunnyowati dan rekan, 2011

Surat Presiden No. 1 menjelaskan perjanjian internasional sebelumnya. 2826/HK/1960, tertanggal 22 Agustus 1960, ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, dan telah berfungsi sebagai standar selama bertahun-tahun untuk proses persetujuan perjanjian internasional. Menurut Surat Presiden ini, tergantung pada materi perjanjian internasional, undang-undang atau peraturan presiden dapat digunakan untuk mengesahkan perjanjian internasional. Namun, karena banyak kesalahan dalam penerapan Surat Presiden ini, perlu diganti dengan Undang-Undang yang mengatur perjanjian internasional. 24. 2000. Empat kategori umumnya dianggap sebagai pengesahan perjanjian

internasional: (1) Ratifikasi (ratification), yang berarti bahwa negara yang akan mengesahkan perjanjian internasional juga menandatangani naskah perjanjian; (2) Akses (accession), yang berarti bahwa negara yang akan mengesahkan perjanjian internasional tidak menandatangani naskah perjanjian; dan (3) Penerimaan (acceptance) atau persetujuan (approval), yang berarti bahwa negara yang akan mengesahkan perjanjian internasional menyatakan bahwa mereka Penandatanganan suatu perjanjian internasional tidak selalu berarti bahwa pihak-pihak terlibat dalam perjanjian tersebut. Untuk menjadi mengikat, perjanjian internasional harus disetujui. Sebelum perjanjian internasional disahkan, para pihak tidak akan diikat olehnya. Seseorang yang mewakili pemerintah untuk menerima atau menandatangani perjanjian atau mengikatkan negara terhadap perjanjian internasional membutuhkan Surat Kuasa, juga dikenal sebagai Full Powers. Presiden dan Menteri adalah pejabat yang tidak membutuhkan surat kuasa. Namun, tanpa memerlukan surat kuasa, penandatanganan perjanjian internasional yang berkaitan dengan kerja sama teknis, yang merupakan implementasi dari perjanjian yang sudah berlaku, dapat dilakukan oleh lembaga negara atau lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen. Pemerintah menyetujui perjanjian internasional hanya jika diperlukan oleh perjanjian internasional tersebut. (Dina Sunyowati dkk, 2011, 46) Ketetapan yang disepakati oleh para pihak menentukan pengesahan perjanjian internasional. Setelah prosedur pengesahan yang diatur dalam undang-undang selesai, perjanjian internasional yang memerlukan pengesahan mulai berlaku. Undang-undang atau Peraturan Presiden mengesahkan perjanjian internasional. Persetujuan DPR diperlukan untuk pengesahan undang-undang. DPR hanya perlu diberitahu tentang pengesahan dengan peraturan presiden. Perjanjian internasional yang berkaitan dengan politik, pertahanan, dan keamanan negara, hak asasi manusia, lingkungan hidup, pinjaman, dan hibah luar negeri, dan perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara adalah undang-undang. DPR dapat meminta pertanggung jawaban atau keterangan dari pemerintah mengenai perjanjian internasional di bawah mekanisme fungsi dan wewenang mereka. Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, DPR dapat membatalkan perjanjian internasional jika dianggap merugikan kepentingan nasional. Menurut Pasal 9 ayat 2 UU Nomor 24 tahun 2000, "Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden," Indonesia dianggap sebagai negara yang menganut paham dualisme. Jadi, perjanjian internasional tidak serta merta diterapkan ke dalam hukum nasional Indonesia dan digunakan sebagai tuntutan di lembaga peradilan nasional. Ini juga menunjukkan bahwa Indonesia melihat hukum internasional dan hukum nasional sebagai sistem hukum yang berbeda. Peraturan perundang-undangan harus dibuat sebelum perjanjian internasional menjadi hukum nasional. Presiden meratifikasi perjanjian internasional melalui UU Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Praktek Hukum Internasional Negara Bagian

Bagaimana hukum internasional diterapkan di peradilan nasional suatu negara dibahas dalam teori "inkorporasi" dan "transformasi". Doktrin integrasi menyatakan bahwa hukum internasional dapat dimasukkan secara langsung ke dalam hukum nasional. Apabila sebuah negara menandatangani dan meratifikasi traktat atau perjanjian dengan negara lain, perjanjian tersebut dapat secara langsung mengikat terhadap warga negara negara tersebut tanpa undang-undang sebelumnya. Doktrin ini diterapkan oleh beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, dan beberapa negara dengan sistem AngloSaxon. Sebaliknya, doktrin transformasi berpendapat bahwa negara yang bersangkutan sebelumnya harus membuat pernyataan tentang hukum internasional sebagai titik awal

transformasi. Perjanjian atau traktat internasional tidak dapat digunakan sebagai sumber hukum di pengadilan nasional sampai mereka "ditransformasi" ke dalam hukum nasional. Menurut Malcolm D. Evans pada tahun 2003, hal 147

Doktrin Integrasi menyatakan bahwa hukum nasional secara otomatis menggabungkan hukum internasional. Menurut monisme, tidak ada perbedaan antara hukum nasional dan internasional. Namun, doktrin transformasi, yang mendekati teori dualisme, menyatakan bahwa negara yang bersangkutan harus bertindak positif. Teori ini berlaku di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara lainnya.

Metode Pelaksanaan Hukum Internasional di Indonesia dan Beberapa Negara Lain

Amerika Serikat (AS)

Menurut Doktrin Inkorporasi, Amerika Serikat terlibat dalam hukum internasional dan hukum nasional. Konstitusi Amerika Serikat mengatur bagaimana hukum nasional dan hukum perjanjian internasional berhubungan satu sama lain. Selama perjanjian internasional termasuk dalam kategori perjanjian yang "self-executing" dan tidak bertentangan dengan konstitusi, isi perjanjian dianggap menjadi bagian dari hukum yang berlaku di AS tanpa memerlukan pengundangan melalui perundang-undangan nasional. Sebaliknya, perjanjian yang tidak termasuk golongan yang berlaku dengan sendirinya (non-self-executing) baru dianggap mengikat pengadilan di Amerika Serikat setelah undang-undang menjadikannya berlaku sebagai hukum dan tidak memerlukan persetujuan badan legislatif.

Menurut Konstitusi Perancis tahun 1958, traktat yang telah diratifikasi dan dipublikasikan berlaku sebagai hukum nasional Perancis. Namun, Konstitusi membatasi status tertentu untuk diratifikasi melalui proses legislasi parlemen dan penafsiran oleh Dewan Konstitusi, yang memungkinkan pengadilan lokal untuk melakukannya. Malcolm N. Menurut Shaw, 1997, halaman 125

Negara Indonesia

Meskipun implementasi Indonesia mengakui supremasi hukum internasional, itu tidak berarti kita harus menerimanya begitu saja. Tempat kita di masyarakat internasional yang berkembang memengaruhi cara kita melihat hukum internasional. Meskipun Indonesia tunduk pada hukum internasional, hukum hamsnya tidak. Pada kenyataannya, Indonesia menolak teori transformasi dan lebih suka bergabung dengan sistem negara-negara Eropa kontinental. Mereka percaya bahwa mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan dan mematuhi semua perjanjian dan konvensi yang telah disahkan, sehingga tidak perlu lagi membuat perundang-undangan untuk melakukannya. Hukuman yang berlaku untuk kebiasaan internasional di Indonesia belum jelas. Tapi Indonesia menerima hukum kebiasaan di laut tentang hak lintas damai kapal asing di laut teritorial Indonesia karena beberapa alasan. Kepentingan dan keterlibatan Indonesia dalam perjanjian internasional menentukan sifatnya terhadap perjanjian tersebut. Perjanjian internasional yang dibuat dan disahkan oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya sangat penting karena mengikat negara dengan hukum internasional lainnya. Oleh karena itu, perjanjian internasional dibuat dan disetujui oleh hukum sebelum Undang-Undang Nomor, seperti yang ditunjukkan oleh Perjanjian Internasional 24 Tahun 2000, yang, menurut Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945, diberikan kepada Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Surat Presiden

No. 2826/HK/1960 mencoba menjelaskan Pasal 11 UUD 1945 karena memerlukan penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana perjanjian internasional dapat dianggap sebagai hukum Indonesia. Sunyowati et al., 2011

Perjanjian internasional sebelumnya, 2826/HK/1960, yang dikirimkan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat pada 22 Agustus 1960, dijelaskan dalam Surat Presiden No. 1. Proses persetujuan perjanjian internasional telah digunakan selama bertahun-tahun. Menurut Surat Presiden ini, undang-undang atau peraturan presiden dapat digunakan untuk mengesahkan perjanjian internasional, tergantung pada materi perjanjian tersebut. Namun, perlu diganti dengan Undang-Undang yang mengatur perjanjian internasional karena banyaknya kesalahan yang terjadi saat menerapkan Surat Presiden ini. 24 Maret 2000. Empat jenis perjanjian internasional biasanya dianggap sebagai pengesahan: (1) Ratifikasi, yang berarti bahwa negara yang akan mengesahkan perjanjian juga menandatangani naskah perjanjian; (2) Akses, yang berarti bahwa negara yang akan mengesahkan perjanjian tidak menandatangani naskah perjanjian; dan (3) Penerimaan, atau persetujuan, yang berarti bahwa negara yang akan mengesahkan perjanjian menerima atau menyetujui perjanjian. Perjanjian internasional harus disetujui sebelum menjadi mengikat. Para pihak tidak akan diikat oleh perjanjian internasional sebelum disahkan. Seseorang yang mewakili pemerintah untuk menerima atau menandatangani perjanjian internasional atau mengikatkan negara terhadap perjanjian internasional membutuhkan Surat Kuasa, yang juga dikenal sebagai Full Powers. Presiden dan menteri tidak membutuhkan surat kuasa. Namun, lembaga negara atau lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, dapat menandatangani perjanjian internasional tentang kerja sama teknis, yang merupakan implementasi dari perjanjian yang sudah berlaku, tanpa memerlukan surat kuasa. Pemerintah hanya menyetujui perjanjian internasional jika diperlukan olehnya. Pengesahan perjanjian internasional didasarkan pada keputusan yang disepakati oleh para pihak (Dina Sunyowati dkk, 2011, 46). Setelah undang-undang menyelesaikan proses pengesahan, perjanjian internasional yang membutuhkan pengesahan mulai berlaku. Perjanjian internasional disahkan oleh undang-undang atau peraturan presiden. Pengesahan undang-undang memerlukan persetujuan DPR. Hanya peraturan presiden yang perlu diberitahukan kepada DPR tentang pengesahan. Undang-undang adalah perjanjian internasional tentang politik, pertahanan, dan keamanan negara, hak asasi manusia, lingkungan hidup, pinjaman, dan hibah luar negeri, dan perubahan atau penetapan batas wilayah negara. Di bawah mekanisme fungsi dan wewenang mereka, DPR dapat meminta pertanggung jawaban atau keterangan dari pemerintah mengenai perjanjian internasional. DPR dapat membatalkan perjanjian internasional jika dianggap merugikan kepentingan nasional, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000. Indonesia dianggap sebagai negara dualisme karena, menurut Pasal 9 ayat 2 UU Nomor 24 tahun 2000, "Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden." Oleh karena itu, perjanjian internasional tidak serta merta mengacu pada hukum nasional Indonesia; sebaliknya, mereka dapat digunakan sebagai tuntutan di lembaga peradilan nasional. Ini menunjukkan bahwa Indonesia menganggap hukum nasional dan internasional sebagai sistem hukum yang berbeda. Sebelum perjanjian internasional menjadi hukum nasional, peraturan harus dibuat. Melalui UU Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, presiden meratifikasi perjanjian internasional.

Daftar Literatur

Teguh Prasetyo dan Kameo J. :2020 Hakikat hukum ekonomi internasional dari sudut pandang keadilan. Fakultas Hukum Universitas Kristen Satiya Wacana Salatiga dan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta berada di Jalan Nomor Diponegoro 52–60 Salatiga

Pengantar Hukum Internasional, tulisan Mochtar Kusumaatmadja, diterbitkan oleh Binacipta di Bandung pada tahun 1989. Maklul N. Shaw, Undang-Undang Hukum Internasional, Cambridge University Press, Cambridge, 1997; Malcolm D. Evans, Undang-Undang Hukum Internasional, New York, Oxford University Press, 2003

Dina Sunyawati. 2010: Sumber hukum dalam hukum nasional: hukum internasional. Airlangga University Press, Surabaya.

Pemimpin, Meria. 2011: Hukum Ekonomi Global IPAP. Jakarta. PT Aneskha Fikahati

PROFIL PENULIS



Rully Trihantana, merupakan Dosen tersertifikasi pada bidang ilmu Manajemen Bank Islam dan mengajar pada program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Sahid Bogor, merupakan lulusan Universitas Indonesia pada Program Pascasarjana Ekonomi dan Keuangan Syariah. Pengalaman bekerja di bidang Perbankan dan keuangan selama 12 tahun. Saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Sahid Bogor.



Tubagus Rifqy Thantawi, lahir di Jakarta, 23 September 1976. Meraih gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan Hukum tentang Kegiatan Ekonomi dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2000) dan Magister Sains Ekonomi dan Keuangan Syariah dari Universitas Indonesia (2005). Saat ini bekerja sebagai Dosen di Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Sahid Bogor



Penulis lahir di Bogor, 30 Mei 1991. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Syariah dari Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor tahun 2017 dan Magister Ekonomi Syariah dari Institut yang sama tahun 2021. Saat ini penulis bekerja sebagai pengajar di Institut Agama Islam Sahid Bogor pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Manajemen Bisnis Syariah dalam mata kuliah Akuntansi Bisnis Syariah, Manajemen Strategik dan Manajemen Agribisnis. Selain aktif mengajar, penulis juga diamanahi sebagai Kepala Program Studi Manajemen Bisnis Syariah sejak tahun 2022. Penulis telah tersertifikat sebagai akuntan keuangan dari Universitas Indonesia sejak tahun 2020 dan tercatat sebagai pendamping produk halal sejak tahun 2023



Yaya Ruhendra Casmita Pujiharto, lahir di Subang 26 Februari tahun 1973 Meraih gelar Sarjana di Institut Pertanian Bogor (1998), meraih gelar Magister di UIN Jakarta pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis (2018) dan meraih gelar Doktor di Universitas Trisakti pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis (2022). Saat ini tercatat sebagai Dosen di Program Pascasarjana Institut Agama Islam Sahid Bogor, juga menjabat sebagai Head Shariah Asset Retail Banking dari September 2016 – Sekarang



Mohamad Kharis Mubarak Berasal dari Jakarta. Lahir di Brebes 04 April tahun 1985 Meraih gelar Sarjana Pertanian Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian di Institut Pertanian Bogor (2009) dan Magister Sains pada Program Studi Ilmu Ekonomi di Universitas Trisakti (2015). Tercatat sebagai Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Program Study Manajemen Bisnis Syariah dan sebagai Konsultan PUMKM Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal.



Ria Kusumaningrum, lahir di Jakarta, 2 Oktober 1981. Meraih gelar Sarjana Peternakan bidang Sosial Ekonomi Industri Peternakan dari IPB University (2004) dan Magister Sains Ilmu Ekonomi Pertanian dari Universitas yang sama (2008). Tesis dengan judul “Dampak Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah terhadap Permintaan dan Penawaran Beras di Indonesia” dengan metode *Two Stage Least Squares* (2SLS) berhasil dipertahankannya.

Saat ini bekerja sebagai pengajar di program studi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis Digital, Matematika Ekonomi dan Ekonometrika, serta sedang menempuh pendidikan Program Doktor (S3) Ilmu Ekonomi Pertanian di IPB University melalui beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kemenkeu RI. Selain itu, Ia aktif dalam kepengurusan Asosiasi Agribisnis Indonesia (AAI) wilayah Bogor dan Asosiasi Sistem Dinamik Indonesia (ASDI).



Penulis bernama Hafid Fadilah, lahir di Bogor tanggal 11 September 1988, Penulis menempuh pendidikan S1 Komunikasi Penyiaran Islam di Institut Agama Islam Sahid Bogor Fakultas Komunikasi Penyiaran Islam, dan menempuh pendidikan S2 di Institut Agama Islam Sahid Bogor Program Studi Megister Ekonomi Syariah. Saat ini penulis menjadi dosen pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



Bayu Purnama Putra, lahir di Bogor 02 Mei tahun 1988 Meraih gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen di Institut Pertanian Bogor (2014) dan Magister Sains pada Program Studi Keuangan Syariah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan Jakarta (2018). Saat ini bekerja sebagai Dosen di Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Sahid Bogor



Miftakhul Anwar, merupakan dosen Institut Agama Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam prodi Perbankan syariah, tercatat sebagai Da'i berstandar MUI dan pembimbing Manasik Haji bersertifikat KEMENAG serta aktif di LBM NU Bogor.



AZIZAH MURSYIDAH, Lahir 25 Juli 1991 di Bogor, merupakan anak ke 3 dari 4 bersaudara keluarga Alm. Drs Kamal Siroj dan Dedah Tsamrotul Fuadah, Dosen Institut Agama Islam Sahid Ini tertarik pada dunia mengajar sejak duduk di bangku Kuliyaatul Muallimat Alislamiyyah (KMI) Gontor kelas 5 (2Aliyah), setelah lulus 6 tahun pada tingkatan KMI, melanjutkan Di ISID (Sekarang UNIDA) Gontor selama 4+1, dan melanjutkan studi Master Ekonomi Syariah (Zakat) pada UIKA Bogor, serta Minat keahlian khusus saya di Bidang Manajemen Wakaf, mengajar di FEBI IAI Sahid Bogor pada mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah, Manajemen Wakaf, Manajemen CSR, Sejarah Pemikiran E.I, Bahasa Indonesia, Asuransi Syariah, dll. Motto Hidup saya *"You Can if You Think You Can"*



ISBN 978-623-10-3419-9

